

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2019 dapat terselesaikan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Timur. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan *"selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"* dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.

LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2019, (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (4) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2019 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 juga secara teknis berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6977/OTDA Tanggal 31 Desember 2019 Hal : Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2019 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela,
Kubangun dengan Iman, Kujaga dengan Amal, dan Kubela dengan Doa

Balikpapan, Maret 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN

H. RIZAL EFFENDI, SE.

DAFTAR ISI

HalamanJudul

Kata Pengantar..... i

Daftarisi..... iii

Peta Wilayah Kota Balikpapan.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Dasar Hukum 1

B. Gambaran Umum Daerah 2

C. Kondisi Geografis Daerah 3

D. Gambaran Umum Demografis 4

E. Kondisi Ekonomi 8

A. Potensi Unggulan Daerah 8

B. Pertumbuhan Ekonomi 10

F. Indikator Kinerja Makro 14

A. Indeks Pembangunan Manusia..... 14

B. Angka Kemiskinan 14

C. Angka Pengangguran..... 14

D. Pertumbuhan Ekonomi 15

E. Pendapatan Perkapita..... 15

F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)..... 15

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) .16

A. Visi Dan Misi..... 16

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah 40

C. Prioritas Daerah 59

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63

A. Urusan Konkuren 63
A. Ringkasan Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 64
B. Ringkasan Urusan Pilihan 142
B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157
C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum 232
D. Indikator Kinerja Kunci 236
1. Tataran Pengambil Kebijakan 236
2. Tataran Pelaksana Kebijakan 236
1) AdministrasiUmum (8 Aspek).....236
2) FungsiPenunjangUrusanPemerintahan..... 236
3) UrusanPemerintahanUmum..... 236
4) TataranPelaksanaKebijakanAspek Tingkat CapaianKinerjaUrusanWajibdanPilihan..... 236

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019 237

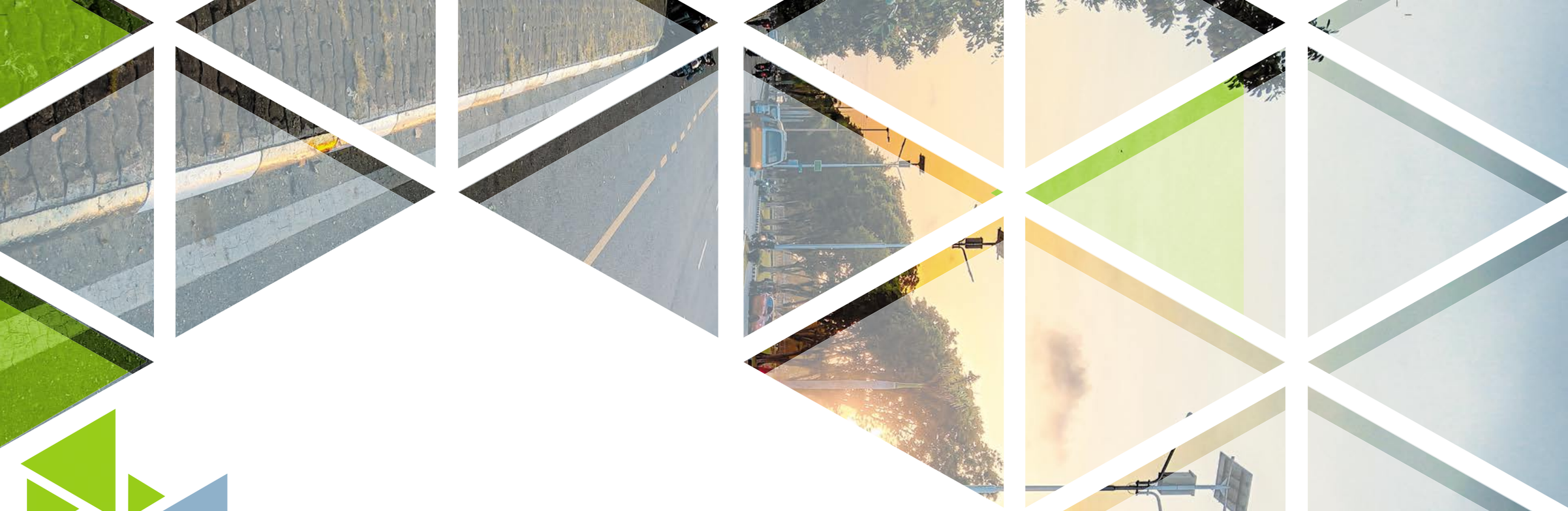
BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....266
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 266
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan..... 266

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....267
A. Kerjasama Antar Daerah 268
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga..... 272
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 297
D. Pembinaan Batas Wilayah 300
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana..... 302
F. Pengelolaan Kawasan Khusus 305
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 314

BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..316

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 326

BAB IX PENUTUP 329



BAB I - PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis,dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
6) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
7) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
8) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status

Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
10) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
11) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
12) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi KalimantanTimur. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten dan Firma Samuel and Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.

Seiring dengan berkembangnya waktu, Balikpapan telah berkembangmenjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 260 ribu barel per-hari. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1° LS - 11° LS dan diantara 116° 50' BT - 117 5° BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan**,**Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Secara Topografi Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/- 85% dengan jenis tanah *podsolik* merah kuning (*haplik*) dan mempunyai lapisan *topsoil*yang tipis serta struktur tanah mudah tererosi. Daerah dataran hanya +/- 15% yang terletak di sepanjang Pantai Timur dan Selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah Alluvial. Sedangkan kawasan pinggiran kota banyak terdapat lembah dan rawa yang merupakan Daerah Aliran Sungai Wain dan Manggar Besar.

Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan budidaya maupun nonbudidaya. Yang dapat dilakukan budidaya antara lain kawasan wilayah perkotaan dan sebagian kecil adalah wilayah pinggiran dengan kendala limitasi pengelolaan wilayah, kawasan lainnya adalah potensi sumber daya laut dan pantai sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai. Saat ini kawasan tersebut telah dilakukan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan ruang hidup bagi masyarakat sesuai dengan peruntukkan wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kawasan wilayah perkotaan saat ini sangat dirasakan mengalami tekanan yang berat terhadap daya dukung lingkungan sehubungan dengan tingginya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak banjir dan rawan terjadinya tanah longsor. Sedangkan pada kawasan pantai sebagian telah dilakukan penguasaan dan okupasi oleh masyarakat, bilamana tidak dilakukan pengaturan dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem pantai.

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW 2011-2031 adalah 857,81 km^2, yang terdiri dari luas daratan 538,44 km^2 dan luas pengelolaan lautan 319,37 km^2.

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa luas lahan menurut jenis penggunaan (kawasan budidaya dan kawasan nonbudidaya) sebagai berikut:

- Kawasan Komersial dengan luas 1.054,36ha yang terdiri dari Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri;
- Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luas 3.147,32 ha;
- Kawasan Wisata dengan luas 34,95ha;
- Kawasan Militer dengan luas 120,33ha;
- Kawasan Khusus dengan luas 5.156,02 ha;
- Kawasan Lindung dengan luas 15.175,45ha;
- Kawasan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dengan luas 6.460 ha;
- Kawasan Campuran dengan luas 31.148,43 ha.

Iklim di Kota Balikpapan termasuk dalam tipe iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi serta tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Adapun iklim di Kota Balikpapan sebagai berikut:

a. Balikpapan mempunyai kelembaban udara berada pada kisaran kelembaban sedang-tinggi yaitu antara 82 - 91%;
b. Curah hujan di Kota Balikpapan sangat bervariasi menurut bulan. Rata-rata curah hujan tertinggi dan terendah berada pada kisaran 64,4 mm – 338,0 mm;
c. Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahunberkisar 21,8° C sampai 35,7° C;
d. Tekanan Udara (*atmospherric pressure*) 1.010,5 mb;
e. Kecapatan Angin (*wind velocity*) 4 – 7,1 knot;
f. Rata-rata penyinaran Matahari yang terjadi di Kota Balikpapan setiap bulannya berkisar antara27,8 – 79,9 %.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kota Balikpapan pada akhir tahun 2019sebesar 670.505 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20.699 atau 3% dari tahun sebelumnya. Lebih lengkap pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk Kota Balikpapan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TINGKAT PERTUMBUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2015	735.850	4,17 %
2	2016	618.128	-16 %

3	2017	633.196	2,38%
4	2018	649.806	2,56%
5	2019	670.505	3%

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Data komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balikpapan Selatan	71.769	68.828	140.597
2	Balikpapan Utara	82.346	78.554	160.900
3	Balikpapan Timur	43.485	40.705	84.190
4	Balikpapan Barat	48.197	45.433	93.630
5	Balikpapan Tengah	53.975	52.135	106.110
6	Balikpapan Kota	43.476	41.602	85.078
	JUMLAH	343.248	327.257	670.505

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Berdasarkan struktur Usia pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kota Balikpapan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 473.086 jiwa, kemudian kelompok usia nonproduktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 197.419 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2019

NO	Rentang Usia	JUMLAH PENDUDUK
(1)	(2)	(3)
1	0 - 4	56.969
2	5 – 9	59.649
3	10 - 14	54.253
4	15 - 19	46.445
5	20 - 24	57.489
6	25 - 29	57.307
7	30 - 34	58.482
8	35 - 39	62.078
9	40 - 44	54.742
10	45 - 49	46.081
11	50 - 54	38.063
12	55 - 59	30.312
13	60 - 64	22.087
14	65 - 70	14.266
15	>70	12.282
	JUMLAH	670.505

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Data Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	JUMLAH PENDUDUK
(1)	(2)	(3)
1	Belum / Tidak Bekerja	176.130
2	Mengurus Rumah Tangga	144.613
3	Pelajar / Mahasiswa	115.783
4	Pensiunan	4.147
5	Pegawai Negeri Sipil	8.732
6	Tentara Nasional Indonesia	3.656
7	Kepolisian RI	3.111
8	Perdagangan	280
9	Petani / Pekebun	5.364
10	Peternak	79
11	Nelayan / Perikanan	2.430
12	Industri	14
13	Konstruksi	11
14	Transportasi	51
15	Karyawan Swasta	123.620
16	Karyawan BUMN	2.566
17	Karyawan BUMD	273
18	Karyawan Honorer	2.215
19	Buruh Harian Lepas	29.293
20	Buruh Tani / Perkebunan	235
21	Buruh Nelayan / Perikanan	193
22	Buruh Peternakan	4
23	Pembantu Rumah Tangga	659
24	Tukang Cukur	35
25	Tukang Listrik	7
26	Tukang Batu	164
27	Tukang Kayu	328
28	Tukang Sol Sepatu	9
29	Tukang Las / Pandai Besi	103
30	Tukang Jahit	374
31	Tukang Gigi	4
32	Penata Rias	44
33	Penata Busana	3
34	Penata Rambut	66
35	Mekanik	890
36	Seniman	52
37	Tabib	1
38	Paraji	1
39	Imam Mesjid	10
40	Pendeta	160
41	Pastor	4
42	Wartawan	119
43	Ustadz / Mubalig	101
44	Juru Masak	12
45	Anggota DPD	2

46	Walikota	1
47	Anggota DPRD Provinsi	2
48	Anggota DPRD Kab / Kota	22
49	Dosen	480
50	Guru	5.448
51	Pilot	3
52	Pengacara	86
53	Notaris	56
54	Arsitek	22
55	Konsultan	68
56	Dokter	747
57	Bidan	433
58	Perawat	976
59	Apoteker	134
60	Psikiater / Psikolog	5
61	Penyiar Televisi	1
62	Penyiar Radio	3
63	Pelaut	470
64	Peneliti	5
65	Sopir	3.960
66	Pialang	4
67	Pedagang	10.274
68	Perangkat Desa	2
69	Biarawati	11
70	Wiraswasta	20.329
71	Lainnya	1.015
	JUMLAH	670.505

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Berdasarkan tingkat pendidikanpada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kota Balikpapan adalah SLTA, yang mencapai 215.824. Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK
(1)	(2)	(3)
1	Tidak / Belum Sekolah	153.706
2	Belum Tamat SD/Sederajat	48.330
3	Tamat SD	96.977
4	SLTP Sederajat	90.080
5	SLTA Sederajat	215.824
6	D I / D II	1.248
7	D III	17.683
8	S I	44.442
9	S II	2.176
10	S III	39
	JUMLAH	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejarah berdirinya Kota Balikpapan diawali dari adanya tambang konsesi Mathilda yang diperoleh J.H. Menten dan kemudian berlanjut dengan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi juga dikerjakannya pembangunan kilang minyak pada tahun 1897. Sejalan dengan kegiatan tersebut Kota Balikpapan kian berkembang dengan pesat dan menjadikan daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah, oleh sebab itu pengembangan perekonomian Daerah juga sangat dipengaruhi dengan berbagai kegiatan penunjang sektor minyak dan gas bumi selain sumber daya alam lain yang ada di Kota Balikpapan saat itu.

Kota Balikpapan tidak memiliki potensi sumberdaya alam seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur maupun Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian potensi sumber daya kelautan, khususnya perikanan masih potensial untuk dikembangkan, oleh sebab itu pengembangan potensi unggulan daerah tidak lagi bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi, tetapi telah bergeser pada pengembangan hasil pertanian dan industri olahan serta Jasa.

a.1. Potensi Sumber Daya Pertanian

Tabel 1.6.
Potensi Sumber Daya Pertanian

No	SEKTOR PERTANIAN UNGGULAN	TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)
1	Padi Sawah	220,4
2	Padi Ladang	3.0
3	Jagung pipil	624,0
4	Jagung Manis	4.120.000
5	Ubi Kayu / Singkong	12.032
6	Ubi Jalar	525
7	Kacang Tanah	48
8	Talas	444
Jumlah		4.133.896,4

Sumber Data : Dinas Pangan, Pertanian dan PerikananKota Balikpapan, 2019

a.2. Potensi Sumber Daya Kelautan

Perairan laut Balikpapan memiliki garis pantai lebih kurang 45,5 km, umumnya merupakan perairan yang terdiri dari pasir, lumpur dan batu-batuan. Dengan wilayah tangkapnya seluas 337,805 km², disamping itu masih tersedia kawasan *high fishery* sekitar 30-50 mil yang belum terjangkau oleh nelayan. Keanekaragaman biota laut yang ada diperairan Balikpapan antara lain adanya beberapa jenis ikan yang memiliki nilai

ekonomi tinggi seperti ikan Kakap, Kerapu, Baronang, Udang, Kepiting dan rumput laut.

Pembangunan perikanan merupakan suatu sistem pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan pembudidaya ikan/nelayan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya ikan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan serta nilai tambah hasil-hasil perikanan, disamping itu keterbatasan pasokan hasil perikanan akan menjadikan ikan sebagai salah satu komoditi strategis.

Potensi perikanan laut untuk Kota Balikpapan mencakup seluas 337,805 km². Jumlah produksi perikanan laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7.
Potensi Sumber Daya Perikanan Laut dan Darat

No	Potensi Perikanan	TAHUN	
		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perikanan Laut: Jumlah Tangkapan Ikan	4.145,05 ton	6.117,64 ton
2.	Perikanan Budidaya Jumlah produksi	186,78	63,45 ton

Sumber Data : Dinas Pangan, Pertanian dan PerikananKota Balikpapan, 2019

a.3. Potensi Industri, Perdagangan dan Koperasi

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim, sebagai kota kolektor dan distributor mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Perkembangan sektor industri di Balikpapan menunjukkan peningkatan setiap tahun baik dari industri besar, industri menengah dan kecil. Pertumbuhan ekonomi Balikpapan disamping didorong perkembangan industri, juga dipacu dengan pertumbuhan perdagangan serta lembaga keuangan non perbankan yaitu koperasi.

Koperasi sebagai lembaga keuangan non bank juga sangat mendorong tumbuhnya perekonomian di Kota Balikpapan, perkembangan Koperasi di Kota Balikpapan yang memberikan kontribusi dalam penyaluran dana usaha dan ekonomi kerakyatan, dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.8.
Perkembangan Koperasi

Jenis Koperasi	TAHUN
	2019
(1)	(2)
Koperasi Aktif	458
Koperasi Tidak Aktif	86
Jumlah	**544**

Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, 2019

a.4. Potensi Pariwisata

Visi Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata meletakan tujuan dan kebijakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut. Pembangunan sektor Pariwisata dilakukan dengan jalan mengembangkan, memanfaatkan obyek wisata serta terus meningkatkan daya tarik wisata seperti kekayaan alam, seni budaya, serta peninggalan sejarah yang ada di Kota Balikpapan.

Potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Balikpapan adalah pantai, hutan dan taman alam serta tempat bersejarah. Sementara fasilitas pariwisata seperti hotel, biro perjalan/transportasi maupun rumah makan dan restoran terus dikembangkan guna menunjang pertumbuhan sektor pariwisata.Berdasarkan hasil pendataan kunjungan wisatawan oleh Disporapar Kota Balikpapan, pertumbuhan kunjungan wisatawan manca negara dan domestik keKota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9.
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

No	Wisatawan	Tahun
		2019
(1)	(2)	(3)
1	Asing Pertumbuhan	56.777 orang 20,27%
2	Domestik Pertumbuhan	2.878.561, orang 1,46%
Jumlah		**2.935.338 orang**

Sumber Data : Disporapar Kota Balikpapan, 2019

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan rilis PDRB terakhir dari BPS Kota Balikpapan, struktur perekonomian Kota Balikpapan masih didominasi lapangan usaha berbasis

sumber daya alam, yaitu Industri Pengolahan (Migas), yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan. Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 45,92persen, kemudian Konstruksi (16,04persen), Transportasi dan Pergudangan (11,95persen) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,32persen). Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5 persen.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (Miliar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2017-2019 dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 1.10.
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (Miliar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/*Industry*		**2017**	**2018**	**2019**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	817.009,2	909.637,0	978.609,4
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	41.391,4	42.390,5	43.863,4
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	41.311.647,9	44.713.829,2.	47.018.512,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	77.940,6	83.681,7	91.957,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	72.812,1	76.626,3	82.262,0
F	Konstruksi/*Construction*	13.112.536,9	14.919.042,2	16.427.567,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	7.815.682,4	8.676.008,7	9.547.776,6
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	10.992.858,3	11.853.850,7	12.239.294,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	1.605.053,0	1.835.785,8	2.031.892,8
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2.853.185,3	3.091.565,8	3.383.138,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3.295.827,7	3.587.442,6	3.803.001,0
L	Real Estat/Real Estate Activities	1.801.336,2	1.958.732,3	2.028.385,4
M	Jasa Perusahaan/Business Activities	276.232,4	294.795,4	304.513,8
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.005.147,2	1.078.802,5	1,192.622,5
O	Jasa Pendidikan/Education	1.373.533,0	1.531.613,0	1.653.624,4
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	567.235,8	616.432,2	661.526,3
Q	Jasa lainnya/Other Services Activities	697.099,3	787.291,4	900.486,7
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**87.716.528,8**	**96.057.527,3**	**102.391.034,1**

Sumberdata :Bappedalitbang, Tahun 2019.

Adapun Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/*Industry*		**2017**	**2018**	**2019**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	0,93	0,95	0,96
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	0,05	0,04	0,04
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	47,10	46,55	45,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi/*Construction*	14,95	15,53	16,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	8,91	9,03	9,32
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	12,53	12,34	11,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	1,83	1,91	1,98
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,25	3,22	3,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,76	3,73	3,71
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,05	2,04	1,98
M	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,31	0,31	0,30
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,15	1,12	1,16
O	Jasa Pendidikan/Education	1,57	1,59	1,62
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,65	0,64	0,65
Q	Jasa lainnya/Other Services Activities	0,79	0,82	0,88
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Adapun Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12.
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga Konstan menurut lapangan usaha (Miliar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/*Industry*		**2017**	**2018**	**2019**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	693.061,5	746,262,5	782,014,6
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	35.262,9	35.529,9	35.934,2
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	43.657.280,8	45.442.815,1	47.472.116,8

D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	66.169,7	69.496,3	76.027,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	54.639,5	55.725,6	58.994,4
F	Konstruksi/*Construction*	8.943.483,4	9.510.131,5	10.176.792,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	6.155.721,3	6.551.791,7	6.936.740,6
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	5.978.044,8	6.283.542,0	6.337.254,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	1.108.885,6	1.240.300,3	1.343.770,8
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2.644.528,9	2.780.444,9	3.004.061,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2.394.776,2	2.517.790,5	2.612.608,2
L	Real Estat/Real Estate Activities	1.321.553,4	1.382.661,7	1.410.669,5
M	Jasa Perusahaan/Business Activities	198.591,4	205.647,7	207.752,3
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	894.679,3	940.397,4	1.000.206,7
O	Jasa Pendidikan/Education	1.008.511,9	1.087.881,8	1.137,683,8
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	385.003,4	409.277,6	431.695,6
Q	Jasa lainnya/Other Services Activities	491.885,0	534.098,9	580.565,5
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**76.032.079,1**	**79.793.795,4**	**83.604.887,6**

Adapun Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/*Industry*		**2017**	**2018**	**2019**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	-1,13	7,68	4,79
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	0,60	0,76	1,14
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	3,56	4,09	4,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,14	5,03	9,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	9,09	1,99	5,87
F	Konstruksi/*Construction*	3,21	6,34	7,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	5,25	6,43	5,88
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	6,40	5,11	0,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	8,87	11,85	8,34
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	7,96	5,14	8,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-0,19	5,14	3,77

L	Real Estat/Real Estate Activities	4,79	4,62	2,03
M	Jasa Perusahaan/Business Activities	3,05	3,55	1,02
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-10,16	5,11	6,36
O	Jasa Pendidikan/Education	7,06	7,87	4,58
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	6,53	6,30	5,48
Q	Jasa lainnya/Other Services Activities	7,23	8,58	8,70
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**3,84**	**4,95**	**4,78**

F. INDIKATOR KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM dapat menetukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar 80,11. Angka tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya di Tahun 2018 yaitu sebesar 79,81. Peningkatan tersebut tentunya didukung oleh seluruh elemen baik dari Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat.

b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur Angka Kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Balikpapan menempati urutan pertama sebagai kota dengan kemiskinan terendah di Kalimantan Timur.

Adapun Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar 2,42%. Presentase terbut mengalami penurunan sejak Tahun 2017 sebesar 2,82% dan Tahun 2018 sebesar 2,64%. Penurunan tersebut merupakan hasil dari berjalannya program kerja penanggulangan kemsikinan di masing-masing organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam tim penanggulangan kemsikinan daerah (TPKD). Program-program tersebut diantaranya program bantuan modal usaha ekonomi kecil dan rumah tangga, program Indonesia pintar, dan program perlindungan sosial lainnya.

c. Angka Pengangguran

Angka pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memliki pekerjaan. Angka pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Adapun Angka Pengangguran di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar 7,29%. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019 jumlah orang yang bekerja di Kota Balikpapan adalah sebanyak 300.974 orang.Jumlah tersebut mengalami peningkatan

dari Tahun sebelumnya yaitu sebanyak 280.297 orang. Penduduk Kota Balikpapan rata-rata memiliki pekerjaan yang terbagi dalam beberapa Kategori yaitu Kategori A (sector pertanian, kehutanan, dan perikanan) sebesar 3,27%, Kategori G (sector perdagangan besar dan eceran) sebesar 23,58% dan didominasi oleh Kategori Jasa yaitu sebesar 73,15%.

d. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertenu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

Adapun Pertumbuhan Ekonomi di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar 4,78%. Angka tersebut mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,97%. Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya sector industry pengolahan terutama pada minyak dan gas.Perlambatan terjadi dikarenakan oleh kinerja konstruksi yang tertahan karena pengerjaan proyek-proyek nasional. Namun kondisi tersebut akan membaik seiring berjalannya aktivitas tambang di Kalimantan Timur yang ikut mendorong aktivitas sector pedagangan dan trasportasi. Dari segi pengeluaran, pelambatan ekonomi Balikpapan bersumber pada melemahnya ekspor bersih antar daerah.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Daerah.Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

Adapun Pendapatan Perkapita di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 151.730.000,00. Pendapatan perkapita Kota Balikpapan Tahun 2019 tercatat tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Timur.Angka tersebut mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan menurunya jumlah kemiskinan di Kota Balikpapan sepanjang Tahun 2019.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio gini)

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut.

Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar 0,31, sedangkan pada Tahun 2018 adalah sebesar 0,32. Angka tersebut mengalami penurunan sepanjang Tahun 2019 diikuti dengan penurunan Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan mengingkatnya jumlah pendapatan perkapita di Kota Balikpapan,







BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kota Balikpapan jangka panjang 20 tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005–2025. Penetapan Visi dan Misi jangka panjang tersebut setelah menerima banyak masukkan dari berbagai pihak khususnya pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan yang lalu. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya antar lain:analisis kondisi umum Daerah yang berlaku saat ini, prediksi kondisi umum Daerah yang diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang, mandat masyarakat dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat tentang kemana arah dan kebijakan Kota hendak dituju pada masa yang akan datang.

Visi jangka panjang Kota Balikpapan untuk 20 tahun kedepan, adalah **“Terwujudnya Balikpapan sebagaiKota Lima Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan &Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman.”**

Kota Jasa

Sejak awal perkembangannya sampai dengan saat ini dan perkembangan Balikpapan kedepan dapat dipastikan bahwa kota ini berkembang sebagai Kota Jasa. Keberadaan infrastruktur berbagai moda perhubungan, keberadaan kantor-kantor pelayanan skala Kalimantan Timur dan Kalimantan, ketiadaan sumber daya alam yang dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya memperkuat fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa. Skala pelayanan jasa KotaBalikpapan tidak hanya meliputi lingkup Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga meliputi wilayah Kalimantan bahkan Indonesia bagian Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan pada saat ini akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*).

Kota Industri

Pengeboran minyak pertama di sumur Mathilda oleh perusahaan JH Menten dan Firma Samuel And Co pada tanggal 10 Februari 1897, merupakan momentum penting bagi Balikpapan untuk menjadi Kota Industri yang sampai

dengan saat ini berkembang menjadi industri pengolahan minyak terbesar diluar pulau jawa. Keberadaan kilang minyak ini berperan strategis untuk mensuplai kebutuhan migas khususnya di Indonesia Timur. Dalam perkembangannya kegiatan industri di Kota Balikpapan semakin tumbuh baik kegiatan industri yang mendukung industri pengolahan minyak tersebut maupun kegiatan industri lainnya seperti industri galangan kapal, perkayuan, bahan bangunan dan lain-lain.

Dipersiapkannya lahan seluas 9 ha untuk relokasi industri tahu tempe dan industri kecil lainnya serta ditetapkannya Kawasan Industri Kariangau pada RTRW 2005-2015 seluas 2.189 ha dan lebih diperluas lagi menjadi 2.721 ha pada RTRW 2012-2032 akan semakin memperkuat posisi Kota Balikpapan sebagai Kota Industri.

Kota Perdagangan

Fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota perdagangan diawali dari para saudagar bugis yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan pesisir kampung baru. Kemudian dibangun dan difungsikannya pelabuhan Semayang Balikpapan sebagai pintu masuk dan keluarnya barang, orang dan jasa serta berkembangnya berbagai fasilitas perdagangan di Kota Balikpapan semakin memperkuat fungsi Balikpapan sebagai Kota Perdagangan. Fungsi pelayanan perdagangan Kota Balikpapan tidak hanya mencakup wilayah Balikpapan tetapi mencakup pula wilayah Kalimantan Timur. Dibangunnya dan dikembangkannya pelabuhan peti kemas kariangau dan diperluasnya berbagai fasilitas bandar udara sepinggan akan semakin memperluas cakupan pelayanan perdagangan Kota Balikpapan.

Kota Pariwisata

Keberadaan Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan kota transit mendorong kota ini berkembang menjadi Kota Pariwisata, yang pada awalnya lebih berfungsi sebagai pendukung sektor pariwisata wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu di Kota Balikpapan banyak tersedia fasilitas penginapan dan restoran serta berkembangnya bisnis biro perjalanan. Posisi geografis Balikpapan yang memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 45,6 km, banyaknya peninggalan sejarah di kota ini dan komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mengarahkan Balikpapan mengembangkan berbagai objek pariwisata. Rencana pembangunan *coastal road*, pengelolaan Teluk Balikpapan dan pelestarian mangrove dan pesisir pantai akan semakin menumbuh kembangkan sektor pariwisata Kota Balikpapan.

Kota Pendidikan & Budaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadikan warga Kota Balikpapan menjadi tuan di rumah sendiri, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengembangkan berbagai lembaga dan fasilitas pendidikan. Ditetapkannya Balikpapan sebagai Kota vokasi Pemerintah Kota mengembangkan sekolah-sekolah menengah kejuruan dan SMK Model serta membangun Politeknik Balikpapan. Komitmen Pemerintah Kota ini didukung pula oleh peran sektor swasta yang juga turut mengembangkan lembaga pendidikan yang cukup berkualitas baik formal maupun informal. Pada perkembangan selanjutnya Politeknik Balikpapan didukung Pemerintah pusat menjadi Politeknik Negeri. Dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membangun dan mengembangkan Institut Teknologi Kalimantan akan semakin memperkuat peran dan fungsi pelayanan Kota Balikpapan sebagai kota pendidikan.

Heterogenitas penduduk Kota Balikpapan merupakan potensi berkembangnya Balikpapan sebagai Kota Budaya. Keberadaan ratusan paguyuban yang tumbuh di kota ini, berikut pembinaannya yang dilakukan pemerintah kota serta dibangunnya fasilitas gedung kesenian, merupakan pilar-pilar yang menopang Balikpapan sebagai Kota Budaya.

Madinatul Iman

Madinatul Iman bermakna bahwa Balikpapan menjadi pusat peradaban maju dengan landasan Iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Madinah (Madinat) atau madani mengandung makna suatu kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk (multi etnis, multi agama dan multi budaya). Masyarakat dalam Madinatul Iman merupakan Masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban maju yang didukung oleh pemerintahan yang baik, dan menjadikan Iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut maka ditetapkan visi jangka menengah yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2016 – 2021, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016, sebagai acuan operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan, yaitu:

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN"

Penjelasan visi diatas dapat dijelaskansebagai berikut:

a. Kota Balikpapan sebagai **Kota Terkemuka**adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan *Coastal Road*, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasidaerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagaidestinasi ekowisata Kalimantan Timur.Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakinmemperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan.Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skalaregional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenalsebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yangmemperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

b. **Nyaman Dihuni**, adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kotayang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yangdilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tataruang, dll) maupun aspek nonfisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:
   1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yanglayak, air bersih, listrik);
   2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik,taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
   3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
   4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
   5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
   6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

c. Kota Balikpapan sebagai kota yang **Berkelanjutan adalah** suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan

harusdapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsep*Livable City*sesungguhnya merupakan representasi *Sustainable City* yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

d. **Madinatul Iman,**mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahandengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Hubungan antara permasalahan/isu strategis dengan visi yang dicita-citakan dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Korelasi Isu Strategis dengan Visi

	Isu Strategis	Yang akan dicapai padaTahun 2021	Visi
•	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*).	**Kota terkemuka**	**Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni**

	Isu Strategis	Yang akan dicapai padaTahun 2021	Visi
•	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja.		**dan berkelanjutan menuju madinatul iman**
•	Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*).	**Kota Nyaman dihuni dan berkelanjutan**	
•	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana.		
•	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	**Madinatul Iman**	

Berdasarkan penjelasan visi di atas, pencapaian visi pemerintah daerah bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan instrumen pembangunan daerah terkait tolok ukur kinerja yang menjadi patokan atau representasi perwujudan visi dan pelaksanaan misi. Dalam Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah, disebutkan bahwa tolok ukur kinerja mewujudkan visi dan pelaksanaan misi bisa direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan daerah, dengan beragam tingkat dampak (*impact*). Tingkat dampak ini memberikan gambaran indikator keberhasilan pembangunan daerah yang bersifat makro dan diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas yang terkait.Indikator makro pembangunan daerah Kota Balikpapan sebagai tolok ukur dan representasi atas keberhasilan perwujudan visi dan pelaksanaan misi pemerintah daerah periode tahun 2016-2021, perkiraannya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Capaian Tahunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,43	10,43	10,45	10,47	10,49	10,51	10,53
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,73	13.73	13.93	14.73	14.93	15.73
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,95	73,95	73.96	73.97	73.99	74.00	74.04
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,95%	5,95%	5,55%	5,30%	5,05%	4,85%	4.55%
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,50%	62,50%	63,28%	63,68%	64,09%	64,50%	64,92%
6	IPM		78.18	78.18	78.33	78.73	79.13	79.53	79.53
7	Tingkat Kemiskinan	%	2.35%	2.35%	2.34%	2.33%	2.32%	2.31%	2.30%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Capaian Tahunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,1	90,1	91	91	92	92	92
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,58	58,58	59,18	59,50	59,82	60,14	60,46
10	*Livable City Index*	Indeks	71,12	71,12	72.5	73	73.5	74	74.5
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	73,40	73,40	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00
12	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
13	PDRB perkapita	Rp	Rp. 122,46 (Juta)	Rp. 122,46 (Juta)	Rp.137,51 (Juta)	Rp.143,33 (Juta)	Rp.151,15 (Juta)	Rp. 156,97 (Juta)	Rp. 163,25 (juta)
14	PDRB Non Migas	Rp	Rp.33,03 (Triliun)	Rp.33,03 (Triliun)	Rp.42,62 (Triliun)	Rp.67,46 (Triliun)	Rp.48,65 (Triliun)	Rp.52,45 (Triliun)	Rp.56,80 (Triliun)
15	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	6,62	6,62	6.62	6.70	6.75	6.80	6.90
17	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,36	79,36	79.56	79.76	79.96	80.16	80.36
18	Nilai Evaluasi LAKIP	Kategori	CC	B (65-67)	B (67-69)	B(69-71)	B(71-73)	BB(73-74)	BB(75)
19	Penilaian Kepatuhan	Nilai	50	50	55	65	70	75	79
20	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82	82	83	84	85	86	87

Guna mencapai visi, maka ditetapkan pula misi Kota Balikpapan, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internalmaupun eksternal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
	Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;	Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman(*liveable city*) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (*green city*) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (*zero waste*) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dariluaskota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).
	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;	Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non *motorized vehicle*) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.

Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.Hasil perumusan tujuan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota BalikpapanTahun 2016-2021disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing
		2	Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan
		3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan

NO	MISI	NO	TUJUAN
2	Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;	4	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan
3	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;	5	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	6	Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat
		7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
5	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.	8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

Tujuan 1:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing.

Sumber daya manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus penentu keberhasilan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas tidak hanya cerdas intelektual, namun juga harus cerdas emosional dan cerdas spiritual sehingga kombinasi ketiga kecerdasan tersebut akan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan membentuk smart people atau masyarakat cerdas. Sektor pembangunan yang paling berpengaruh terhadap sumber daya manusia adalah pendidikan. Pembangunan pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2017 diperluas pada konsep pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ yang diarahkan pada Peningkatan Kualitas Pendidikan nonformal berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ, Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SARPRAS Pendidikan. Pendidikan non formal berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ akan diwujudkan melalui upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana belajar berbasis IT di beberapa sekolah dan penerapan muatan lokal yang berbasis IMTAQ di semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan, pemberian insentif guru PAUD dan insentif ustadzh/ustadzah. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik diharapkan memperluas akses pendidikan untuk semua penduduk umur sekolah terutama keluarga kurang mampu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa Stimulan Pendidikan dan Hibah bantuan pembangunan sarana prasarana sekolah swasta. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui kualifikasi guru, sertifikasi guru serta pelatihan pengelolaan anggaran dan manajemen sekolah bagi tenaga kependidikan.

Sasaran dari tujuan diatas adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu :

Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,45 Tahun dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 10,43 Tahun. Artinya capaian kinerja kualitas

pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator rata-rata lama sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,2 tahun pada Tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2021 seluruh usia sekolah di Kota Balikpapan dapat sampai pada tingkat pendidikan menengah yang mendukung program pendidikan 12 tahun sebagai Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur.

Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,73tahun dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 13,73tahun. Artinya capaian kinerja kualitas pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator angka harapan lama sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 2 (dua) tahun pada tahun 2021. Target pencapaian pada tahun 2021 ini akan mendukung peningkatan IPM Kota Balikpapan.

Terkait capaian sasaran kualitas pendidikan pada Indikator Sasaran rata-rata Lama sekolah dengan peningkatan sebesar 0,2 tahun dan indikator sasaran angka harapan lama sekolah dengan peningkatan sebesar 2 Tahun. Target dan capaian setiap strategi adalah sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ merupakan cara memolakan pendidikan 12 tahun secara berjenjang bagi siswa disetiap sekolah untuk mampu menyerap IPTEK dan mengimplemantasikan IMTAQ secara tuntas. Sejalan hal tersebut, pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ memiliki maksud menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan teknologi yang mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan dengan didasarkan atas nilai keimanan dan budi pekerti luhur dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang Terjangkau.

Strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau merupakan cara pemerintah kota untuk mencapai sasaran kualitas pendidikan seperti hanya strategi mengembangkan pola pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ. Strategi ini memiliki penekanan pada akses layanan pendidikan dalam ruang lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi (disingkat “TIK”) yang diarahkan untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.

Berdasarkan hal diatas, bahwa strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau sangat penting untuk diimplementasikan secara luas jejaringnya dalam menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

Strategi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan.

Strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan strategi yang berkelanjutan dengan tujuan memperbaiki mutu pendidikan pada tiap periode waktu perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sehubungan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tersebut

perlu direncanakan secara baik dan tepat sasaran agar penyelenggaraan bukan semata-mata bersifat *input oriented* yang bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output kurang dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada mutu penyelenggaraan pendidikan karena tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Tujuan 2:
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual dan berdaya saing adalah faktor kesehatan. Masyarakat yang sehat jasmani sangat mendukung pembentukan manusia cerdas intelektual, sedangkan cerdas emosional dan cerdas spiritual membutuhkan jiwa yang sehat.

Sasaran tujuan tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan diharapkan tercapai melalui strategi peningkatan aksesbilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan dengan rumusan operasional akan dilakukan dengan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan rujukan dan optimalisasi regulasi pelayanan kesehatan. Peningkatan aksesbilitas dimaksudkan untuk kemudahan seluruh lapisan masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi.Kualitas pelayanan kesehatan difokuskan kepada ketersediaan dan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana prasarana kesehatan.Manajemen pelayanan kesehatan diharapkan masyarakat semakin pasti dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tanggap, akurat dan nyaman.

Sasaran dari tujuan Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan adalah meningkatkan derajat kesehatan dengan target yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup ditargetkan 73,96 Tahun dari pencapaian indikator sasaran *baseline* tahun 2015 adalah 73,95 Tahun. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Usia Harapan Hidup memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,09 tahun pada Tahun 2021.
b. Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan 1 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 6 per 1000 kelahiran hidup.
c. Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 60 jiwa pada tahun 2021 dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 72 jiwa kelahiran hidup.

Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) memberikan pengaruh penurunan (-) sebesar 12 jiwa pada tahun 2021.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan adalah Pengembangan Pola Hidup Sehat dan Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan.Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat.Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan strategi aksesbilitas kesehatan, Pemerintah Kota bersama jajarannya dalam hal ini tanggungjawab berada pada SKPD Dinas Kesehatan berusaha mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan seperti pelaksanaan Jamkesda, JPK-PNS, Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurang mampu.

Sejalan hal tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai dengan baik. Proses pengaturan kegiatan ilmiah atau ilmu seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif serta rasional untuk mencapai tujuan ini disebut manajemen, sedangkan untuk mengatur kegiatan – kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut " Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat ". Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan.Pelayanan yang dilakukan di Rumah sakit meliputi; gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, sedangkan di Pukesmas hanya pelayanan; gawat darurat (kearah pertolongan pertama) dan rawat jalan.

Sesuai dengan reformasi dibidang kesehatan melalui Paradigma Sehat, pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Puskesmas lebih difokuskan pada upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) dengan

tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif. Selain itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas bukan hanya kepada individu (pasien), tetapi juga keluarga dan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna (komprehensif dan holistik). Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun strategi Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan yang dirumuskan dalam rumusan operasional berdasarkan strategi tersebut yaitu:

a. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat difokuskan pada pelayanan puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di masyarakat termasuk kelompok perempuan;
b. Peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan Rujukan harus ditingkatkan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat dilayani dengan cepat, tanggap, akurat dan nyamandan;
c. Optimalisasi regulasi Pelayanan Kesehatan sangat diperlukan untuk kepastian dan kenyamanan layanan.

Tujuan 3:

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan

Kesejahteraan masyarakat secara harfiah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemenuhan sandang, pangan dan papan.Untuk dapat memenuhi sandang, pangan dan papan, masyarakat harus mempunyai penghasilan yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan.Selain itu pemerataan kesejahteraan akansangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat.Pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan diarahkan pada semakin tingginya kesadaran seluruh unsur masyarakat bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan peran masyarakat luas dan bukan hanya tanggungjawab pemerintah.Masyarakat harus memiliki daya juang tinggi dan pantang menyerah untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual.Lembaga-lembaga masyarakat berperan aktif membangun masyarakat untuk mampu membantu sesamanya.Dunia usaha meningkatkan rasa solidaritas dan penghargaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.Upaya pembentukan karakter tersebut harus dilakukan menyeluruh dan berkesinambungan sehingga terwujud Kota Balikpapan yang madani.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah menurunnya jumlah pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan jumlah pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat usia kerja yang bekerja dan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupan yang berarti mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri, untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan difokuskan pada

pengendalian kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan dan kesetaraan gender.

Sasaran dari tujuan Mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan, adalah menurunnya jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.Target sasaran menurunnya pengangguran yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah :

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan 7,93 % dari pencapaian *baseline* Indikator Sasaran tahun 2016 adalah 7,95 % artinya Capaian kinerja pada tahun 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar 0,02%. Terkait hal ini Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengambil langkah preventif dan bekerja kerasuntuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. Untuk mengantisipasi peningkatan TPT dibutuhkan dan arah kebijakan.
b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan 67,32 % dari pencapaian *baseline* Indikator Sasaran tahun 2015 adalah 66,42 % artinya Capaian kinerja pada tahun 2021 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 0,9%. Terkait dengan peningkatan APAK dari 66,42 % menjadi 67,32%, Pemerintah Kota Balikpapan memperluas lapangan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja akan lapangan pekerjaan dan melaksanakan pemerataan pembangunan disegala sektor serta membangun *relationship* antar *stake holder* untuk turut serta membangun lapangan pekerjaan yang memadai.

Strategi untuk menurunkan jumlah pengangguran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.Peningkatan produktivitas kerja sangat penting dalam kondisi semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor terutama pertambangan sehingga tenaga kerja yang ada dituntut mengoptimalkan hasil produksi.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin perusahaan memperhatikan karyawan melalui lingkungan kerja yangbaik, memberikan pelatihan yang cukup, optimalisasi mesin dan peralatan kerja, dan mendukung kesejahteraan karyawan dan yang terpenting adalah penetapan kebijakan pengupahan yang melindungi baik pekerja maupun dunia usaha.

Peningkatan kompetensi ketenagakerjaan diarahkan baik pada pekerja maupun yang belum bekerja dengan target menghasilkan tenaga kerja yang kompeten baik dari segi keterampilan, bahasan dan perilaku. Untuk pada pekerja diarahkan pada perusahaan tempat bekerja, pelatihan usaha-usaha masyarakat, pelatihan tenaga kerja dan kerjasama antar dunia usaha.Sedangkan untuk yang belum bekerja maka harusdilakukan pemetaan tenaga kerja yang selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan berupa pelatihan tenaga kerja untuk

seluruh lapisan masyarakat, penempatan tenaga kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan kegiatan magang.

Perluasan kesempatan kerja merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.Upaya perluasan kesempatan kerja berkaitan erat pertumbuhaninvestasi usaha. Investasi usaha akan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Untuk mendukung upaya tersebut maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan antara lain pemetaan lapangan kerja dan pemetaan tenaga kerja harus dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara upaya penyediaan lapangan usaha baru.

Pembinaan usaha kecil masyarakat sehingga semakin meningkat yang akhirnya mampu menyerap tenaga kerja, pembinaan untuk mengembangkan jiwa usaha masyarakat sehingga masyarakat mampu berinovasi dalam menciptakan usaha baru, Job Marketing Fair sebagai upaya memfasilitasi antara dunia usaha dan pencari kerja.

Tujuan 4:

Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan

Sehubungan dengan pokok tujuan, misi ke-2 memiliki korelasi dalam perwujudan visi yang terukur atas Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 menjadi 64,21 dari *baseline*pada tahun 2015 sebesar 60,13. Adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan

Strategi mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tata ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan mempunyai arti bahwa penataan ruang wilayah dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya guna, dan hasil guna sesuai dengan arah pemanfaan ruang yang telah ditetapkan, serta menjamin kelestarian dan kelangsungan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Agar poin efisien dan berkelanjutan dapat tercapai, maka strategi ini memiliki penekanan pada memperkuat dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, menyediakan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana dan kebakaran.

Pada strategi perwujudan tata ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan terdapat indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu indikator tersedianya Peraturan Daerah untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Insentif dan Disinsentif dimana ditargetkan penyelesaian Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat dalam rangka pengendalian pemanfaataan ruang. Sedangkan untuk indikator persentase penertiban pemanfaatan ruang berdasarkan tabel diatas,

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPMD 2011-2016) telah memenuhi target capaiannya yang akan terus ditingkatkan capaiannya pada tahun 2021.

b. Strategi mewujudkan *clean air, clean water, clean land*

Strategi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat demi tercapainya sebuah kota yang layak huni dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan lingkungan telah banyak terjadi karena berbagai pihak tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan.Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan serta pengendalian yang ketat agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan.Selain itu juga diperlukan penegakan hukum bagi perusak lingkungan agar memberikan sebuah efek jera agar kerusakan terhadap lingkungan tidak kembali terjadi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui kemudahan masyarakat dalam akses data dan informasi mengenai SDA dan Lingkungan Hidup. Keterbukaan akses data dan informasi ini juga akan mampu meningkatkan peran masyarakat untuk ikut dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta penggalian inovasi masyarakat terkait cara pengelolaan lingkungan. Selanjutnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas dan pengendali kerusakan lingkungan akan berkontribusi pada upaya pencegahan kerusakan linkungan terutama dalam hal respon dan tindakan terhadap pengaduan masyarakat.

Tujuan 5:

Meningkatkan pelayanan Infrastruktur

Tujuan ke 5 yaitu meningkatkan pelayanan infrastruktur.Sehubungan dengan pokok tujuan misi ke-3 memiliki korelasi dalam perwujudan visi yang terukur atas capaian dalam 1 (satu) sasaran yakni Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur. Target yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2021 menjadi 79,00 dari *baseline* pada tahun 2014 sebesar 73,40 atau dalam kategori baik. Mengingat tidak adanya hasil survey kepuasan infrastruktur di Kota Balikpapan pada Tahun 2015, maka sebagai *baseline* digunakan hasil penilaian *Most Livable City Index* oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk Kota Balikpapan pada tahun 2014 yaitu pada aspek persepsi masyarakat terhadap ketersedian sarana dan prasarana dengan indeks kenyamanan sebesar 73,40.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur atas pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan. Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat yang merupakan penjumlahan dari masing-masing infrastruktur setelah dibobot (S (Total Index type A + B + C+D+E)/n) dapat dikelompokkan skala penilaian berikut ini:

Tabel 2.5
Asumsi Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

ASUMSI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)			
NILAI INDEKS	RENTANG NILAI		KETERANGAN
1	0 - 10	0 - 20	Buruk
2	11 - 20		
3	21 - 30	21 - 40	Sedang
4	31 - 40		
5	41 - 50	41 - 60	Cukup
6	51 -60		
7	61 - 70	61 - 80	Baik
8	71 - 80		
9	81 - 90	81 - 100	Baik Sekali
10	91 - 100		

Adapun strategi adalah dengan Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan wilayah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur.Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan adalah jalan dan transportasi yang akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai *multiplier* dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas harus didukung dengan upaya pengembangan data dan informasi infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.Dengan adanya data dan informasi yang valid mampu memberikan data yang akurat terkait kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur.Selain itu juga diperlukan penguatan dalam prosedur percepatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur.Hal ini dimaksudkan agar infrastruktur yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dapat ditangani dengan segera.Selanjutnya juga dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas juga diperlukan sosialisasi kepada pengguna dalam hal keselamatan dan ketertiban.

Tujuan 6:

Menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat

Salah satu tujuan dari misi 4 adalah Menggerakkan Sendi-sendi Perekonomian Masyarakat. Perkembangan perekonomian kota sangat tergantung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kreatifitas yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi usaha masyarakat.Kreatifitas usaha yang tercipta dalam konsep ekonomi kreatif, yakni mengembangkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan daya inovasi dan kreasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber-sumber potensial masyarakat dan sumber daya alam yang

terbarukan.Peningkatan aktifitas sendi ekonomi masyarakat dapat menjadi dasar peningkatan pendapatan masyarakat sehigga berdampak pada terwujudnya pemertaan pendapatan masyarakat.Selain itu perlu didorong upaya diversifikasi ekonomi kreatif sehingga dapat pula membentuk dan mewujudkan branding perekonomian sebagai identitas yang khas Kota Balikpapan.

Sendi-sendi perekonomian masyarakat diharapkan dapat bersinergis, yakni merupakan wujud dari keterkaitan antara hulu dan hilir aktifitas ekonomi, sehingga perekonomian yang ada saling mendukung dan pada akhirnya akan dapat menambah nilai jual ekonomi itu sendiri. Untuk meningkatkan kreatifitas ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan SDM yang berjiwa entrepreneur, berdaya saing dan kreatif. Dengan SDM berjiwa entrepreneur, berdaya saing dan kreatif akan dapat menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga dengan demikian perekonomian dapat berkembangan yang pada akhirnya diharapkan ouput secara makro adalah terciptanya pemerataan pendapatan di masyarakat Kota Balikpapan yang dapat dinikmati semua golongan. Sasaran dari tujuan diatas adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Target dari sasaran tersebut yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu :

a. Peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan sebesar Rp. 163,25 Juta dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah Rp.122,46 Juta. Artinya, capaian kinerja PDRB perkapita pada tahun 2021 ditargetkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB Perkapita semakin baik pula tingkat perekonomian.dengan adanya penambahan ouput dari produksi barang dan jasa. Namun demikian ukuran ini belum dapat menggambarkan kenyataan karena harus pula dilihat dari jumlah penduduk miskin dan pengangguran,sehingga belum sepenuhnya mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk yang tergambar dari indeks Gini Ratio. PDRB Perkapita yang meningkat pada tahun 2021 menunjukkan nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kota Balikpapan sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku yang memperlihatkan trend yang positif.
b. Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,30 dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Balikpapan masih tergolong kategori sedang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya diupayakan adanya penurunan indeks gini ratio sesuai dengan target Indikator RPJMD, sehingga komposisi yang menikmati pemerataan pendapatan adalah golongan bawah dan menengah.

Terkait capaian Sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat pada Indikator peningkatan PDRB perkapita dengan peningkatan menjadi Rp. 163,25 Juta dan Indikator Sasaran Penurunan Indeks Gini dengan indeks 0,30, untuk pencapaian 2 indikator tersebut, digunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pendekatan Penguatan SDM dan IPTEK pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana, meningkatkan kemandirian koperasi, menjadikan UMKM mandiri, Pengembangan kawasan/sentraindustri.Diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat tercipta kualitas dan kuantitas produk, diversifikasi usaha, usaha kreatif, usaha yang berdaya saing sehingga dapat meningkatan nilai jual produk yang dapat diterima di pasar bebas yang pada akhirnya pergerakan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antara lain, melalui :

1. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Diharapkan setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat mendukung penciptaan efisinsi dan peningkatan nilai produksi.
2. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Diharapkan program tersebut akan didukung dengan kegiatan-kegiatan yang outputnya meningkatkan jumlah IKM yang berkualitas dan menghasilkan produks yang berkualitas pula.
3. Program penataan struktur industri. Diharapkan akan mewujudkan industri yang terpadu berwawasan lingkungan, meningkatan nilai tambah produks lokal, dan meningkatkan jumlah usaha di kawasan dan sentra Industri yang beroperasi (Kawasan Industri Kariangau, Sentra Industri Kecil Somber dan Sentra Industri Kecil Teritip).
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan.
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, diharapkan dapat meningkatkan jumlah koperasi aktif sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
6. Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Diharapkan dampak program tersebut mampu meningkatkan jumlah kredit UMKM dari Bank sebagai modal pengembangan berusaha dan bergeraknya investasi.
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Diharapkan program ini mampu menciptakan jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang berkualitas guna menggerakkan, menjalankan dan mengembangkan koperasi tersebut.

b. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan

Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan didasarkan pada pendekatan memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha distribusi perdagangan, dan meningkatkan kualitas keamanan barang.

Di Kota Balikpapan 95% kebutuhan barang dipenuhi dari luar Kota Balikpapan yang berarti sangat tinggi ketergantungannya dari daerah lain. Diharapakan dengan pendekatan tersebut Kota Balikpapan dapat menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan stok barang guna mencukupi kebutuhan barang dan keterjaminan keamanan suatu barang kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan.Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui strategi meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan, antara lain adalah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, diharapkan setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat mendukung menciptakan efisinsi dan peningkatan nilai produksi;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Diharapkan kedua program tersebut dapat mewujudkan strategi untuk menjaga stabiltas harga dan kebutuhan pangan serta meningkatkan keamanan pangan di Kota Balikpapan;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program tersebut diharapkan dapat menambah niliai produk yang akan di ekspor yang nanti dapat memberi kontribusi perkembangan perekonomian di Kota Balikpapan;
4. Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki usaha dengan produk terstandardisasi dan terciptanya perlindungan bagi konsumen dengan upaya meningkatan kegiatan tera ulang terhadap alat ukur wajib tera;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar. Dengan program ini diharapkan tercipta pasar yang berkualitas dan tertata serta meningkatkan jumlah pedagang yang berusaha didalam pasar;
6. Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar, diharapkan pasar rakyat dapat mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman dan mendukung salah satu kreteria penilaian adipura serta mampu bersaingan dengan toko swalayan.

Tujuan 7:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi akan menghasilkan perbaikan ekonomi, tetapi berimplikasi lain terhadap sosial dan lingkungan misalnya meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu meningkatkan pertumbuhan produksi dengan penerapan ekonomi hijau diharapkan akan menghasilkan perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sasaran dari tujuan diatas adalah Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu :

1. Target capaian indikator meningkatkan nilai PDRB non migas adalah Rp. 46.85 trilyun dari pencapaian *baseline* tahun 2015 yaitu Rp. 40,21 trilyun.
2. Target capaian indikator meningkatkan nilai PDRB migas adalah Rp. 98,5 trilyun dari pencapaian *baseline* tahun 2015 yaitu Rp. 74,60 trilyun.

Strategi dalam rangka pencapaian target kinerja pada RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Ekowisata

Posisi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur menjadi salah satu peluang yang menjadikan Kota Balikpapan semakin banyakdikunjungi oleh wisatawan, baik regional, nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan, peningkatan dan promosi destinasi wisata di kota Balikpapan. Bentuk promosi yang digunakan bisa berbentuk brosur, souvenir, website ataupun mengikuti event-event yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu upaya yang perlu terus ditingkatkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha pendukung pariwisata seperti perhotelan, rumah makan, kafe, travel agen dan usaha-usaha lainnya. Semua usaha diatas bila berjalan dengan baik pada akhirnya akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

b. Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan Berinvestasi

Strategi Menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi didasarkan pada pendekatan dan cara menerapkan regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, dan reformasi kebijakan peizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu. Pendekatan tersebut nanti akan berdampak pada meningkatkan rencana dan realisasi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan PDRB perkapita di Kota Balikpapan.

c. Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pertanian dan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia.Dengan merujuk permasalahan dan pentingnya menjaga pertanian menuju kemandirian pangan, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengembangan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan produksi dengan memanfaatkan potensi geografis wilayah dan sumber daya manusia yang terintegrasi dan sinergis dalam sektor pertanian.Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kelurahan Manggar, KelurahanLamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha yang meliputi kawasan sawah lestari seluas 130 ha dan kawasan potensi pertanian seluas 195 ha.Kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan

Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 1,591 ha.Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha.Kawasan peruntukan peternakan di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 100 ha.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri dari daerah penangkapan ikan 0-2 mil seluas 7.642 ha dan daerah penangkapan ikan > 2 mil dengan luas 27.896 ha yang berada di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas 579 ha yang terdiri dari revitalisasi kawasan perikanan budidaya darat di sekitar Sungai Somber, Sungai Manggar, dan pesisir Kelurahan Teritip seluas 545 ha, sementara kawasan perikanan budidaya laut terletak di wilayah laut dan pesisir Pantai Manggar hingga Sungai Aji Raden seluas 1.804 ha.

d. Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

Energi telah menjadi kebutuhan dasar yang memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional dan global.Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil yang berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.Sementara penggunaan sumber energi baru terbarukan hanya sekitar 6% dan selebihnya yaitu sekitar 94% berasal dari energi fosil. (sumber Kemen.ESDM-RI).

Potensi bioenergi (limbah pertanian, kotoran hewan, sampah kota, biomassa) yang tersedia di seluruh Indonesia sangat prospektif untuk dikembangkan baik sebagai listrik dan nonlistrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi. Namun demikian sebagian besar pembangkit listrik tenaga berdasarkan fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebih.Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan adalah memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomiannya.Potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan yaitu :

- Biomassa;
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
- Pembangkit Listrik Tenaga Angin.

Penggunaan energi biomassa adalah pilihan prioritas yang memiliki nilai kelayakan investasi yang paling ekonomis diantara alternatif yang lainnya. Selain itu, bahan baku utamanya (sampah organik) yang mudah didapat dan sejak tahun 2012 penggunaan gas methane telah dikembangkan untuk melayani kebutuhan listrik warga di sekitar lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah Manggar. Pada tahun 2015 telah dilakukan kajian Teknis Pengelolaan Sampah Pasar Pandansari dimana sampah yang dihasilkan oleh Pasar Pandansari memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas yang dapat dikonversi menjadi listrik.

Tujuan 8:

Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan,akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakatuntuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh,dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negatif dapat dicegah atau diatasi.

Pengembangan pelayanan publik yang prima harus diawali dengan adanya fungsi dasar yang harus dimiliki organisasi yaitu pemasaran, operasional dan finansial. Atas fungsi dasar tersebut dikembangkan *core skill* yang saling terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Beberapa substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana hal ini sudah biasa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Core skills*, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan pasar secara kompetitif;
2. *Echnicians*, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek teknis secara professional di bidang pekerjaan sehingga menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab (*responsibility*);
3. *Management,* kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan secara professional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim maupun aspek *managerial* dan *leadership*;
4. *Business knowledge*, tuntutan terhadap pemahaman pengetahuan bisnis khususnya menyangkut nilai-nilai keuntungan (*profit making*) yang perlu diadopsi kesektor publik dengan tidak mengabaikan aspek pemertaan dan keadilan;
5. *Skill*, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya menyangkut bidang pekerjaanya, termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan;
6. *Habit*, membiasakan bekerja secara profesional dengan tidak mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur kinerja yang kondusif;

7. *Cohesion*, membisakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama;
8. *Collective Experience*, menjadikan pengalaman individu atau kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja sebagai penglaman bersama;
9. *Knowledge of environment*, menyadari terjadinya perubahan setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan;
10. *Technology*, diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan menguasai dunia dan perubahan.

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima diperlukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi guna mendukung penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Sasaran dari tujuan diatas adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu:

a. Opini Laopran Keuangan di targetkan WTP pada tahun 2021 atau sama dengan posisi pada tahun 2015 yaitu WTP. Dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan taat azas;
b. Indeks persepsi korupsi ditargetkan 6.90% pada Tahun 2021 dengan posisi yang sama pada tahun 2015 sebesar 6.62%;
c. Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan mencapai 80.36 pada tahun 2021 atau meningkat sebanyak 1 dari tahun 2015 sebesar 79.36;
d. Indek Profesionalitas ASN dkitargetkan meningkat 6 angka pada tahun 2021 menjadi 88 poindari tahun 2015 sebesar 82 poin.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, strategi dan arah pembangunan jangka menengah yang akan diterapkan secara berkesinambungan dengan cara mengindentifikasi berbagai faktor yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke depan. Adapun Strategi Pembangunan Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaranakan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu

prosespembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berupaya meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan.

Gambar 2.1.
Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Akses Layanan Pendidikan (Berbasis Iptek Dan Imtaq) 12 Tahun Yang Terjangkau



2) Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Pelaksanaan peningkatan aksestabilitas, kualitas dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

Gambar 2.2.
Strategi Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

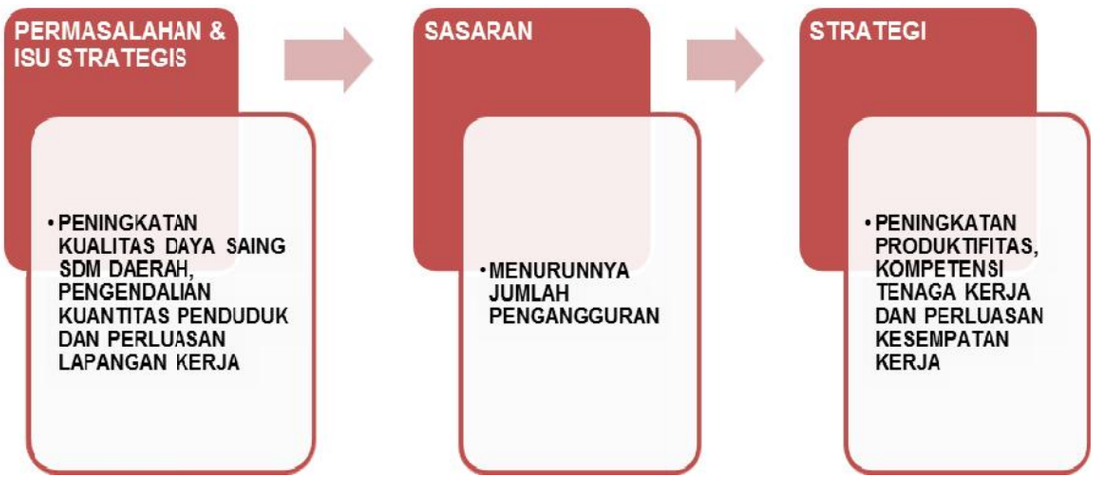


Perwujudan strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan optimalisasi regulasi bidang kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan kawasan industri dan kawasan pengembangan ekonomi.Program ini harus disinkronkan dengan renstra SKPD yang bertugas dan berwenang.

3) Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien. Kondisi daerah yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan sangat berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.3.
Strategi Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja



4) Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Strategi dalam percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan.Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan terpadu, percepatan penanganan PMKS dan pengendalian penduduk.

Gambar 2.4.
Strategi Percepatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



5) Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan.Masih adanya kesenjangan aksesibilitas dalam berbagai bidang mengakibatkan peran perempuan menjadi lemah dan berdampak kepada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun masyarakat.Selain itu masih ditemukan regulasi maupun kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan perempuan.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa belum ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender perlu diarahkan untuk mendorong adanya perubahan nilainilai yang ada dalam keluarga maupun masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya, tanpa kehilangan kodratnya sebagai wanita, untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.Selain itu memperkuat peran keluarga dan mengedukasi masyarakat untuk ikut melindungi hak-hak anak diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup anak.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengarah pada perwujudan perlindungan perempuan dan anak, pembinaan kelembagaan organisasi perempuan, dan pembinaan potensi perempuan.

Gambar 2.5.
Strategi Percepatan dan Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Serta Kesetaraan Gender



6) Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di daerah, saat ini Kota Balikpapan sebagai suatu daerah otonom sudah memiliki suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dimana pelaksanaannya telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.RTRW Kota Balikpapan telah mengalokasikan ruang dengan memperhitungkan kemampuan lahan dan keseimbangan lingkungan di Kota Balikpapan.

Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang di bertujuan untuk memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang; serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.Oleh karena itu, hal yang penting untuk perlu dilaksanakan adalah menyiapkan dokumen rencana tata ruang, melaksanakan rencana tata ruang melalui program dan kegiatan serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalu perangkat peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan pemberlakuan sanksi.

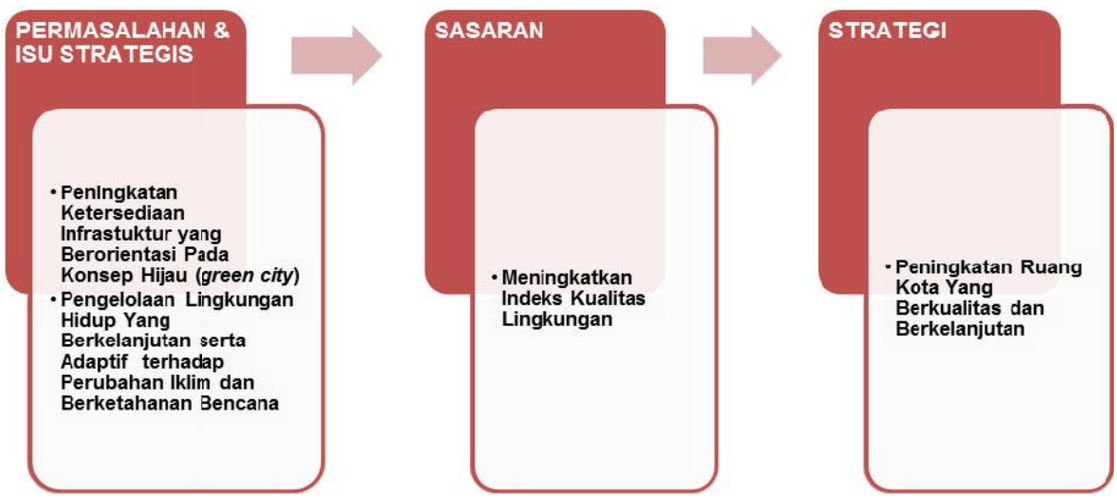
Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang ditetapkan tanggal 2

November 2012 terdapat beberapa komitmen yang sangat mendukung pengembangan Kota Balikpapan menjadi "kota hijau", antara lain:

1. Pola ruang 52% Kawasan Lindung dan 48% Kawasan Budidaya
2. Tidak menyediakan ruang untuk wilayah pertambangan
3. Pengembangan kawasan budidaya dengan konsep *foresting the city* dan *green corridor*, untuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau diarahkan pada green industri yang didukung *zero waste* dan *zero sediment*.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, penyediaan data dan informasi lingkungan menjadi hal yang penting guna mendorong pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

Gambar 2.6.
Strategi Peningkatan Ruang Kota Yang Berkualitas dan Berkelanjutan



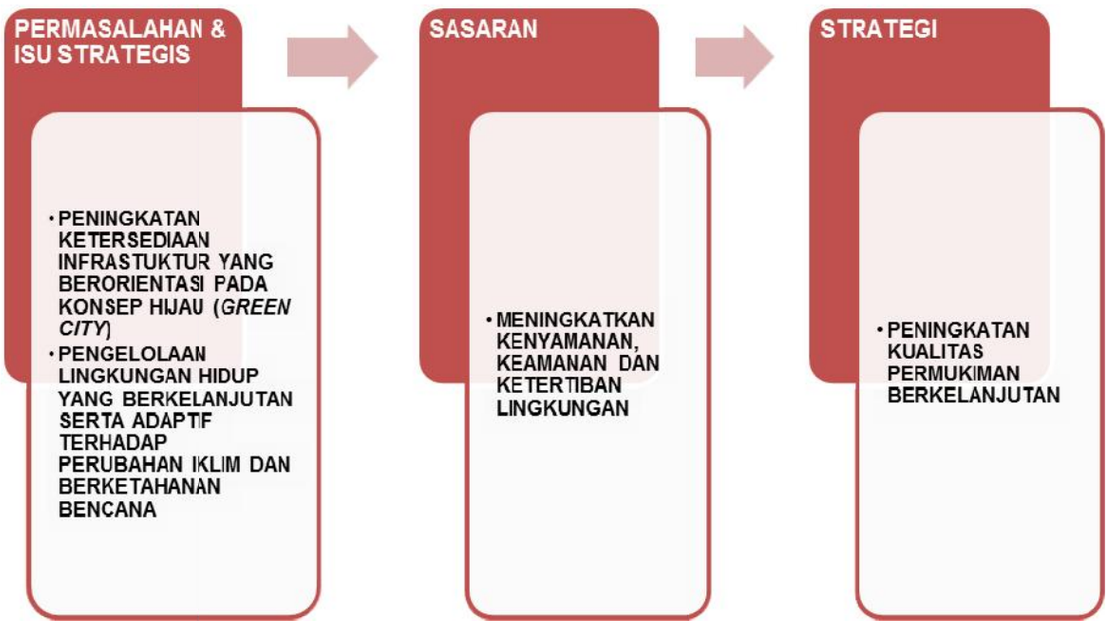
7) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, selain kondisi lingkungan dan ruang kota yang berkualitas, hal lainnya yang sangat penting adalah kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah bagian wilayah kota sebagai wadah hunian yang meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ini kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman merupakan persyaratan kelayakan lingkungan permukiman yang dapat menjadi indikator kekumuhan suatu kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air

bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan mitigasi bencana dan kebakaran, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's*) yang antara lain adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang dan membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

Gambar 2.7.
Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Berkelanjutan



8) Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;

Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan proses pembangunan. Kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki toleransi yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kota serta memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga

adat istiadat dan budaya Indonesia. Tujuan dan sasaran pembangunan kota tidak akan tercapai tanpa partisipasi masyakat.

Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kota dan kelembagaan terkait, membina dan menguatkan peran linmas dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan serta meningkatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Gambar 2.8.
Strategi Pengembangan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Berkarakter Dan Berkebudayaan Serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan



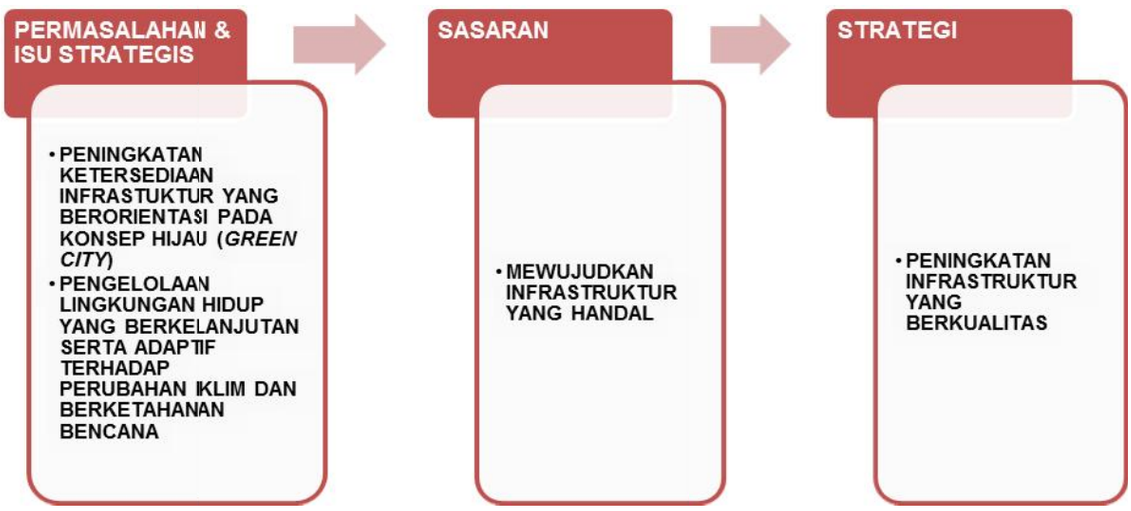
9) Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan transportasi.Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat pertumbuahan dan kegiatan perekonomian serta pendukung pengembangan wilayah.Infrastruktur yang berkualitas juga

diharapkan mampu melayani seluruh elemen masyarakat sehingga terwujudnya infrastruktur yang handal.Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu menjawab permasalahan Kota Balikpapan yang ada akibat rendahnya kualitas infrastruktur seperti kemacetan dan banjir serta tingginya angka inflasi.

Gambar 2.9.
Strategi Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Yang Berkualitas



10) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dimaksudkan untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan sumber daya manusia dan penerapan teknologi bagi pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana,mendorong UMKM yang mandiri, memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, dan Meningkatkan kualitas keamanan barang.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan nilai tambah produksi Industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri.Implementasi terhadap arah

kebijakan meningkatkan nilai tambah produksi industri dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya pelaku industri kecil menengah (IKM) dan revitalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal.Sedangkan implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM serta koperasi yang mandiri dilakukan melalui dua hal yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan koperasi serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi.

Gambar 2.10.
Strategi Pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi



11) Pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dicapai melalui peningkatan promosi wisata, menjalin kerjasama dengan asosiasi pariwisata yang lebih beragam, mengembangkan sarana prasarana pendukung wisata, menerapkan regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, reformasi kebijakan peizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu, intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan Mengembangkan potensi sumber energi alternatif.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal adalah dengan pengembangan kawasan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan serta pengembangan energi baru terbarukan.

Implementasi terhadap arah kebijakan pengembangan kawasan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas dan informasi pariwisata, pengembangan potensi pariwisata, dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.Implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan percepatan pelayanan perizinan.Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas dilakukan melalui percepatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.Implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan dan pengembangan energi baru terbarukan diupayakan melalui penghematan penggunaan energi fosil.

Gambar 2.11.
Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal



12) Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional;

Komponen strategi pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional meliputi :

a) Peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
b) Pemetaan aset kota, peningkatan sistem manajemen pengelolaan aset;
c) Peningkatan kelembagaan, regulasi, SDM, dan SARPRAS pelayanan publik dan pengintegrasian sistem manajemen di seluruh SKPD (pengembangan *smart city*);
d) Penataan ulang pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja;
e) Harmonisasi produk hukum daerah;

f) Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan daerah dan SKPD.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan optimalisasi manajemen aset. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan serta peningkatan pengawasan internal.Sedangkan implementasi kebijakan optimalisasi manajemen aset dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan pengelolaan aset daerah.

Gambar 2.12
Strategi Pengelolaan keuangan, Aset dan Manajemen Pemerintahan Daerah



2. Arah Kebijakan

2.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai

sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6.
Keterkaitan Antara Sasaran Pembangunan Dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;	Peningkatan Kualitas Pen-didikan Non Formal berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ
				Perluasan subsidi pen-didikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah
				Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	2	Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan	Peningkatan derajat ke-sehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan serta pengembangan prilaku hidup sehat
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	3	Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja yang produktif dan kreatif serta berdaya saing
				Peningkatanperlindungan ketenagakerjaan
				Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	4	Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perluasan Program Penanggulangan Kemiskinan
				Percepatan Penanganan PMKS
				Pengendalian angka kelahiran
		5	Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender	Penguatan kelembagaan koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender, pengembangan Kota Layak Anak dan meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	6	Mewujudkan ruang kota yang berkualitas& berkelanjutan	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				Menurunkan dan Mengen-dalikan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	7	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perumahan
				Meningkatka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN
		8	Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berke-budayaan serta Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kondusifitas, keamanan dan Ketertiban Kota
				Pengembangan prestasi pemuda dan olahraga
				Peningkatan prestasi dan Pelestarian Budaya Daerah
				Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya
				Peningkatan Peran LPM, Lembaga Perguruan Tinggi dan Tim Penggerak PKK
				Perluasan pengembangan inovasi daerah
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	9	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Menyediakan infrastruktur Trans-portasi yang menghubungkan seluruh wilayah Kota Balikpapan
				Mewujudkan Infrastruktur yang nyaman dan berkualitas
8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	10	Pengembangan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkannilai tambah produksi Industri
				Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri
				Pengembangan jaringan distribusi dan keamanan perdagangan
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	11	Pengembangan potensi ekonomi lokal	Pengembangan kawasan industri pariwisata berwawasan lingkungan
				Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
				Meningkatkan produksi pertanian
				Meningkatkan produk unggulan perkebunan
				Meningkatkan produksi peternakan
				Meningkatkan produksi perikanan
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	12	Pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional	Pengelolaan keuangan yang Transparan dan akuntabel
				Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha
				Peningkatan kualitas SDM aparatur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan dukungan Pelayanan publik
				Peningkatan kualitas produk hukum daerah
				Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Tahapan secara umum Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.13
Tema Tahunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021



2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan

Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut danudara nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan bagian kawasan andalan Kawasan Bontang-Samarinda -Tenggarong, Balikpapan Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Kota Balikpapan berperan sebagai Kota Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi sebagai Pusat pemerintahan kota,Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, dan Pusat pengolahan migas. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan yaitu :

a. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan). Teluk Balikpapan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terletak pada 3 (tiga) wilayah administrasi pemerintahan, yaitu wilayah Pemerintahan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. DAS Teluk Balikpapan memiliki luas ± 194.400 ha dengan sekitar 87 persen luas kawasan berada di Kabupaten Paser, luas wilayah di Kota Balikpapan mencapai 11 persen, dan sekitar 2 persen luas kawasan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada DAS Teluk Balikpapan terdapat sungaisungai besar maupun kecil, di antaranya seperti Sungai Somber, Sungai Wain, Sungai Semoi, Sungai Sepaku dan Sungai Riko yang airnya mengalir dan bermuara ke Teluk Balikpapan. DAS Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, di antaranya sebagai penyangga kesinambungan fungsi teluk tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesinambungan fungsi tersebut, salah satunya diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu dan sinerjik.
b. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung. Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung terletak di Teluk Balikpapan yang merupakan dua kawasan peruntukan industri Kariangau di Kota Balikpapan seluas 3.565 ha dan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 4.808 ha. Kawasan industri ini dihubungkan oleh Jembatan Pulau Balang dan diarahkan menjadi kawasan industri

manufaktur yang mengolah produk-produk kehutanan, pertanian, dan bahan-bahan lain menjadi produk jadi. Arahan pengelolaan kawasan industri pengolahan adalah mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan. Kawasan strategis ini berperan antara lain sebagai:

- Wahana proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam unggulan;
- Instrumen untuk mensinergikan investasi pemerintah melalui program-program SKPD;
- Kawasan prioritas untuk mensinergikan program pusat-provinsi kabupaten/kota;
- Area penerapan pembangunan dengan prinsip green industri; dan
- Wahana kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan/riset dalam mengembangkan inovasi.

Sejalan dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional dan provinsi, maka dapat ditentukan Kawasan Strategis Kota yang menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah “wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan” (pasal 1 (29) UU No. 26/2007). Kawasan strategis wilayah kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis kota berfungsi:

a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan
e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kota (KSK), sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis kota dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan 7 kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Memiliki potensi pasar regional, nasional dan internasional.
d. Didukung jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.
f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
g. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Balikpapan, baik melalui keterkaitan fungsional keterpusatannya maupun melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus yang dikembangkan pada kawasan tersebut, dan juga melalui keterpaduan sektor-sektor perekonomian di kawasan tersebut.Umumnya, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi mencakup kawasankawasan yang mempunyai ciri sebagai kawasan: Kawasan Metropolitan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Ekonomi Terpadu.

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan 6 kriteria berikut:

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya kota atau nasional;
b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri masyarakat Kota Balikpapan;
c. merupakan aset kota, atau nasional, atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota atau nasional
e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kota atau nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kawasan strategis sosial budaya yang ada di Balikpapan adalah kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Balikpapan Barat yang merupakan kampung atas air di Kota Balikpapan dan Kawasan Pendidikan

Skala Regional Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitarnya.

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Penetapan Kawasan Strategis untuk daya dukung lingkungan hidup didasarkan pada 7 kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. Merupakan aset kota atau nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/ atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/ atau dilestarikan;
c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian pada skala kota ataupun negara;
d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. Rawan bencana alam skala kota atau nasional;
g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

C. PRIORITAS DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi maka secara umum untuk Tahun 2016-2021 akan dilakukan berbagai macam program pembangunan. Dengan mempertahankan substansi program-program yang sudah berjalan sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025 serta RPJMN 2015-2019, maka disusun 12 (dua belas) Agenda Prioritas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Adapun 12 (dua belas) agenda Prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. Percepatan dan peningkatankesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;
6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
10. Pengembangan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi;
11. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
12. Pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional.

Adapun keterkaitan antar agenda prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan

Prioritas	RPJM Nasional 2015 - 2019	RPJMD Prov. Kaltim 2013 - 2018	Agenda Prioritas RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021	Agenda Prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelolaan Keuangan, aset danmanajemen Pemerintahandaerah yang efektif, efisien dantaat azas dalam mendukungPelayanan Publik BerstandarInternasional
2	Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih,Efektif,Demokratis dan Terpercaya		Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	
3	Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya		Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	
4	Memperteguh KeBhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia		Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;	

Prioritas	RPJM Nasional 2015 - 2019	RPJMD Prov. Kaltim 2013 - 2018	Agenda Prioritas RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021	Agenda Prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Peningkatan Kualitas Infrasruktur Dasar	Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*)	Mewujudkan pemerataaninfrastruktur yang berkualitas
				Meningkatkan kualitaslingkungan permukimanberkelanjutan
		Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*)	
6	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja	Peningkatan kualitas dankuantitas akses layananpendidikan (berbasis IPTEK danIMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau
				Pengembangan kehidupanmasyarakat yang harmonis,berkarakter dan berkebudayaanserta Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Dalam Pembangunan
		Peningkatan Kualitas layanan kesehatan		Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan
		Percepatan Pengentasan Kemiskinan		Percepatan dan peningkatankesejahteraan masyarakat
				Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender

Prioritas	RPJM Nasional 2015 - 2019	RPJMD Prov. Kaltim 2013 - 2018	Agenda Prioritas RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021	Agenda Prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
7	Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*)	Pengembangan potensi ekonomi lokalPengembangan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi
			Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*)	
8	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategi Ekonomi	Percepatan Tranformasi Ekonomi	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*)	
		Pengembangan Agrobisnis		
9	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, Pengendaliankuantitas penduduk danperluasan lapangan kerja	Mewujudkan ruang kota yangberkualitas dan berkelanjutan
		Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan		Mewujudkan ruang kota yangberkualitas dan berkelanjutan

Sumber Data : Diolah dari RPJMN 2015 – 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018



BAB III - URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kota/kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah. Pembagian tersebut mencangkup berbagai bidang-bidang urusan yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.Program dan kegiatan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihanyang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Balikpapanpada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Ringkasan Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Tabel 3.1.

Ringkasan Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan
Perangkat Daerah Penyelenggara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Program pendidikan anak usia dini**	**98,32**	**2**	**6.936.124.000,00**	**6.262.530.182,00**	Perencanaan pembangunan berdasarkanRenja, RKA, DPA	baik		
	Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar tk Negeri pembina di Balikpapan	100,00		137.150.000,00	129.007.246,00	Perencanaan pembangunan berdasarkanRenja, RKA, DPA	baik		
	Penguatan dan peningkatan mutu lembaga PAUD	94,75		350.000.000,00	309.903.436,00	Perencanaan pembangunan berdasarkanRenja, RKA, DPA	baik		
	Pendamping tutor PAUD	99,96		5.910.300.000,00	5.410.213.150,00	Perencanaan pembangunan berdasarkanRenja, RKA, DPA	baik		
	Hari Anak Nasional (HAN) porseni PAUD se Kota Balikpapan	88,20		50.000.000,00	26.661.600,00	Perencanaan pembangunan berdasarkanRenja, RKA, DPA	baik		
	Penilaian akreditasi PAUD dikmas	100,00		50.000.000,00	48.685.950,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional PAUD tk Negeri pembina di Balikpapan(DAK 2019)	100,00		88.200.000,00	77.584.800,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadaan sarana dan prasarana PAUD/tk Negeri (DAK 2019)	74,32		350.474.000,00	260.474.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program pendidikan non formal	**97,09**	**2**	**18.274.887.800,00**	**16.459.707.814,00**	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	100,00		895.353.000,00	873.831.050,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	100,00		674.183.400,00	650.906.224,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	100,00		695.883.200,00	657.927.764,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	100,00		677.654.000,00	640.684.458,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	100,00		546.779.200,00	505.654.490,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengelolaan rumah pintar	98,34		375.836.000,00	270.901.278,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Ujian nasional program paket a, b, c dan c kejuruan	100,00		72.150.000,00	67.875.600,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengelolaan insentif ustadz dan ustadzah taman pendidikan al qur'an (tpa)	99,99		8.213.040.000,00	7.707.060.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Lomba hari aksara internasional hai) tk Kota Balikpapan	100,00		40.000.000,00	38.350.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Apresiasi gtk PAUD non formal	84,87		76.000.000,00	50.962.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan sarana belajar SKB (DAK 2019)	100,00		1.624.200.000,00	1.330.134.300,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan prasarana belajar SKB (DAK 2019)	91,86		1.898.409.000,00	1.743.940.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (DAK 2019)	0,00		-	-	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Rehabilitasi prasarana belajar SKB (DAK 2019)	100,00		720.000.000,00	720.000.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan Balikpapan Timur(DAK 2019)	75,45		636.200.000,00	452.351.700,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan Balikpapan Selatan(DAK 2019)	79,42		372.300.000,00	277.855.300,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan Balikpapan Tengah(DAK 2019)	99,22		338.400.000,00	219.839.250,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan Balikpapan Utara(DAK 2019)	83,73		159.200.000,00	113.143.700,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan Balikpapan Barat(DAK 2019)	62,17		259.300.000,00	138.290.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Program peningkatan mutu pendidik dan	**99,73**	**13**	**838.600.000,00**	**778.285.978,00**	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tenaga kependidikan					berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	100,00		37.000.000,00	35.075.092,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penguatan tim penilai angka kredit	100,00		100.000.000,00	91.612.300,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penguatan pengelolaan data dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan	100,00		40.500.000,00	39.105.850,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penanganan kasus-kasus pendidik dan tenaga kependidikan	87,84		18.500.000,00	10.040.900,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pemilihan dan perhargaan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi	100,00		100.000.000,00	96.708.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pelatihan karya tulis ilmiah (kti) bagi guru/pendidik	100,00		100.000.000,00	98.725.150,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pelatihan dan lomba pengembangan model pembelajaran berbasis tik	100,00		130.000.000,00	128.204.092,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	100,00		80.000.000,00	64.792.200,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengembangan keprofesian berkelanjutan	100,00		60.000.000,00	51.171.450,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pelaksanaan program profesi guru dalam jabatan (ppgdj)	100,00		172.600.000,00	162.850.594,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Program pendidikan dasar	**99,64**	**21**	**210.009.055.450,00**	**201.447.044.933,52**	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	100,00		600.000.000,00	597.112.500,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	100,00		1.000.000.000,00	783.343.102,67	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan ruang serba guna/aula SMP	100,00		900.000.000,00	762.726.954,46	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	100,00		300.000.000,00	278.878.265,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
45	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP	100,00		280.000.000,00	276.850.726,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP	100,00		1.000.000.000,00	826.451.512,91	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	100,00		8.500.000.000,00	8.496.659.056,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan SD dan SMP terpadu kelurahan graha indah	100,00		3.000.000.000,00	2.526.739.137,08	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Olympiade sains SD	100,00		100.000.000,00	92.715.352,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Olympiade sains SMP	100,00		100.000.000,00	76.707.500,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembinaan dan pemantapan implementasi	100,00		200.000.000,00	191.227.700,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kurikulum 2013 jenjang SD					berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Pembinaan dan pemantapan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP	100,00		150.000.000,00	142.206.400,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembinaan gugus SD	100,00		200.000.000,00	189.125.051,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembinaan siswa berprestasi tingkat SD	100,00		508.750.000,00	502.612.200,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembinaan, pengelolaan dan pelayanan manajemen dan data SD	100,00		125.000.000,00	120.671.850,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembinaan, pengelolaan dan pelayanan manajemen dan data SMP	100,00		175.000.000,00	145.101.901,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penambahan ruang kelas baru SD/mi	100,00		4.100.000.000,00	3.534.373.988,74	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	100,00		5.700.000.000,00	4.685.695.255,24	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penilaian akreditasi SD	100,00		125.000.000,00	123.938.950,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penilaian akreditasi SMP	100,00		75.000.000,00	59.170.203,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pra ujian nasional, ujian sekolah dan ujian nasional	100,00		400.000.000,00	391.702.383,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pra ujian sekolah SD dan ujian sekolah SD Kota	100,00		400.000.000,00	388.075.597,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Balikpapan					berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD	100,00		5.000.000.000,00	4.956.022.816,58	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	100,00		5.000.000.000,00	4.968.399.764,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 001 Balikpapan Barat	99,99		916.676.000,00	872.972.857,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 002 Balikpapan Barat	100,00		827.196.000,00	781.921.339,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 003 Balikpapan Barat	89,46		117.005.000,00	104.404.850,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 004 Balikpapan Barat	100,00		692.057.000,00	646.787.510,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 005 Balikpapan Barat	100,00		448.123.000,00	436.992.088,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 006 Balikpapan Barat	96,09		241.235.000,00	213.874.425,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 007 Balikpapan Barat	100,00		219.155.000,00	203.050.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 008 Balikpapan Barat	98,86		402.153.000,00	358.851.125,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 009 Balikpapan Barat	95,13		1.065.185.000,00	912.118.780,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 010 Balikpapan Barat	100,00		257.515.000,00	227.188.500,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 011 Balikpapan Barat	100,00		383.671.000,00	371.430.890,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 012 Balikpapan Barat	100,00		202.564.000,00	181.836.565,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Barat	93,87		275.481.000,00	244.751.667,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 014 Balikpapan Barat	88,52		112.174.000,00	83.546.431,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 015 Balikpapan Barat	98,64		294.213.000,00	280.668.300,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 016 Balikpapan Barat	100,00		294.830.000,00	285.281.965,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 017 Balikpapan Barat	100,00		173.457.000,00	170.450.544,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 018 Balikpapan Barat	79,08		271.954.000,00	208.423.100,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 019 Balikpapan Barat	100,00		725.886.600,00	712.408.663,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 020 Balikpapan Barat	97,13		527.650.000,00	489.789.305,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 001 Balikpapan Kota	91,49		812.000.000,00	618.756.275,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 002 Balikpapan Kota	99,43		340.097.000,00	324.838.600,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 003 Balikpapan Kota	100,00		588.764.000,00	547.507.028,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 004 Balikpapan Kota	100,00		246.824.000,00	213.612.933,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 005 Balikpapan Kota	100,00		691.723.000,00	670.176.461,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 006 Balikpapan Kota	100,00		267.060.000,00	261.947.600,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 007 Balikpapan Kota	100,00		362.573.000,00	330.291.550,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 008 Balikpapan Kota	100,00		331.893.000,00	285.440.779,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 009 Balikpapan Kota	92,81		217.744.000,00	186.771.660,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 010 Balikpapan Kota	100,00		256.224.000,00	253.162.376,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 011 Balikpapan Kota	100,00		504.266.000,00	492.335.812,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 012 Balikpapan Kota	92,34		564.105.000,00	509.565.100,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Kota	100,00		792.223.000,00	774.811.536,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 014 Balikpapan Kota	82,17		187.930.000,00	138.829.120,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 015 Balikpapan Kota	100,00		267.891.000,00	262.530.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 001 Balikpapan Selatan	100,00		756.193.000,00	714.274.356,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 002 Balikpapan Selatan	100,00		537.810.000,00	528.452.689,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 003 Balikpapan Selatan	100,00		457.483.000,00	441.305.191,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 004 Balikpapan Selatan	100,00		712.883.000,00	684.724.075,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 005 Balikpapan Selatan	100,00		430.583.000,00	410.393.254,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 006 Balikpapan Selatan	100,00		463.884.000,00	449.970.630,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 007 Balikpapan Selatan	100,00		451.482.000,00	433.373.603,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 008 Balikpapan Selatan	100,00		466.723.000,00	449.770.061,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 009 Balikpapan Selatan	100,00		378.169.000,00	369.372.509,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 010 Balikpapan Selatan	100,00		831.655.000,00	799.705.775,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 011 Balikpapan Selatan	100,00		329.253.000,00	313.372.050,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 012 Balikpapan Selatan	98,57		394.305.000,00	372.720.888,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Selatan	100,00		703.609.000,00	668.713.286,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 012 Balikpapan Selatan	96,41		563.453.000,00	526.208.114,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Selatan	99,65		1.094.967.000,00	1.028.030.732,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 014 Balikpapan Selatan	99,96		489.810.000,00	481.345.200,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 015 Balikpapan Selatan	91,32		797.680.000,00	693.363.624,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 001 Balikpapan Tengah	100,00		1.024.448.000,00	1.005.588.850,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 002 Balikpapan Tengah	99,58		235.523.000,00	227.215.825,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 005 Balikpapan Tengah	95,93		419.008.000,00	386.675.612,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 006 Balikpapan Tengah	100,00		430.383.000,00	422.707.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 007 Balikpapan Tengah	100,00		436.083.000,00	419.591.859,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 008 Balikpapan Tengah	96,37		237.224.000,00	223.329.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 009 Balikpapan Tengah	98,58		243.659.000,00	238.639.900,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 010 Balikpapan Tengah	100,00		341.117.000,00	315.573.170,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 011 Balikpapan Tengah	100,00		255.120.000,00	254.404.450,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 012 Balikpapan Tengah	100,00		445.663.000,00	421.105.204,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Tengah	98,03		480.022.000,00	449.263.800,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 014 Balikpapan Tengah	100,00		215.013.000,00	210.865.205,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 015 Balikpapan Tengah	99,94		246.727.000,00	232.846.852,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 016 Balikpapan Tengah	100,00		229.955.000,00	218.738.575,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 017 Balikpapan Tengah	100,00		177.843.000,00	173.975.950,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 018 Balikpapan Tengah	100,00		421.383.000,00	404.180.171,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 019 Balikpapan Tengah	99,17		354.697.000,00	345.127.750,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 020 Balikpapan Tengah	100,00		229.125.000,00	218.003.100,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 021 Balikpapan Tengah	92,12		285.618.000,00	258.303.546,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 022 Balikpapan Tengah	95,82		233.520.000,00	220.217.765,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 023 Balikpapan Tengah	100,00		204.623.000,00	202.841.800,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 024 Balikpapan Tengah	98,06		211.964.000,00	186.015.550,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 025 Balikpapan Tengah	100,00		427.909.000,00	413.991.405,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 026 Balikpapan Tengah	100,00		213.844.000,00	208.993.472,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 027 Balikpapan Tengah	100,00		375.975.000,00	360.502.080,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 028 Balikpapan Tengah	100,00		145.930.000,00	143.349.085,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 029 Balikpapan Tengah	100,00		210.464.000,00	206.414.879,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 030 Balikpapan Tengah	97,68		273.207.000,00	257.795.470,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 001 Balikpapan Timur	100,00		499.843.000,00	485.883.708,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 002 Balikpapan Timur	98,02		665.380.000,00	625.029.543,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 003 Balikpapan Timur	93,55		400.607.000,00	366.465.985,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 004 Balikpapan Timur	100,00		267.230.000,00	254.300.910,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 005 Balikpapan Timur	97,12		515.287.000,00	480.126.948,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 006 Balikpapan Timur	100,00		612.537.000,00	547.036.636,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 007 Balikpapan Timur	91,82		169.380.000,00	149.907.800,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 008 Balikpapan Timur	100,00		179.996.000,00	160.796.535,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 009 Balikpapan Timur	100,00		159.231.000,00	152.725.063,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 010 Balikpapan Timur	100,00		346.509.000,00	311.526.116,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 011 Balikpapan Timur	100,00		460.528.000,00	443.760.001,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 012 Balikpapan Timur	100,00		479.663.000,00	442.116.802,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Timur	95,92		422.430.000,00	390.428.676,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 014 Balikpapan Timur	97,14		115.564.000,00	111.923.700,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 015 Balikpapan Timur	100,00		404.000.000,00	387.920.050,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 016 Balikpapan Timur	100,00		190.664.000,00	188.297.046,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 017 Balikpapan Timur	97,31		316.113.000,00	295.802.873,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 018 Balikpapan Timur	100,00		226.640.000,00	211.407.375,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 019 Balikpapan Timur	100,00		481.246.000,00	466.703.021,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 020 Balikpapan Timur	100,00		357.797.000,00	329.469.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 021 Balikpapan Timur	100,00		383.057.000,00	346.025.243,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 001 Balikpapan Utara	100,00		895.850.000,00	869.279.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 002 Balikpapan Utara	100,00		761.086.000,00	718.671.456,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 003 Balikpapan Utara	99,90		677.323.000,00	628.066.600,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 004 Balikpapan Utara	100,00		858.390.000,00	814.236.625,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 005 Balikpapan Utara	100,00		129.914.000,00	108.941.085,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 006 Balikpapan Utara	100,00		433.458.000,00	402.578.261,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 007 Balikpapan Utara	99,76		443.040.000,00	412.736.425,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 008 Balikpapan Utara	100,00		158.460.000,00	150.588.300,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 009 Balikpapan Utara	95,45		798.368.000,00	690.573.986,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 010 Balikpapan Utara	100,00		340.663.000,00	319.836.415,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 011 Balikpapan Utara	100,00		403.080.000,00	344.378.450,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 012 Balikpapan Utara	99,60		188.860.000,00	165.627.400,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 013 Balikpapan Utara	100,00		362.171.000,00	344.913.260,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 014 Balikpapan Utara	100,00		503.035.650,00	485.933.330,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 015 Balikpapan Utara	99,23		231.019.000,00	209.132.250,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 016 Balikpapan Utara	96,34		355.158.000,00	332.039.675,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 017 Balikpapan Utara	100,00		428.033.000,00	416.676.850,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 018 Balikpapan Utara	100,00		356.494.000,00	332.057.325,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 019 Balikpapan Utara	99,76		309.910.000,00	295.524.400,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 020 Balikpapan Utara	100,00		852.140.000,00	842.311.155,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 021 Balikpapan Utara	99,88		407.874.000,00	396.290.597,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 022 Balikpapan Utara	99,75		232.978.000,00	215.358.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 023 Balikpapan Utara	98,99		248.347.000,00	242.362.465,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 024 Balikpapan Utara	100,00		236.444.000,00	232.205.250,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 025 Balikpapan Utara	100,00		178.569.000,00	155.214.600,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 026 Balikpapan Utara	93,95		192.057.000,00	154.372.050,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 027 Balikpapan Utara	99,84		505.694.000,00	429.180.345,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 028 Balikpapan Utara	89,95		213.986.000,00	186.749.775,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 029 Balikpapan Utara	98,38		352.797.000,00	338.952.475,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 030 Balikpapan Utara	98,29		608.792.000,00	486.608.750,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 031 Balikpapan Utara	99,86		300.238.000,00	280.835.839,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 032 Balikpapan Utara	99,68		220.344.000,00	203.962.075,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 033 Balikpapan Utara	100,00		908.967.000,00	884.646.226,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 1 Balikpapan	100,00		919.480.000,00	888.762.128,84	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 2 Balikpapan	100,00		552.645.000,00	528.019.817,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 3 Balikpapan	100,00		1.097.329.000,00	1.029.381.685,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 4 Balikpapan	100,00		933.764.000,00	909.254.250,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 5 Balikpapan	100,00		1.017.372.000,00	898.408.817,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 6 Balikpapan	100,00		788.365.000,00	768.368.525,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 7 Balikpapan	98,14		1.075.626.000,00	992.131.275,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SMP Negeri 8 Balikpapan	100,00		1.087.439.000,00	1.068.167.384,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 9 Balikpapan	100,00		915.330.000,00	839.062.571,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 10 Balikpapan	100,00		1.059.738.000,00	1.012.261.288,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 11 Balikpapan	100,00		1.077.171.000,00	1.010.923.209,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
4	Bosda SMP Negeri 12 Balikpapan	100,00		778.633.000,00	737.187.775,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 13 Balikpapan	100,00		750.889.000,00	719.435.575,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 14 Balikpapan	100,00		739.897.000,00	678.797.257,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 15 Balikpapan	100,00		724.556.000,00	623.159.559,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 16 Balikpapan	100,00		534.238.000,00	424.685.711,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 17 Balikpapan	100,00		723.774.000,00	685.120.178,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 18 Balikpapan	100,00		997.106.000,00	923.565.418,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SMP Negeri 19 Balikpapan	100,00		489.987.000,00	467.524.572,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 20 Balikpapan	100,00		505.497.000,00	491.294.150,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
5	Bosda SMP Negeri 21 Balikpapan	100,00		204.810.000,00	195.382.758,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SMP Negeri 22 Balikpapan	100,00		869.466.000,00	850.741.530,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
6	Bosda SMP Negeri 23 Balikpapan	100,00		803.199.000,00	796.584.812,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan pagar sekolah dasar (sd)	100,00		3.300.000.000,00	3.275.449.383,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan pagar sekolah menengah pertama (smp)	100,00		3.200.000.000,00	3.176.935.066,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadan meubelair sekolah SD	100,00		2.500.000.000,00	2.348.857.856,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadan meubelair sekolah SMP	100,00		6.000.000.000,00	5.826.415.147,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan jamban/toilet sekolah dasar (sd)	100,00		520.171.200,00	514.726.400,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
7	Pembangunan jamban/toilet Sekolah Menengah	100,00		300.000.000,00	296.826.970,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pertama (SMP)					berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Bosda SDN 021 Balikpapan Barat	100,00		240.806.000,00	238.011.479,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bosda SDN 022 Balikpapan Barat	100,00		214.243.000,00	189.674.350,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan prasarana belajar SMP(DAK 2019)	100,00		1.790.900.000,00	1.790.820.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadaan sarana belajar SMP(DAK 2019)	100,00		1.400.000.000,00	1.357.500.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Rehabilitasi prasarana belajar SMP(DAK 2019)	100,00		757.600.000,00	757.600.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Rehabilitasi prasarana belajar SD(DAK 2019)	100,00		12.730.179.716,00	12.726.679.716,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pembangunan prasarana belajar SD(DAK 2019)	100,00		2.231.966.284,00	2.231.966.284,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) pendidikan dasar	100,00		62.745.400.000,00	62.173.680.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Program pembinaan tata kelola bidang pendidikan	**99,37**	**6**	**1.646.665.200,00**	**1.367.172.038,00**	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pelaksanaan PPDB online	100,00		412.500.000,00	396.555.950,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
8	Peringatan hardiknas	100,00		200.000.000,00	194.859.000,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Pelaksanaan kuis kihajar tingkat kota	100,00		160.000.000,00	154.373.588,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pelaksanaan adiwiyata award	98,89		534.165.200,00	321.410.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Fasilitasi penyusunan rencana bos dan bop	100,00		190.000.000,00	182.111.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penyusunan spm dan profil pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan	100,00		150.000.000,00	117.862.500,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**99,70**	**15**	**2.763.064.000,00**	**2.352.853.484,00**	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00		450.000.000,00	293.927.688,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
9	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,00		42.200.000,00	8.568.100,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00		225.000.000,00	223.697.100,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00		200.000.000,00	190.740.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00		160.000.000,00	150.404.650,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penyediaan komponen instalasi	100,00		40.000.000,00	27.511.000,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	listrik/penerangan bangunan kantor					berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	83,20		50.000.000,00	39.600.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
11	Penyediaan makanan dan minuman	100,00		450.000.000,00	436.292.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	100,00		450.000.000,00	420.797.021,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	100,00		695.864.000,00	561.315.925,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**98,05**		**1.130.178.000,00**	**995.777.431,09**	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00		35.178.000,00	35.169.200,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,00		265.000.000,00	251.300.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00		310.000.000,00	267.576.868,09	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00		230.000.000,00	199.509.717,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	87,06		170.000.000,00	125.490.746,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pemeliharaan jaringan internet dan website	100,00		120.000.000,00	116.730.900,00	Perencanaan pembangunan	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	disdikbud					berdasarkan Renja, RKA, DPA			
	Program peningkatan disiplin aparatur	**100,00**		**135.000.000,00**	**130.350.000,00**	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Pengadaan mesin/kartu absensi	100,00		135.000.000,00	130.350.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	**100,00**		**15.000.000,00**	**11.250.000,00**	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani	100,00		15.000.000,00	11.250.000,00	Perencanaan pembangunan berdasarkan Renja, RKA, DPA	baik		

2. Urusan Kesehatan

Perangkat Daerah Penyelenggara: Dinas Kesehatan Kota

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Program upaya kesehatan masyarakat**								
	- Kegiatan operasional peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di	100%	27 UPTD	12.485.771.400,00	11.561.724.649,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA	kurang	Kurang SDM nakes medis (dokter umum dan dokter gigi), paramedis dan	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	puskesmas					OPD		penunjang seperti tenaga akuntansi, kesehatan lingkungan, apoteker, analis laboratorium, serta tenaga it	
	- Kegiatan operasional peningkatan kesehatan masyarakat di UPTD laboratorium dan radiologi	100%	1 UPTD	900.000.000,00	862.287.393,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan operasional peningkatan kesehatan masyarakat di UPTD instalasi farmasi Kota	100%	1 UPTD	257.887.000,00	214.964.559,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100%	50 orang	450.000.000,00	352.091.800,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Kurang SDM nakes medis, paramedis dan penunjang seperti driver dan operator call 119	
	- Kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan kerja dan olahraga	500 orang	7 orang	100.000.000,00	97.042.430,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Kurang tenaga kesehatan seperti tenaga promkes	
	- Kegiatan penatalaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	700 orang	105 orang	150.000.000,00	122.043.250,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	-	
	- Kegiatan penanganan pelayanan pasien ketergantungan napza	350 jiwa	4 orang	125.000.000,00	72.472.750,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Kurang SDM nakes medis dan paramedis khusus penanganan ketergantungan napza	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegiatan penanggulangan KLB dan bencana	10 kasus	5 orang	500.000.000,00	36.280.431,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100%	60 orang	350.000.000,00	324.283.660,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	-	
	- Kegiatan pembinaan pemanfaatan hasil toga	2 puskesmas	12 orang	100.000.000,00	47.431.550,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Belum semua puskesmas sebagai puskesmas dengan layanan pemanfaatan hasil toga	
	- Kegiatan peningkatan gizi masyarakat	100%	30 orang	500.000.000,00	468.488.395,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Belum semua puskesmas terdapat tenaga gizi (D III) sebagai sesuai permenkes nomor 75 tahun 2014	
	- Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan PTM	1600 orang	4 orang	300.000.000,00	251.012.951,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang (posbindu kit)	Usulan ke berbagai sumber dana sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku	
	- Kegiatan pelayanan kesehatan mata untuk masyarakat	100 orang	3 orang	100.000.000,00	81.802.900,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	-	
	- Kegiatan pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat	470 jiwa	4 orang	100.000.000,00	59.753.775,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	-	
	- Kegiatan pelayanan kesehatan gigi anak sekolah dan	3600 anak	54 orang	100.000.000,00	92.879.169,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA	cukup	-	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	masyarakat Balikpapan					OPD			
	- Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan	300 sarana	32 orang	250.000.000,00	213.844.350,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Beberapa sampel masih dikirim ke samarinda untuk dilakukan test	
	- Kegiatan pembayaran klaim visum polres	200kasus	50 orang	200.000.000,00	147.638.150,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan operasional kasus kdrt, ktp, kta dan trafficking di puskesmas	22 kasus	6 orang	100.000.000,00	91.495.606,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di dinas kesehatan	100%	7 orang	716.000.000,00	657.844.350,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas	100%	27 puskesmas	14.219.000.000,00	11.459.039.546,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Pengelola kegiatan sangat minim	
2	- Kegiatan peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	3 kegiatan	31 orang	750.000.000,00	642.043.600,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyehatan lingkungan	70%	35 orang	500.000.000,00	439.022.580,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Tenaga kesehatan lingkungan sebagai salah satu tenaga yang dibutuhkan sesuai permenkes no 75 tahun 2014	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan dana non kapitasi jkn di puskesmas	0	12 puskesmas	136.960.000,00	-	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan dana kapitasi jkn di puskesmas	81,37%	17 puskesmas	11.868.497.900,00	9.405.592.004,81	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Pemenuhan melalui berbagai sumber dana	
	- Kegiatan distribusi obat dan e-logistik (bok) DAK 2019	1 layanan	12 orang	200.000.000,00	186.767.652,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan dukungan manajemen bok Kota dan jampersal - DAK 2019	100%	40 orang	721.000.000,00	550.707.742,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular								
	- Kegiatan pemberantasan penyakit DBD dan zoonosis	ir 240,65/100.000 pddk, cfr 0,8 %	150 orang	1.375.250.000,00	723.389.950,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (tbc, ispa, kecacingan, diare dan kusta)	600 orang	5 orang	200.000.000,00	151.576.650,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan pemberantasan penyakit	<1% risti	50 orang	250.000.000,00	187.180.777,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA	cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kulit/kelamin/IMS/HIV/ AIDS					OPD			
	- Kegiatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	100%	200 orang	100.000.000,00	57.674.348,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan peningkatan imunisasi	100%	150 orang	350.000.000,00	238.971.600,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak								
	- Kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak	100%	6 orang	1.000.000.000,00	950.835.291,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang		
	- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi abk	180 abk	70 orang	500.000.000,00	484.058.100,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Di era BPJS pelayanan kepada pasien menjadi yang utama, namun real di lapangan tenaga fungsional	
	- Kegiatan jaminan persalinan bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan persalinan (DAK) 2019	100 jiwa	6 orang	612.000.000,00	590.406.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Bidan, perawat, gizi, dokter menjadi tenaga merangkap tugas dan jabatan admin di manajemen keuangan, adm umum, it, dll), hal ini tentu sangat berdampak pada mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	
3	**Program peningkatan kualitas, kuantitas SDM serta sarana**					RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	prasarana kesehatan					OPD			
	- Kegiatan rehab berat/sedang sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas dan pustu, jaringannya	1 unit	10 orang	560.000.000,00	482.029.331,54	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan melalui pengiriman program pelatihan	20 orang	10 orang	300.000.000,00	275.484.155,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	2 unit	10 orang	20.656.000.000,00	17.784.184.264,11	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	baik		
	- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK 2019)	3 unit	10 orang	1.400.000.000,00	1.346.120.000,30	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	baik	-	
	- Kegiatan pengelolaan pengembangan dan sumber daya kesehatan	1000 rekomendasi	20 orang	200.000.000,00	155.092.400,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	baik	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegiatan pengembangan sikda (sistem informasi kesehatan daerah)	100%	585 orang	200.000.000,00	158.493.800,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegiatan penerapan akreditasi sarana pelayanan kesehatan - DAK 2019	15 puskesmas	135 orang	1.794.400.000,00	1.028.169.235,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegiatan pengawasan dan peningkatan kualitas alat	27 puskesmas	3 orang	1.000.000.000,00	860.859.906,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA	kurang	Tenaga it masih minim untuk mengelola data-data	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kesehatan					OPD		kesehatan	
	- Kegaian pengadaan obat dan bmhp (DAK 2019)	100%	7 orang	2.767.592.000,00	2.544.931.893,60	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Belum seluruh faskes terakreditasi nasional	
	- Kegaitan pengadaan obat dan bmhp	100%	7 orang	1.500.000.000,00	1.399.663.387,40	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegaitan pemantapan pelaksanaan sistem akuntansi dan monitoring evaluasi puskesmas	4 puskesmas	3 orang	50.000.000,00	41.634.100,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegaitan peningkatan kapasitas kinerja puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	27puskesmas	3 orang	100.000.000,00	81.241.300,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegaitan manajemen desentralisasi kesehatan	80 buku	4 orang	150.000.000,00	137.717.100,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	Belum seluruh puskesmas menerapkan ppk blud	
	- Kegaitan pengadaan alat kesehatan (DAK 2019)	4 set / paket	7 orang	520.437.000,00	271.763.621,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang	-	
	- Kegaitan pembangunan laboratorium kesehatan daerah	1 unit	10 orang	5.419.060.000,00	4.344.035.870,23	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Ketersediaan tenaga it masih kurang	
	- Kegaitan penyediaan sewa	2 unit	10 orang	400.000.000,00	97.650.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA	cukup	Sdm dengan kompetensi atlm	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gedung puskesmas					OPD		kurang	
	- Kegaitan pengadaan sistem informasi dan komunikasi psc 119 (DAK 2019)	1 paket	5 orang	300.000.000,00	286.000.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegaitan pengadaan ambulance psc 119 (DAK 2019)	1 unit	5 orang	500.000.000,00	435.237.300,30	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	-	
	- Kegaiatan penyediaan obat gizi (DAK penugasan 2019)	1 jenis	7 orang	878.042.000,00	878.027.480,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegaiatan pengadaan posbindu kit (DAK penugasan 2019)	100%	4 orang	71.018.000,00	68.690.754,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
4	**Program penanggulangan Kemiskinan terpadu**	16.405 jiwa	3 orang	11.082.786.125,00	6.577.196.218,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	kurang		
e	- Kegaiatan pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI)					RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD			
	Program peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan kepada Masyarakat					RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegaiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat puskesmas blud	17 layanan	10 puskesmas	18.305.613.000,00	14.639.280.684,76	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup	Pengelola kegiatan sangat minim	
	- Kegaiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat blud UPT laboratorium dan radiologi	1 layanan	12 orang	1.874.090.000,00	1.690.641.069,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	Program penataan penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah					RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD			
	- Kegaiatan pengadaan lahan puskesmas karang jati	100%	4 orang	2.696.250.000,00	2.002.376.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD			
	- Kegaiatan pengadaan kendaraan dinas operasional	3 unit	25 orang	2.500.000.000,00	2.149.100.001,40	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegaiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	5 orang	1.000.000.000,00	879.103.621,50	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegaiatan pengadaan peralatan gedung kantor	7 jenis	5 orang	500.000.000,00	489.785.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegaiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	10 unit	5 orang	780.000.000,00	736.187.432,66	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegaiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198 unit	90 orang	1.500.000.000,00	1.106.533.236,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
5	- Kegaiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	200 unit	5 orang	399.451.200,00	346.663.700,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	Program pelayanan administrasi perkantoran					RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD			
	- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15 rekening	90 orang	594.960.000,00	234.530.876,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas	198 unit	90 orang	80.000.000,00	58.917.100,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	5 orang	250.000.000,00	213.846.765,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	51 jenis	5 orang	220.000.000,00	157.082.140,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	5 orang	350.000.000,00	179.619.825,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 jenis	2 orang	5.000.000,00	4.938.450,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	90 orang	19.828.000,00	19.260.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	20.340 Kotak	5 orang	300.000.000,00	278.706.000,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	166 orang	576 orang	600.000.000,00	594.753.753,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		
	- Kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	20 orang	20 orang	351.880.000,00	334.414.106,00	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA OPD	cukup		

perangkat daerah penyelenggara: RSUD beriman Kota Balikpapan

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi	Realisasi				

		Program		(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan kualitas, kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana kesehatan								
	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK 2019)	100%	10 orang	1.796.866.000	1.664.830.555	sesuai	cukup		
	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat								
	Peningkatan kualitas pelayanan blud rumah sakit umum daerah	95%	400 orang	82.563.469.000,00	59.639.425.724,26	sesuai	cukup	Regulasi terkait pengelolaan blud masih minim	

Perangkat daerah penyelenggara: RSKB "sayang ibu"

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**83,64**		**68.000.000**	**56.872.000**	RKA sesuai dengan Renja			
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		9	**68.000.000**	**56.872.000**		baik		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	**90,33**		**2.752.250.000**	**2.486.016.901**	RKA sesuai dengan Renja			
	Operasional peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat		seluruh	**2.752.250.000**	**2.486.016.902**		baik		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	di rumah sakit bersalin sayang ibu		pegawai						
	Program peningkatan kualitas, kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana kesehatan	95,45		196.500.000	**187.566.597**	RKA sesuai dengan Renja			
	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK 2018)		13	196.500.000	**187.566.598**		baik		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	97,89		63.000.000	**61.670.000**	RKA sesuai dengan Renja	baik		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**83,64**		**68.000.000**	**56.872.000**	RKA sesuai dengan Renja			

3. Lingkungan Hidup
perangkat daerah penyelenggara:Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemeliharaan dan pengawasan kawasan konservasi ruang	94	20 orang	1.250.000.000	1.172.740.643	Renja skpd,RKA	Cukup		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	terbuka hijau/hutan Kota					skpd			
2	Pengelolaan kebun raya Balikpapan	92	32 orang	3.000.000.000	2.758.580.648	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
3	Pengelolaan kawasan konservasi ruang terbuka hijau/hutan Kota	3	50 orang	850.000.000	26.500.000	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
4	Pemeliharaan alat pantau kualitas udara	98	12 orang	1.045.000.000	1.027.002.630	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
5	Pengujian emisi kendaraan bermotor dan emisi cerobong sumber tidak bergerak	95	100 orang	250.000.000	238.407.075	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
6	Penyusunan kajian perencanaan sarana dan prasaran limbah b3	100	12 orang	100.000.000	99.550.000	Renjaskpd, RKA skpd	Cukup		
7	Pengelolaan limbah b3	73	13 orang	50.000.000	36.480.504	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
8	Pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	91	60 orang	300.000.000	273.221.111	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
9	Pengelolaan prokasih	92	12 orang	250.000.000	230.115.293	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
10	Penyusunan dokumen profil adipura Kota Balikpapan	75	24 orang	250.000.000	187.812.724	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
11	Peringatan hari-hari lingkungan hidup	96	100 orang	200.000.000	191.168.500	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
12	Penyusunan laporan status informasi lingkungan hidup	90	50 orang	100.000.000	90.128.000	Renja skpd,RKA	Cukup		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	KotaBalikpapan					skpd			
13	Pengembangan format mrv (pengukuran, pelaporan dan implementasi) implementasi rad grk	86	100 orang	100.000.000	86.476.346	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
14	Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan	81	50 orang	400.000.000	324.510.965	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
15	Inventarisasi sumber pencemar ke sungai - sungai di Kota Balikpapan	95	15 orang	250.000.000	236.390.000	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
16	Pemeliharaan sumur pantau air bawah tanah	92	12 orang	250.000.000	230.984.278	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
17	Program cgh (clean, green, healthy city)	89	50 orang	380.434.540	339.756.350	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
18	Pos pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	70	20 orang	386.812.300	270.128.484	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
19	Sosialisasi lingkungan hidup	63	2800 orang	380.727.550	239.143.960	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
20	Kampung iklim	92	3 rt	150.000.000	137.891.038	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
21	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	96	5 orang	3.900.000.000	3.753.211.676	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
22	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan	93	13 orang	610.578.000	567.138.000	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	persampahan (DAK tahun 2018)								
23	Mengumpulkan dan mengangkut sampah ke tpa	94	415 orang	21.151.375.000	19.913.289.230	Renja skpd, RKA skpd	Cukup		
24	Peningkatan kebersihan Kota dan jalan protokol Kota Balikpapan	92	297 orang	14.903.250.000	13.709.403.422	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	
25	Pelayanan retribusi persampahan	87	22 orang	1.500.000.000	1.297.555.885	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	
26	Pengelolaan sampah 3r (mrf & itf)	92	47 orang	2.100.000.000	1.933.751.769	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	
27	Pembuatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana tpa manggar	72	69 orang	4.734.500.000	3.417.752.322	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	
28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional persampahan	71	30 orang	15.116.165.500	10.801.709.000	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	
29	Pengolahan sampah dengan sanitary landfill	82	69 orang	9.800.000.000	8.079.485.421	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	
30	Pemantapan program adiwiyata	83	30 orang	150.000.000	125.148.280	Renja skpd, RKA skpd	Cukup	-	

4. Pekerjaan umum dan tata ruang

perangkat daerah penyelenggara:Dinas Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan	Tingkat	Jumlah	Alokasi & Realisasi Anggaran	Kesesuaian	Kondisi	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang

		Capaian Spm	Pegawai	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perencanaan Pembangunan	Sarpras		Dianggap Perlu
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		12 Orang	12.221.375.500,00	10.119.496.771,69	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Program Pembangunan pedestrian Kota		12 Orang	9.787.505.000,00	6.860.462.585,03	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program Pembangunan pedestrian Kota
3	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan		12 Orang	184.007.652.400,00	165.668.421.880,16	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4	Program Pengendalian banjir		18 Orang	27.982.083.250,00	15.906.502.540,33	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program Pengendalian banjir
5	program Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong		18 orang	39.693.775.000,00	29.292.824.581,39	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	program Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong
6	Program Pemeliharaan Saluran dan drainase		18 Orang	28.698.600.000,00	23.541.671.973,38	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program Pemeliharaan Saluran dan drainase
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya		18 Orang	866.486.000,00	660.533.105,49	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya
8	Program sarana dan prasarana aparatur (gedung pemerintah)		12 Orang	53.262.950.000,00	41.816.053.631,85	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program sarana dan prasarana aparatur (gedung pemerintah)

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Program sarana dan prasarana umum		12 Orang	730.000.000,00	514.833.290,00	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program sarana dan prasarana umum
10	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga		12 Orang	19.114.700.000,00	17.436.486.666,26	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
11	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		12 Orang	27.261.011.000,00	26.198.756.580,34	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
12	Program peningkatan jalan lingkungan		12 Orang	177.325.953.700,00	174.801.611.762,36	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program peningkatan jalan lingkungan
13	Program peningkatan drainase lingkungan		12 Orang	23.454.046.300,00	22.469.153.739,82	Renstra 2019 dan Renja 2031	Cukup	Tidak ada	Program peningkatan drainase lingkungan
14	Program pembinaan jasa konstruksi		6 orang	220.000.000,00	194.442.060,00	Renstra 2019 dan Renja 2032	Cukup	Tidak ada	Program pembinaan jasa konstruksi
15	Program pelayanan administrsi perkantoran		11 orang	2.789.379.500,00	2.436.718.687,00	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program pelayanan administrsi perkantoran
16	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		11 orang	8.135.490.000,00	4.352.395.985,00	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Hal Lain Yang Dianggap Perlu
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program sistem data informasi pekerjaan umum		18 orang	68.320.000,00	64.978.550,00	Renstra 2019 dan Renja 2019	Cukup	Tidak ada	Program sistem data informasi pekerjaan umum

5. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
perangkat daerah penyelenggara: dinas perumahan dan permukiman

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	16	1.228.091.300	992.115.499	sesuai	baik	-	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		3.494.800.000	2.889.835.757				
	Program peningkatan disiplin aparatur	100%		15.000.000	9.400.000				
	Program penyebarluasan informasi daerah	100%		52.500.000	40.535.000				
	Program pengelolaan areal permakaman	100%	40	4.881.850.700	4.696.060.412	sesuai	baik	-	-
	Program pengelolaan ruang	95%		21.374.436.300	20.085.531.699			Waktunya kurang dan kurang rapi (perpanjangan waktu merapikan	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	terbuka hijau (rth)							pekerjaan)	
	Program pengelolaan rumah susun	100%	5	4.500.000.000	3.932.355.306	sesuai	baik	-	-
	Program pengembangan perumahan	100%	11	300.000.000	282.202.330	sesuai	baik	-	
	Program lingkungan sehat perumahan	73%	9	5.632.576.250	3.616.656.956	sesuai	baik	1 paket tidak dilaksanakan karena waktu tdk mencukupi	-
	Program penanggulangan kemiskinan terpadu bidang perumahan dan permukiman	100%		211.060.000	190.273.890			-	

6. kepemudaan dan olahraga
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan peran serta kepemudaan								
	Pelaksanaan jambore pemuda daerah,jambore pemuda indonesia (jumlah pameran)	1	37	200.000.000	173.394.500	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Jumlah pemuda yang mengikuti jpd dan jpi (orang)	8	37			sesuai	baik	tidak ada	
	Peringatan hari sumpah pemuda (jumlah peserta yang mengikuti upacara hari sumpah pemuda /orang)	1000	37	350.000.000	309.969.662	sesuai	baik	tidak ada	
	Pemilihan pemuda pelopor	4	37	90.000.000	61.497.920	sesuai	baik	tidak ada	
	Pelatihan calon anggota paskibraka Kota Balikpapan (jumlah anggota paskibraka yang terpilih/orang)	44	37	1.400.000.000	1.362.604.363	sesuai	baik	tidak ada	
	Sosialisasi kewirausahaan pemuda (jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi /orang)	200	37	100.000.000	79.635.790	sesuai	baik	tidak ada	
	Pelatihan kewirausahaan pemuda bidang teknologi, informasi dan industri kreatif (jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/orang)	100	37	100.000.000	86.537.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Pengembangan media kie (komunikasi, informasi dan edukasi) kepemudaan (jumlah media kie kepemudaan /media)	100	37			sesuai	baik	tidak ada	
	Pelatihan wirausaha muda berwawasan lingkungan (jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/orang)	0	37	100.000.000	56.484.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Fasilitasi bhakti sosial organisasi pemuda peduli masyarakat	1500	37	75.000.000	73.467.000	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	(jumlah organisasi dan pramuka yang aktif dalam kemasyarakatn (orang)								
	Pembinaan kepemudaan Kota Balikpapan(jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/orang)	600	37	100.000.000	96.265.800	sesuai	baik	tidak ada	
	Pelatihan kader pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda (jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	275	37	100.000.000	96.762.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga								
	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi(jumlah atlet dan pelatih berprestasi yang menerima penghargaan /orang)	600	37	9.960.000.000	9.952.360.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga (sidia) (tersedianya aplikasi pendataan atlet olah raga dan pengembangan/pemeliharaannya (aplikasi)	1	37	44.500.000	43.953.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyelenggaraan pertandingan sepak bola (jumlah atlet yang mengikuti pertandingan (atlet)	270	37	2.357.630.000	1.959.051.324	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Turnamen bulu tangkis Kota Balikpapan (jumlah atlet yang mengikuti lomba /atlet)	500	37	197.500.000	196.278.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyelenggaraan kejuaraan tennis (jumlah atlet yang mengikuti lomba (atlet)	150	37	167.400.000	152.316.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyelelenggaraan hari olahraga nasional (haornas) (jumlah peserta yang mengikuti haornas /orang)	700	37	100.000.000	54.755.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Manajemen pembibitan atlet Kota Balikpapan (jumlat atlet dan pelatih yang mengikuti pelatihan (orang)	120	37	100.000.000	87.995.600	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyelenggaraan lomba perahu naga (jumlah atlet yang mengikuti lomba (atlet)	200	37	225.000.000	213.620.640	sesuai	baik	tidak ada	
	Pengembangan dan pembinaan olahraga rekreasi dan masyarakat (jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan /orang)	250	37	559.775.000	403.888.969	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyelenggaran pertandingan renang (jumlah atlet yang mengikuti lomba /atlet)	200	37	197.790.000	94.415.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyelenggaraan pertandingan beladiri (jumlah atlet yang mengikuti lomba (atlet)	200	37	52.950.000	52.950.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Kompetisi olahraga difabel (npc) (jumlah atlet yang mengikuti	100	37	200.000.000	186.525.600	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	lomba (atlet)								
	Penyelenggaraan senam massal lansia (jumlah atlet yang mengikuti lomba (atlet)	210	37	50.000.000	35.527.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Pendataan olahraga masyarakat (jumlah club dan atlet yang terdata (orang	125	37	25.000.000	5.750.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan (jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	100	37	75.000.000	68.832.160	sesuai	baik	tidak ada	
	Festival perahu hias dan lomba senam kesehatan jasmani dalam rangka hari jadi Kota Balikpapan (jumlah peserta yang mengikuti perlombaan /orang)	250	37	125.000.000	118.077.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga								
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga (jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara (venue)	2	37	2.607.000.000	2.495.496.270	sesuai	baik	tidak ada	

7. penanaman modal
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3,750 T	8 Orang (PNS:7 Orang; Non PNS : 1 Orang)	66.097.000	53.105.500	Renstra, Usulan Musrenbang, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	Baik	-	-
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	41,25%	15 Orang (PNS:10 Orang; Non PNS : 5 Orang)	547.300.000	508.782.900	Renstra, Usulan Musrenbang, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	Baik	-	-
3	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	88, 356%	47 Orang (PNS:28 Orang; Non PNS : 19 Orang)	500.000.000	471.295.400	Renstra, Usulan Musrenbang, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	Baik	-	-
4	Program Pengawasan Pengendalian Investasi dan Perizinan	644	8 Orang (PNS:7 Orang; Non PNS : 1 Orang)	50.000.000	49.400.000	Renstra, Usulan Musrenbang, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	Baik	-	-

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88%	23 Orang (PNS : 13 Orang, Non PNS : 10 Orang)	2.218.765.000	1.921.215.700	Renstra, Usulan Musrenbang, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	Baik	-	-
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

8. Koperasi dan UKM

perangkat daerah penyelenggara: Dinas Koperasi Umkm dan Perindustrian

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	100%	5 orang	105.000.000	102.243.640	- Renja - RKA - DPA	kurang	'- SDM (staf) masih kurang - sarana operasional yang tidak memadai, seperti komputer, printer, jaringan / server wifi yang sering mengalami gangguan serta mobil	perlunya penambahan staf serta perbaikan dan/atau penambahan sarana

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pengembangan dan pemberdayaan koperasi							operasional sering mengalami kerusakan	operasional untuk menunjang kinerja
	- Kegiatan pengawasan dan pengendalian koperasi	100%	3 orang	71.500.000	57.730.335	- Renja - RKA - DPA	kurang		
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah								
	- Kegiatan temu kemitraan usaha mikro kecil dan menengah	100%	10 orang	97.284.500	95.624.500	- Renja - RKA - DPA	cukup	perlunya jaringan wifi yang memadai untuk memenuhi tuntutan pekerjaan	perlunya perbaikan jaringan wifi
	Program penciptaan iklim usaha umkm yang kondusif								
	- Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM umkm	100%	4 orang	53.000.000	50.773.250	- Renja - RKA - DPA	cukup		
	Program pelayanan administrasi perkantoran								
	- Penyediaan jasa surat menyurat	87,50%	5 orang	5.000.000	4.725.000	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	5 orang	173.098.000	91.159.782	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penyediaan jasa pemeliharan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	27%	5 orang	22.000.000	11.048.800	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00%	3 orang	209.432.000	208.626.602	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan alat tulis kantor	100,00%	5 orang	119.620.700	117.638.500	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00%	5 orang	75.000.000	73.639.600	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00%	5 orang	10.000.000	9.899.700	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan makanan dan minuman	90%	54 orang	75.500.000	61.857.675	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	100%	54 orang	430.000.000	425.293.186	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	95,00%	5 orang	299.098.000	263.319.362	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	Program peningkatan sarana dan								

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	prasarana aparatur								
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	5 orang	14	140.871.500	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	6 orang	75.000.000	75.000.000	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Pemeliharaan rutin/berkala- -- perlengkapan gedung kantor	100%	6 orang	11.047.300	9.900.000	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	98,17%	6 orang	80.000.000	67.923.820	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
	- Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai	61,67%	6 orang	14.000.000	8.300.000	- Renja - RKA - DPA	lengkap	tidak ada	tidak ada

9. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		35 orang pns, 37 orang non pns	2.553.315.500	2.343.796.803	sesuai	lengkap dan baik	-	-
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		35 orang pns, 37 orang non pns	514.991.300	435.016.522	sesuai	lengkap dan baik	-	-
3	Program peningkatan disiplin aparatur		35 orang pns, 37 orang non pns	19.117.000	18.326.000	sesuai	lengkap dan baik	-	-
4	Program penataan administrasi kependudukan		35 orang pns, 37 orang non pns	2.306.171.000	2.252.399.279	sesuai	lengkap dan baik		

10. ketenagakerjaan
perangkat daerah penyelenggara: dinas ketenagakerjaan

no	Program/kegiatan	tingkat capaian spm / realisasi program	jumlah pegawai	alokasi & realisasi anggaran		kesesuaian perencanaan pembangunan	kondisi sarpras	masalah & solusi	lain-lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja**	**80%**		**614.183.500**	**551.161.783**	**sesuai**	**cukup**		
	- Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja			563.443.500	512.260.183				
	- Kegiatan penyelenggaraan pemagangan			32.280.000	21.275.000				
	- Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja (lpk) **Program peningkatan kesempatan kerja**	**22%**		18.460.000 **171.349.000**	17.626.600 **158.114.500**	**sesuai**	**cukup**		
	- Kegiatan pelayanan antar kerja			141.609.000	130.661.500				
	- Kegiatan perluasan kesempatan kerja			29.740.000	27.453.000				
	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	**50%**		**104.805.000**	**66.986.500**	**sesuai**	**cukup**		

no	Program/kegiatan	tingkat capaian spm / realisasi program	jumlah pegawai	alokasi & realisasi anggaran		kesesuaian perencanaan pembangunan	kondisi sarpras	masalah & solusi	lain-lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Kegiatan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial			25.925.000	22.631.500				
	- Kegiatan pengendalian dan koordinasi dewan pengupahan dalam penetapan umk			17.875.000	14.650.000				
	- Kegiatan pembinaan pengaturan syarat kerja			47.700.000	16.400.000				
	- Kegiatan pemasyarakatan hubungan industrial			13.305.000	13.305.000				

11. Pangan

perangkat daerah penyelenggara: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pelayanan administrasi perkantoran							**Program pelayanan administrasi perkantoran**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	36,14%	2	11.000.000	3.062.500	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan jasa surat menyurat	36,14%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%	2	1.234.200.000	453.051.991	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,0%	3	68.000.000	27.471.500	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,0%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,0%	4	233.255.000	228.728.813	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,0%
	Penyediaan alat tulis kantor	100,0%	2	94.075.000	70.488.550	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan alat tulis kantor	100,0%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,0%	2	82.200.000	68.400.090	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,0%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,0%	2	80.200.000	73.582.381	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,0%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	100,0%	2	28.080.000	16.472.000	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	100,0%

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
	Penyediaan makanan dan minuman	100,0%	2	325.600.000	285.329.500	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan makanan dan minuman	100,0%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam & luar daerah	100,0%	70	375.000.000	374.693.686	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam & luar daerah	100,0%
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	100,0%	65	1.135.388.000	756.002.155	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	100,0%
	Penyediaan jasa keamanan kantor	100,0%	4	200.000.000	198.976.661	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Penyediaan jasa keamanan kantor	100,0%
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**							**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,0%	2	140.000.000	132.651.200	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,0%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,0%	2	284.080.000	254.300.800	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,0%
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100,0%	2	199.974.500	194.260.797	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100,0%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,0%	3	379.176.600	130.507.872	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,0%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	76,5%	3	90.825.000	42.318.539	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	76,5%

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
	Program peningkatan disiplin aparatur							**Program peningkatan disiplin aparatur**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapnannya	100%	81	53.300.000	49.005.000	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapnannya	100%
	Program peningkatan diversfikasi dan ketahanan pangan masyarakat							**Program peningkatan diversfikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	
	Pembinaan dan pengembangan pangan lokal	93%	4	60.000.000	47.120.825	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pembinaan dan pengembangan pangan lokal	93%
	Analisa data pangan	100%	4	135.935.000	95.596.068	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Analisa data pangan	100%
	Pengembangan persediaan pangan dan distribusi pangan	94,68%		250.000.000	204.255.199	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pengembangan persediaan pangan dan distribusi pangan	94,68%
	Pengawasan keamanan pangan	99%		200.000.000	192.700.860	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pengawasan keamanan pangan	99%
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian		2					**Program pemberdayaan penyuluh pertanian**	
	Dukungan operasional balai penyuluhan pertanian (bpp) pendampingan petani dan pelaku agribisnis	99%	2	299.000.000	248.998.951	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Dukungan operasional balai penyuluhan pertanian (bpp) pendampingan petani dan pelaku agribisnis	99%

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
	Pekan daerah (peda) ktna	96,88%	2	799.700.000	764.119.947	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik	Pekan daerah (peda) ktna	96,88%

12. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

perangkat daerah penyelenggara:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**	**104,65%**	**41 orang terdiri dari pns 19 orang dan non pns 22 orang**	**2.766.030.000**	**2.103.457.797**	**DPA tahun 2019**	cukup namun kondisi kendaraan operasional (r4) sangat memprihatinkan (kendaraan tua/tidak tersedia dana)	masalah : penguatan kapasitas keluarga dalam hal pola asuh anak dan remaja sangat minim ketersediaan dananya untuk melakukan penjangkauan penyuluhan sampai ke tingkat rt setiap tahunnya	
	- Perlindungan anak			72.600.000	61.894.358	**DPA tahun 2019**			
	- Komunikasi informasi edukasi (kie) perlindungan anak			259.298.000	252.524.640	**DPA tahun 2019**			
	- Pendataan, evaluasi, pelaporan dan penguatan sistem perlindungan anak			243.147.000	219.737.559	**DPA tahun 2019**			

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Operasional UPTD perlindungan perempuan dan anak			1.243.787.000	734.082.915	**DPA tahun 2019**		solusi : menjalin kerjasama dengan kelembagaan masyarakat peduli perempuan dan anak (seksi ppa tingkat rt)	
	- Perlindungan perempuan			645.000.000	565.515.725	**DPA tahun 2019**			
	- Komunikasi informasi edukasi (kie) perlindungan perempuan			302.198.000	269.702.600	**DPA tahun 2019**			
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	**97,57%**		**282.500.000**	**237.384.210,00**	**DPA tahun 2019**	cukup namun kondisi kendaraan operasional (r4) sangat memprihatinkan (kendaraan tua/tidak tersedia dana)	solusi : menjalin kerjasama dengan kelembagaan masyarakat peduli perempuan dan anak (seksi ppa tingkat rt)	
	- Pemberdayaan potensi perempuan			282.500.000	237.384.210,00	**DPA tahun 2019**			
	Program pelayanan admnistrasi perkantoran	**100%**		**1.197.496.000**	**1.080.577.422**	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			45.000.000	20.655.997,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			19.968.000	17.686.500,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor			11.000.000	10.507.310,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Penyediaan alat tulis kantor			110.000.000	91.723.857,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			88.870.000	82.485.260,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Penyediaan makanan dan minuman			147.030.000	123.864.200,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah			459.260.000	450.990.843,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran			316.368.000	282.663.455,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	Program peningkatan sarana dan prasana aparatur	**100%**		**475.700.000**	**360.319.428**	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor			11.000.000	10.285.000,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Pengadaan peralatan gedung kantor			125.000.000	121.123.150,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			125.000.000	99.084.137,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		
	- Pemeliharaan rutin /berkalakendaraan			150.000.000	90.238.141,00	**DPA tahun**	**cukup**		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dinas/operasional					**2019**			
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			64.700.000	39.589.000,00	**DPA tahun 2019**	**cukup**		

13. pengendalian penduduk dan keluarga berencana

perangkat daerah penyelenggara:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program keluarga berencana**	**139,63%**	47 orang terdiri dari pns 42 orang dan non pns 5 orang	**3.387.163.000**	**3.103.776.860**	**DPA tahun 2019**	cukup namun tidak dudukung/tidak tersedia kendaraan operasional (r4) untuk pembinaan di lapangan	masalah : kategori sasaran unmet need masih didominasi oleh permasalahan pemahaman agama yang masih antipati terhadap program kb	
	Penyuluhan dan pergerakan pus ber-kb			579.152.000	510.699.717	DPA tahun 2019			
	Penjaminan kualitas layanan kb			179.800.000	157.612.700	DPA tahun 2019		solusi : meningkatkan kunjungan ke lapangan oleh para pkb untuk mengintensifkan penyuluhan kb bagi kelompok sasaran unmet need	
	Pencatatan, pelaporan evaluasi sistem informasi keluarga dan ketahanan keluarga			180.000.000	177.585.688	DPA tahun 2019			

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan sarana dan prasarana keluaga berencana (DAK 2019)			1.256.250.000	1.148.796.000	DPA tahun 2019			
	Operasional balai penyuluhan dan kampung kb (DAK non fisik 2019)			1.191.961.000	1.109.082.755	DPA tahun 2019			
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr	**117,54%**	**47 orang terdiri dari pns 42 orang dan non pns 5 orang**	**214.097.500**	**194.044.768**	**DPA tahun 2019**	cukup namun tidak dudukung/tidak tersedia kendaraan operasional (r4) untuk pembinaan di lapangan	masalah : minimnya ketersediaan modul-modul pembinaan bagi seluruh pik-r dan saka kencana dirasakan masih minim termasuk kualitas SDM para pembina pik-r dan saka kencana	
	Pembinaan pergerakan partisipasi remaja			214.097.500	194.044.768	DPA tahun 2019		solusi : melaksanakan penguatan kapasitas pik-r dan saka kencana termasuk pembinanya melalui pengadaan modul-modul pembinaan pik-r dan saka kencana	
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	**110,50%**		**556.203.000**	**494.949.997**	**DPA tahun 2019**		masalah : minimnya ketersediaan modul-modul pembinaan bagi seluruh poktan dirasakan masih minim termasuk kualitas SDM para pembina poktan/imp	
	Pembinaan ketahanan ekonomi keluarga			64.098.000	56.656.850	DPA tahun 2019		solusi : melaksanakan penguatan kapasitas poktan dan imp termasuk pembinanya melalui pengadaan modul-modul pembinaan poktan/imp	
	Pemberdayaan keluarga melalui peringatan hari keluarga			150.000.000	133.189.767	DPA tahun 2019			

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Optimalisasi layanan penyuluh kb tingkat Kecamatan			150.000.000	138.653.900	DPA tahun 2019			
	Pembinaan ketahanan keluarga pendayagunaan kelompok kegiatan/imp			192.105.000	192.105.000	DPA tahun 2019			

14. Perhubungan perangkat daerah penyelnngara:Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	lain-lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	program pelayanan administrasi perkantoran	93.15%	223	4.992.597.000	4.650.290.072,20	sesuai	lengkap	-	-
	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	86.50%	223	5.707.000.000	4.936.740.660	sesuai	lengkap	-	-
	program peningkatan disiplin aparatur	94.57%	223	809.365.000	765.422.900	sesuai	lengkap	-	-
	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj	92.08%	8	1.375.000.000	1.206.093.171,04	sesuai	lengkap	-	-
	program pengawasan dan	97.67%	97	472.126.000	461.106.000	sesuai	lengkap	-	-

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	lain-lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengendalian lalu lintas								
	program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	98.01%	25	1.400.000.000	1.372.196.446,75	sesuai	lengkap	-	-
	program penerangan jalan umum (pju)	87.24%	22	34.000.000.000	29.662.467.038	sesuai	lengkap	-	-
	program pengelolaan parkir	91.47%	22	4.080.000.000	3.731.794.556,03	sesuai	lengkap	-	-
	program pelayanan angkutan perairan	98.74%	6	605.000.000	646.755.450,18	sesuai	lengkap	-	-
	program pengembangan data, informasi perhubungan/transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas	95.06%	5	700.000.000	665.450.000	sesuai	lengkap	-	-
	program pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	93.18%	12	865.000.000	806.010.548,30	sesuai	lengkap	-	-
	program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	99.09%	18	680.000.000	673.832.074,23	sesuai	lengkap	-	-
	program pengawasan dan pengendalian angkutan jalan	93.17%	70	768.795.000	716.265.000	sesuai	lengkap	-	-

15. komunikasi dan informatika
perangkat daerah penyelenggara: dinas komunikasi dan informatika

no	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	100%	8	5.215.443.500	4.755.805.836	sesuai	cukup	tempat kurang representatif, pengadaan gedung/ bangunan untuk lpse pada khususnya dan diskominfo pada umumnya	pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai tik dan bimtek/diklat SDM terkait tik

16. penataan ruang
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program perencanaan tata ruang**								
	Revisi rtrw Kota Balikpapan 2017 - 2037 dan percepatan perda rdtr Kota balikapan	75%	10 orang	271.900.000	198.718.039	Renja, RKA dan DPA	cukup	RDTR : harus menyesuaikan dengan permen yang baru RTRW : belum ada penyusunan dok. klhs	
2	**Program pengendalian pemanfaatan ruang**								

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	100%	10 orang	50.000.000	22.111.300	Renja, RKA dan DPA	cukup	-	
	Operasional tim ahli bangunan gedung Kota Balikpapan	100%	10 orang	200.000.000	188.410.900	Renja, RKA dan DPA	cukup	terbatasnya konsultan manajemen konstruksi di bpp yang berkompeten sebagai pendamping pemohon slf	
	Penertiban bangunan umum dan pemanfaatan ruang	70%	10 orang	117.000.000	56.155.160	Renja, RKA dan DPA	kurang	-	
	Pengawasan bangunan umum dan pemanfaatan ruang	70%	10 orang	185.700.000	135.020.000	Renja, RKA dan DPA	kurang	-	

17. pertanahan
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**								
	Peninjauan lokasi pengukuran dan penerbitan izin membuka tanah negara	95%	10 orang	386.737.900	269.225.680	Renja, RKA danDPA	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Entri data sistem informasi pertanahan	97%	6 orang	97.550.000	79.325.000	Renja, RKA danDPA	baik		
	Fasilitasi permasalahan pertanahan	100%	6 orang	45.000.000	40.351.410	Renja, RKA danDPA	kurang		
2	**Program pengadaan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku**								
	Pembebasan lahan teritip (tahap ii)	100%	25 orang	24.300.000.000	22.806.907.834	Renja, RKA danDPA	cukup		
	Pembebasan lahan aji raden	70%	25 orang	17.960.000.000	4.781.231.679	Renja, RKA danDPA	cukup		
3	**Program pengadaan lahan pembangunan jalan dan jembatan**								
	Pengadaan jalan untuk pelebaran jalan letjen suprapto	75%	20 orang	4.000.000.000	59.910.750	Renja, RKA danDPA	cukup		
4	**Program pengadaan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum**								
	Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana umum institut teknologi kalimantan (itk)	45%	20 orang	594.850.000	96.563.770	Renja, RKA danDPA	cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembebasan lahan untuk ketertiban Kota	80%	25 orang	6.400.000.000	4.918.076.315	Renja, RKA danDPA	cukup		
	Pembayaran ganti rugi taman bekapai	100%	25 orang	7.500.000.000	7.174.173.799	Renja, RKA danDPA	cukup		
	Pembayaran ganti rugi sewa eks pelabuhan somber	100%	10 orang	1.864.989.500	1.864.989.491,2	Renja, RKA danDPA	cukup		
	Pembayaran ganti rugi cemara rindang	100%	10 orang	15.000.000.000	14.938.035.300	Renja, RKA danDPA	cukup		

18. Pemberdayaan masyarakat dan desa
perangkat daerah penyelenggara: Bagian Pemerintahan & Bagian Kesejahteraaan Rakyat

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian pemerintahan									
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dan Kecamatan		2			Renja, RKA, DPA		tidak ada masalah	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Kegiatan rakor, orientasi dan pembinaan manajemen pemerintahan Kecamatan dan kelurahan tingkat Kota Balikpapan		1	265.000.000,00	250.058.330,00	Renja, RKA, DPA	lengkap	tidak ada masalah	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan		2			Renja, RKA, DPA		tidak ada masalah	
	Kegiatan pelaksanaan bbgrm dan penilaian kelurahan terbaik tingkat Kota Balikpapan		1	265.653.000,00	229.151.810,00	Renja, RKA, DPA	lengkap	tidak ada masalah	
Bagian kesejahteraan rakyat									
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	**100%**		**456.473.800**	**358.698.210**				
	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui peran mahasiswa kuliah nyata (kkn)	100%	2	145.000.000	133.327.800	sesuai	baik		
	Pembinaan posyandu	100%	2	311.473.800	225.370.410	sesuai	cukup		

19. sosial
perangkat daerah penyelenggara:Dinas Sosial

No	Program/kegiatan	Tingkat	Jumlah	Alokasi & Realisasi Anggaran	Kesesuaian	Kondisi	Masalah & Solusi	Lain-Lain

		Capaian Spm / Realisasi Program	Pegawai	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perencanaan Pembangunan	Sarpras		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial								
	- Pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan perlindungan korban	73,68%	2 orang	508.961.700	315.709.046	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pembinaan pendayagunaan bagi penyandang disabilitas	100,00%	2 orang	250.000.000	244.446.967	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pelayanan tuna sosial dan ktk	76,97%	2 orang	1.246.110.000	959.153.932	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pembinaan lanjut usia	2,39%	2 orang	160.000.000	159.986.300	DPA	cukup	tidak ada	-
	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial								
	- Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (psks)	100,00%	2 orang	635.100.000	628.910.900	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial (lks)	0,00%	2 orang	54.706.500	63.977.346	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	100,00%	2 orang	250.000.000	209.858.898	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Fasilitasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial	100,00%	2 orang	25.000.000	23.750.200	DPA	cukup	tidak ada	-
3	- Penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial	100,00%	2 orang	25.000.000	24.900.000	DPA	cukup	tidak ada	-

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan data dan informasi								
	- Pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial	100,00%	2 orang	50.000.000	46.500.000	DPA	cukup	tidak ada	-
4	**Penanggulangan kemiskinan terpadu**								
	- Pembinaan kelompok usaha bersama (kube)	100,00%	5 orang	30.000.000	28.874.800	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pengelolaan data pmks miskin penerima program penanggulangan kemiskinan	100,00%	5 orang	918.000.000	860.018.147	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pembinaan wanita rawan sosial ekonomi	100,00%	2 orang	20.000.000	15.959.900	DPA	cukup	tidak ada	-
	Perlindungan dan jaminan sosial								
	- Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (pkh)	100,00%	2 orang	400.000.000	340.843.479	DPA	cukup	tidak ada	-
	- Pelayanan korban bencana	100,00%	2 orang	207.000.000	161.564.538	DPA	cukup	tidak ada	-
	Sarana dan prasarana logistik								
	- Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana	100%	2 orang	100.000.000	97.714.000	DPA	cukup	tidak ada	-
	Penanggulangan kemiskinan								

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bidang ketahanan pangan								
	- Operasional penyaluran rastra/bpnt	100%	5 orang	50.000.000	46.674.550	DPA	cukup	tidak ada	-

20. kebudayaan
perangkat daerah penyelenggara:Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pengelolaan keragaman budaya	**100,00**	5	**3.139.577.500,00**	**2.538.226.613,00**	perencanaan pembangunan berdasarkanRenja, RKA, DPA	baik		
	Pesta rakyat dan pawai budaya dalam rangka hari jadi Kota Balikpapan	100,00		294.500.000,00	269.893.700,00				
	Pagelaran kesenian pada syukuran peringatan hari jadi Kota Balikpapan dan hut republik indonesia	100,00		135.000.000,00	133.746.150,00				
	Fasilitasi pertunjukan kesenian tradisional Kota Balikpapan	100,00		410.500.000,00	402.972.602,00				

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Pembinaan pramuka saka widya budaya bhakti	100,00		50.000.000,00	15.372.000,00				
	Pentas seni agama islam (pai) tingkat SD/smp	100,00		125.000.000,00	82.221.756,00				
	Lomba sekolah sehat (lss)	100,00		75.000.000,00	53.399.800,00				
	Olympiade olahraga siswa nasional (o2sn) tingkat SD dan SMP	100,00		150.000.000,00	141.002.581,00				
	Festival lomba seni siswa nasional (fls2n) tingkat SD dan SMP	100,00		150.000.000,00	117.126.700,00				
	Pembinaan seni budaya di Kota Balikpapan	100,00		100.000.000,00	99.944.200,00				
	Pengembangan olahraga tradisional di sekolah	100,00		100.000.000,00	90.041.900,00				
	Pemeliharaan sarana prasarana pengembangan seni dan olahraga di sekolah	100,00		269.577.500,00	248.931.250,00				
	Fasilitasi kegiatan kesenian dan olahraga tradisional	100,00		630.000.000,00	429.917.350,00				
	Liga sepak bola SMP berkelanjutan tingkat Kota, propinsi dan nasional	100,00		500.000.000,00	424.875.331,00				
	Pekan olahraga pelajar nasional (popnas)	100,00		150.000.000,00	28.781.293,00				

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Program pelestarian benda cagar budaya	**99,60**	5	**1.730.040.000,00**	**1.586.081.459,00**				
	Operasional juru pelihara benda cagar budaya	100,00		663.000.000,00	635.962.306,00				
	Registrasi dan pelestarian cagar budaya Kota Balikpapan	100,00		90.000.000,00	57.420.000,00				
	Promosi dan pengembangan cagar budaya dan museum	100,00		149.040.000,00	111.584.159,00				
	Pemeliharaan dan rehabilitasi cagar budaya dan museum	100,00		478.000.000,00	463.275.300,00				
	Lawatan sejarah cagar budaya dan museum	97,20		250.000.000,00	228.372.248,00				
	Pembuatan brosur informasi tentang cagar budaya dan permuseuman	100,00		100.000.000,00	89.467.446,00				

21. statistik

perangkat daerah penyelenggara: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22. kearsipan
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	program perbaikan sistem administrasi kearsipan	100%	15 orang	297.500.000	270.698.070	Renstra, Renja, RKA, DPA, perjanjian kinerja	cukup	tidak ada	tidak ada
2	program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100%	15 orang	335.000.000	309.930.569	Renstra, Renja, RKA, DPA, perjanjian kinerja	cukup	tidak ada	tidak ada
3	program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	100%	15 orang	125.000.000	120.032.600	Renstra, Renja, RKA, DPA, perjanjian kinerja	cukup	tidak ada	tidak ada

23. perpustakaan
perangkat daerah penyelenggara: Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100%	16	1.295.155.000	1.154.896.147	Renstra, Renja, RKA, DPA, perjanjian kinerja	cukup	tidak ada	tidak ada
2	program pelayanan administrasi perkantoran	100%	16	2.827.638.700	2.286.061.620	Renstra, Renja, RKA, DPA, perjanjian kinerja	cukup	tidak ada	tidak ada
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	16	1.161.667.300	966.980.778	Renstra, Renja, RKA, DPA, perjanjian kinerja	cukup	tidak ada	tidak ada

b. Ringkasan urusan pilihan

Tabel 3.2.
Ringkasan Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Urusan Perikanan

perangkat daerah penyelenggara : Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**program pengembangan pencatatan kegiatan usaha perikanan**		**3 orang**			sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	penanganan pelayanan pencatatan usaha perikanan	100%	3 orang	64.218.000	61.168.507	sesuai Renja,RKA dan	baik		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
						DPA			
2	**program pengembangan perikanan tangkap**		**2 orang**			sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	operasional tempat pelelangan ikan (tpi)	22,94%	2 orang	607.339.000	135.806.554	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik	rehab dermaga tidak dilakukan karena status asset yang belum jelas	
	pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap	0%	2 orang	-	-	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik	tidak ada proposal permohonan nelayan yang masuk	di nolkan
3	**program peningkatan produksi perikanan**		**2 orang**			sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	pemeliharaan/perawatan/peningkatan fasilitas pelayanan bbi teritip Balikpapan	94,25%	2 orang	193.850.000	185.852.733	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
4	pengembangan/peningkatan/pengelolaan dan operasional balai benih ikan (DAK bidang perikanan)	61,58%	2 orang	1.154.344.000	589.980.775,24	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	program pemberdayaan kelembagaan petani, peternak, nelayan, pembudidaya dan pengolah		**3 orang**						
	pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan	93,43%	3 orang	89.800.000	70.326.500	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	penilaian pokdakan, kub dan poklahsar perikanan	100%	3 orang	75.000.000	59.687.900	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	program pengembangan kapasitas sumberdaya manusia (sdm) masyarakat perikanan								
	pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia (sdm) perikanan	100%	3 orang	123.900.000	100.833.400	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		

2. Pertanian

perangkat daerah penyelenggara: dinas pangan, pertanian dan perikanan

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan dan ternak**		**4 orang**				baik		
	Pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit hewan dan ternak	100%	4 orang	646.100.000	537.099.993	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik		
	Peningkatan sarana prasarana pusat kesehatan hewan	100%	4 orang	201.500.000	160.974.418	sesuai Renstra,Renja,	baik		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	(puskeswan)					RKA			
2	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**		**4 orang**				baik		
	Kegiatan operasional kegiatan inseminasi buatan (ib)	100%	4 orang	200.000.000	180.648.880	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik		
3	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**		**11 orang**				baik		
	Kegiatan peningkatan sarana prasarana rumah potong hewan (rph)	41,30%	8 orang	870.000.000	314.650.474	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik		
	Kegiatan peningkatan sarana prasarana operasional laboratorium kesmavet	69,64%	3 orang	260.639.500	126.491.799	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik		
4	Pengawasan keamanan peredaran produk peternakan	32,59%	3 orang	56.662.000	10.993.400	sesuai Renstra,Renja, RKA			
	Program pemberdayaan kelembagaan petani, peternak, nelayan, pembudidaya dan pengolah								
5	Pembinaan teknis pengolahan dan penganekaragaman pakan ternak	83,33%	2 orang	125.000.000	63.370.600	sesuai Renja,RKA dan DPA			
	Program peningkatan produksi pertanian						baik		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Kegiatan operasional unit pembibitan	67,25%	4 orang	405.350.000	248.119.650	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik		
	Kegiatan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	100%	4 orang	500.000.000	314.857.900	sesuai Renstra,Renja, RKA	baik		
	Kegiatan peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura	80,76%	4 orang	525.000.000	388.323.633	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	Pemanfaatan lahan pekarangan	100%	3 orang	238.740.000	230.621.450	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
6	**Program peningkatan produksi tanaman perkebunan**								
	Pemberdayaan kelembagaan perkebunan	100%	2 orang	97.500.000	65.397.155	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	Intensifikasi tanaman perkebunan	100%	2 orang	150.000.000	134.576.264	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		
	Pengendalian opt gangguan usaha perkebunan	100%	2 orang	125.000.000	101.513.300	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Pelatihan budidaya perkebunan	100%	3 orang	118.500.000	101.118.851	sesuai Renja,RKA dan DPA	baik		

3. Pariwisata

perangkat daerah penyelenggara: Dinas Pemuda, Olaraga dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pelayanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan jasa surat menyurat (jumlah materai dan perangko)	1.080,00	37	7.250.000	6.510.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (jumlah rekening)	15	37	680.000.000	404.488.380	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyedian jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan	14	37	16.500.000	5.307.200	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	dinas/operasional (dokumen)								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor (jasa kebersihan)	9	37	225.400.000	220.710.443	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyedia alat tulis kantor (jenis)	73	37	160.000.000	151.138.050	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan (jenis)	22	37	200.000.000	193.376.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	22	37	65.000.000	46.086.800	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan alat rumah tangga (jenis)	42	37	43.315.500	24.331.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (examplar)	3.156	37	22.000.000	16.860.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan makanan dan minuman (jumlah makan minum rapat, tamu dan harian)	19.551	37	160.000.000	127.995.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Rapat - rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah (jumlah perjalanan dinas ke luar daerah)	71	37	375.000.000	374.529.462	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran (jumlah tenaga bantuan)	23	37	451.477.500	413.579.037	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Penyediaan jasa enginering kantor (jumlah engginering)	1	37	50.000.000	49.304.748	sesuai	baik	tidak ada	
	Penyedian jasa pengamanan kantor (jumlah tenaga pengamanan)	3	37	219.194.400	157.841.600	sesuai	baik	tidak ada	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Pengadaan peralatan gedung kantor (jumlah peralatan gedung)	15	37	410.000.000	372.924.000	sesuai	baik	tidak ada	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	37	135.000.000	-	sesuai	baik	tidak ada	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (jumlah kendaraan dinas)	48	37	125.000.000	101.091.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (jumlah peralatan yang di pelihara)	92	37	100.000.000	98.745.500	sesuai	baik	tidak ada	
	Program pengembangan pemasaran pariwisata								
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar Negeri (jumlah pameran)	3	37	1.660.000.000,00	1.629.409.749,00	sesuai	baik	tidak ada	
	(Jumlah festival)	7	37					tidak ada	
	Opersional Balikpapan tourism board (btb) (jumlah souvenir)	2.648	37	350.000.000,00	350.000.000,00	sesuai	baik	tidak ada	

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	(Jumlah table top)	1	37					tidak ada	
	Cetak brosur informasi pariwisata dan sauvenir (jumlah sovenir dan brosur)	7.683	37	250.000.000,00	249.686.600,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Pemuthakhiran website pariwisata dan operasional tic bandara sepinggan (jumlah sovenir dan brosur)	1.140	37	170.000.000,00	166.104.317,00	sesuai	baik	tidak ada	
	(Jumlah petugas tic)	2	37			sesuai	baik	tidak ada	
	Operasional duta wisata (jumlah duta wisata yang bertugas)	206	37	330.500.000,00	326.234.980,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Pengembangan informasi pariwisata berbasis aplikasi (jumlah aplikasi)	1	37	50.000.000,00	48.326.442,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Pengembangan sadar wisata dan sapta pesona (jumlah penyuluhan)	2	37	100.000.000,00	99.705.240,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Produksi film pariwisata daerah (film promosi pariwisata)	1	37	150.000.000,00	148.863.975,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Program pengembangan destinasi pariwisata								
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (jumlah fasilitas, pembangunan dan pemeliharaan sapras)	1	37	4.512.000.000,00	1.405.854.990,00	sesuai	baik	penyedia lalai dan sudah masuk daftar hitam lkpp januari 2020 serta sedang diproses pengembalian uang jaminan di bank kaltimtara	

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	Program pengembangan kemitraan								
	Pengembangan sumber daya manusia dasn profesionalisme bidang pariwisata (jumlah anggota saka pariwisata)	150	37	100.000.000,00	98.694.650,00	sesuai	baik	tidak ada	
	(Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan)	50	37						
	Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata								
	Pemilihan dan pembinaan putra dan putri duta wisata Kota Balikpapan (jumlah duta wisata)	24	37	200.000.000,00	200.000.000,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Operasional unit pelaksana teknis (upt) pantai manggar segara sari (jumlah petugas kebersihan)	69	37	1.549.800.000,00	1.516.248.721,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Operasional tim pemeriksa lapangan untuk penerbitan rekomendasi izin usaha pariwisata (jumlah usaha pariwisata yang terdaftar rekomendasi)	150	37	30.000.000,00	24.761.250,00	sesuai	baik	tidak ada	
	Pengamanan pantai manggar pada hari besar/libur nasional (jumlah hari pengamanan hari libur/hari besar)	16	37	225.000.000,00	223.504.800,00	sesuai	baik	tidak ada	

4. perindustrian

perangkat daerah penyelenggara: Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pengembangan industri kecil menengah								
	- Kegiatan fasilitasi kepemilikan sertifikat merk, hak cipta, dan label halal	97%	3 orang	50.000.000	44.709.800	- Renja - RKA - DPA	cukup		
	- Kegiatan pengembangan dan pembinaan industri kreatif	62%	6 orang	500.000.000	399.884.464	- Renja - RKA - DPA	kurang		
	- Kegiatan penyertaan promosi dan partisipasi industri kecil menengah (dekranasda)	100%	25 orang	616.405.100	560.646.778	- Renja - RKA - DPA	lengkap		
	- Kegiatan pelatihan aneka usaha ikm	100%	3 orang	50.000.000	46.870.000	- Renja - RKA - DPA	cukup		
	- Kegiatan pengawasan pengendalian tdi & iui	88%	7 orang	36.162.400	22.393.515	- Renja - RKA - DPA	cukup		
	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi								
	- Kegiatan pemutakhiran teknologi Kota Balikpapan	90%	95 orang	55.000.000	46.443.645	- Renja - RKA - DPA	cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program penataan struktur industri								
	- Kegiatan operasional upt sentra industri kecil somber (siks)	96%	6 orang	108.000.000	85.238.158	- Renja - RKA - DPA			
	- Kegiatan operasional upt sentra industri kecil teritip (sikt)	89,17%	6 orang	300.000.000	208.009.858	- Renja - RKA - DPA			
	- Pengembangan sentra industri kecil (bantuan keuangan provinsi 2019)	89,17%	6 orang	1.000.000.000	777.958.229	- RKA - DPA			
	- Kegiatan pembangunan dan pengembangan sentra industri kecil somber (siks)	85%	6 orang	1.900.000.000	517.301.750	- Renja - RKA - DPA			
	- Kegiatan pembangunan dan pengembangan sentra industri kecil somber (siks) DAK 2019	99%	6 orang	5.500.000.000	4.184.167.042	- RKA - DPA			
	- Pembangunan sentra industri kecil teritip (sikt) (DAK tahun 2019)	73,83%	5 orang	14.075.748.000	9.140.375.379	- RKA - DPA			

5. perdagangan

perangkat daerah penyelenggara: Dinas Perdagangan

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**								
	- Kegiatan pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri		6	156.000.000,00	149.684.354,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	- Kegiatan pengembangan misi dagang,kontrak dagang, promosi dan pameran dalam dan luar		13	224.000.000,00	214.109.260,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
2	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**								
	- Kegiatan peningkatan pengawasan barang perdagangan		12	132.500.000,00	86.217.300,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	- Kegiatan operasional upt kemetrologian		16	200.000.000,00	183.682.874,77	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	- Kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana kemetrologian		7	580.000.000,00	570.420.690,80	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								
	- Kegiatan peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga bahan pokok strategis serta partisipasi		42	342.500.000,00	327.951.542,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pasar lelang								
	- Pengembangan pokok dalam negeri, perijinan usaha dan kemitraan perdagangan		7	140.000.000,00	122.426.620,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	Program peningkatan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar								
	- Kegiatan penanganan sampah penunjang kebersihan pasar		66	2.219.978.708,00	2.132.375.434,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	- Kegiatan pelaksanaan pengamanan, penertiban dan kebersihan pasar		62	2.675.178.856,00	2.591.828.182,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana pasar								
	- Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar		12	1.089.749.063,00	1.082.415.475,58	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	Program peningkatan sarana dan prasarana pasar								
	- Kegiatanpeningkatan sarana dan prasarana pasar pandansari (ex kebakaran)		5	10.000.000.000,00	8.835.235.403,26	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	- Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar		5	125.000.000,00	49.746.144,70	sesuai	cukup	tidak ada masalah	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar basah sepinggan (DAK perdagangan th 2019)		5	1.625.959.000,00	1.156.342.800,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	
	Program pengembangan potensi dan pengembangan								
	- Kegiatan pengembangan potensi pasar		34	449.256.000,00	436.070.025,00	sesuai	cukup	tidak ada masalah	

6. transmigrasi

perangkat daerah penyelenggara: -

no	program/kegiatan	tingkat capaian spm / realisasi program	jumlah pegawai	alokasi & realisasi anggaran		kesesuaian perencanaan pembangunan	kondisi sarpras	masalah & solusi	lain-lain
				alokasi (rp)	realisasi (rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nihil								

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

tabel 3.3.
Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang Dilaksanakan

Fungsi penunjang urusan pemeerintahan daerah (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya)

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian administrasi pembangunan									
1	**Program pengembangan sistem pelaporan** - **Kegiatan operasional tim simontepra kota balikpapan**		140 orang	411.000.000	401.070.070	sesuai	baik	- masalah : data induk menggunakan data dari sirup sehingga data seringkali mengalami perubahan yang menyulitkan tim sekretariat dalam memvalidasi data - solusi : data induk	nihil

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								menggunakan sipkd dari aplikasi bpkd dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengembang aplikasi simontepra	
2	**Program pengembangan sistem pelaporan** - **Kegiatan perasional tim simontepra kota balikpapan**		20 orang	270.000.000	253.657.840	sesuai	baik	- masalah : beberapa pekerjaan fisik melewati masa waktu pelaksanaan pekerjaan. - solusi : diperlukan bimtek manajemen kontrak kepada pengelola kegiatan OPD	nihil
3	**Program pengembangan sistem pelaporan** **Kegiatan verifikasi pemeliharaan infrastruktur**		23 orang	47.500.000	45.045.050	sesuai	baik	- 'masalah : beberapa usulan tidak sesuai dengan kriteria pemeliharaan sesuai perwali no.05 tahun 2013 - solusi : diperlukan edukasi kepada pihak pengusul	nihil

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								bahwa usulan pemeliharan harus memenuhi kriteria pemeliharaan	
Bagian kesejahteraan rakyat									
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat			**1.824.472.000**	**1.731.658.525**				
	Kegiatan penguatan peran pkk melalui fungsi kesekretariatan tp. Pkk kota	100%	2	672.072.000	609.905.009	sesuai	baik		
	Kegiatan penguatan peran pkk dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pokja i	100%	2	160.000.000	153.410.520	sesuai	baik		
	Kegiatan penguatan peran pkk dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pokja ii	100%	2	180.000.000	175.447.750	sesuai	baik		
	Kegiatan penguatan peran pkk dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pokja iii	100%	2	205.000.000	199.084.780	sesuai	baik		
	Kegiatan penguatan peran pkk dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pokja iv	100%	2	205.000.000	198.838.120	sesuai	baik		
	Kegiatan fasilitasi kegiatan dharma wanita persatuan Kota Balikpapan	100%	2	402.400.000	394.972.346	sesuai	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian umum									
	Program penyediaan administrasi perkantoran		2	133.000.000,00	110.457.600,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2	200.000.000,00	198.254.758,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		2	1.000.000.000,00	991.842.000,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan alat tulis kantor		2	10.750.000.000,00	10.648.686.559,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2	10.500.000.000,00	10.366.393.759,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan makanan dan minuman		2	3.000.000.000,00	2.902.641.115,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		2	3.500.000.000,00	3.297.298.804,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa keamanan kantor		2	750.000.000,00	644.008.540,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa kebersihan dan pemeliharaan taman kantor					Renja, RKA, DPA			
	Penyediaan jasa kebersihan dan pemeliharaan taman rumah jabatan		2	4.965.000.000,00	3.972.570.000,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur		2	750.000.000,00	516.266.300,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Pengadaan kendaraan		2	1.200.000.000,00	894.788.396,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dinas/operasional								
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		2	3.000.000.000,00	1.995.419.719,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	6.219.050.000,00	6.110.524.024,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		2	3.000.000.000,00	2.754.062.885,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor		10	6.000.000.000,00	5.171.552.706,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa dan pemeliharaan rumah jabatan		10	7.250.000.000,00	6.996.481.750,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan peralatan lainnya		2	1.200.000.000,00	1.038.050.790,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa dan fasilitasi dukungan kegiatan pemerintah Kota					Renja, RKA, DPA			
	Rehabilitasi dan revisi instalasi jaringan listrik dan air bangunan aset pemerintah		2	1.000.000.000,00	831.331.500,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program peningkatan disiplin aparatur					Renja, RKA, DPA			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		2	4.500.000.000,00	2.523.000.185,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		2	11.750.000.000,00	10.813.084.085,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		2	133.000.000,00	110.457.600,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Fasilitasi dukungan pelayanan tamu pemerintah Kota		2	200.000.000,00	198.254.758,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
Bagian keuangan									
	Program penyediaan administrasi perkantoran		4			Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		3	1.834.761.500,00	1.496.212.550,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		10			Renja, RKA, DPA			
	Penyusunan anggaran sekretariat daerah Kota Balikpapan		2	30.000.000,00	25.729.770,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Fasilitasi pelaksanaan urusan pemanfaatan aset dan pendapatan daerah		2	40.000.000,00	33.926.750,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Peningkatan pengelolaan dan evaluasi keuangan perbendaharaan		3	85.000.000,00	83.635.860,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Pemeliharaan rutin berkala aplikasi dan		2	45.000.000,00	44.880.000,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	peralatan pengelolaan keuangan								
	Penyusunan laporan dan evaluasi realisasi anggaran sekretariat daerah		3	30.000.000,00	22.844.850,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Evaluasi dan pelaporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi		2	250.000.000,00	209.291.253,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
	Penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah		3	18.000.000,00	17.799.100,00	Renja, RKA, DPA	Lengkap		
Bagian hukum									
	Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah		pns: 6 non pns:3	369.955.000	228.912.574,00	sesuai	cukup	tidak ada	-
	Kodifikasi dan penataan dokumentasi hukum		pns: 6 non pns:3	76.276.500	72.892.050,00	sesuai	cukup	tidak ada	-
	Sosialisasi produk hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum Kota Balikpapan		pns: 9 non pns:3	586.542.500,00	519.734.443,00	sesuai	cukup	tidak ada	-
	Pengarsipan hukum online		pns: 6 non pns:3	49.275.000,00	46.175.507,00	sesuai	cukup	tidak ada	-
	Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum		pns: 6 non pns:3	818.277.500,00	511.890.680,00	sesuai	cukup	tidak ada	-
	Rapat koordinasi panitia ranham Kota Balikpapan		pns: 9 non pns:3	80.068.500,00	50.213.116,00	sesuai	cukup	tidak ada	-

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan		pns: 9 non pns:3	91.923.000,00	28.818.850,00	sesuai	cukup	tidak ada	-
Bagian perkotaan									
1	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		10 orang	986.640.000	828.715.254	-	cukup	tidak ada masalah	-
2	Penataan daerah otonomi baru		25 orang	199.650.000	194.997.047	-	cukup	tidak ada masalah	-
3	Hari jadi Kota		100 orang	3.378.125.000	3.278.029.400	-	cukup	tidak ada masalah	-
4	Fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pengendalian lingkungan Kota		16 orang	269.097.500	172.583.584	-	cukup	tidak ada masalah	-
Bagian perekonomian									
	Program pengembangan city gas								
	- Survey pengembangan jaringan gas rumah tangga		2	200.000.000	-	sesuai RPJMD	cukup	masalah : 'kegiatan tidak terealisasi karena kurun waktu pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam proses lelang di bagian pengadaan barang dan jasa mengalami gagal lelang, karena peserta yang mendaftar tidak menghadiri proses	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								audiensi. dan apabia kegiatan diulang kembali untuk tayang elang membutuhkan waktu yang akan mempersingkat kurun waktu pengerjaan kegiatan survey sekitar 120 hari kalender. solusi : 'mengingat pembangunan jaringan gas pada tahun 2018 telah menggunakan dokumen feed-dedc jargas esdm dan survey pemerintah Kota tahun 2017 maka untuk dokumen survey jargas tahun 2018 akan digunakan untuk pembangunan jargas tahun 2020 karena pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2019 tidak mendapat kuota pembangunan	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								jargas.	
	Program penyiapan potensi sumber daya dan sarana prasarana								
	Fasilitasi koordinasi dan pengawasan sarana prasarana perekonomian daerah		1						
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi			150.000.000,00	92.747.325,00	0			
	Koordinasi bidang perekonomian daerah se-kalimantan Timur dan pengawasan pelaksanaan kegiatan promosi daerah		1						
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi			50.000.000,00	40.605.400,00	0			
	Pembinaan dan pengembangan potensi bumd		1						

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian pengadaan barang dan jasa									
1	**Program peningkatan kapasitas sumber daya apartur**						kondisi sarana prasarana di bagian pbj dinilai kurang, kita tidak memiliki ruangan bidding room yang memadai,meja dan kursi kerja tidak proporsional, kasubbag tidak memiliki lemari penyimpanan dokumen.		
	Kegiatan pembinaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan			300.000.000	171.187.000,00				
	Program layanan pengadaan barang dan jasa								
	Kegiatan pengelolaan rencana umum pengadaan			117.067.500,00	65.632.261,00				
	Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Balikpapan			372.769.000,00	316.344.900,00				
Bagian organisasi									
	Program penataan kelembagaan		3			Renja, RKA, DPA			
	Analisa jabatan		2	161.000.000,00	141.251.804,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Evaluasi kelembagaan		2	99.999.700,00	57.352.596,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Evaluasi ketatalaksanaan		2	100.000.000,00	52.566.022,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik		2			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan pembinaan pelayanan publik		1	850.000.000,00	780.715.459,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Kegiatan pengukuran survei kepuasan masyarakat		1	178.050.000,00	177.000.000,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		4			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip)		3	185.000.000,00	78.991.000,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan asn		4			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan pengembangan sistem pengelolaan kepegawaian dan disiplin asn		3	65.000.000,00	54.908.400,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
Bagian humas protokol									
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		11			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan pelaksanaan acara, audiensi, penerimaan tamu pemerintah Kota Balikpapan		10	500.000.000,00	497.402.250,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		3			Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Kegiatan peningkatan kualitas/mutu paduan suara pemerintah Kota Balikpapan		2	55.100.000,00	54.668.500,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program penyebarluasan informasi daerah		3			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan informasi publik pimpinan		2	500.000.000,00	485.613.798,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program pelayanan administrasi perkantoran		2			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1	450.465.000,00	348.297.735,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		2			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan kerjasama informasi dan media massa		1	49.391.415,00	44.288.450,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
	Kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Balikpapan		1	808.551.300,00	757.710.270,00	Renja, RKA, DPA	lengkap		
Bagian pemerintahan									
	Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan		3			Renja, RKA, DPA			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tindak kriminal								
	Kegiatan koordinasi operasi penertiban dan pengawasan ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan		2	786.500.000,00	764.804.500,00	Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan ketertiban umum dan ketentraman perlindungan masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru		2	384.986.000,00	377.870.450,00	Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan		2	2.607.399.900,00	2.310.831.590,00	Renja, RKA, DPA			
	Program evaluasi dan pelaporan pemerintahan		3			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) Kota Balikpapan		2	123.710.000,00	119.997.486,00	Renja, RKA, DPA			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan		3			Renja, RKA, DPA			
	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan peringatan hut kemerdekaan ri		2	1.026.290.000,00	993.606.750,00	Renja, RKA, DPA			
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan									
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	88%		27.946.513.000	29.126.376.099				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa surat menyurat	66%	2	4.152.500	2.725.000	sesuai	lengkap		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89%	2	500.000.000	444.395.572	sesuai	lengkap		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	59%	3	56.289.750	33.395.600	sesuai	lengkap		
	Penyediaan alat tulis kantor	98%	2	197.775.000	193.058.943	sesuai	lengkap		
	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	99%	2	420.457.500	419.224.403	sesuai	lengkap		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	98%	3	87.830.000	86.201.500	sesuai	lengkap		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	85%	4	300.000.000	306.892.500	perubahan	lengkap		
	Penyediaan makanan dan minuman	69%	5	7.351.409.250	7.237.307.000	perubahan	lengkap		
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	98%	83	17.237.786.000	18.694.196.014	perubahan	lengkap		
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	95%	37	580.800.000	591.086.093	perubahan	lengkap		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99%	2	210.013.000	208.915.954	sesuai	lengkap		
2	Penyediaan jasa keamanan kantor	91%	16	1.000.000.000	908.977.520	sesuai	lengkap		
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	91%		3.478.466.000	4.765.110.442		lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas	97%	2	400.000.000	389.946.779	sesuai	lengkap		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	97%	2	200.000.000	342.814.550	perubahan	lengkap		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	95%	2	200.000.000	404.701.000	perubahan	lengkap		
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	87%	2	200.000.000	239.371.000	perubahan	lengkap		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	88%	2	200.000.000	392.749.500	perubahan	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	86%	2	1.058.000.000	1.200.414.886	perubahan	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	97%	5	306.600.000	1.016.783.560	perubahan	lengkap		
3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	77%	3	557.000.000	426.743.767	sesuai	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	99%	2	80.000.000	79.387.000	sesuai	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	98%	2	276.866.000	272.198.400	sesuai	lengkap		
4	**Program peningkatan displin aparatur**	100%		915.790.000	971.673.000		lengkap		
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (setwan)	99%	36	22.500.000	80.778.000	perubahan	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (dewan)	100%	2	893.290.000	890.895.000	sesuai	lengkap		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		320.000.000	319.928.570		lengkap		
	Peningkatan SDM aparatur setwan	100%	36	320.000.000	319.928.570	sesuai	lengkap		
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	81%		18.600.623.000	16.948.047.420		lengkap		
	Kegiatan reses	79%	45	1.800.000.000	1.429.652.500	sesuai	lengkap		
	Rapat kerja	77%	14	200.000.000	153.560.000	sesuai	lengkap		
	Rapat rapat paripurna	8%	12	75.000.000	49.671.800	perubahan	lengkap		
	Penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD Kota Balikpapan	34%	4	528.000.000	226.240.000	perubahan	lengkap		
	Peningkatan kompetensi badan musyawarah	95%	23	1.182.000.000	1.509.087.082	perubahan	lengkap		
	Panitia khusus/ panitia kerja DPRD Kota Balikpapan	96%	17	700.000.000	961.304.359	perubahan	lengkap		
	Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan kehormatan	96%	45	558.270.000	776.429.787	perubahan	lengkap		
	Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan anggaran	93%	23	1.957.353.000	2.193.877.824	perubahan	lengkap		
	Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan pembentukan	86%	17	3.400.000.000	3.614.342.288	perubahan	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	peraturan daerah dan kajian-kajian								
	Peningkatan kompetensi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	52%	2	1.800.000.000	928.645.525	sesuai	lengkap		
	Kegiatan penyusunan kajian raperda inisiatif DPRD bidang politik dan hukum	77%	17	1.400.000.000	1.073.785.387	sesuai	lengkap		
6	Kajian komisi 2 bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata dan ketahanan pangan	87%	16	1.600.000.000	1.399.097.273	sesuai	lengkap		
	Pembaharuan data website dan mail Balikpapan.go.id	97%	4	20.190.000	20.185.000	sesuai	lengkap		
	Pengelolaan data dan informasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan	63%	4	30.000.000	18.757.000	sesuai	lengkap		
	Pengembangan kerja sama dengan media massa	86%	472	3.283.800.000	2.827.719.950	perubahan	lengkap		
	Kajian komisi 3 bidang imfrastruktur dan transportasi	78%	17	1.900.000.000	1.475.637.175	sesuai	lengkap		
	Kajian komisi 4 bidang pendidikan dan kesehatan	77%	16	1.500.000.000	1.156.716.420	sesuai	lengkap		
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	96%	17	2.016.657.000	1.925.859.139	sesuai	lengkap		
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan(bimtek)	100%	16	562.214.000	561.375.000	sesuai	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi	75%		2.056.000.000	4.125.021.850		lengkap		
	Fasilitasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan	75%	36	2.594.523.000	1.953.909.099	sesuai	lengkap		
	Program penyebarluasa informasi daerah	81%		2.000.000.000	4.073.640.850		lengkap		
	Pembaharuan data website dan mail Balikpapan.go.id	99%	4	23.000.000	22.660.000	sesuai	lengkap		
	Pengelolaan data dan informasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan	87%	4	33.000.000	28.721.000	sesuai	lengkap		
	Pengembangan kerja sama dengan media massa	81%	472	2.000.000.000	4.073.640.850	perubahan	lengkap		
Inspektorat									
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh		4	1.293.736.000	924.547.136	Renja, RKA, DPA	lengkap	tidak ada masalah	
2	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur		4	1.037.840.000	1.003.791.736,00	Renja, RKA, DPA	lengkap	tidak ada masalah	
Badan pengelola keuangan daerah									
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			3.891.646.000,00	3.456.635.599,00				alokasi setelah perubahan

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									anggaran
2	Program pengelolaan pendapatan daerah			100.000.000,00	74.416.142,00				alokasi setelah perubahan anggaran
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan			675.000.000,00	638.631.125,00				alokasi setelah perubahan anggaran
4	Program pengelolaan keuangan perbendaharaan			660.000.000,00	620.153.752,00				alokasi setelah perubahan anggaran
5	Program peningkatan manajemen aset/barang milik daerah			24.222.364.000,00	21.903.782.756,80				alokasi setelah perubahan anggaran
Badan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah									
1	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		72 orang	320.761.000	248.655.553	77,52%	lengkap		
2	Pelayanan administrasi perkantoran			2.107.492.050,00	1.944.383.214	92,26%	lengkap		
3	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			5.898.386.900,00	3.909.098.467	66,27%	cukup		
4	Optimalisasi pemanfaatan teknologi			679.035.304,00	482.379.436	71,04%	cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	informasi								
Badan penanggulangan bencana daerah									
	Program peningkatan kesiapsiagaan pencegahan bencana dan kebakaran			1.586.700.000,00	714.166.969,00		lengkap	tidak ada masalah	
	Kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan bencana			200.000.000,00	192.208.600,00		lengkap	tidak ada masalah	
	Pendidikan dan pelatihan jungle rescue dan vertical rescue			200.000.000,00	166.324.800,00		lengkap	tidak ada masalah	
	Pendidikan/pelatihan water rescue			150.000.000,00	124.726.850,00		lengkap	tidak ada masalah	
	Simulasi kebakaran dan evakuasi gedung bertingkat			750.000.000,00	676.091.260,71		lengkap	tidak ada masalah	
	- Pengadaan reservoir (gwt) dan pompa			100.000.000,00	98.611.500,00		lengkap	tidak ada masalah	
	- Penyuluhan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran			300.000.000,00	288.103.600,00		lengkap		
	- Pengadaan inspeksi sarana proteksi kebakaran			1.586.700.000,00	714.166.969,00		lengkap		
	Program tanggap darurat pennaggulangan bencana								
	- Pembentukan relawan tanggap darurat dan simulasi penanggulangan bencana dengan masyarakat dan aparatur terkait			150.000.000	121.610.900		lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Bimbingan teknis petugas tim reaksi cepat (trc) penanggulangan bencana			-	-		lengkap		
	Program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana								
	- Rehabilitasi dan stimulan sarana prasarana pasca bencana			250.000.000,00	156.404.352,00		lengkap		
	- Rekontruksi dan stimulasi sarana prasarana pasca bencana			250.000.000,00	241.412.001,00		lengkap		
	Program sarana prasarana logistik								
	- Pengadaan peralatan penanggulangan bencana			2.000.000.000,00	1.730.426.878,00		lengkap		
	- Pengadaan alat pemadam api ringan (apar) untuk pihak ketiga			-	-		lengkap		
	- Penanganan kejadian bencana dan kebakaran (antisipasi)			410.000.000,00	284.623.900,00		lengkap		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Urusan Perencanaan)									
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	-	**7**	**1.805.440.000,00**	**1.632.103.511,00**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap		
	Penyediaan jasa surat menyurat			3.000.000,00	2.784.500,00				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			19.200.000,00	12.281.279,00				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			25.000.000,00	10.976.000,00				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			200.000.000,00	198.985.624,00				
	Penyediaan alat tulis kantor			150.000.000,00	146.322.550,00				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			130.000.000,00	108.402.660,00				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			10.000.000,00	9.746.000,00				
	Penyediaan makanan dan minuman			208.240.000,00	182.371.000,00				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			900.000.000,00	899.702.898,00				
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.			160.000.000,00	60.531.000,00				
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**7**	**600.000.000,00**	**540.349.136,00**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			50.000.000,00	49.689.750,00				
	Pengadaan peralatan gedung kantor			170.000.000,00	167.728.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			150.000.000,00	148.633.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.			100.000.000,00	78.434.112,00				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			130.000.000,00	95.864.274,00				
3	**Program pengembangan data/informasi**		**7**	**618.760.000,00**	**451.698.034,00**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap		
	Penyusunan data profile daerah			108.760.000,00	102.009.350,00				
	Pengembangan dan pemetaan database perencanaan pembangunan			450.000.000,00	305.336.759,00				
	Pengelolaan data pembangunan			60.000.000,00	44.351.925,00				
	Program perencanaan pembangunan daerah		**7**	**785.000.000,00**	**565.519.274,00**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang dan penyusunan RKPD			700.000.000,00	510.283.274,00				
	Penyusunan kebijakan umum apbd (kua) prioritas plafon anggaran sementara (ppas) rapbd dan perubahan apbd Balikpapan			85.000.000,00	55.236.000,00				
	Program perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur		**5**	**400.000.000,00**	**347.858.320,00**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap		
	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan corcoperate social responsibility (csr) Kota Balikpapan			400.000.000,00	347.858.320,00				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**7**	**375.000.000,00**	**310.592.370,00**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap		
	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan			300.000.000,00	251.676.400,00				
	Penyusunan laporan kinerja pembangunan daerah			75.000.000,00	58.915.970,00				
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan(urusan penelitian dan pengembangan)									
1	**Program penelitian dan pengembangan**	**-**	**5**	**1.961.296.000,00**	**1.723.715.554.,50**	sesuai dengan Renja, RKA dan DPA	lengkap	-	-
	Kajian perencanaan pembangunan bidang pengembangan infrastruktur dan perekonomian perkotaan			587.600.000,00	425.871.600,00				
	Kajian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur			899.026.000,00	841.236.637,50				
	Pengembangan penguatan sida Kota Balikpapan			474.670.000,00	456.607.317,00				
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(kepegawaian)									
1	**Program pelayanan adimintrasi**	**93%**	**142 orang**	**775.998.690,00**	**725.167.165,67**	**sesuai**	**baik**	**-**	-

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perkantoran								
	Peneydiaan jasa surat menyurat	53.71%	5 orang	4.500.000,00	2.417.000,00	sesuai	baik	kurang efektifnya pemanfaatan jasa surat menyurat oleh bidang-bidang	konfirmasi ke tujuan setiap ada pengiriman surat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90.56%	5 orang	92.328.000,00	83.616.396,00	sesuai	baik	pembayaran biaya yang kurang efektif	rencana transaksi non tunai
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	75.60%	17 orang	4.600.000,00	3.477.800,00	sesuai	baik	keterlambatan pajak kendaraan karena tidak tepat waktu	pemantauan jadwal sebelum jatuh tempo
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98.86%	7 orang	11.024.600,00	10.898.800,00	sesuai	baik	stock ofname barang jasa kebersihan yang belum effektif	membuat aplikasi penyediaan barang habis pakai
	Penyediaan alat tulis kantor	97.97%	7 orang	41.809.050,00	40.960.700,00	sesuai	baik	stock ofname alat tulis kantor yang belum effektif	membuat aplikasi penyediaan barang habis pakai
	Penyediaan barang cetakan dan	77.89%	7 orang	50.400.000,00	39.254.500,00	sesuai	baik	kualitas penjilidan	rencana melakukan

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penggandaan							yang kurang baik	survey pengadaan barang kembali untuk mendapatkan rekanan yang bagus
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	99.47%	6 orang	4.208.000,00	4.185.600,00	sesuai	baik	berkurangnya jumlah surat kabar	menambahkan anggaran
	Penyediaan makan dan minum	87.31%	48 orang	108.960.000,00	95.132.000,00	sesuai	baik	makan minum tamu belum tercover	menambahkan anggaran
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	99.28%	48 orang	405.400.000,00	402.477.779,67	sesuai	baik	realisasi per paket tidak sesuai perencanaan	mengguna kan aplikasi siapnas
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	81.01%	6 orang	52.769.040,00	42.746.590,00	sesuai	baik	kenaikan tarif BPJS yang mengalami kenaikan	menganggaRKAn diperubahan
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**68%**	**30 orang**	**745.100.000,00**	**504.441.726,00**	**sesuai**	**baik**	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	67.08%	10 orang	600.000.000,00	402.465.640,00	sesuai	baik	masih banyaknya barang yang terdaftar dalam	koordinasi dan pengusula

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kondisi baik di kib namun sebenrnya kondisinya rusak	n kembali
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	52.68%	18 orang	77.200.000,00	40.670.086,00	sesuai	baik	adanya beberapa kendaraan dinas dalam kondisi kurang baik	monev jadwal pemeliharaan kendaraan
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	90.29%	7 orang	67.900.000,00	61.306.000,00	sesuai	baik	mesin fotocopi yang rusak dalam keadaan agak lama	pemilihan metodhe pemeliharaan secara berkala
	Program peningkatan disiplin aparatur	**90%**	**4 orang**	**109.250.000,00**	**98.498.740,00**	**sesuai**	**baik**	-	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%		29.250.000,00	29.250.000,00	sesuai	baik		
	Pengadaan tanda pengenal pns	98.81%	4 orang	80.000.000,00	69.248.740,00	sesuai	baik	belum tersedianya bedge untuk cpnsd dan non pns	rencana anggaran belanja pengadaan tanda pengenal cpnsd dan non pns
	Program peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	**96%**	**9 orang**	**237.545.400,00**	**227.206.450,00**	**sesuai**	**baik**	-	-

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan dokumen fisik pns / cpns	98.64%	5 orang	49.100.000,00	43.835.130,00	sesuai	baik	dokumen kepegawaian dalam e arsip belum lengkap	scan dan uploud dokumen secara bertahap dan berjenjang
5	Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian	99.43%	10 orang	188.445.400,00	183.371.320,00	sesuai	baik	terdapat data pegawai yang tidak valid	rekonsiliasi data pegawai
	Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara	**88%**	**39 orang**	**1.485.381.000,00**	**1.302.357.366,00**	**sesuai**	**baik**	-	-
	Pembinaan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan	97.58%	43 orang	100.000.000,00	97.583.600,00	sesuai	baik	masih banyaknya pelanggaran disiplin pns	sosialisasi peraturan kepegawaian
	Pengelolaan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami dan pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya	98.37%	17 orang	130.601.000,00	128.466.271,00	sesuai	baik	kartu pegawai, kartu istri, kartu suami dan pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya tidak selesai tepat waktu	integrasi dengan e arsip kepegawaian untuk kelengkapan beRKAs
	Operasional korpri Kota Balikpapan	85.78%	5 orang	1.254.780.000,00	1.076.307.495,00	sesuai	baik	fasilitasi operasional korpri melibatkan kepengurusan korpri sehingga dalam pengambilan keputusan secara	meningkatkan koordinasi dengan anggota pengurus

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								berjenjang membutuhkan waktu yang cukup lama	korpri dalam rencana anggaran dan realisasi anggaran
	Pembinaan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan	97.58%	43 orang	100.000.000,00	97.583.600,00	sesuai	baik	masih banyaknya pelanggaran disiplin pns	sosialisasi peraturan kepegawaian
	Pengelolaan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami dan pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya	98.37%	17 orang	130.601.000,00	128.466.271,00	sesuai	baik	kartu pegawai, kartu istri, kartu suami dan pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya tidak selesai tepat waktu	integrasi dengan e arsip kepegawaian untuk kelengkapan beRKAs
	Operasional korpri Kota Balikpapan	85.78%	5 orang	1.254.780.000,00	1.076.307.495,00	sesuai	baik	fasilitasi operasional korpri melibatkan kepengurusan korpri sehingga dalam pengambilan keputusan secara berjenjang membutuhkan waktu yang cukup lama	meningkatkan koordinasi dengan anggota pengurus korpri dalam rencana anggaran dan realisasi

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									anggaran
	Program peningkatan kinerja aparatur sipil negara	**86%**	**16 orang**	**272.871.450,00**	**233.702.704,00**	**sesuai**	**baik**	-	-
	Evaluasi kinerja asn	85.65%	16 orang	272.871.450,00	233.702.704,00	sesuai	baik	methode perhitungan hasil kinerja yang belum efektif	-
								-	optimalisasi penggunaan aplikasi perhitungan kinerja yang terintegrasi
								-	menerapkan punishment bagi yang tidak mengumpulkan skp
								evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala	evaluasi kinerja secara berkala mengguna kan sistem kinerja

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									yang terintegrasi
	Program peningkatan kulitas manajemen karier aparatur sipil negara	**41%**	**173 orang**	**4.702.452.900,00**	**1.914.744.365,18**	**sesuai**	**baik**	**-**	-
	Pendidikan pns melalui tugas belajar	72.02 %	6 orang	513.349.950,00	369.739.402,00	sesuai	baik	pns tugas belajar tidak lulus tepat waktunya	bekerjasama dengan perguruan tinggi tempat belajar pns tugas belajar untuk mengirimkan hasil ujian semester kemudian dilakukan monev
								adanya usulan izin belajar yang tidak linier dengan pendidikan sebelumnya serta tugas dan fungsi	sosialisasi peraturan terkait izin belajar dan tugas belajar
								adanya formasi yang tidak terpenuhi karena calon peserta	membuka kembali penawaran

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								tidak lulus nilai yang telah ditentukan	formasi tugas belajar
	Pemetaan kompetensi	81.95%	16 orang	230.000.000,00	188.487.244,00	sesuai	baik	belum tersusunnya peta kompetensi asn secara keseluruhan	uji kompetensi pegawai dilakukan secara bertahap
	Penyusunan rencana pembinaan karir pns	57.83%	9 orang	1.035.179.000,00	598.615.783,00	sesuai	baik	belum efektif dan efisiennya teknis pelaksanaan uji kompetensi	bekerjasama dengan bkd provinsi kaltim untuk pelaksaan uji kompetensi
								tenaga assesor dan psikolog yang kurang sehingga terlambat dalam memperoleh hasil uji kompetensi	penambahan usulan formasi cpnsd jabatan assesor dan psikolog
									peningkatan kompetnsi

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									tim tpk (tim penilai kompetensi)
	Seleksi penerimaan cpns	14.63%	45 orang	2.477.624.000,00	362.562.801,00	sesuai	baik	sarana dan prasarana yang belum memadai serta fungsional prakom yang terbatas	bekerjasama dengan instansi terkait seperti bkn dan swasta untuk sewa gedung/ laboratorium
	Penyususnan formasi pns	57.21%	20 orang	87.550.000,00	50.083.470,00	sesuai	baik	masih adanya perbedaan beberapa nama jabatan pelaksana antara bkn dengan kemenpan rb	koordinasi dengan bkn dan kemenpan rb melalui bagian organisasi
	Proses data mutasi	96.21%	11 orang	66.200.000,00	63.965.638,18	sesuai	baik	distibusi pegawai belum efektif	menyususun peta distribusi pegawai secara berkala

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									memanfaatkan SDM yang tersedia (minimal SDM tetapi kaya fungsi)
	Penyelesaian kenaikan pangkat pns	95.92%	9 orang	206.150.000,00	197.743.547,00	sesuai	baik	sk kenaikan pangkat yang tidak selesai tepat waktu	pengusulan kembali beRKAs yang tidak lengkap
									integrasi dengan e arsip kepegawaian untuk kelengkapan beRKAs
	Pembinaan jabatan fungsional	95.92%	9 orang	43.500.000,00	41.838.580,00	sesuai	baik	belum seluruh pegawai yang duduk di jabatan fungsional mendapatkan pebinaan sehingga pengetahuan terkait usulan pak dan dupak masih kurang	sosialisasi pembinaan jabatan fungsional secara intensif
	Penyusunan analisis kebutuhan diklat	97.22%	6 orang	42.899.950,00	41.707.900,00	sesuai	baik	belum seluruh pendidikan dan	evaluasi pasca

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan evaluasi pasca diklat							pelatihan dilakukan evauasi pasca diklat	diklat dilakukan secara bertahap
								kurang maksimalnya pemanfaatan analisis kebutuhan diklat sebagi pedoman pengembangan pegawai	dokumen analisis kebutuhan diklat sebagai pedoman perencanaan pengembangan pegawai
Kantor Satpol PP									
1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	170	1.018.100.000	925.158.400	sesuai	lengkap		
	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP	100%	170	30.000.000	27.400.000	sesuai	lengkap		
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	100%	170	27.500.000	26.800.000	sesuai	lengkap		
	Operasional khusus/razia koordinasi ketentraman dan ketertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah Kota Balikpapan	100%	170	696.000.000	625.309.400	sesuai	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelidikan, penyidikan dan penegakan produk hukum daerah	100%	170	45.000.000	44.985.000	sesuai	lengkap		
	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah	100%	170	30.000.000	29.400.000	sesuai	lengkap		
	Kajian produk hukum daerah dan administrasi ppns	100%	170	30.000.000	29.624.000	sesuai	lengkap		
	Pengamanan, penjagaan dan pengawalan	100%	170	159.600.000	141.640.000	sesuai	lengkap		
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	170	30.000.000	29.714.400	sesuai	lengkap		
	Pengendalian keamanan lingkungan	100%	170	30.000.000	29.714.400	sesuai	lengkap		
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	170	3.099.100.000	2.157.396.360	sesuai	lengkap		
	Pembinaan dan penguatan perlindungan masyarakat	100%	170	30.000.000	29.050.000	sesuai	lengkap		
	Pelatihan linmas	100%	170	32.500.000	23.900.000	sesuai	lengkap		
	Fasilitasi pengamanan pemilu	100%	170	3.036.600.000	2.104.446.360	sesuai	lengkap		
Kecamatan Balikpapan Tengah									
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**			**2.811.703.000,00**	**2.387.290.983,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		5 org	528.000.000,00	365.164.452,00		cukup		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		5 org	44.440.000,00	9.003.100,00		cukup		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		5 org	198.000.000,00	182.638.545,00		cukup		
	Penyediaan alat tulis kantor		5 org	200.000.000,00	197.933.918,00		cukup		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5 org	148.500.000,00	135.259.960,00		cukup		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5 org	25.785.000,00	25.426.500,00		cukup		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5 org	9.152.000,00	9.128.000,00		cukup		
	Penyediaan makanan dan minuman		5 org	311.516.000,00	257.673.550,00		cukup		
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		5 org	460.350.000,00	459.949.158,00		cukup		
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		5 org	885.960.000,00	745.113.800,00		cukup		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			**1.002.450.000,00**	**920.222.426,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Pengadaan peralatan gedung kantor		5 org	244.750.000,00	231.035.000,00		cukup		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung		5 org	176.000.000,00	172.550.400,00		cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kantor								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		5 org	176.000.000,00	119.416.026,00		cukup		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		5 org	205.700.000,00	201.421.000,00		cukup		
	Penyediaan/sewa gedung kantor		5 org	200.000.000,00	195.800.000,00		cukup		
	Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di sekolah			**58.989.400,00**	**39.597.400,00**	**Renja --> RKA --> DPA**			
	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah (UKS)		5 org	58.989.400,00	39.597.400,00		cukup		
	Program penanggulangan kemiskinan terpadu			**133.936.000,00**	**123.342.952,00**	**Renja --> RKA --> DPA**			
	Pengelolaan data pmks miskin penerima program penanggulangan kemiskinan		2 org	66.000.000,00	62.627.700,00		cukup		
	Fasilitasi program keluarga harapan (pkh) Kecamatan		2 org	67.936.000,00	60.715.252,00		cukup		
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			**72.770.000,00**	**61.355.000,00**	**Renja --> RKA --> DPA**			
	Fasilitasi pengembangan Kecamatan layak anak		2 org	72.770.000,00	61.355.000,00		cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			**2.117.646.000,00**	**-**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (DAU tambahan)			-	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gunungsari ulu (DAU tambahan)			180.000.000,00	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gunungsari ilir (DAU tambahan)			120.000.000,00	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan karang rejo (DAU tambahan)			292.941.000,00	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan karang jati (DAU tambahan)			175.042.100,00	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan mekar sari (DAU tambahan)			180.122.070,00	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sumber rejo (DAU tambahan)			176.470.500,00	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan gunungsari ulu (DAU tambahan)			172.941.000,00	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan gunungsari ilir			232.941.000,00	-				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(DAU tambahan)								
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan karang rejo (DAU tambahan)			60.000.000,00	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan karang jati (DAU tambahan)			177.898.900,00	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan mekar sari (DAU tambahan)			172.818.930,00	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan sumber rejo (DAU tambahan)			176.470.500,00	-				
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat			**586.849.600,00**	**509.454.612,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan gunungsari ulu		4 orang	30.249.000,00	29.408.700,00		kurang	sarana di aula :pendingin ruangan, laptop (hilang), layar/screen) dan microphone perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan gunungsari ilir		2 org	30.307.400,00	27.642.216,00		kurang	sarana : komputer untuk di bgn pelayanan perlu pengadaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan karang rejo		2 org	29.642.600,00	27.380.000,00		kurang	sarana : pendingin ruangan di aula pertemuan, sound system, infocus, laptop dan printer perlu pengadaan.	
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan karang jati		3 org	29.689.800,00	26.388.996,00		kurang	sarana : printer, komputer, laptop, infocus dan microfon dalam keadaan rusak dan perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan mekar sari		2 org	28.957.800,00	27.028.600,00		kurang	sarana : printer, komputer, laptop, infocus dan microfon dalam keadaan rusak dan perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan prasarana :	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								gedung kantor sementara sewa sehingga kenyamanan dalam memberikan pelayanan tidak maksimal	
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan sumber rejo		3 org	27.225.000,00	25.250.000,00		kurang	sarana : komputer, laptop, infocus dan pendingin ruangan dalam keadaan rusak perlu pengadaan dan perlu penambahan daya listrik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan (pkk) Kecamatan Balikpapan Tengah		2 org	47.778.000,00	45.095.950,00				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan gunungsari ulu			60.500.000,00	60.066.600,00		cukup		
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan gunungsari ilir		2 org	60.500.000,00	26.937.900,00		cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan karang rejo		2 org	60.500.000,00	52.262.540,00		cukup		
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan karang jati		3 org	60.500.000,00	52.544.300,00		cukup		
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan mekar sari		2 org	60.500.000,00	56.276.710,00				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan sumber rejo		3 org	60.500.000,00	53.172.100,00		cukup		
	Program peningkatan peran Kecamatan dan kelurahan			**3.673.114.000,00**	**3.301.155.499,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan gunungsari ulu			351.000.000,00	321.750.000,00			sarana di aula :pendingin ruangan, laptop (hilang), layar/screen) dan microphone perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan gunungsari ilir		2 org	621.000.000,00	569.250.000,00			komputer untuk di bgn pelayanan perlu pengadaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan karang rejo		3 org	783.000.000,00	717.750.000,00			sarana : pendingin ruangan di aula pertemuan, sound system, infocus, laptop dan printer perlu pengadaan.	
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan karang jati		3 org	360.000.000,00	288.750.000,00			sarana : printer, komputer, laptop, infocus dan microfon dalam keadaan rusak dan perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan mekar sari		2 org	315.000.000,00	288.750.000,00			sarana : printer, komputer, laptop, infocus dan microfon dalam keadaan rusak dan perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan prasarana : gedung kantor	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								sementara sewa sehingga kenyamanan dalam memberikan pelayanan tidak maksimal	
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan sumber rejo		2 org	513.000.000,00	470.250.000,00			sarana : komputer, laptop, infocus dan pendingin ruangan dalam keadaan rusak perlu pengadaan dan perlu penambahan daya listrik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	
	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau, dan sehat		4 orang	173.844.000,00	164.456.350,00		cukup		
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		4 orang	43.296.000,00	41.250.000,00		cukup		
	Koordinasi / rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan		4 orang	36.000.000,00	33.300.000,00		cukup		
	Penyelenggaraan pelayanan izin membuka/ memanfaatkan tanah negara		4 orang	70.000.000,00	63.854.547,00		cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (rt)		4 orang	180.000.000,00	131.380.402,00		cukup		
	Pelaksanaan komunikasi / informasi / edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat		4 orang	32.934.000,00	31.389.000,00		cukup		
	Fasilitasi penyelenggaraan kerja bakti massal		4 orang	194.040.000,00	179.025.200,00		cukup		
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah			**83.000.000,00**	**78.114.948,00**	**Renja --> RKA --> DPA**			
	Penerbitan izin usaha mikro dan kecil (iumk)		2 org	83.000.000,00	78.114.948,00		cukup		
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			**49.797.000,00**	**44.592.000,00**	**Renja --> RKA --> DPA**			
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani		2 org	49.797.000,00	44.592.000,00		cukup		
	Program pengelolaan keragaman budaya			**952.635.000,00**	**866.431.520,00**	**Renja --> RKA --> DPA**			
	Fasilitasi penyelenggaraan seleksi tilawatil qur'an (stq) tingkat Kecamatandan musabaqah tilawatil qur'an (mtq)		2 org	952.635.000,00	866.431.520,00		cukup		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program perencanaan pembangunan daerah			**86.742.800,00**	**81.930.410,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah		2 org	30.000.000,00	29.185.460,00		cukup		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan gunungsari ulu			8.554.700,00	8.082.000,00		kurang	sarana di aula :pendingin ruangan, laptop (hilang), layar/screen) dan microphone perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.	
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan gunungsari ilir		2 org	10.962.600,00	10.123.300,00		kurang	sarana : komputer untuk di bgn pelayanan perlu pengadaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan karang rejo		2 org	12.069.700,00	11.279.700,00		kurang	sarana : pendingin ruangan di aula pertemuan, sound system, infocus, laptop dan printer perlu pengadaan.	
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan karang jati		3 org	7.949.700,00	7.299.700,00		kurang	sarana : printer, komputer, laptop, infocus dan microfon	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dalam keadaan rusak dan perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan mekar sari		2 org	7.447.500,00	6.868.500,00		kurang	sarana : printer, komputer, laptop, infocus dan microfon dalam keadaan rusak dan perlu pengadaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan prasarana : gedung kantor sementara sewa sehingga kenyamanan dalam memberikan pelayanan tidak maksimal	
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan sumber rejo		3 org	9.758.600,00	9.091.750,00		kurang	sarana : komputer, laptop, infocus dan pendingin ruangan dalam keadaan rusak perlu pengadaan dan perlu penambahan daya listrik untuk menunjang pelaksanaan	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kegiatan	
	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr			**100.000.000,00**	**97.015.800,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera		2 org	100.000.000,00	97.015.800,00				
	Program peningkatan disiplin aparatur			**11.825.000,00**	**11.660.000,00**	**Renja --> RKA --->DPA**			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		5 org	11.825.000,00	11.660.000,00		cukup		
Kecamatan Balikpapan Selatan									
	Program pelayanan administrasi perkantoran	85,21%	78 orang	3.258.523.000	2.776.698.871	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	79,88%	9 orang	1.489.245.000	1.189.579.392	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program peningkatan disiplin aparatur	93,34%	5 orang	59.993.000	56.000.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr	96,95%	5 orang	182.979.000	177.398.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di sekolah	95,02%	5 orang	125.478.000	119.235.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program penangggulangan kemiskinan	95,44%	18	55.000.000	52.492.000	Renstra, Renja ,	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terpadu		orang			RKA			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,49%	16 orang	2.513.546.000	313.887.850	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	87,81%	21 orang	998.970.000	877.196.790	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program peningkatan peran Kecamatan dan kelurahan	96,10%	21 orang	3.438.133.000	3.304.018.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	63,57%	2 orang	48.900.000	31.087.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program pengelolaan keragaman budaya	96,20%	4 orang	85.000.000	81.767.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	93,49%	4 orang	30.000.000	28.047.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
	Program perencanaan pembangunan daerah	94,43%	16 orang	61.000.000	57.602.000	Renstra, Renja , RKA	baik		
Kecamatan Balikpapan Kota									
	Program pelayanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			489.175.000	227.948.877				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			21.193.000	7.928.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			72.085.000	66.579.100				
	Penyediaan alat tulis kantor			127.860.000	124.801.200				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			106.753.000	100.556.950				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			46.011.000	36.628.600				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			26.143.000	11.688.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman			247.800.000	199.100.000				
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah			438.416.000	437.833.055				
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran			956.469.500	828.255.935				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Pengadaan peralatan gedung kantor			74.811.000	62.274.500				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			53.000.000	52.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan			93.705.000	65.434.325				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dinas/operasional								
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			74.811.000	69.061.000				
	Penyediaan/sewa gedung kantor			180.000.000	170.000.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur								
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			36.400.000	36.400.000				
	Program fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah								
	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah (uks)			124.740.000	123.469.000				
	Program penanggulangan kemiskinan terpadu								
	Pengelolaan data pmks miskin penerima program penanggulangan kemiskinan			50.000.000	50.000.000				
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								
	Fasilitasi pengembangan kecamatan layak anak			50.000.000	25.630.000				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan								
	Koordinasi dan Sosilalisasi TTG/POSYANTEK, UKM, danLPM			83.000.000	83.000.000				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prapatan (DAU Tambahan)			204.271.000	-				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telaga Sari (DAU Tambahan)			199.000.000	-				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalndasan Ulu (DAU Tambahan)			197.195.050	-				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalndasan Ilir (DAU Tambahan)			242.505.000	-				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai (DAU Tambahan)			220.000.000	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan prapatan (dau tambahan)			148.670.000	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan telaga sari (dau tambahan)			153.941.000	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan klandasan ulu			155.745.950	-				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(dau tambahan)								
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan klandasan ilir (dau tambahan)			110.436.000	-				
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan klandasan damai (dau tambahan)			132.941.000	-				
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat								
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan prapatan			35.000.000	33.115.000				
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan telaga sari			35.000.000	34.600.000				
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan klandasan ulu			35.000.000	32.640.000				
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan klandasan ilir			35.000.000	34.025.000				
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan damai			35.000.000	30.575.000				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan (pkk) kecamatan balikpapan kota			150.000.000	145.684.400				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan prapatan			120.000.000	118.943.700				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan telaga sari			120.000.000	108.813.000				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan klandasan ulu			120.000.000	61.239.000				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan klandasan ilir			120.000.000	118.001.750				
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan damai			120.000.000	118.168.500				
	Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan								
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan prapatan			342.000.000	342.000.000				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan telaga sari			423.000.000	423.000.000				
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan klandasan ulu			378.000.000	378.000.000				
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan klandasan ilir			558.000.000	558.000.000				
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan damai			342.000.000	333.000.000				
	Fasilitasi penyelenggaraan kerja bakti massal			421.500.000	417.110.000				
	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan balikpapan bersih,hijau, dan sehat			75.000.000	65.560.000				
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			150.000.000	146.979.900				
	Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat			88.000.000	84.950.000				
	Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan			195.000.000	194.840.000				
	Penyelenggaraan pelayanan izin membuka/memanfaatkan tanah negara (imtn)			80.000.000	56.103.000				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)			108.382.000	108.142.000				
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah								
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah			93.000.000	91.800.000				
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga								
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani			23.000.000	23.000.000				
	Program pengelolaan keragaman budaya								
	Penyelenggaraan seleksi tilawatil qur'an dan festival seni islam			100.000.000	96.100.000				
	Program perencanaan pembangunan daerah								
	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan balikpapan kota			34.742.500	34.742.500				
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan prapatan			15.000.000	13.719.400				

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan telaga sari			15.000.000	7.425.000				
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan klandasan ulu			15.000.000	14.700.000				
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan klandasan ilir			15.000.000	12.050.000				
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan damai			15.000.000	15.000.000				
	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr								
	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera			160.000.000	154.000.000				
KecamatanBalikpapan Timur									
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	84		2.402.292.000	2.009.591.519	selesai	baik		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus	83		578.814.000	478.695.200	selesai	baik		
	Program peningkatan disiplin aparatur	86		39.900.000	34.425.000	selesai	baik		
3	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	19		51.903.000	9.745.000	sesuai	kurang baik		
4	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan berbasis Masyarakat di Lingkungan	3		58.350.000	1.678.200	selesai	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekolah								
5	Program penanggulangan kemiskinan terpadu	93		149.865.500	139.870.350	selesai	baik		
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	29		68.852.000	19.937.500	selesai	baik		
7	Program pengembangan pemberdayaan masyarakat	93		600.300.000	560.477.750	selesai	baik		
8	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	90		2.226.806.000	2.007.610.000	selesai	baik		
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	37		1.464.915.000	536.770.100	selesai	baik		
10	Program Pembinaan peran serta 76Masyarakat dalam pe93layanan KB/KR yang68 mandiri	78		248.030.000	192.455.050	selesai	baik		
11	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	76		93.000.000	71.000.000	selesai	baik		
12	Program pengelolaan keragaman budaya	93		77.250.000	71.681.900	selesai	baik		
13	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	68		79.568.000	54.061.750	selesai	baik		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Program perencanaan pembangunan daerah	91		64.366.000	58.830.750	selesai	baik		
KecamatanBalikpapan Utara									
	Program pelayanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			630.846.000	374.049.767	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			15.914.000	8.713.400	Renstra	lengkap		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			199.800.000	187.526.433	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan alat tulis kantor			199.754.900	182.443.940	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			57.755.000	52.561.790	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			29.822.000	29.331.830	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			10.360.000	8.160.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan makanan dan minuman			152.119.900	133.223.200	Renstra dan Renja	lengkap		
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah			408.447.000	408.047.552	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran			1.161.938.000	1.065.915.750	Renstra dan Renja	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Pengadaan peralatan gedung kantor			332.115.000	331.796.875	Renstra	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			24.720.000	20.000.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			116.699.000	70.918.786	Renstra	lengkap		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			142.988.000	90.061.490	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyediaan/sewa gedung kantor			25.750.000	0	Renstra	tidak ada lagi sewa gedung kantor		
	Program peningkatan disiplin aparatur								
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			42.119.000	39.000.000	Renstra	lengkap		
	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu			25.900.000	24.160.000	Renstra	lengkap		
	Program fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah								
	Pembinaan kesehatan berbasis			69.757.000	51.580.300	Renstra dan Renja	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	masyarakat di lingkungan sekolah (uks)								
	Program penanggulangan kemiskinan terpadu								
	Pengelolaan data pmks miskin penerima program penanggulangan kemiskinan			58.405.000	52.739.500	Renstra	lengkap		
	Fasilitasi program keluarga harapan (pkh) Kecamatan			51.800.000	47.205.000	Renstra	lengkap		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan								
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan batu ampar (DAU tambahan)			271.891.000	-	Renja	-		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gunung samarinda(DAU tambahan)			247.936.000	-	Renja	-		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan karang joang (DAU tambahan)			302.940.500	-	Renja	-		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan muara rapak (DAU tambahan)			305.000.000	-	Renja	-		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gunung samarinda baru (DAU tambahan)			227.375.000	-	Renja	-		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan graha indah (DAU tambahan)			262.000.000	-	Renja	-		
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan batu ampar (DAU tambahan)			81.050.000	20.855.550	Renja	lengkap		
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan gunung samarinda (DAU tambahan)			105.005.000	-	Renja	-		
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan karang joang (DAU tambahan)			50.000.500	-	Renja	-		
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan muara rapak (DAU tambahan)			47.941.000	-	Renja	-		
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan gunung samarinda baru (DAU tambahan)			125.566.000	62.256.000	Renja	lengkap		
	Pengembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan gununggraha indah (DAU tambahan)			90.941.000	-	Renja	-		
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat								
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan batu ampar			17.355.000	16.155.000	Renstra	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan gunung samarinda			17.372.000	16.940.000	Renstra	lengkap		
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan karang joang			17.372.000	15.068.000	Renstra	lengkap		
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan muara rapak			17.372.000	16.047.000	Renstra	lengkap		
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan gunung samarinda baru			17.372.000	16.805.500	Renstra	lengkap		
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan graha indah			17.372.000	17.040.000	Renstra	lengkap		
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan (pkk) Kecamatan Balikpapan Utara			18.810.000	18.412.000	Renstra	lengkap		
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan gunung samarinda			53.045.000	51.439.000	Renstra	lengkap		
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan karang joang			53.045.000	53.034.800	Renstra	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan muara rapak			53.045.000	51.923.000	Renstra	lengkap		
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan gunung samarinda baru			53.045.000	42.505.000	Renstra	lengkap		
	Program peningkatan peran Kecamatan dan kelurahan			**3.898.107.750**	**3.776.357.500**				
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan batu ampar			630.000.000	630.000.000	Renstra	lengkap		
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan gunung samarinda			468.000.000	468.000.000	Renstra	lengkap		
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan karang joang			549.000.000	549.000.000	Renstra	lengkap		
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan muara rapak			774.000.000	774.000.000	Renstra	lengkap		
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan gunung samarinda baru			270.000.000	270.000.000	Renstra	lengkap		
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan graha indah			594.000.000	594.000.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Fasilitasi penyelenggaraan kerja bakti massal			118.746.000	113.580.000	Renstra dan Renja	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih,hijau, dan sehat			91.697.500	84.930.000	Renstra	lengkap		
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			34.884.400	34.284.400	Renstra dan Renja	lengkap		
	Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat			170.000.000	99.123.000	Renstra	lengkap		
	Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan			127.480.000	111.666.000	Renstra	lengkap		
	Penyelenggaraan pelayanan izin membuka/memanfaatkan tanah negara (IMTN)			70.299.850	47.774.100	Renstra	lengkap		
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah			**25.550.000**	**23.583.000**			**25.550.000**	
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah			25.550.000	23.583.000	Renstra	lengkap	25.550.000	
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			**18.525.000**	**10.908.000**			**18.525.000**	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani			18.525.000	10.908.000	Renstra	lengkap	18.525.000	

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pengelolaan keragaman budaya			**75.653.000**	**65.585.000**			**75.653.000**	
	Penyelenggaraan seleksi tilawatil qur'an dan festival seni islam			75.653.000	65.585.000	Renstra	lengkap	75.653.000	
	Program perencanaan pembangunan daerah			**65.379.000**	**57.630.100**				
	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara			15.913.000	14.738.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan batu ampar			9.707.000	8.362.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan gunung samarinda			7.850.000	6.950.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan karang joang			9.059.000	8.536.100	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan muara rapak			7.692.000	6.092.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan gunung samarinda baru			8.422.000	6.612.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan graha indah			6.736.000	6.340.000	Renstra dan Renja	lengkap		
	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr			**95.000.000**	**88.226.600**				
	Pembinaan institusi masyarakat dan			95.000.000	88.226.600	Renstra dan Renja	lengkap		

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keluarga sejahtera								
Kecamatan Balikpapan Barat									
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**		**3348**	**2.392.382.000**	**2.229.012.839**	-			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		131	292.740.000	291.054.895	-			
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		60	15.913.500	8.392.500	-			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		138	69.795.200,00	68.979.625	-			
	Penyediaan alat tulis kantor		131	199.977.000,00	196.942.085	-			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		135	72.857.800,00	71.676.800	-			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		139	17.015.000,00	16.835.000	-			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2362	18.480.000,00	7.134.000	-			
	Penyediaan makanan dan minuman		136	203.362.500,00	170.840.000	-			
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		44	330.788.000,00	328.420.526	-			
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		72	1.171.453.000,00	1.068.737.408	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		**605**	**557.802.000**	**492.249.387**	-			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		135	274.000.000,00	253.260.600	-			
	Pengadaan peralatan gedung kantor		136	37.480.000,00	34.793.000	-			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		139	15.900.000,00	15.855.000	-			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		56	116.699.000,00	82.348.787	-			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		139	113.723.000,00	105.992.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur		**15**	**36.026.000**	**31.270.000**	-			
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan		4	11.526.000,00	11.250.000	-			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		11	24.500.000,00	20.020.000	-			
	Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di sekolah		**21720**	**68.950.000,00**	**59.305.000**	-			
	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah (uks)		21720	68.950.000,00	59.305.000	-			
	Program penanggulangan kemiskinan		**1662**	**133.992.600,00**	**128.562.600**	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terpadu								
	Pengelolaan data pmks miskin penerima program penanggulangan kemiskinan		1152	24.719.600,00	24.719.600	-			
	Fasilitasi program keluarga harapan (pkh) Kecamatan		510	109.273.000,00	103.843.000	-			
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		**510**	**69.714.500,00**	**62.814.500**	-			
	Fasilitasi pengembangan Kecamatan layak anak		510	69.714.500,00	62.814.500	-			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan		**222294**	**2.168.408.500,00**	**44.410.000**	-			
	Pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (DAU tambahan)		111172	2.117.646.000,00	-	-			
	Koordinasi dan sosialisasi ttg/posyantek, ukm, dan lpm		111122	50.762.500,00	44.410.000	-			
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat		**5067**	**533.822.100,00**	**502.765.950**	-			
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan baru ilir		27	26.341.000,00	26.197.050	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan baru Tengah		21	26.344.500,00	25.073.200	-			
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan baru ulu		20	36.344.000,00	24.937.500	-			
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan karingau		26	26.345.000,00	24.523.000	-			
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan margo mulyo		20	26.345.000,00	23.065.000	-			
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan marga sari		34	26.345.000,00	25.082.000	-			
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan lembaga		140	56.757.600,00	56.187.600	-			
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan baru ilir		837	51.500.000,00	47.755.250	-			
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan baru Tengah		860	51.500.000,00	50.356.900	-			
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan		815	51.500.000,00	49.285.050	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lingkungan kelurahan baru ulu								
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan kariangau		1127	51.500.000,00	49.665.000	-			
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan margo mulyo		850	51.500.000,00	51.282.500	-			
	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan marga sari		290	51.500.000,00	49.355.900	-			
	Program peningkatan peran Kecamatan dan kelurahan		**558246**	**3.437.166.900**	**3.278.470.150**	-			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan baru ilir		68	585.000.000,00	567.000.000	-			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan baru Tengah		58	486.000.000,00	486.000.000	-			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan baru ulu		58	477.000.000,00	477.000.000	-			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan kariangau		17	117.000.000,00	117.000.000	-			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt kelurahan margo mulyo		55	450.000.000,00	450.000.000	-			
	Penyelenggaraan tugas dan fungsi rt		36	297.000.000,00	288.000.000	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kelurahan marga sari								
	Kerja bakti massal gabungan di wilayah Kecamatan		111132	67.640.000,00	110.393.800	-			
	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat		111124	158.940.000,00	150.040.000	-			
	Pembinaan pemerintahan kelurahan		111137	5.960.000,00	2.950.000	-			
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		111123	29.831.000,00	28.343.500	-			
	Koordinasi / rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan		520	325.337.500,00	205.290.000	-			
	Penyelenggaraan pelayanan izin membuka/memanfaatkan tanah negara		111117	70.296.800,00	51.571.300	-			
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (rt)		295	227.149.900,00	211.692.400	-			
	Pelaksanaan komunikasi / informasi / edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat		1506	140.011.700,00	133.189.150	-			
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah		**107**	**168.705.000,00**	**139.727.500**	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penertiban izin usaha mikro dan kecil (iumk)		107	168.705.000,00	139.727.500	-			
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		**131**	**19.110.000,00**	**16.000.000**	-			
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani		131	19.110.000,00	16.000.000	-			
	Program pengelolaan keragaman budaya		**60**	**79.998.500,00**	**78.328.500**	-			
	Fasilitasi penyelenggaraan seleksi tilawatil qur'an (stq) tingkat Kecamatan dan musabaqah tilawatil qur'an (mtq)		60	79.998.500,00	78.328.500	-			
	Program perencanaan pembangunan daerah		**100**	**17.955.000,00**	17.455.000	-			
	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat		100	17.955.000,00	17.455.000	-			
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan baru ilir		80	3.260.000,00	3.038.000	-			
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan baru Tengah		68	3.296.000,00	3.252.000	-			
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan baru ulu		60	3.295.000,00	3.094.000	-			
	Penyelenggaraan musrenbang		53	3.296.000,00	2.832.000	-			

No	Program/kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kelurahan kariangau								
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan margo mulyo		54	3.296.000,00	2.736.000	-			
	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan marga sari		79	3.260.000,00	3.038.000	-			
	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr		**111137**	**101.796.000,00**	**96.834.500**	-			
	Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera		111137	101.796.000,00	96.834.500	-			

C. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Tabel 3.4.
Ringkasan Urusan Pemerintahan Umumyang Dilaksanakan

Urusan Pemerintahan Umum
perangkat daerah penyelenggara: Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	program pelayanan administrasi								

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	perkantoran								
	kegiatan : rapat - rapat dan koordinasi kedalam dan keluar daerah	100%	44	151.465.000	144.372.468	sesuai			
	program pengelolaan hibah dan bantuan sosial								
	kegiatan : pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial pemrintah Kota Balikpapan	100%	-	2.750.000	-	sesuai			
	program pengembangan wawasan kebangsaan								
	kegiatan : peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	100%		25.100.000	23.562.763	sesuai			
	kegiatan : pengelolaan data sarana dan rumah ibadah dan pondok pesantren	100%		4.114.600	2.150.000	sesuai			
	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	kegiatan : sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	100%		16.300.300	16.616.550	sesuai			
	kegiatan : pembinaan dan kerjasama terhadap fpk,fkub,dan ppwk,kominda<,fkdm kta balikapan	100%		22.300.000	22.267.750	sesuai			
	kegiatan : fasilitasi kegiatan peningkatan hari-hari nasional	100%		1.950.000	1.850.000	sesuai	kegiatan : fasilitasi kegiatan peningkatan hari-hari nasional		
	program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
	kegiatan : fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat (pekat)	100%		6.500.000	6.150.000	sesuai			
	kegiatan : monitoring kondusif Kota	100%		5.541.200	5.541.200	sesuai	kegiatan : monitoring kondusif Kota		
	program pendidikan politik masyarakat						**program pendidikan politik masyarakat**		

No	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Spm / Realisasi Program	Jumlah Pegawai	Alokasi & Realisasi Anggaran		Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Kondisi Sarpras	Masalah & Solusi	Lain-Lain
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)				
	kegiatan : pengelolaan beRKAs pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik	100%		8.900.000	7.485.500	sesuai			
	kegiatan : pemantauan perkembangan situasi politik daerah	100%		2.850.000	1.900.000	sesuai			
	kegiatan : sosialisasi perundang-undangan tentang ormas, partai politik pemilu dan peraturan lainnya			3.800.000	3.000.000	sesuai			
	kegiatan : desk pemilu/pemilukada	100%		204.992.023	204.987.523	sesuai			
	program ketahanan politik ekonomi, sosial, dan budaya								
	kegiatan : deteksi dini terhadap potensi gejala/peristiwa/ancaman/tantangan/hambatan/dan ganguan	100%		74.600.000	62.110.285	sesuai			
	kegiatan : koordinasi rencana aksi penanggulangan konflik sosial			15.600.000	9.543.300	sesuai			
	kegiatan : monotoring, evaluasi, dan pemantauan orang asing (ngo)			1.575.660	15.756.600	sesuai			

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Berdasarkan indikator kinerja kunci **ii.1**, maka tingkat pencapaian kinerja, **yang meliputi 13 aspek, 36 fokus dan 43 ikk** dapat dilihat pada lampiran ikk ii.1 (terlampir).

2. Tataran pelaksana kebijakan

1) Administrasi umum (8 aspek)

Berdasarkan indikator kinerja kunci **ii.2**, maka tingkat pencapaian kinerja, **meliputi 8 aspek, 17 fokus, dan 21 ikk**pada dinas pelaksana urusan konkuren (urusan wajib dan pilihan) dapat dilihat pada lampiran ikk ii.2 (terlampir).

2) Fungsi penunjang urusan pemerintahan

Berdasarkan indikator kinerja kunci **ii.2**, maka tingkat pencapaian kinerja, **meliputi 8 aspek, 17 fokus, dan 21 ikk** pada fungsi penunjang urusan pemerintahan (badan, fungsi kesekretariatan, kantor dan kecamatan) dapat dilihat pada lampiran ikk ii.2 (terlampir).

3) Urusan pemerintahan umum

Berdasarkan indikator kinerja kunci **ii.2**, maka tingkat pencapaian kinerja, **meliputi 8 aspek, 17 fokus, dan 21 ikk** pada urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik kota balikpapan, dapat dilihat pada lampiran ikk ii.2 (terlampir).

4) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan

Berdasarkan indikator kinerja kunci **ii.3**, maka tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan masing-masing urusan wajib di lingkungan pemerintah kota balikpapan tahun 2019, **yang meliputi 24 urusan wajib dengan 126 ikk,6 urusan pilihan dengan 20 ikk, fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan 17 ikk dan urusan pemerintahan umum dengan 2 ikk,** dapat dilihat pada lampiran ikk ii.3 (terlampir).

BAB IV - REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

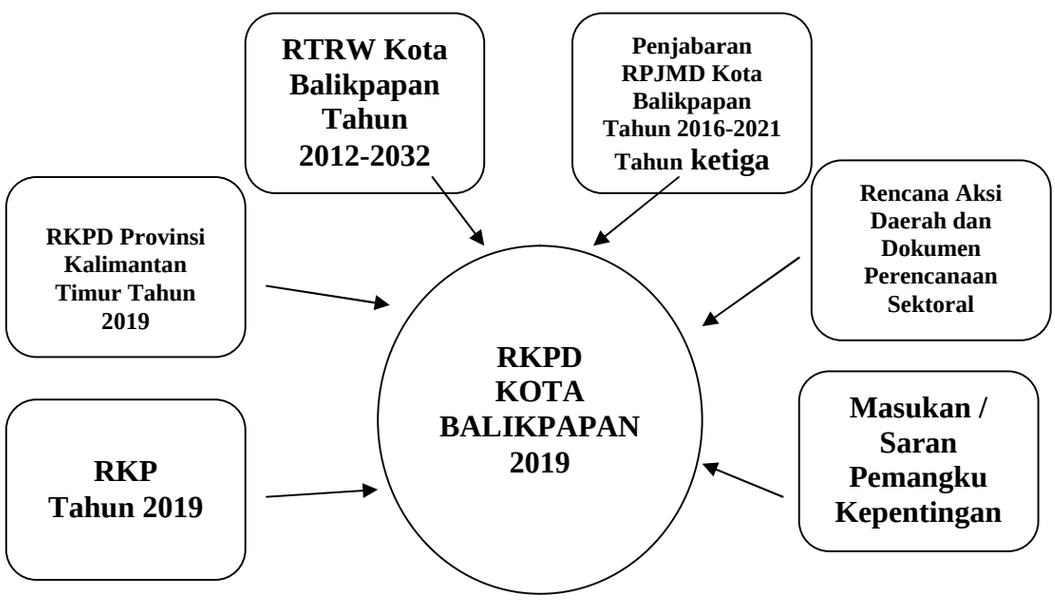
BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Prioritas dan sasaran RKPD Kota Balikpapan Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identfikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Oleh karena itu, prioritas dan sasaran pembangunan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. PrioritasdanSasaranRKPdanRKPDProvinsiKalimantanTimurTahun2019;
2. ArahpengembanganwilayahsesuaidenganRencanaTataRuangWilayah(RTRW)KotaBalikpapanTahun2012-2032;
3. PenjabaranRPJMDKotaBalikpapantahun2016-2021TahunKetiga;
4. RencanaAksiDaerahdanDokumenPerencanaanSektoralKota Balikpapan;dan
5. Masukan/SaranpemangkukepentinganterhadapRancanganAwalRKPDKotaBalikpapanTahun2019.

Proses integrasi penyusunan RKPD kota Balikpapan tahun 2019 dijelaskanmelaluitabel4.1.dibawahini.

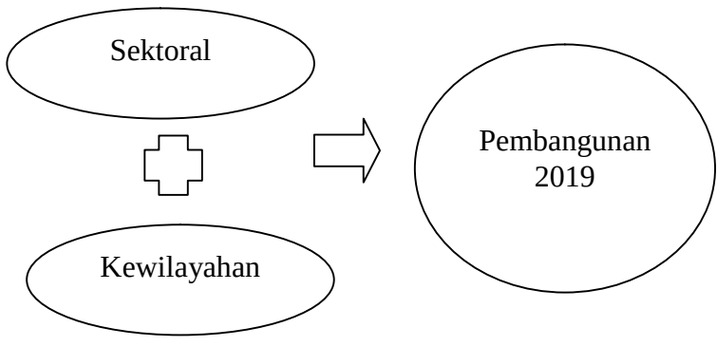
Gambar 4.1.
Komponen Penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2019



Secara substansi RKPD Kota Balikpapan tahun 2019 mengintegrasikan pendekatan program sektoral dan kewilayahan,sebagaimanadigambarkan

dalamgambar4.2.berikutini.

Gambar 4.2.
Fokus Program Pembangunan Tahun 2019



Kerangka prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahap 2019 dipayungi oleh visi dan misi Walikota sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 dan sinkronisasi dengan Sasaran Prioritas RPJMN 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Selanjutnya akan diuraikan substansi isi dokumen yang dijadikan rujukan penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2019. RKPD Kota Balikpapan tahun 2019 memuat rencana pembangunan sektoral integratif dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta memuat rencana pembangunan wilayah terpadu. Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu: (1) tujuan dan sasaran pembangunan; (2) prioritas pembangunan tahun 2019; (3) arah kebijakan pembangunan kewilayahan terpadu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

BerdasarkanRPJMNTahun2015-2019,kebijakanpembangunannasionaldiarahkanpadaupayapencapaianvisidanmisipembangunannasionaltahun2015-2019.Visitersebutadalah“TerwujudnyaIndonesiaYangBerdaulat,Mandiri,dan BerkepribadianBerlandaskanGotong-Royong”,yangdilakukanmelalui7misipembangunanyaitu:

1. mewujudkankeamanannasionalyangmampumenjagakedaulatanwilayah ,menopangkemandirianekonomidenganmengamankan sumberdayamaritim,danmencerminkankepribadianIndonesiasebagainegarakepulauan;
2. mewujudkanmasyarakatmaju,berkeseimbangan,dandemokratisberlandaskannegarahukum;
3. mewujudkanpolitikluarnegeribebas-aktifdanmemperkuatjatidirisebagainegaramaritim;

4. mewujudkankualitashidupmanusiaIndonesiayangtinggi,maju,dansejahtera;
5. mewujudkanbangsayangberdayasaing;
6. mewujudkanIndonesiamenjadinegaramaritimyangmandiri,maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. mewujudkanmasyarakatyangberkepribadiandalamkebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut **"Nawa Cita"**, yaitu:

1. menghadirkankembaliNegarauntukmelindungisegenapbangsadanmemberikanrasaamankepadaseluruhwarganegara;
2. membuatPemerintahselaluhadirdenganmembanguntatakelolapemerintahanyangbersih,efektif,demokratis,danterpercaya;
3. membangunIndonesiadaripinggirandenganmemperkuatdaerahdaerahdandesadalamkerangkanegarakesatuan;
4. memperkuatkehadirannegaradalammelakukanreformasisistemdanpenegakanhukumyangbebaskorupsi,bermartabat,danterpercaya;
5. meningkatkankualitashidupmanusiadanmasyarakatIndonesia;
6. meningkatkanproduktivitasrakyatdandayasaingdipasarInternasionalsehinggabangsaIndonesiabisamajudanbangkitbersamabangsa-bangsaAsialainnya;
7. mewujudkankemandirianekonomidenganmenggerakkansektor-sektorstrategisekonomidomestik;
8. melakukanrevolusikarakterbangsa;dan
9. memperteguhkebhinekaandanmemperkuatrestorasisocial Indonesia

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,mental/karakter;
2. Dimensipembangunansektorunggulanmeliputikedaulatanpangan, kedaulatanenergidan ketenagalistrikan,kemaritimandankelautan, pariwisatadanindustri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan,dan antarwilayah meliputidesa,pinggiran,luarJawa, dankawasantimur.

Ketigadimensitersebutperludidukungolehkondisikepastiandanpenegakanhukum,keamanandanketertiban,politikdandemokrasi,sertatatakelolapemerintahandanreformasibirokrasi.Pembangunannasionaljangkamenengahdilaksanakanuntukmencapaisasaranutamapembangunannasionalditahun2019,antaralainmeliputi:

1. Pertumbuhanekonomisebesar5,4-5,8%;
2. IndeksGinisebesar0,38-0,39;
3. Tingkatkemiskinansebesar8,5-9,5%;
4. IndeksPembangunanManusia(IPM)sebesar71,98;
5. TingkatPengangguranTerbuka(TPT)sebesar4,8–5,2%.

TemaPembangunanNasionalTahun2019yaitu:PemerataanPembangunanuntukPertumbuhanBerkualitas".Pendekatanyangdigunakandalamprosesperencanaanpembangunannasionaltahun2019adalahHolistik,Tematik,Integratif,danSpasialmelaluipenguatankebijakan*MoneyFollowProgram*.
PrioritaspembangunannasionaldalamRKPtahun2019sejumlah5prioritasnasional,yaitu:

1. PembangunanManusiamelaluiPenguranganKemiskinandanPeningkatanPelayananDasar,denganprogramprioritas:
   a) percepatanpengurangankemiskinan;
   b) peningkatanpelayanankesehatandangizimasyarakat;
   c) pemerataanlayananpendidikanberkualitas;
   d) peningkatanaksesmasyarakatterhadapperumahandanpermukimanlayak;dan
   e) peningkatantatakelolalayanandasar.
2. PenguranganKesenjanganantarwilayahmelaluiPenguatanKonektivitasdanKemaritiman,denganprogramprioritas:
   a) peningkatanKonektivitasdaTIK;
   b) peningkatanSistemLogistik;
   c) percepatanPembangunanDaerahTertinggaldanDesa;
   d) percepatanPembangunanPapuadanPapuaBarat;dan
   e) penanggulanganBencana.
3. PeningkatanNilaiTambahEkonomimelaluiPertanian,Industri,dan JasaProduktif,denganprogramprioritas:
   a) peningkatanEkspordanNilaiTambahProdukPertanian;
   b) percepatanPeningkatanEkspordanNilaiTambahIndustri Pengolahan;
   c) peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif;
   d) percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan
   e) pengembangan Iptek dan Inovasi untukMeningkatkan Produktivitas.
4. PemantapanKetahananEnergi,Pangan,danSumberDayaAir,denganprogr

amprioritas

a) peningkatanProduksidanPemenuhanKebutuhanEnergi;
b) peningkatanProduksi,AksesdanKualitasKonsumsiPangan;
c) peningkatanKuantitas,KualitasdanAksesibilitasSumberdayaAir;dan
d) peningkatanDayaDukungSDAdanDayaTampungLingkungan.

5. StabilitasKeamananNasionaldanKesuksesanPemilu,denganprogrampri oritas:
   a) KamtibmasdanKeamananSiber;
   b) KesuksesanPemilu;
   c) PertahananWilayahNasional;
   d) KepastianHukumdanReformasiBirokrasi;dan
   e) EfektivitasDiplomasi.

Selainitu,sesuaidenganPeraturanPresidenNomor58Tahun2017tentangPerub ahanAtasPeraturanPresidenNomor3Tahun2016tentangPercepatanPelaksan aanProyekStrategisNasional,terdapatbeberapaproyekstrategisnasionalyangh arusmendapatkandukunganPemerintahDaerahkhususnyapenyelesaiannya padatahun2019yaituantaralain:

1. PembangunanJalanTolBalikpapan–Samarinda;
2. PembangunanJembatanPulauBalang;
3. PembangunanWadukTeritip;
4. PembangunanEmbungAjiRaden;
5. PembangunanSPAMTeritip;
6. PenangananPermukimanKumuhdiKelurahanManggar;dan
7. UpgradingKilangBalikpapan(RDMP).

4.1.2. ArahKebijakandanPrioritasRKPDProvinsiKalimantanTimurTahun 2019

PembangunandaerahKalimantanTimurTahun2019merupakantahunpertam adalampembangunanjangkamenengahProvinsiKalimantanTimurTahun2018 -
2023.SesuaidenganVisiRPJPDKaltimyaitu“TerwujudnyaMasyarakatyangAdil danSejahteraDalamPembangunanBerkelanjutan”,arahanpembangunanpad atahun2018-
2023merupakansasaranpembangunanlimatahunantahapIVyangdiharapkan mampumewujudkanmasyarakatyangadildansejahteradisegenapwilayahdala mpelaksanaanpembangunanberkelanjutan.Berdasarkanhasilkinerjapemba ngunantahunsebelumnya,sertadenganmemperhatikanmainstreamingperub ahaniklim,perubahantatakelolapemerintahan,upayamengatasikesenjangan pendapatandankesenjanganwilayahsertaperluasankesempatankerja,makak

ebijakanpembangunandaerahProvinsiKalimantanTimurTahun2019ditujukanuntuk“MEMPERKUATDAYASAINGINVESTASIUNTUKMEMPERCEPATHILIRISASIINDUSTRI”.Gunapercepatanpencapaiantujuanpembangunandaerahtahun2019tersebut,ditetapkanprioritaspembangunandaerahProvinsiKalimantanTimurTahun2019,meliputi:

1. PenguatanPendidikanVokasidanKeterampilanTenagaKerja;
2. PembangunanInfrastrukturdanKonektivitasSentraProduksi,KawasanIndustridanOutlet;
3. PeningkatanKemudahanBerusahadanPengembanganEkonomiKerakyatan;
4. PeningkatanProduksiPertaniandanPerikanan;
5. PeningkatanSumberdayaAparaturdanKualitasPelayananPublik.

PrioritaspembangunandaerahProvinsi Kalimantan Timurtahun2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam sasaran dan indikator, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019

PRIORITASPEMBANGUNAN		PROGRAMPRIORITAS		KEGIATANPRIORITAS	
1	PENGUATANPENDIDIKANVOKASIDANKETERAMPILANTENAGAKERJA	1	Programpeningkatankualitasdanproduktifitastenagakerja	1	Pendidikandanpelatihanbagipencarikerja
				2	Pengadaansaranadanprasaranapelatihan
		2	ProgramPendidikan SekolahKejuruan	3	Pembangunandanrehabgedungsekolahkejuruan
				4	PengadaanSaranadan PrasaranaSekolahKejuruan
				5	Pembangunanruang praktikumSMK
2	PENINGKATAN KEMUDAHANBERUSAHADANPENGEMBANGANEKONOMIKERAKYATAN	3	Programpenataanstruktur industri	6	Kegiatanpembinaan keterkaitanprodukindustrihuluhinggakehilir
		4	ProgramPembangunan SaranaPrasaranaKEK Maloy	7	PembangunanTangki TimbunKEKMaloy
		5	ProgramPengendalian PelaksanaanInvestasi	8	KegiatanPembinaandanpengawasanpelaksanaaninvestasi
		6	TataHutandan PemanfaatanKawasan	9	Pengawasandan PengendalianPengelolaan HutandanPemanfaatanHasilHutan
		7	Programpeningkatan efisiensiperdagangandalamnegeri	10	Peningkatansistemdanjaringaninformasiperdagangan
3	INFRASTRUKTURDAN	8	ProgramPembangunan	11	PembangunanJalan

PRIORITASPEMBANGUNAN		PROGRAMPRIORITAS		KEGIATANPRIORITAS	
	KONEKTIVITASSENTRAPRODUKSI,KAWASANINDUSTRIDANOUTLET		JalandanJembatan	12	(Talisayan-Sangkulirang-Maloy)
		9	ProgramPembangunanPrasaranaTransportasiLautdanSDP	13	Pembangunan,rehabilitasidanpemeliharaanpelabuhanlautdanSDP
		10	PembangunanJalandanJembatan	14	PembangunanJalan
				15	(AksesJembatanPulauBalang)
		11	ProgramPengelolaanSumberDayaAir	16	PengendalianDayaRusakAir,PenyediaanAirBakudanPengamananPantai
				17	PengembangandanPengelolaanJaringanIrigasi,RawadanJaringanIrigasiLainnya
				18	PengembangandanPengelolaanJaringanIrigasi,RawadanJaringanIrigasiLainnya
				19	(Operasi&PemeliharaanJaringanIrigasi)
				20	Perencanaan,Pengawasan,danManajemenPengelolaanSumberDayaAir
4	PENINGKATAN PRODUKSIPERTANIANDANPERIKANAN	12	Programpenyediaanbahantanaman	21	PerbanyakanBahanTanamanPerkebunan
		13	ProgramPeningkatanProduktivitasPerkebunan	22	PeremajaanKomoditiPerkebunan
		14	ProgramPengembanganperikanantangkap	23	RehabilitasiKomoditiPerkebunan
				24	IntensifikasiKomoditiPerkebunan
				25	KegiatanPengelolaanKenelayanan
		15	Programpeningkatanpenyediaanbenihlkandanudangunggulan	26	OperasionalpembenihandiBalaiperikanandanHatcherySkalaRumahTangga
				27	Rehabsaranadanprasaranaperbenihan
		16	PengembanganKawasanPeternakan	28	PeningkatanSDMperbenihan
		17	ProgramPeningkatanProduksiPeternakan	29	PengembanganKawasandanPeningkatanProduksiPakanTernak
				30	PengembanganPerbibitandanInseminasiBuatan
		18	Programpeningkatanproduksibenihtanamanpangan	31	Penumbuhan,pembinaandanpengembanganbenihpadidanpalawija

PRIORITASPEMBANGUNAN		PROGRAMPRIORITAS		KEGIATANPRIORITAS	
		19	ProgramPeningkatan produksipertanian tanamanpangan	32	pengembangansentra produksitanamanpangan
5	PENINGKATANSUMBERDAYAAPARATURDANKUALITASPELAYANANPUBLIK	20	ProgramPeningkatan pelayananpublik	33	Peningkatankualitas pelayananpublik
		21	Programpengembangan zonaintegritas	34	PenerapanzonaintegritaspadaSKPD
		22	Programpengembangan SPM	35	Pembinaan,monitoringdan evaluasipenyelenggaraanStandarPelayananMinimal(SPM)

Tujuan,arahkebijakan,prioritasdanfokuspembangunandaerahProvinsiKalimantanTimurtahun2019merupakanupayagunamencapaitargetsasaranmakro pembangunandaerahtahun2019yaitu:

Tabel 4.2.

Target Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2019

Ekonomi Makro	2016	2017	Target 2018	Proyeksi 2019
Pertumbuhan Ekonomi	-0,38	3,13	0,5 ± 1	2,5 ± 1
Inflasi (%)	3,39	3,15	4 ± 1	4 ± 1
Investasi (Rp. Triliun)	20,19	28,20	44,19	53,53

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2019

Setelah memperhatikan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Dari hasil formulasi tersebut tema pembangunan Tahun 2019Kota Balikpapan adalah:

“PENGEMBANGANEKONOMIKREATIFDALAMRANGKAPEMANTAPANSEKTORJASA,INDUSTRI,PERDAGANGANPARIWISATAPENDIDIKANDANBUDAYA”

Selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 berdasarkan fokus tema pembangunan sebagai berikut:

1. PengembanganEkonomiKreatif

PerkembanganperekonomianKotaBalikpapantidaklepasdariperkembanganperekonomianregionalmaupunglobal.ProdukDomestikRegionalBrutoKalimantanTimurmengalamidistorsiakibattingginyaketergantunganpadahargapasarglobal,sehinggajugamempengaruhiperekonomianKotaBalikpapanyangmerupakanpintugerbangKalimantanTimurdansebagaikotajasayangmemberikansupportingterhadapkegiatanyangadadisekitar/hinterlandKotaBalikpapan.Olehkarenaitu,fokuspengembanganekonomikreatifmerupakanupayaPemerintahKotaBalikpapanuntukmendorongekonomiberkelanjutandanpersiapansertadukunganterhadaptransformasiekonomiyangdilakukanPemerintahProvinsiKalimantanTimur.

Salah satu alasan dari pengembangan industri kreatif adalah adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak para citrasuatu kawasan. Sasaran fokus tema ini adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan nilai tambah produksi Industri, peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM danKoperasi yang mandiri dan pengembangan jaringan distribusi dan keamanan perdagangan. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dalam rangka memenuhi sasaran menurunkan angka pengangguran yang diarahkan melalui pembinaan dan pelatihan tenaga kerja yang produktif dan kreatif serta berdaya saing, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

2. PemantapanSektorJasa,Industri,Perdagangan,Pariwisata,Pendidikanda nBudaya

   SesuaidenganVisipembangunanjangkapanjangKotaBalikpapansebagaimanayangtercantumdalamRPJPDKotaBalikpapan2005–2025adalah:“MewujudkanKotaBalikpapansebagaiLimaDimensi:Jasa,Industri,Perdagangan,Pariwisata,PendidikandanBudayadalamBingkaiMadinatulIman”.MerujukpadaRPJPDKotaBalikpapan,fokuspembangunanjangkamenengahperiode2016-2021diarahkanpadapembangunandaerahsecaramenyeluruhdiberbagaibidangdenganmenekankandayasaingperekonomiandaerahyangditopangolehkuatnyakemandiriandankeunggulandaerah,yangditujukanuntukmencapaikemandiriandankesejahteraanmasyarakatKotaBalikpapandenganfokuspembangunanlebihdiorientasikanbagaimanamewujudkanKotaBalikpapansebagaikotajasaterkemuka.

   RKPDtahun2019merupakanpenjabarantahunketigadariRPJMD2016—2021yangmemuatsasaran,arahkebijakan,danstrategipembangunanyangdisusunsecaraterencanadansistematisdenganmemanfaatkansumberday

ayangtersediasecaraoptimal,efisien,efektif,danakuntabel.Tampakjelasba hwapembangunanpadaRKPDtahun2019adalahsebagaibagiandaritahapa nuntukmencapaivisidanmisiRPJMDKotaBalikpapanTahun2016— 2021.Olehkarenaitudirumuskantujuandansasaranpembangunantahun 2019yaitu:

a) MewujudkanSumberdayaManusiayangCerdasIntelektual,CerdasEmo sional,CerdasSpiritualdanBerdayaSaingSumberdayamanusiamenjad ikomponenutamadalampelaksanaanpembangunansekaliguspenentu keberhasilanpembangunandaerah.SDMyangberkualitastidakhanyac erdasintelektual,namunjugaharuscerdasemosionaldancerdasspiritua lsehinggakombinasiketigakecerdasantersebutakanmenghasilkanSD Myangberdayasaingdanmembentuk*smartpeople*ataumasyarakatcerd as.Sektorpembangunanyangpalingberpengaruhterhadapsumberdaya manusiaadalahpendidikan.PembangunanpendidikanKotaBalikpapa npadatahun2019diperluaspadakonseppendidikanberbasisIPTEKdan berlandaskanIMTAQyangdiarahkanpadaPeningkatanKualitasPendidi kanNonFormalberbasisIPTEKdanBerlandaskanIMTAQ,perluasansub sidipendidikanbagiseluruhpesertadidikusiasekolah,peningkatankual itasdankuantitastenagapendidiksertatenagakependidikandanpening katankualitasdankuantitassarpraspendidikan.Adapunsasaranyangi ngindicapaiadalahmeningkatnyakualitaspendidikandengantargetyait u:
   - Rata-rataLamaSekolahditargetkan10,49tahun
   - AngkaHarapanLamaSekolahditargetkan14,73tahun

b) MewujudkanMasyarakatyangSehatJasmanidanRohanisecaraBerkela njutanSalahsatusektoryangsangatberpengaruhdalammewujudkansu mberdayamanusiayangcerdasintelektual,cerdasemosionaldancerdas spiritualdanberdayasaingadalahfaktorkesehatan.Masyarakatyangse hatjasmanisangatmendukungpembentukanmanusiacerdasintelektu al,sedangkancerdasemosionaldancerdasspiritualmembutuhkanjiway angsehat.Sasarantujuantersebutadalahmeningkatkanderajatkesehat anmasyarakatyangberkelanjutan.Kesehatanmasyarakatyangberkela njutandiharapkantercapaimelaluistrategipeningkatanaksesibilitas,k ualitasdanmanajemenpelayanankesehatandenganrumusanoperasio nalakandilakukandenganpeningkatanupayapromotifdanpreventifmel aluilembagadanpengelolakesehatanmasyarakat,peningkatanmanaje menlayanankesehatanditingkatfasilitaskesehatantingkatpertamadan rujukandanoptimalisasiregulasipelayanankesehatan.Peningkatanak sesibilitasdimaksudkanuntukkemudahanseluruhlapisanmasyarakat

mengakseslayanankesehatantanpadiskriminasi.Kualitaspelayanan kesehatandifokuskanketersediaandanprofesionalismesumberdayam anusiasertasaranaprasaranakesehatan.Manajemenpelayanankeseha tandiharapkanmasyarakatsemakinpastidanmudahuntukmendapatk anlayanankesehatanyangcepat,tanggap,akuratdannyaman.Sasarand aritujuanmewujudkanmasyarakatyangsehatjasmanidanrohanisecara berkelanjutanadalahmeningkatkanderajatkesehatandengantargetya ngakandicapaipadaRKPDTahun2019adalahsebagaiberikut:

- Usia Harapan Hidup ditargetkan 73,99 tahun
- Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan 3/1000 kelahiran hidup;
- Angka Kematian Balita (AKBA) ditargetkan 4/1000 kelahiran hidup;
- Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 66/100.000 kelahiran hidup.

c) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas melalui Pengembangan Partisipasi yang Menyeluruh dan Berkesinambungan.Kesejahteraan masyarakat secara harfiah sangat dipengaruhi oleh kemampuanpemenuhansandang,pangandanpapan.Untukdapatme menuhisandang,pangandanpapan,masyarakatharusmempunyaipen ghasilanyangdiperolehdariusahadanpekerjaan.Selainitupemerataan kesejahteraanakansangatberpengaruhterhadapkondisikesejahteraa nmasyarakatyangakhirnyaberpengaruhpadakualitaskehidupanmas yarakat.Pengembanganpartisipasiyangmenyeluruhdanberkesinamb ungandiarahkanpadasemakintingginyakesadaranseluruhunsurmas yarakatbahwauntukmewujudkankehidupanmasyarakatyangberkual itasdibutuhkanperanmasyarakatluasdanbukanhanyatanggungjawa bpemerintah.Masyarakatharusmemilikidayajuangtinggidanpantang menyerahuntukselaluberusahamemenuhikebutuhankehidupanden ganmengedepankannilai-nilaispiritual.Lembaga-lembagamasyarakatberperanaktifmembangunmasyarakatuntukma mpumembantusesamanya.Duniausahameningkatkanrasasolidarita sdanpenghargaankepadamasyarakatdanlingkungansekitarnya.Upay apembentukankaraktertersebutharusdilakukanmenyeluruhdanberk esinambungansehinggaterwujudKotaBalikpapanyangmadani.
Sasaranyangakandicapaiuntukmewujudkantujuantersebutadalahm enurunnyajumlahpengangguransertameningkatkankualitashidupda nkesejahteraanmasyarakatsecaramenyeluruhdanberkelanjutan.Pen urunanjumlahpengangguranmenunjukkanbahwasemakinbanyakm

asyarakatusiakerjayangbekerjadanberusahasehinggamampumemenuhikebutuhanhidupyangberartimendukungkesejahteraandankualitashidupmasyarakatitusendiri.Untukpeningkatankualitashidupdankesejahteraanmasyarakatsecaramenyeluruhdanberkelanjutandifokuskanpadapengendaliankependudukan,penurunantingkatkemiskinandankesetaraangender.TargetsasaranmenurunnyapengangguranyangakandicapaipadaRKPD2019adalahTingkatPengangguranTerbuka(TPT)ditargetkansebesar5,05%.

d) MeningkatkanKualitasKotayangBerwawasanLingkungan.
Pembangunanyangberwawasanlingkunganataupembangunanberkelanjutanmemilikiciri-ciritertentu,yaitudicapaimanusiakarenamajunyaderappembangunanitumembawaadanyasalingketerkaitanbeberapasektor,antaralainlingkungandanmasyarakatsertakemanfaatandanpembangunan.Pembangunanakanselaluberkaitandansalingberinteraksidenganlingkunganhidup.Interaksitersebutdapatbersifatpositifataunegatif.Pengetahuandaninformasitentangberbagaiinteraksitersebutsangatdiperlukandalampembangunanberwawasanlingkungan.Pembangunanberwawasanlingkungansangatdiperlukanmengingatdayadukungalamternyatasemakintidakseimbangdenganlajutuntutanperkembanganpemenuhankebutuhanhidup.Namunperkembanganyangdampaknegatifbagilingkunganyaknirusaknyalingkungankarenapembangunanyanglebihcenderungberorientasiekonomis.Terlaksananyapembangunanberwawasanlingkungandanterkendalinyapemanfaatansumberdayaalamsecarabijaksanamerupakantujuanutamapengelolaanlingkunganhidup.
Tujuanmeningkatkankualitaskotayangberwawasanlingkungandilaksanakanmelaluisasaranpeningkatankualitaslingkunganhidup.Padatahun2019targetcapaianindekslingkunganhidupsebagaigambarankualitaslingkunganadalahsebesar58,58.

e) MeningkatkanPelayananInfrastruktur.

Pemerataaninfrastrukturmelaluipembangunaninfrastrukturmenjadiaspekpentingdanvitaluntukmempercepatprosespembangunanwilayahsekaligusrodapenggerakpertumbuhanekonomi.Halinimengingatgeraklajudanpertumbuhanekonomisuatuwilayahtidakdapatdipisahkandariketersediaaninfrastruktur.Olehkarenaitu,pembangunansektorinimenjadifondasidaripembangunanekonomiselanjutnya.Pembangunaninfratrukturyangdimaksudkanakanmampumenjadipendorongberk

embangnyasektor-sektorterkaitsebagaimultiplierdanpadaakhirnyamemberikankontribusiuntukpertumbuhanekonomi. Tujuanmeningkatkanpelayananinfrastrukturmelaluisasaranterwujudnyainfrastrukturyanghandalditargetkanmeningkatmenjadi76,00padatahun2019.

f) MenggerakkanSendi-SendiPerekonomianMasyarakat.

Perkembanganperekonomiankotasangattergantungpadapergerakanekonomimasyarakat.OlehkarenanyaPemerintahperlumendorongkegiatanekonomimasyarakatdenganmenciptakankreatifitasyangdapatmenimbulkannilaitambahbagiusahamasyarakat.Kreatifitasusahayangterciptadalamkonsepekonomikreatif,yaknimengembangkanekonomimasyarakatdenganmeningkatkandayainovasidankreasimasyarakatmelaluipemanfaatansumber-sumberpotensialmasyarakatdansumberdayaalamyangterbarukan.Peningkatanaktifitassendiekonomimasyarakatdapatmenjadidasarpeningkatanpendapatanmasyarakatsehinggaberdampakpadaterwujudnyapemerataanpendapatanmasyarakat.SelainituperludidorongupayadiversifikasiekonomikreatifsehinggadapatpulamembentukdanmewujudkanbrandingperekonomiansebagaiidentitasyangkhaskotaBalikpapan.Sendi-sendiperekonomianmasyarakatdiharapkandapatbersinergi,yaknimerupakanwujuddariketerkaitanantarahuludanhiliraktifitasekonomi,sehinggaperekonomianyangadasalingmendukungdanpadaakhirnyaakandapatmenambahnilaijualekonomiitusendiri.UntukmeningkatkankreatifitasekonomimasyarakatdiperlukanpeningkatanSDMyangberjiwaentrepreneur,berdayasaingdankreatif.DenganSDMberjiwaentrepreneur,berdayasaingdankreatifakandapatmenghasilkanproduk-produkyangmampubersaingdalammenghadapipasarbebasAseanatauMasyarakatEkonomiAsean(MEA),sehinggadengandemikianperekonomiandapatberkembangyangpadaakhirnyadiharapkanoutputsecaramakroadalahterciptanyapemerataanpendapatanmasyarakatKotaBalikpapan.Sasarandaritujuandiatasadalahmeningkatkanpemerataanpendapatanmasyarakat.Targetdarisasarantersebutyangakandicapaipadarkpd2019yaitu:

- PeningkatanPDRBperkapitayangditargetkansebesarRp143,33Jutadaripencapaian*baseline*tahun2015adalahRp122,46Juta
- IndeksGiniRatiopadatahun2018ditargetkansebesar 0,33dari

pencapaian baseline tahun 2015 yaitu sebesar 0,34.

g) MeningkatkanPertumbuhanEkonomiHijau.
Pembangunanyangbertumpupadapertumbuhanproduksiakanmenghasilkanperbaikanekonomi,tetapiberimplikasilainterhadapsosialdanlingkunganmisalnyameningkatnyaemisigasrumahkaca,berkurangnyaarealhutansertamusnahnyaberbagaispesiesdankeanekaragamanhayati.Olehkarenaitumeningkatkanpertumbuhanproduksidenganpenerapanekonomihijaudiharapkanakanmenghasilkanperekonomianyangrendahkarbon(tidakmenghasilkanemisidanpolusilingkungan),hematsumberdayaalamdanberkeadilansosial.Sasarandaritujuandiatasadalah MendorongPembangunanEkonomiyangBerkelanjutan.Targetdarisasaraniniyangakandicapaipada RKPD 2018 yaitu meningkatkannilai PDRB nonmigasadalah Rp27,25 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu Rp.40,21 trilyun.

h) TerselenggaranyaTataKelolaPemerintahanYangBaikdanPenyediaanLayananPublikyangPrima.
Dalammewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik,makapenyelenggaraanpemerintahharusdilaksanakandenganketerbukaan,akuntabilitas,efektifitasdanefisiensi,menjunjungtinggisupremasihukum.Dengan adanyakeadilanyangdiberlakukandalamsetiappenegakanhukum,makahaliniakanmampumembukapikiranmasyarakatuntukikutberpartisipasidalammenjaminkelancaran,sertakeserasiandanketerpaduantugasdanfungsipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan.Dalammewujudkan*goodgovernance*diperlukanperanmasyarakat.Halinidikarenakanmasyarakatyangmempunyaihakuntukmencari,memperoleh,danmemberikaninformasimengenaipenyelenggaraanpemerintahandaerah.Denganmasyarakatberpartisipasiaktifmakasegalahal/tindakanyangberindikasinegatifdapatdicegahataudiatasi.
Pengembanganpelayananpublikyangprimaharusdiawalidenganadanyafungsidasaryangharusdimilikiorganisasiyaitupemasaran,operasionaldanfinansial.Atasfungsidasartersebutdikembangkan*coreskill*yangsalingterkaitdenganfungsi-fungsiyanglain.Selanjutnyadalammewujudkan*tatakelolapemerintahanyangbaikdanpenyediaanlayananpublikyangprima*diperlukaninovasidalampemanfaatanteknologigunamendukungpenataankelembagaan,pengembanganaparatur,sistempengawasan,sertapemeriksaanyangefektif.Sasarandaritujuandiatasadalahtatakelolapemerintahanyangbai

k.Targetdarisasaraniniyangakandicapaipada RKPD 2019 yaitu:

- OpiniLaporanKeuanganditargetkanWTP.Dalampengelolaankeuangandaerahsecaraefektif,efisiendantaatazas;
- Indekspersepsikorupsiditargetkan6,70padaTahun 2018denganposisipadatahun2015sebesar6.75%;
- SurveyKepuasanMasyarakatditargetkanmencapai79,96padatahun2019ataumeningkatsebanyak0,40daritahun2019sebesar79.56;
- IndekProfesionalitasASNditargetkanmeningkat2poinpadatahun2019menjadi85daritahun2017sebesar 83.

Tabel 4.3.

Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan dengan PrioritasNasionalTahun 2019, Prioritas Provinsi Tahun 2019, RT/RW Kota BalikpapanTahun 2012-2032 dan Rencana Aksi Daerah

No	PrioritasNasional RKPTahun2019	PrioritasRKPD KalimantanTimur2019	KeterkaitanRTRWKotaBalikpapan	SasaranPembangunanKota Balikpapan	KeterkaitanRencanaAksiDaerah
1	- PembangunanManusiamelaluiPenguranganKemiskinandanPeningkatanPelayananDasar	- PenguatanPendidikan Vokasi&KeterampilanTenagaKerja	- PerwujudanPusatPelayanan	- Meningkatnyakualitaspendidikan, - Meningkatkanderajatkesehatan Masyarakatberkelanjutan, - Menurunnyajumlahpengangguran	SDGs,RADLayakAnak
2	- PenguranganKesenjanganantarwilayahmelaluiPenguatanKonektivitasdanKemaritiman	- PembangunanInfrastrukturProduksi &KonektivitasSentraKawasanIndustri&Outlet	- Perwujudan StrukturRuangKotadanKawasanStrategis	- Terwujudnya infrastruktur yanghandal	SDGs,RADGRK,RADLayakAnak,RADRamah Lansia
3	- PeningkatanNilaiTambahEkonomimelaluiPertanian, Industri,danJasa Produktif	- PeningkatanKemudahanBerusahadanPengembanganEkonomiKerakyatan	- Perwujudan PolaRuangdanKawasanStrategis	- Meningkatkankualitashidupdankesejahteraanmasyarakatsecaramenyeluruhdanberkelanjutan - Meningkatkanpemerataanpendapatanmasyarakat - Mendorongpembangunanekonomiyangberkelanjutan	SDGs
4	- PemantapanKetahananEnergi,Pangan,danSumberDayaAir	- PeningkatanProduksiPertanian&Perikanan	- PerwujudanStrukturdanPolaRuang	- Meningkatkankualitaslingkunganhidup	SDGs,RADGRK
5	- StabilitasKeamananNasionaldan KesuksesanPemilu	- PeningkatanSumberdayaAparatur&KualitasPelayananPublik		- MeningkatkanKenyamanan, KeamanandanKetertibanLingkungan - Tata kelolapemerintahan yangbaik	SDGs,RADPPK

4.2. PrioritasPembangunanTahun2019

Prioritaspembangunanmerupakanlangkah-langkahyangberisikanprogram-programindikatifuntukmewujudkanvisidanmisi.Prioritaspembangunanharusdijadikansalahsaturujukanpentingdalamperencanaanpembangunandaerah*(strategyfocussed-management).*Rumusanprioritaspembangunanataustrategimerupakanperny

ataanyangmenjelaskanbagaimanatujuandansasaranakandicapaiyangselanjutnyadiperjelasdenganserangkaianarahkebijakan.

RumusanstrategijugaharusmenunjukkankeinginanyangkuatbagaimanaPemerintahDaerahmenciptakannilaitambah*(valueadded)*bagistakeholderpembangunandaerahdanpentinguntukmendapatkanparameterutamayangmenunjukkanbagaimanastrategistersebutmenciptakannilai*(strategicobjective)*.Melaluiparametertersebut,dapatdiidentifikasiindikasikeberhasilanataukegagalansuatustrategisekaligusuntukmenciptakanbudaya"berpikirstrategik"dalammenjaminbahwatransformasimenujupengelolaankeuanganpemerintahdaerahyanglebihbaik,transparan,akuntabeldanberkomitmenterhadapkinerja,strategiharusdikendalikandandievaluasi*(learningprocess)*.

4.2.1. ArahKebijakandanPrioritasRKPDKotaBalikpapanTahun2019

Denganmengacu pada RPJMD Kota Balikpapan, dan memperhatikan prioritas pembangunannasionaltahun2019dan prioritasProvinsi Kalimantan Timurtahun 2019 serta tema pembangunanTahun 2019, makaPrioritasPembangunan2019dirumuskansebagaiberikut:

Tabel 4.4.
Prioritas Pembangunan 2019

SasaranPembangunan	PrioritasPembangunan
Meningkatkanpemerataanpendapatanmasyarakat	PengembanganDayaSaingPerekonomianMelaluiSektorIndustriEkonomiKreatif
Mendorongpembangunanekonomiyangberkelanjutan	
MeningkatnyaKualitasPendidikan	PemerataanLayananPendidikanDanKesehatanSertaPeningkatanKeterampilanTenagaKerja
MeningkatkanDerajatKesehatanMasyarakatberkelanjutan	
MenurunnyaJumlahPengangguran	
Meningkatkankualitashidupdankesejahteraanmasyarakatsecaramenyeluruhdanberkelanjutan	
Meningkatkankualitaslingkunganhidup	PeningkatanKualitasLingkunganHidupUntukMendukungPengendalianBanjir
MeningkatkanKenyamanan,Keamanandan KetertibanLingkungan	
TerwujudnyaInfrastrukturYangHandal	PembangunanInfrastrukturKonektivitasDanLayananDasarPerumahanPermukiman
TataKelolaPemerintahanyangbaik	PeningkatanSumberdayaAparatur&KualitasPelayananPublik

Prioritaspembangunanmerupakanpilihankeputusanlokasidandistribusisumberdayayangdimilikidaerahdalamrangkamewujudkansasaranpembangunannasional,provinsidandaerahsecaraterintegrasidalamsistemperencanaandanpenganggaranpembanguandaerah.HarmonisasitersebutdiaturdalamamanatSuratEdaranBersamaMenteriDalamNegeridenganMenteriPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenasRepublikIndonesiaNomor:050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016,tangggal23 Desember2016,perihalPetunjukPelaksanaan PenyelarasanRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahdenganRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional2015-2019.Disebutkanbahwaperludilakukanintegrasidanpenyelarasanprioritasnasional,programprioritas,kegiatanprioritassecaraberjenjangberdasarkanpembagianurusanpemerintahanantaraRPJMD-RKPDKabupaten/KotadenganRPJMD-RKPDProvinsidanRPJMN-RKP,sertaRPJMD-RKPDProvinsidenganRPJMN-RKP.MatrikberikutakanmemaparkanpetaharmonisasiprioritaspembangunanKotaBalikpapandenganPrioritasNasionaldanProvinsi.

Tabel 4.5.

Harmonisasi Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

PrioritasNasional	PrioritasProvinsi	PrioritasKota
PembangunanManusiamelaluiPenguranganKemiskinandanPeningkatanPelayananDasar	PenguatanPendidikanVokasidan KeterampilanTenagaKerja	PemerataanLayananPendidikandan Kesehatanserta PeningkatanKeterampilan TenagaKerja
PenguranganKesenjanganantarwilayahmelaluiPenguatanKonektivitasdanKemaritiman	PembangunanInfrastrukturdanKonektivitasSentraProduksi,Kawasan	PembangunanInfrastrukturKonektivitasDanLayananDasarPerumahanPermukiman
	IndustridanOutlet	PeningkatanKualitasLingkungan HidupuntukMendukung PengendalianBanjir
PeningkatanNilaiTambahEkonomimelaluiPertanian,Industri, danJasaProduktif	PeningkatanKemudahanBerusahaDanPengembanganEkonomiKerakyatan	PengembanganDayaSaingPerekonomianMelaluiSektorIndustriEkonomiKreatif
PemantapanKetahananEnergi,Pangan,danSumberDayaAir	PeningkatanProduksiPertaniandanPerikanan	

StabilitasKeamananNasionaldan KesuksesanPemilu	PeningkatanSumberdayaAparaturdanKualitasPelayananPublik	PeningkatanSumberdaya AparaturdanKualitasPelayanan Publik

4.2.2. ProgramdanKegiatanPrioritasRKPDKotaBalikpapanTahun2019

Berdasarkanprioritaspembangunanyangtelahdirumuskandiatas,makaprogramprioritasdalamRKPDKotaBalikpapanTahun2019adalahsebagaiberikut:

1) Prioritas Pengembangan Daya Saing Perekonomian melalui Sektor Industri EkonomiKreatifPengembangan sentra industri kecil menengahdiharapkan mampu memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan hidupnya dengan meminimalisir kerusakan di lingkungan sekitarnya. Hal ini seiring dengan program Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa Asia lainnya dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tabel 4.6.
Kegiatan Prioritas

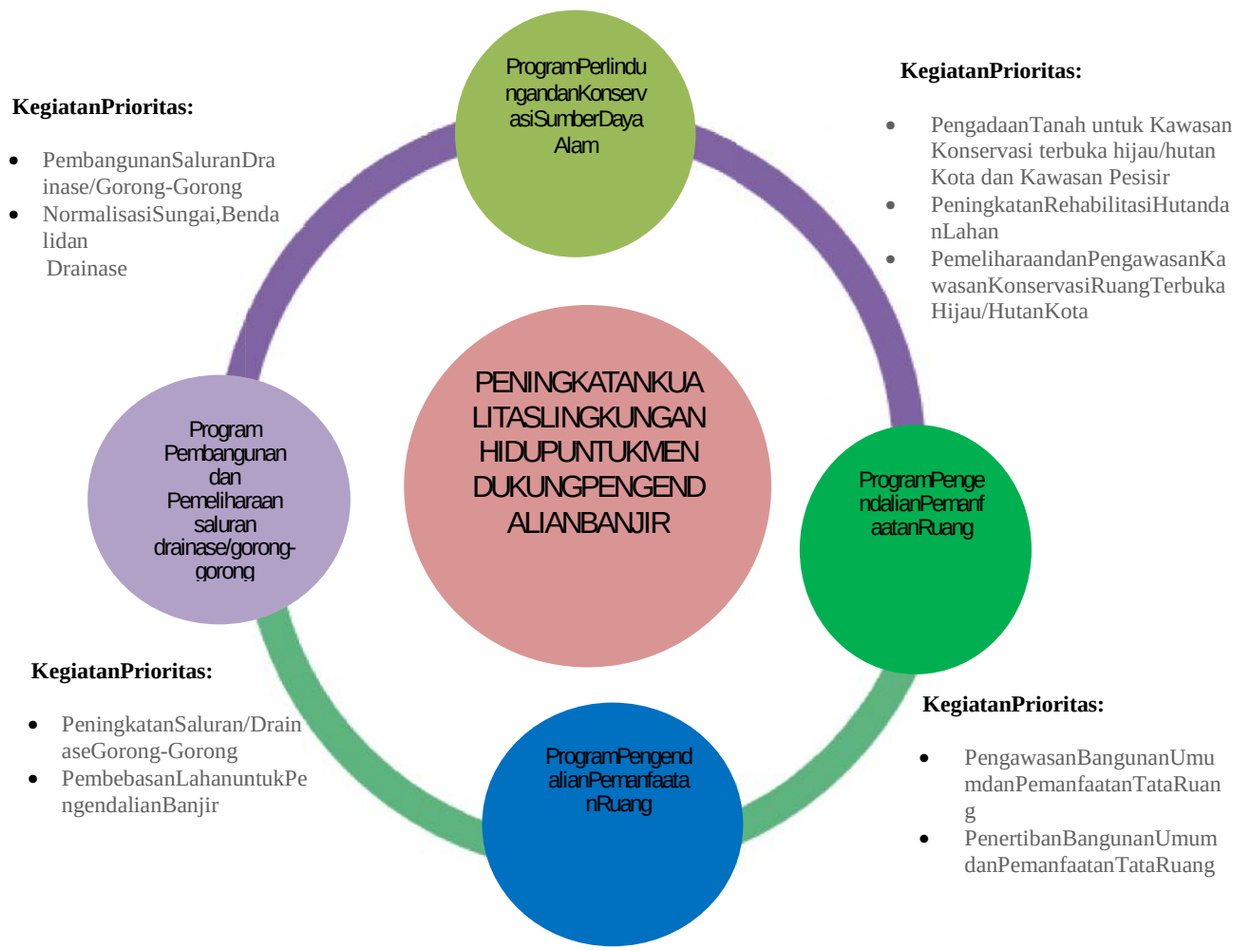
PROGRAMPRIORITAS	KEGIATANPRIORITAS
ProgramPeningkatanKapasitasIptekSistem Produksi	FasilitasiPenerapanTeknologiTepatGuna
	Penguatan/PertumbuhanKewirausahaanbagi SekolahKejuruandiKotaBalikpapan
	PelatihanSistemIndustriTahudanTempe
	PeningkatanKualitasSDMAparatDanPelakuUsaha DiSiks(PIRT/HALAL/MEREK/SNI/GHK/GKM/AMT/CEFEDLL)
	PembinaanTeknologiMutuProdukDan KonvensiGugusKendaliMutu
	PemutakhiranTeknologiKotaBalikpapan
	PemuktahiranTeknologiKotaBalikpapan
	FasilitasiKepemilikanSertifikatMerk,Hak Cipta,DanLabelHalal
	SosialisasiPeningkatanStandartMutuProduk
	PeningkatanSumberDayaPelakuIndustriKecil Menengah

PROGRAMPRIORITAS	KEGIATANPRIORITAS
ProgramPengembanganIndustriKecilDan Menengah	PelatihanPengolahanPangananKhas Balikpapan
	PelatihanAnekaUsahaIkm
	PengembanganDanPembinaanIndustriKreatif
	PenyertaanPromosiDanPartisipasiIndustri KecilMenengah(DEKRANASDA)
	PembinaanDanPelatihanKetrampilanBagiIkm
	PenyertaanDanPartisipasiAktifDalam PameranIndustriKecilDanMikro
	LombaHasilKetrampilanIkmDanHasil KerajinanKhasBalikpapan
	PengawasanPengendalianTDI&IUI
ProgramPengembanganIndustriKecilDan Menengah	FasilitasiDanPembinaanKepemilikanIzin UsahaIndustriKecilDanMenengah
ProgramPenataanStrukturIndustri	PeningkatanDanPengembanagnTeknologiDanIn dustriLogam,Mesin,AlatDanElektronika
	PeningkatanKelembagaanSentra-Sentra IndustriPotensialKotaBalikpapan
	PeningkatanProduktivitasDanAlihTeknologi
	FasilitasiMesinProduksiPelakuUsahaDi Sentra-SentraPotensial
	PeningkatanKualitasIndustriExisting
	KawasanIndustriKecilSomberDanIncubator IndustriDanBisnis
	PenyediaanInfrastrukturDanSaranaPrasarana RumahKemasan
	PembangunanDanPengembanganSentra IndustriKecilTeritip(SIKT)
	FasilitasiUmumInkubatorIndustriDanBisnis
	PembangunanDanPengembanganSentra IndustriKecilSomber(SIKS)
ProgramPenciptaanIklimUsahaKecil MenengahYangKondusif	PembinaanPengembanganSDMUMKM
ProgramPengembanganSistemPendukung UsahaBagiUsahaMikroKecilMenengah	TemuKemitraanUsahaMikroKecilDan Menengah
ProgramPengembanganPemasaranPariwisata	PemutakhiranWebsitePariwisataDan OperasionalTICBandaraSepinggan
	PengembanganInformasiPariwisataBerbasis Digital/Aplikasi
ProgramPeningkatanProduksiPertanian	PeningkatanProduksiPertanianTanaman Pangan
	PeningkatanProduksiPertanianTanaman Hortikulutura
ProgramPeningkatanProduksiTanaman Perkebunan	IntensifikasiTanamanPerkebunan

PROGRAMPRIORITAS	KEGIATANPRIORITAS
ProgramPeningkatanProduksiHasilPetenakan	OperasionalKegiatanInseminasiBuatan
PeningkatanProduksiPerikanan	Pengembangan/Peningkatan/PengelolaanDan OperasionalBalaiBenihIkan

2) PrioritasPeningkatanKualitasLingkunganHidupuntukMendukungPengendalianBanjirSalahsatupenyebabbanjirselaintingginyacurahhujanadalahberkurangnyadaerahresapanairkarenaaktivitaspembukaanlahanuntukkegiatanpermukiman,industridansebagainya.Olehkarenaitu,dalamrangkapengendalianbanjirdiKotaBalikpapan,halyangharusdilakukantidakhanyamelakukannormalisasisalurandandrainasetetapijugaharusdiimbangidenganpengendalian,perlindungandankonservasilingkungan.Untukitu,makaprogramdankegiatanprioritasuntukmendukunghaltersebutdijabarkansebagaiberikut:

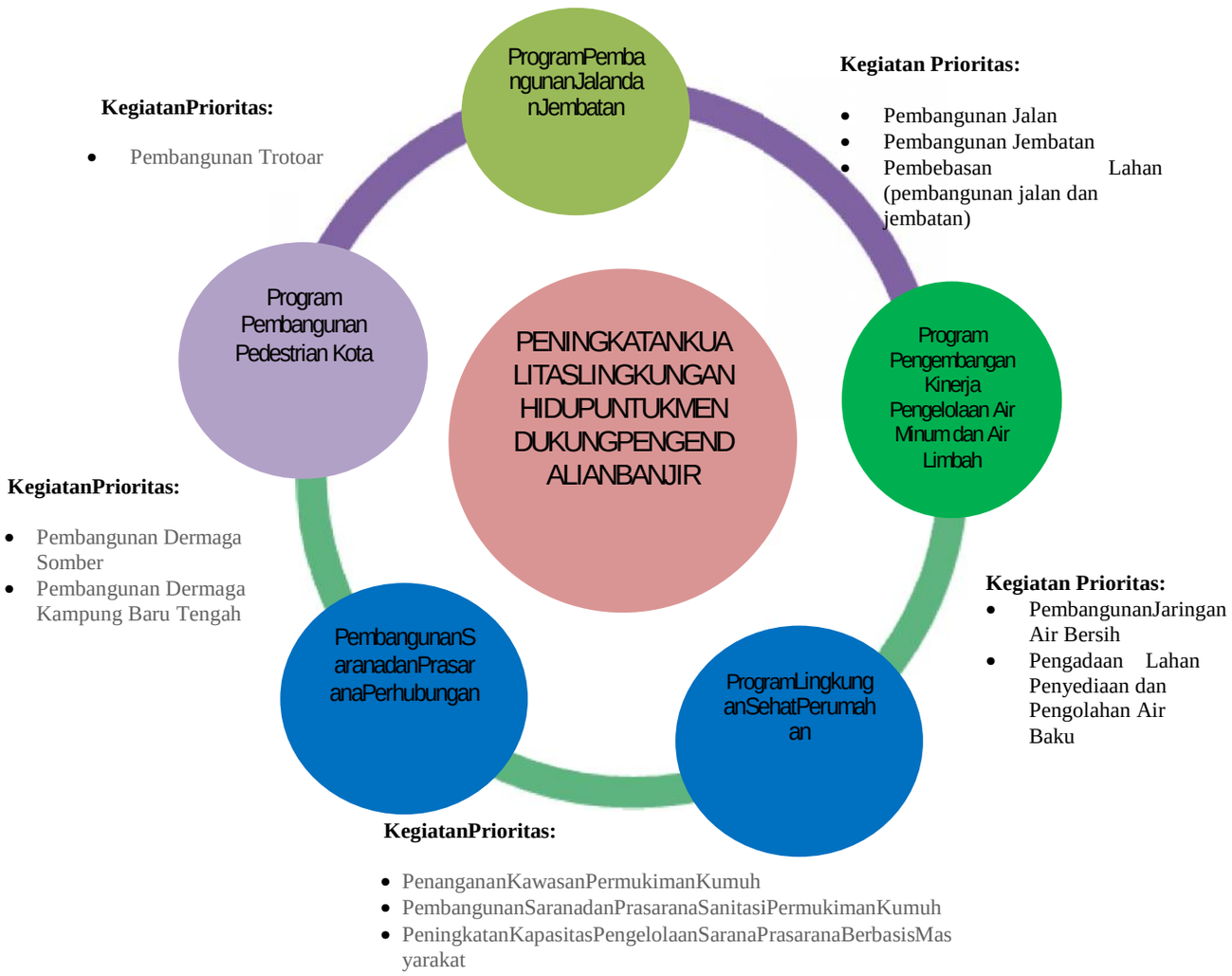
Gambar 4.3.
Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir



3) PembangunanInfrastrukturKonektivitasdanLayananDasarPerumahanPe

rmukimanPembangunaninfrastruktursangatdiperlukanuntukmendukungpertumbuhanekonomisertapengembanganwilayah.Halinidapatmendorongdayasaingdaerah KotaBalikpapankhususnyasebagaiKotaJasa,Industri, PerdaganganPariwisataPendidikandanBudaya.Selaininfrastrukturkonektivitas,jugadiperlukaninfrastrukturpelayanandasaruntukmemenuhikebutuhandasarmasyarakat.Untukitu,makaprogramdankegiatanprioritasuntukmendukunghaltersebutdijabarkansebagaiberikut:

Gambar 4.4.
Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur konektivititas dan Layanan Dasar Perumahan Pemukiman



4) PeningkatanLayananPendidikandanKesehatanSertaPeningkatanKompetensiTenagaKerjaUntukpeningkatanlayananpendidikanmakaarahkebijakanpadatahun2019adalah:
   a. PeningkatanKualitasPendidikanNonFormalberbasisIPTEKdanBerlandaskanIMTAQArahkebijakantersebutdilaksanakanmelaluiprogramprioritasProgramPendidikanDasarmelaluikegiatanPeningkatanSaranadanPrasaranaPendidikanjenjangSekolahDasardanSekolahMeneng

ahPertamaPeningkatansaranaprasaranasekolahberupapembangun anruangbelajar,laboratorium,perpustakaan,toilettermasukpenyedia anmejakursimuriddanguru.

b. Perluasansubsidipendidikanbagiseluruhpesertadidikusiasekolah Kebijakanperluasansubsidipendidikansebagaiupayaperluasanakses pendidikanuntukseluruhmasyarakat.Kebijakaninidimplementasika nmelaluiprogramprioritaspendidikandasardengankegiatanBantuan OperasionalSekolah.BOSsangatdiperlukansekolahuntukpembiayaa noperasionalsekolahsekaliguspemenuhansaranaprasaransekolah;

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan Untuk peningkatan kualitas pendidikan, maka ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sangat penting. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat penting. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah. Sertifikasi tenaga pendidik diarahkan pada pemenuhan pendidik sesuai persyaratan jenjang pendidikan;

d. Disektorkesehatan,arahkebijakanpembangunantahun2019adalahP eningkatanderajatkesehatanmasyarakatmelaluiPeningkatanAksesd anKualitasdanManajemenPelayananKesehatansertaPengembangan PrilakuHidupSehat.Padaawaltahun2018,KotaBalikpapanmengalami kondisidaruratakibatpenyakitdifteri.Penyakitinidisebabkankondisili ngkungantempattinggalyangkurangsehat.Karenaituprogramdankegi atandiarahkanpadaperbaikankondisikesehatanlingkungan.Program dankegiatanprioritasyangakandilaksanakanuntukmenjabarkanarah kebijakantersebutAdalah:

- ProgramUpayaKesehatanMasyarakatdengankegiatanprioritasOp erasionalPeningkatanKesehatanMasyarakatdiPKMsertaPeningka tandanPengawasanKeamananPangandanBahanBerbahayasertaP emberdayaanMasyarakat;
- Operasionalpeningkatankesehatanmasyarakatdi PKMadalahkegi atanprioritasuntukmendukungkegiatanpelayanantingkatdasardi puskesmas.Demikianjugadenganpeningkatandanpengawasanke amananpangandanbahanberbahayasangatpentingdalampemben tukankesehatanmasyarakatterutamaanak-anak;
- ProgramPeningkatanKualitas,KuantitasSDMsertaSaranadanPras aranaKesehatan.KegiatanprioritaspadaprograminiadalahPeningk atanSaranadanPrasaranaKesehatandiPKMdanjaringannyasertaP

eningkatanKualitasTenagaKesehatanPelayananKesehatanmelaluiPengirimanProgramPelatihan.Programinimenjadisangatprioritaskarenaberhubunganlangsungdenganlayanankesehatanmasyarakatbaikyangbersifatpromotif,preventifdankuratif;

- ProgramPencegahandanPenanggulanganPenyakitMenular,Diwujudkanmelaluikegiatan PencegahandanPenanggulanganPenyakitMenularsertaPeningkatanSurveilancedanEpidemiologidanPenanggulanganWabah.Masihterjadinyabencanadisentridiakhirtahun2017sertaterjadinyawabahdemamberdarahsetiaptahun,makaprogramini menjadisangatpenting.Kegiatandimulaidengansurveydanpenelusuranmasyarakatpenderitapenyakitmenularseiringdengankegiatanpenangananpenyakitmenulardimasyarakat;

e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.Dijabarkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan tenagaKerja dan kegiatan Penyelenggaraan Pemagangan.

f. ProgramPeningkatanKesempatanKerja. Programprioritasinidiharapkanmampumenahanpeningkatantingkatpengangguranterbukayangpadatahun2017mencapai 10,6%.Programinidilaksanakanmelaluikegiatanpelayananantarkerjadanperluasankesempatankerja.Pelayananantarkerjamenjadisalahsatuupayamembantupenyerapantenagakerjayangtelahterlatihkeperusahaanyangmembutuhkan.Perluasankesempatankerjadilaksanakanmelaluipelatihan untukpeningkatankompetensidanjiwainterpreneursehinggatenagakerjayangadamampumemenuhikebutuhanpasarkerjasertadapatmenciptakanlapangankerja.

Gambar 4.5.
Program Prioritas Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Peningkatan Keterampilan Kerja



ProgramPeningkatan Kulaitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Prioritas: • Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di PKM dan jaringannya • Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan	ProgramPencegahan dan Penanggulangan Penyakit	ProgramPeningkatan Kualitas, Kuantitas SDM	**Kegiatan Prioritas:** • Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di PKM • Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyakat

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahanyangbaik.Arahkebijakanuntukmendukungprioritaspembangunantersebutadalah:
   - Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkanpengelolaankeuanganyangtransparandanakuntabelmakaprogramdankegiatanprioritasyangakandilaksanakan:
     1) ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuanganmelaluikegiatanPenyusunanLaporanKinerjaInstansiPemerintah(LKjIP);
     2) ProgramPeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerahdengankegiatanPenyusunanAnalisaStandarBelanjasertaPenyusunanStandarSatuanHarga;
     3) ProgramPeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerahmelaluikegiatanPenyusunanRegulasiPengelolaanKeuangandanAsetDaerah;
     4) ProgramPeningkatanmanajemenAset/barangMilikDaerahdengankegiatanPengamananAset PemerintahKotaBalikpapan;
     5) ProgrampeningkatansistempengawasaninternaldanpengendalianpelaksanaankebijakanKDHdengankegiatanPelaksanaanPengawasaninternalsecaraberkala/revieuRKAPerangkatDaerah-RKAPPKDdanReviuRPJMDPemerintahKotaBalikpapan;

Pengembangantatakelolapemerintahanyangefektifitasdanefisiensisertapenyederhanaanprosedurdanbirokrasidaerah,kepastianbiayaperizinansertastandarisasipelayananperizinanuntukmempermudahpelayananinvestasipelakuusaha.

Arahkebijakantersebutdalamrangkamendukungdanmenciptakankemud

ahandankenyamanandalampengelolaaninvestasidiKotaBalikpapanyangt entunyaakanmendorongtersedianyalapanganusahadanpekerjaanbagim asyarakat.Programdankegiatanprioritasyangakandilaksanakanadalah:

- Pengembangan ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan kegiatan Deteksi dini terhadap potensi gejala/peristiwa, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
  1) ProgramPeningkatanPromosidanKerjasamaInvestasi dengankegiatanPenyelenggaraanInvestasi;
  2) ProgramPeningkatanIklimInvestasidanRealisasiInvestasimelalui kegiatanpenyediaanprofilinvestasi;
  3) ProgramPengembanganSistemInformasiPenanamanModaldanPe rizinanmelaluikegiatanPemeliharaandanPengembanganSistemI nformasiPenanamanModaldanPerizinan,PenyediaanBahan/med ia.InformasiLayananPerizinanInvestasi,Penyelenggaraanpublika sidansosialisasiperizinandaninvestasisertapeningkatanpelayana nkelilingdanpelayananreguler.

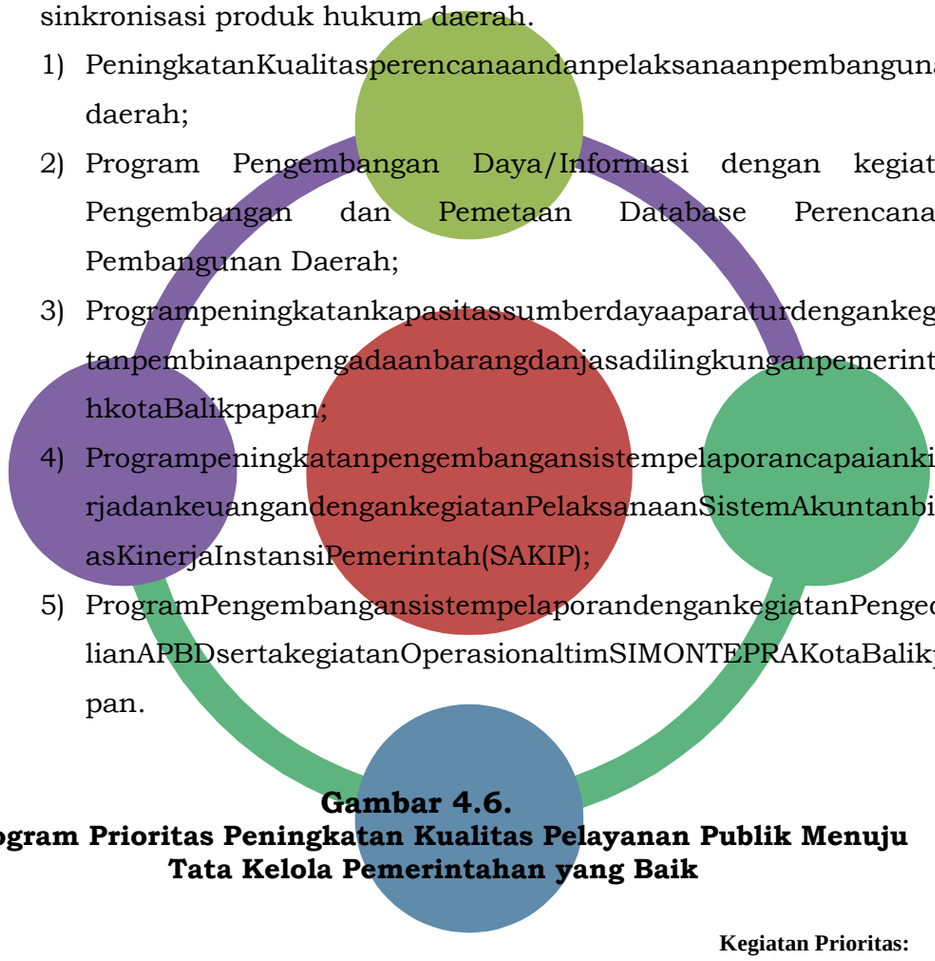
- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sumberdayamanusiamenjadisyaratutamadalampelayananpublik.Ar ahkebijakaninidiwujudkanmelaluiprogramdankegiatanprioritasseba gaiberikut:
  1) Programpeningkatankualitasmanajemenkariraparatursipilnegar adengankegiatanpendidikandanpelatihanstrukturalbagiPNSDaer ah,kegiatanpendidikanPNSmelaluitugasbelajar,kegiatanpemetaa nkompetensiPNS.SelainuntukASNbersifatumum,makasecaratek nisberbagaikegiatanpendidikandanpelatihanmaupunbimbingant eknisuntukPerangkatDaerahteknisdilaksanakansetiaptahundise tiapPerangkatDaerahuntukmendukunglayananpubliksesuaituga sdanfungsi.

- Peningkatan dukungan Pelayanan Publik

  Pelayananpublikmerupakantugasutamapemerintahkotadalamrang kamelayanimasyarakatyangakanbermuarapadapeningkatankeseja hteraanmasyarakat.Berbagaisistemberbasisteknologiinformasitelah dikembangkanolehPemerintahKotaBalikpapansebagaiupayapening katankecepatandanketepatanlayananmasyarakatsekaligusmenyaji kanlayananyangtransparandanakuntanbel.Secaraumumkebijakant ersebutdiwujudkanmelaluiprogramdankegiatanprioritasyaituprogra moptimalisasipemanfaatanteknologiinformasidengankegiatanpenge

mbangandanpengelolaane-governmentsertakegiatansewabandwidth.ProgrampelayananpengaduandengankegiatanpengembangansistemlayananindormasidankomunikasiberbasisTIK.

- Peningkatan Kualitas produk hukum daerah Kebijakan dalam bidang hukum dilaksanakan melalui program Penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah.
  1) PeningkatanKualitasperencanaandanpelaksanaanpembangunan daerah;
  2) Program Pengembangan Daya/Informasi dengan kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3) ProgrampeningkatankapasitassumberdayaaparaturdengankegiatanpembinaanpengadaanbarangdanjasadilingkunganpemerintahkotaBalikpapan;
  4) ProgrampeningkatanpengembangansistempelaporancapaiankinerjadankeuangandengankegiatanPelaksanaanSistemAkuntanbilitasKinerjaInstansiPemerintah(SAKIP);
  5) ProgramPengembangansistempelaporandengankegiatanPengedalianAPBDsertakegiatanOperasionaltimSIMONTEPRAKotaBalikpapan.



Gambar 4.6.
Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untukmenyelaraskankinerjapembangunan,makaRKPDKotaBalikpapanTahun2019disusundenganpendekatanHolistik,Integratif,Tematik,dan Spasial(HITS).PendekatanHITSmerupakanpendekatanyangmenekankanpadakegiatan-kegiatanuntukmendukungPrioritasNasionaldanPemerintahProvinsiKalimantanTimurdalamhalinisalingketerkaitannyaperpaduanantaraSasaran,Strategi,ArahKebijakandanProgramPrioritassertaIndikatorKinerja.

Tabel 4.7.

Perpaduan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas serta Indikator Kinerja

PrioritasNasional/Provinsi	PrioritasKotaBalikpapan	ProgramPrioritas	KegiatanPrioritas	Lokasi
PembangunanWadukTeritipdanEmbungAjiRadenbesertaIPATeritip	PembangunanInfrastrukturKonektivitasdanLayananDasarPerumahanPermukiman	ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanAirMinumdanAirLimbah	PembangunanJaringanAirBersih	Kel.Lamaru,Kel.Teritip
			PengadaanLahanPenyediaandanPengolahanAirBaku	
Program100-0-100	PembangunanInfrastruktur KonektivitasdanLayanan Dasar PerumahanPermukiman	ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanAirMinumdanAirLimbah	PembangunanJaringanAirBersih	Kel.MuaraRapak,Kel.Baru Ulu,Kel.BaruTengah,Kel. Margomulyo,KelMargasari, Kel.Damai,Kel.KlandasanUlu,Kel. SepinggánRaya,Kel.Sepinggan,Kel.Manggar,Kel.ManggarBaru
		ProgramLingkunganSehat Perumahan	PenangananKawasan PermukimanKumuh	
			PembangunanSaranadanPrasaranaSanitasiPermukimanKumuh	
			PeningkatanKapasitasPengelolaanSaranaPrasaranaBerbasisMasyarakat	
PembangunanJalanTol (PenguatanKonektivitas)	InfrastrukturKonektivitasdanLayananDasarPerumahanPermukiman	ProgramPembangunanJalandan Jembatan	PembangunanJalan	Kel.Manggar,Kel.Sepinggan, Kel.KarangJoang
			PembangunanJembatan	
			PembebasanLahan(pembangunanjalan danjembatan)	
PembangunanKawasanIndustri	PengembanganDayaSaingPerekonomianmelaluiSektor IndustriKreatif	ProgramPenataanStrukturIndustri	ProgramKemudahanPelayanandanPercepatanProsesPerizinan	Kel.BatuAmpar,Kel.Teritip, Kel.Kariangau
			PembangunanDanPengembanganSentraIndustriKecilTeritip(SIKT)	
			PembangunanDanPengembanganSentraIndustriKecilSomber(SIKS)	

BAB V - TUGAS PEMBANTUAN

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun 2019 tidak ada tugas pembantuan yang diterima di karenakan Pemerintah Kota Balikpapan tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada Tahun 2019 Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan, dikarenakan tidak adanya tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan.



BAB VI - TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Untuk memudahkan impelementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah diadakan pembagian Urusan Pemerintah yang merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya Pembagian Urusan Pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka masing-masing fungsi Pemerintah dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain Pembagian Urusan Pemerintahan terdapat pula Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi: Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan penanggulangan Bencana, Pengolahan Kawasan Khusus, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Gambaran pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tabel 6.1.

Kerjasama Antar Daerah

No	Daerah yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil (*Output*) dari Kerjasama	Permasalahan dan Solusi	Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kota Samarinda	Permen 22 tahun 2014	1. Sosial Budaya, 2. Sosial Ekonomi, 3. Tata Ruang, 4. Lingkungan Hidup, 5 .Sarana dan Prasarana 6. program sistering center of excellent pengadaan barang/jasa	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kota Samarinda tentang Kerjasama Jaringan lintas Perkotaan	1. Kerjasama dan Perkotaan, 2. DLH Kota Balikpapan		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	PKS antar OPD LH		
2	Kabupaten Paser	Permen 22 tahun 2014	1. Pelayanan Tera/tera ualng atau alat -alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) di Unit Pelaksana Teknis Metrologi Disdak Kota Bpp 2. Pelayanan tera/terau ulang di Pemerintah Kabupaten Paser. 3. Pelayanan tera/tera Ulang atas permintaan pemilik UTTP.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kab. Paser tentang; Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kab. Paser.	1. Kerjasama dan Perkotaan, 2. Disdak Kota Balikpapan		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	PKS ANTAR opd DISDAK		
3	Kabupaten Paser	Permen 22 tahun 2014	a. bidang pendidikan dan kesehatan; b. bidang agrobisnis dan agroindustri;	adendum Pembangunan Antar Daerah	1. DKK, 2. Disdik 3. DLH 4. DPPR		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	PKS antara OPD DKK,Disdik, Bag. BPJ		

No	Daerah yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil (*Output*) dari Kerjasama	Permasalahan dan Solusi	Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			c. bidang sosial budaya dan sosial ekonomi; d. bidang tata ruang dan lingkungan hidup; e. bidang meteorologi; dan f. Program Sistering Center of Excellet Pengadaan Barang/Jasa.		5. Bag. BPJ						
4	Pemerintah Kabupaten Paser	Permen 22 tahun 2014	a. bidang pendidikan dan kesehatan; b. bidang agrobisnis dan agroindustri; c. bidang sosial budaya dan sosial ekonomi; d. bidang tata ruang dan lingkungan hidup; e. bidang meteorologi; dan f. kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Pembangunan Antar Daerah	1. DKK, 2. Disdik 3. DLH 4. DPPR 5. Bag. BPJ		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	PKS antara OPD DKK,Disdik, Bag. BPJ		
5	Pemerintah Kab. Panajam Paser Utara	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Sumber daya alam, 2. Bidang Pengembangan infrastruktur, 3. Bidang Kesehatan, 4. Bidang Pariwisata, 5. Bidang Usaha Mikro kecil dan menengah, 6. Bidang Perindustrian 7. Bidang Lingkungan Hidup, 8. Bidang Sosial, 9. Bidang pertanian, 10. Bidang perikanan,	Pembangunan Antar Daerah	1. DPPR 2. DKK, 3. DPOP, 4. DKUMKMP, 5. DLH, 6. Disdak, 7. DP3, 8. DISHUB, 9. Bag. PJB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	1. DPPR 2. DKK, 3. DPOP, 4. DKUMKMP, 5. DLH, 6. Disdak, 7. DP3, 8. DISHUB, 9. Bag. PJB		

No	Daerah yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil (*Output*) dari Kerjasama	Permasalahan dan Solusi	Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			11. bidang Perhubungan, 12. bidang metrologi, dan 13. program sistering center of excellent pengadaan barang/jasa								
6	Pemerintah Kota Bontang	Permen 22 tahun 2014	a. Bidang Sosial Budaya, b. Bidang sosial ekonomi c. Bidang lingkungan hidup, dan d. Kematangan unit kerja pengadaan barang jasa	Pembangunan Lintas Kotaan	Bag. PJB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	Bag. PJB		
7	Pemerintah Kota Bontang	Permen 22 tahun 2014	a. Bidang Sosial Budaya, b. Bidang sosial ekonomi c. Bidang lingkungan hidup, dan d. Program Sistering Center of excellent pengadaan barang/jasa	Pembangunan Lintas Kotaan	Bag. PJB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	Bag. PJB		
8	Pemerintah Kab. KUTIM	Permen 22 tahun 2014	1.Bidang pendidikan 2.Bidang Kesehatan 3.Bidang Sosial 4.Bidang Perhubungan 5.Bidang ketahanan pangan,perikanan,dan pertanian 6.Bidang sumber daya perairan dan konservasi 7.Bidang Lingkungan Hidup 8.Bidang Pemberdayaan Masyarakat 9.Bidang Infrastruktur 10.Bidang penataan ruang 11.Bidang Penanaman Modal 12.Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan perindustrian	Pembangunan Antar Daerah	Bag. PJB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	Bag. PJB		

No	Daerah yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil (*Output*) dari Kerjasama	Permasalahan dan Solusi	Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			13.Bidang Pariwisata 14.Bidang kepemudaan 15.Bidang Olahraga, dan 16.Program sistering center of excellent pengadaan barang atau jasa								
9	Pemerintahan Kab. Kukar	Permen 22 tahun 2014	a. Pendidikan dan kesehatan, b. Lingkungan Hidup,kehutanan, pertanian dan Perikanan. c. Pengembangan Infrastruktur dan tata ruang, d. Pariwisata, UKM dan Perindustriaan, e. sosial budaya dan penanggulangan bencana, dan f. Program Sistering Center of Excellent pengadaan barang/jasa	Pembangunan Antar Daerah			APBD masing-masing daerah	12 Bulan	Bag. PJB		
10	Kab Kutai Barat	Permen 22 tahun 2014	a. Bbidang Sosial Budaya, b. Bidang Sosial Ekonomi, c. Bidang Sarana dan Prasarana, d. Bidang Lingkungan Hidup, dan e. Program Sistering Center of Excellent Pengadaan Barang/ Jasa	Pembanguana Antar Daerah	Bag. PJB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	Bag. PJB		
11	Kab. Donggala	Permen 22 tahun 2014	a. manajemen perkotaan; b. promosi perdagangan, industri dan investasi; c. Kebudayaan dan periwisata; d. Kebersihan dan pertamanan; e. Pengelolaan potensi pangan	Pembangunan Antar Daerah	Bag Kerjasama dan Perkotaan		APBD masing-masing daerah	12 Bulan	Bag Kerjasama dan Perkotaan.		

No	Daerah yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil (*Output*) dari Kerjasama	Permasalahan dan Solusi	Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			masyarakat; f. ilmu pengetahuan dan teknologi; g. Pendidikan dan teknologi.								

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Balikpapan selama tahun 2018 telah mengadakan kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai mitra sebagai pihak ketiga yang menunjang kemajuan dan perkembangan kinerja serta kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan. Dalam hal ini mitra kerja yang mengadakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Kota selama tahun anggaran 2018dapat dilaporkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Yang Terjalin

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BPJS Kesehatan	Permen 22 tahun 2014	a. Memperluas cakupan Kepesertaan BPJS, b. Mengalokasikan anggaran dlm rangka Pelaksanaan Program BPJS, c. Memastikan semua penduduk kota Balikp[apan sudah terdaftar dlm BPJS d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan yang berkwalitas di kota balikpapan, e. Lainnya yang terlapir dalam lapiran	Kesepakatan bersama antara Pemkot Balikpapan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Balikpapan terntang Perluasan Cakupan Kesepakatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Cakupan Semesta (universal heath coverage)di Kota Balikppan	Dinas Kesehatan		**APBD masing-masing daerah**	**12 Bulan**
2	BPJS Kesehatan Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Penanggulangan penyakit DBD melalui program Kelambu air, b. Pelaksanaan Program GERMAS, c. Program kesehatan yang terkait Kegiatan Promotif danPreventif, d. Mobile care	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan BPJS Kesehatan Balikpapan Tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		**APBD masing-masing daerah**	**12 Bulan**
3	Lembaga Administrasi Negara	Permen 22 tahun 2014	a. Pengkajian kebijakan, b. Pelaksanaan inovasi administrasi negara, c. Pelatuihan dan pengembangan kompetewnsi aparatur, d. Pendidikan Tinggi.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Lembaga Administrasi Negara tentang : Penyedian Lahan Dan Peningkata KapasitasAparatur Pemerintah Kota Balikpapan.	BPKAD		**APBD masing-masing daerah**	**12 Bulan**
4	PT Pos Indonesia (Persero)	Permen 22 tahun 2014	1. jasa pengiriman dokumen, dan 2. Transaksi Pembayaran secara Elektronik maupun Tunai.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kantor Pos Balikpapan			Balikpapan tentang : Kerjasama Jasa Layanan PT. Pos Indonesia.				
5	BPKP Prov. Kaltim	Permen 22 tahun 2014	a. Pengelolaan keuangan daerah, b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akutansi keuangan daerah, c. Pengembangan dan penyenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, d. penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas intren pemerintah daerah, e. pengembangan danpenyelenggaraan SPIP, dan f. peningkatan kinerja perusahaan daerah/BUMD	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tentang :Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota Balikpapan.	BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
6	Perum Bulog	Permen 22 tahun 2014	Program bantuan sosial di lingkungan kel.damai	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Perum Bulog tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalibang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
7	PT. Thiess indonesia	Permen 22 tahun 2014	1. Pelatihan dan Pendampingan Urban Ferming, 2. Penyediaan peralatan pendukung Urban Ferming, 3. Pendampingan dan pelatihan tanggab bencana kebakaran, dan 4. penyediaan peralatan penanggulangan kebakaran.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan denganPT. Thiess Indonesia tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Lab. Klinik Pramita	Permen 22 tahun 2014	Pemeriksaan Kesehatan Pada Keluarga Germas	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Lab. Klinik Pramita Tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
9	Lab. Klinik Pramita	Permen 22 tahun 2014	Kegiatan Gerakam Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappeda Litbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
10	Petrosea Tbk Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, 2. Bidang Kesehatan, dan 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Petrosea Tbk Balikpapan tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappeaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
11	Petrosea Tbk Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	1. Seminar "Pendidikan Karaketer bagi Generasi Milinial" 2. Petrosea *Goes to School* Angkatan ke 2, 3. Petrosea *Goes to Campus*, 4. Lanjuta Kube Menjahit, 5. Pengembangan destinasi mangrove, 6. Program sampah jadi berkah, 7. Aksi Donor Darah, dan 8. *charity*: panti asuhan/ pondok pesantren	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	RSPB	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, dan 2. Bidang Kesehatan,	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
13	PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk	Permen 22 tahun 2014	1. Edukasi Kesehatan, dan 2. Pemeriksaan Kesehatan pada Keluarga Germas	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Prodia Widyahusada Tbk tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
14	RUMAH SAKIT HERMINA BALIKPAPAN	Permen 22 tahun 2014	1. Bantuan Septic Tank utk 12 Rumah di Kec. Sepinggan Baru, 2. edukasi kesehatan bagi Masyarakat dan sekolah di Kel. Sepinggan Baru, dan 3. Pemeriksaan Kesehatan pada Kegitaan germas.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Rumah Sakit Hermina Balikpapan tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
15	PT. PJB UBJOM PLTU KALTIM TELUK	Permen 22 tahun 2014	1. bidang pendidikan, 2. Bidang Kesehatan, 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan 4. Bidang Lingkungan	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. PBJ UBJOM PLTU Kalatim Teluk tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	PT. PJB UBJOM Kaltim Teluk	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, PBJ mengajar dan beasiswa. 2. Bidang Sosial Ekonomi, Lele Vakum Kuning dan Pengembangan bina usaha kripik Spandusa. 3. Bidang Lingkunga, Bank sampah BESTARI dan *Handy Craft* SANA, 4. Bidang Kesehatan berupa STBM Kariangau.	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
17	PT. PANDEGA CITRA KELOLA	Permen 22 tahun 2014	Program Bantuan Sosial Buat Masyarakat Kel. Kelandasan Ilir	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Pandega Citra Kelola tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
18	Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Pembangkit Jawa-Bali UBJOM Kaltim Teluk	Permen 22 tahun 2014	1. *Weekend healthy market,* , donor darah, cek kesehatan gratis, *talk show* mengenai kesehatan dan *live music* dan *live cookin, 2. Borneo culture week* berupa penampilan kesenian dari kalimantan / berbagai daerah, pameran kerajinan khas kalimantan, *fashion show* dan *artist performanc, 3. foodthentic* berupa pameran kuliner khas kalimantan dan , 4. Hari batik Nasional berupa pameran batik, *talk show* tentang *batik fashionshow* dan *art performance.*	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Pembangkit Jawa-Bali UBJOM Kaltim Teluk		a. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran, b. Pengoorbadinasian dan kerjasama terkait penanggulangan bencana, c. Pemberian informasi dan data terkait penanggulangan bencana, dan d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.	Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
20	PT. HM. SAMPOERNA Tbk	Permen 22 tahun 2014	1. Pelatihan dan Pendampingan Urban Ferming, 2. Penyediaan peralatan pendukung Urban Ferming, 3. Pendampingan dan pelatihan tanggab bencana kebakaran, dan 4. penyediaan peralatan penanggulangan kebakaran.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. HM. Samporna Tbk tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
21	PT. HM. SAMPOERNA Tbk	Permen 22 tahun 2014	1. Pelatihan dan pendampingan penguatan kelompok sadar lingkungan dan sadar wisata. 2. dukungan promosi wisata kampung tematik di kelurahan baru tengah (kampung taman ortogonal pariwisata), 3. dukugan infrastruktur untuk peningkatan di kampung tematik.	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
22	PT. PERTAMINA (PERSERO)	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang pendidikan, 2. Bidang Kesehatan, 3. bidang Lingkungan,	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Peertaminai (Persero) Region Kaltim tentang :	1.Kerjasama dan perkotaan,		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	REGION KALIMANTAN		4. Bidang pemberdayaan masyarakat, 5. bidang penanggulangan bencana alam.	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	2.bappeaLitbang			
23	PT. PERTAMINA (PERSERO) REGION KALIMANTAN	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, 2. Bidang Kesehatan, 3. Bidang pemberdayaan Masyarakat, 4. Bidang Lingkungan.	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bapprdalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
24	PT. Pertamina Hulu Mahakam	Permen 22 tahun 2014	a. Bidang Pendidikan, b. Penelitian, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, d. Lingkungan, dan e. Pengabdian Masyarakat.	Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitia, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan dan Pengabdian Masyarakat.	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.bappeaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
25	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) SAMS Singgan	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Ekonomi, dan 4. Bidang Prasarana Umum.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Anggakasa Pura I (persero) SAMs Sepinggan tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
26	PT. WILMAR NABATI INDONESIA	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Rohani, 2. bidang Pendidikan, 3. Bidang Pemberdayaan Wanita, dan 4. Bidang Kelompok Usaha	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Wilmar Nabati tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
27	PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IV BALIKPAPAN	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Lingkungan, 2. Bidang Kerohanian, 3. Bidang Kesehatan, 4. Bidang Pendidikan	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Pegadaian (persero) Kanwil IV Balikpapan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	PT. ELNUSA Tbk	Permen 22 tahun 2014	1. Elnusa berbagi Kasih, 2. Partisipasi Sponsorship, 3. Aksi donor darah, dan 4. tebar Hewan Kurban.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan pt. elnusa Tbk tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
29	PT. KIMIA FARMA Tbk	Permen 22 tahun 2014	1. Pemberian makan bayi dan anak di posyandu, 2. Program Germas, dan 3. Kelambu air	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Kimia Farma Tbk tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
30	YAYASAN TUNAS KARYA BANGSA	Permen 22 tahun 2014	1. english trening bagi PNS, 2. raffles test toefl, dan 3. Sertifikat kehadiran	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Yayasan Tunas Karya Baangsa tentang : Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BappedaLitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
31	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Wilayah Balikpapan.		1. Penyaluran Program Kemitraan Rp. 4 M untuk sektor usaha industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. 2. penyaluran Program Bina Lingkungan Rp. 100 Juta dlm bentuk bantuan/ hibah berupa BPP (Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan), BBA (Bantuan Bencana Alam), BKM (Bantuan Kesehatan Masyarakat), BSU (bantuan Sarana Umum), BSI (bantuan Sarana Ibadah), BPA (bantuan	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelestarian Alam), BPK (bantuan Pengentas Kemiskinan). 3. Ruang lingkup areal kerja Perusahaan Perseorangan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Wilayah Balikpapan meliputi Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. PPU, Kab. Panajam dan Kab. Kutai Kartanegara.					
32	PT. Pengadaian (persero) Kanwil Balikpapan		Mendukung kelancaran operasional bank sampah induk dan bank sampai unit kota balikpapan dalam progran Pt. Pegadaian (persero) Kanwil IV balikpapan	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
33	PT. BPD Kaltimtara Cab. Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Balikpapanyang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan daerah	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Balikpapan tentang : Pengelolaan Keuangan Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Balikpapan.	1.Kerjasama dan perkotaan, 2.BPKAD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
34	Badan Pengurus Cabang HIPMI Kota Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. menciptakan pengusaha muda Kota Balikpapan yang mandiri, kreatif dan inovatif serta berperan aktif demi kemajuan Kota Balikpapan; b. mengedepankan peran pengusaha muda Kota Balikpapan dalam pemberian	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Badan Pengurus Cabang HIPMI Kota Balikpapan tentang Kerjasama Pembangunan Prekonomian	Bag. Ekonomi		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kontribusi terhadap kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan; c. menjadikan pengusaha muda Kota Balikpapan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan; d. mendorong berkembangnya industri kreatif di Kota Balikpapan; dan e. menjadikan pengusaha muda Kota Balikpapan sebagai mitra strategis baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya.					
35	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, 2. Bidang Penelitian, 3. Bidang Pengembangan, 4. Pengabdian kepada masyarakat	Kesepakatan bersama antara Pemkot Balikpapan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Potensi Daerah	Dishupb dan BPKSDM		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
36	INSTITUS TEKNOLOGI KALIMANTAN	Permen 22 tahun 2014	1. Bidang Pendidikan, 2. Bidang Penelitian, 3. Bidang Pengembangan, 4. Pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Disdik dan Diskominfo		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
37	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur	Permen 22 tahun 2014	dukungan teknis dan pendanaan dibidang pengelolaan hutan kota RSS Damai III	Pengelolaan Hutan Kota RSS Damai III	DLH dan BPKD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	YAYASAN BHTI TANOTO	Permen 22 tahun 2014	dukungan teknis kepada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pelaksanaan program pelita pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	Disdik		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
39	Universitas Mulawarman	Permen 22 tahun 2014	a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya; dan e. penyusunan produk hukum daerah.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	BKPSDM		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
40	Pemerintah Kota Balikpapan dengan Universitas Mulawarman		a. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, d. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya; dan e. Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	BKPSDM		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
41	Universitas Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, b. Penyelenggaraan Pendidikan dan	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bappeda Litbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelatihan, c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, d. Penyelenggaraan KegiatanIlmiah, Seminar dan Lokakarya; dan e. Penyusunan Produk Hukum Daerah.					
42	Universitas Balikpapan		a. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, d. Penyelenggaraan KegiatanIlmiah, Seminar dan Lokakarya; dan e. Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bappedlitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
43	Universitas Gadjah Mada	Permen 22 tahun 2014	a. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, d. Penyelenggaraan KegiatanIlmiah, Seminar dan Lokakarya; dan e. Penyusunan Produk Hukum Daerah. f. Didang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan misi dan visi PARAH PIHAK.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	DKK		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	Pemerintah Kota Balikpapan dengan Universitas gadja Mada		a. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, d. Penyelenggaraan KegiatanIlmiah, Seminar dan Lokakarya; dan e. Penyusunan Produk Hukum Daerah. f. Didang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan misi dan visi PARAH PIHAK.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	DKK		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
45	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAMS Sepinggan Bpn	Permen 22 tahun 2014	1. bidang Pariwisata dan budaya, 2. Bidang UKM dan Koprasi, 3. bidang Lingkungan Hidup, 4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dan 5. Bidang Perhubungan	Pelayanan Informasi, Publikasi, Promosi dan Pembangunan di Kota Balikpapan	DPOP		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
46	Pemerintah Kota Balikpapan dan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara		a. Bidang pariwisata dan budaya, b. Bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koprasi	Pelayanan Informasi, Publikasi, Promosi dan Pembangunan di Kota Balikpapan.	DKUMKMP		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Internasional SAMA Sepinggan Balikpapan							
47	PT. KARYAPAMA MARGA ABADI	Permen 22 tahun 2014	Penyedian rumah murah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Penyediaan Rumah Murah Kepada Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	BKPSDM		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
48	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Permen 22 tahun 2014	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdiaan kepada masyarakat. 3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan Lokakarya, dan 4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Disdik dan Bappeda		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49	PT. DAYAMITRA TELEKOMONIKASI	Permen 22 tahun 2014	Peniungkatan pelayanan infrastruktur telekomonikasi bagi masyarakat dan pemerintah balikpapan	PENINGKATAN PELAYAN DAN INFRASTUKTUR TELEKOMONIKASI DI KOTA BALIKPAPAN	DISHUB, DISKOMINFO		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
50	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	Pemberiaan pelayanan bantuan hukum secara ligititas dan non ligilitas	PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM DIKOTA BALIKPAPAN	BPMP2KB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
51	Universitas Brawijaya	Permen 22 tahun 2014	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdiaan kepada masyarakat. 3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan Lokakarya, dan 4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia.	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Perkotaan		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
52	Pemkot Balikpapan dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Area Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	1. Pemberian fasilitas kredit kepada PNS di Lingkungan Pemerintahan Kotya Balikpapan, 2. Memfasilitasi pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 3. Penempatan dana, dan 4. Fasilitasi Cash Management dan Corprorate Card	Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Perbankan	BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral	Permen 22 tahun 2014	a. Sosialisasi Penyedian dan pendistribusian gas Bumi melalui jaringan gas bumiuntuk Rumah tangga, b. Pembangunan infrastruktur penyediaan dan pendistribusiaan gas bumi melalui jaringan distruibusi gas bumi untuk rumah tangga termasud sarana pendukung, c. perizinan terkait pembangunan penyediaan dan pendistribusiaan gas bumi melalui jaringan distribusi gas.	Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumahtangga di Wilayah Kota Balikpapan Provinsi KalimantanTimur.	Bag. Ekonomi		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
54	Badan Informasi Geospasial	Permen 22 tahun 2014	a. Penyelenggaraan informasi geospasial, b. Pengembangan Informasi geospasial, c. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan para pihak	Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kota Balikpapan	BPBD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
55	Kantor Wilayah Kemerntrian Hukum dan HAM Prov. Kaltim	Permen 22 tahun 2014	pelayanan pembuatan KTP elektronik bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di Kaota Balikpapan	Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama LayananKArtu Tanda Penduduk Elektronik Warga Binaan Masyarakat.	Disdukcapil		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
56	Pemkot Balikpapan dengan Universitas Muslim Indonesia	Permen 22 tahun 2014	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, 2. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarnya, dan 4. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi sumber Daya Manusia	Kerjasma Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Dinas Pendidikan		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	Pemkot Balikpapan dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Wilayah Banjarmasin	Permen 22 tahun 2014	1. Penerimaan Pendapatan dan Pembayaran Retribusi Daerah, 2. Pemberian fasilitasi Kredit kepada PNS Kota Balikpapan, 3. Sistem Informasi Pendidikan, 4. Penempatan Dana, dan 5. Fasilitas Cash Management.	Kerjasma Layanan Jasa Perbankan	BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
58	Pemkot Balikpapan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.	Permen 22 tahun 2014	Pelaksanaan Pembayaran PBB-P2 *on-line* dan *e-tax/electronic taxes*	Kerjasma Layanan Jasa Perbankan	BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
59	Pemkot Balikpapan dengan Pemerintah STIE MADANI Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Pendidikan dan Pelatihan, b. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, c. Kegiatan Ilmiah, seminar dan lokakarya, d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, e. peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, f. penyusunan produk hukum daerah.	Pelaksanaan sistem *ON-LINE* Pembayaran dan Pelaporan	Bag. Organisasi		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
60	Pemkot Balikpapan dengan PT. BANK	Permen 22 tahun 2014	a. pemanfaatan nomor identitas PNS; b. pemanfaatan data kepangkatan; c. pemanfaatan data jabatan dan unit kerja; dan	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	BKPSDM		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kaltimtara		d. pemanfaatan data usia pensiun.					
61	Pemkot Balikpapan dengan Universitas Semarang	Permen 22 tahun 2014	a. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, b. Peningkatan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, d. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, e. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarnya, f. Penyusunan produk hukum daerah.	Kerjasma Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Disdik		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
62	Pemkot Balikpapan dengan PT. PLN (persero) UIP Kalimanatan BagianTimur	Permen 22 tahun 2014	Ruang lingkup meliputi dukungan teknis dan pendanaan dakam pengelolaan Kebun Raya Balikpapan	Pengelolalaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kebun Raya Balikpapan	DLH		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
63	Pemkot Balikpapan dengan Institut Teknologi Kalimantan	Permen 22 tahun 2014	a. Pendidikan; b. Penelitian; c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Pengabdian kepada Masyarakat.	Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	DPMPT		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
64	Pemkot Balikpapan dengan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Wilayah Balikpapan.	Permen 22 tahun 2014	a. Pengembangan *smart city governamce;* b. Pengembangan *smart city mobility;* c. Pengembangan *smart city environment;* d. Pengembangan *smart city living;* e. Pengembangan *smart city economy;* dan f. Pengembangan *smart city people.*	Pengembangan *Smart City* di Kota Balikpapan	DPOP, DKUMKMP, Diskominfo		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
65	Pemerintah Kota Balikpapan dengan Universitas Trisakti Jakarta	Permen 22 tahun 2014	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya; d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia; e. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan f. Penyusunan produk hukum daerah	KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	BKPSDM		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
66	Pemerintah Kota Balikpapan dan PT. Bank Danamon Indonmesia Tbk	Permen 22 tahun 2014	a. Kepedulian Lingkungan; b. Peningkatan sektor wisata di kota balikpapan	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility	Kecamatan Kota		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
67	Pemkot Balikpapan dengan Kodim 0905 Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Bidang Sumber Daya Manusia, b. Bidang Infrastruktur, c. Bidang Perekonomian, dan d. Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Balikpapan	Bappedalitbang		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
68	Pemkot Balikpapan dengan Kepolisian Resor Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	1. Tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan jalur Putra dan Putri berprestasi dalam penerimaan calon anggota Polri. 2. Penelusuran dan penyediaan SDM yang memenuhi kriteria Putra dan Putri berprestasi bagi calon Polri. 3. Pengarahan, Pembinaan, dan Pelatihan Putra dan Putri yang dipersiapkan untuk menjadi calon anggota Polri yang berkualitas, dan 4. Sosialisasi penerimaan calon anggota Polri melalui Putra dan Putri berprestasi kepada masyarakat, khusnya para pelajar.	Penelusuran dan Pembinaan Putra-Putri Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggotya Kepolisian Negara Republik Indonesia	disdik		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
69	Pemkot Balikpapan dan Kejaksaan Negeri Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	Pemberian bantuan hukum, pertimbanganhukum dan tindakan hukum lainnya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam menghadapi permasalahan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara	Kerjasama Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	BKPSDM dan Bag. Hukum		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
70	Pemkot Balikpapan dengan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	1. Pengembangan data Pertanahan, 2. Surve, 3. Pengukuran, 4. Pemetaan Tematik, 5. Pertimbang Teknis Pertanahan, 6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan 7. Pensertifikatan aset Pemerintah Kota Balikpapan.	Kerjasma bidang Pertanahan	DPPR		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
71	Pemkot Balikpapan dengan Badan Ekonomi Kreatif	Permen 22 tahun 2014	a. Riset, edukasi dan pengembangan ekonomi Kreatif, b. Akses permodalan, c. Infrastruktur, d. Pemasaran, e. Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi, f. hubungan antara lembaga dan wilayah, dan, g. ruang sentral pemasaran ekonomi kreatif.	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Balikpapan	DKUMKMP		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	Dirjen Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan Pemkot Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi milik PIHAK KESATU; b. Melakukan bimbingan teknis penyusunaan Rencana Induk (*masterplan) Smart City*; c. Melaksanakan Sosialisasi dan *Focus Grup Discussion* Gerakan Menuju 100 *Smart city;* d. Melakukan Pertukaran data, dan *legal software* dengan menggunakan *free and open Source Software* antara Perangkat Daerah; dan e. pelaksanaan integrasi data antar Perangkat Daerah	Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Balikpapan	Diskominfo		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
73	Pemkot Balikpapan dengan Direktorat Jendral Pajak Kaltimtara	Permen 22 tahun 2014	a. Sosialisasi, b. Bimbingan dan Konsultasi, c. Koordinasi, dan d. Pemanfaatan data dan/atau Informasi	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan
74	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemkot Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, b. Pengawasan Penganggaran dan Pemanfaatan dana bagi hasil pajak Pokok, c. Monitoring dan Evaluasiterhadap kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang yang berada diwilayah kota Balikpapan. d. Intensifikasi Pajak Bahan Bakar	Peeran serta Poemerintah Daera Kota Balikpapan	BPPDRD		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kendaraan Bermotor, e. Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan umum meneral dan batu bara, perkebunan dan kehutanann, f. penelusuran dan percepatan realisasi atas tunggakan pajak kendaraan dinas yang ada dilingkungan kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Balikpapan.					
75	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional SAMA Sepinggan Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	a. Peningkatan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan integritas Command Center milik Pihak Pertama dengan CCTV milik Pihak Kedua dan CCTV milik Pihak Ketiga. b. Akses Jaringan CCTV milik Para Pihak.	Integritas Command Center Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan Closed Circuit Televion Pemerintah Kota Balikpapan dan Closed Circuit Television Bandar Udara Internasiaonal SAMS Sepinggan Balikpapan.	DISHUB, DISKOMINFO		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	Sumber dan Jumlah Anggaran	Jangka Waktu Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
76	Pemerintah Daera Kota Balikpapan dengan LPSK RI Balikpapan	Permen 22 tahun 2014	(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan. (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan; b. pemberian layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana; c. sosialisasi layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; d. pemberian informasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan; e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana; dan f. peningkatan kemampuan sumber daya manusia PARA PIHAK.	LAYANAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA	DP3AKB		APBD masing-masing daerah	12 Bulan

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Pemerintah Kota Balikpapan selama tahun 2018 telah melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait, yang dapat dilaporkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 6.3.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

No	FORUM KOORDINASI	MATERI KOORDINASI	INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT	SUMBER ANGGARAN	JML ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA KOORDINASI	JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT/GOL.	JML KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN	HASIL DAN MANFAAT KOORDINASI	TINDAK LANJUT HASIL KOORDINASI	HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rapat kordinasi Kerjasama Daerah	Kerjasama Daerah	Biro Kerjasama Prov. Kaltim	APBD		Kerjasama dan Perkotaan	1, S1, III.b	1 Kegiatan	Terjalinnya Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota	MOU	
2	Rapat kordinasi Kerjasama Daerah	Kerjasama Daerah dan Sister City	Ditjen Bina Bangda Kemendagri	APBD		Kerjasama dan Perkotaan	1, S1, III.b	1 Kegiatan	Terjalinya Koordinasi antara Pusat dan Daerah	MOU	
3	Rapat Kerja Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Timur Tahun 2019	1. Batas Wilayah	Gubernur Kalimantan Timur;	APBD		Kerjasama dan Perkotaan	6 orang pegawai & 2 orang naban	1 kegiatan	Terlaksanaanya identifikasi, validasi, dan pembakuan data nama rupa bumi unsur alami;	SK Batas Wilayah	
		2. Penataan Wilayah	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen	APBD			S2 & S1				

No	FORUM KOORDINASI	MATERI KOORDINASI	INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT	SUMBER ANGGARAN	JML ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA KOORDINASI	JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT/GOL.	JML KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN	HASIL DAN MANFAAT KOORDINASI	TINDAK LANJUT HASIL KOORDINASI	HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		& Toponimi	Pemerintahan Umum, Ditjen OTDA); Badan Informasi Geospasial; Pejabat Provinsi Kalimantan Timur (Asisten Tata Pemerintahan, Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, BPN Provinsi, Bappeda Provinsi); Wakil dari Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur				Gol IV, III, dan II				

No	FORUM KOORDINASI	MATERI KOORDINASI	INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT	SUMBER ANGGARAN	JML ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA KOORDINASI	JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT/GOL.	JML KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN	HASIL DAN MANFAAT KOORDINASI	TINDAK LANJUT HASIL KOORDINASI	HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Forkopimda	Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD	Sekretariat Daerah	2.380.220.000	Bag. Pemerintahan	3078 orang	12 bulan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kota Balikpapan		

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

a. Sengketa batas wilayah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Sengketa batas wilayah dengan Segmen Teluk Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

a. Sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kartanegara telah disepakati 4 titik (titik 4,5,6,7 pada peta kerja) tarikan garis batas yang dibuat oleh Tim PDB Provinsi Kalimantan Timur dengan trayek sepanjang ± 2,5 km, sedangkan titik 1,2,3 menuju titik 4 belum disepakati oleh masing-masing Tim PDB. Untuk itu masing-masing Tim PDB membuat kajian teknis berupa peta tarikan batas yang disampaikan kepada Tim PDB Provinsi Kaltim terkait trayek yang belum disepakati untuk selanjutnya dikaji oleh Tim BPD Provinsi Kaltim.

Setelah dilakukan kajian oleh Tim BPD Provinsi Kaltim, maka Gubernur Kaltim menegaskan Segmen Batas antara Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui surat Gubernur Kaltim beserta Peta Lampiran nomor: 136/7367/BPPW-C/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Batas Wilayah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Batas Wilayah Kota Balikpapan-Kabupaten Kutai Kartanegara hanya berupa Batas Daerah di Darat. Untuk Batas Daerah di darat meliputi wilayah Teritip, Karang Joang dan Paruh Burung.

Pelaksanaan penegasan batas daerah hingga tahun 2016 sebagai berikut:

1) Segmen Batas antara kelurahan Teritip, Kota Balikpapan dengan Kelurahan Salok Api, Kabupaten Kutai Kartanegara, tahapan tahapan yang telah dicapai adalah:
   - Telah tercapai kesepakatan dan diterbitkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 136 /7367/BPPW-C/2011, tertanggal 8 Agustus 2011, perihal Batas Wilayah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
   - Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

2) Segmen Batas antara Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan dengan Kelurahan Sungai Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara, tahapan-tahapan yang telah dicapai:
   - Telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 2 titik, yakni di titik KM 24 dan dititik Paruh Burung.

b. Sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada tanggal 6 s.d 8 November 2018 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan dan klarifikasi peta batas daerah antara pusat dan daerah pada segmen batas antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesepakatan sebagai berikut:

1) Kedua Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berbatasan sepakat terhadap penarikan garis batas pengelolaan laut antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur di Teluk Balikpapan sesuai dengan Berita Acara tanggal 3 Juli 2018;
2) Kedua Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berbatasan sepakat melanjutkan ke tahap penyusunan draft Permendagri terkait penarikan garis batas pengelolaan laut antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan mengusulkan penetapan Permendagri tentang batas laut terpisah dengan Permendagri Nomor 48 Tahun 2012;

3) Ditjen Bina Adwil akan melakukan penambahan titik kartometrik pada penarikan garis batas pengelolaan laut pada sub-segmen diatas dan meminta masukan kepada Biro Hukum Kemendagri terkait bentuk hukum, konstruksi hukum, dan substansi hukum terhadap kesepakatan garis batas di Teluk Balikpapan sesuai dengan Berita Acara tanggal 3 Juli 2018;
4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Adwil khususnya subdit Toponimi wilayah I terkait gazeteer pulau yang terletak di Teluk Balikpapan sesuai dengan Berita Acara tanggal 3 Juli 2018.

3. Perangkat Daerah Penyelenggaran Pembinaan Batas Wilayah

Perangkat Daerah yang menangani pembinaan batas-batas wilayah adalah Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Tim PBD Kota Balikpapan dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang menangani pembinaan batas-batas wilayah secara fungsional melekat pada Bagian Kerjasama dan Perkotaan sSekretariat Daerah Kota Balikpapan.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Sepanjang tahun 2019 bencana yang terjadi di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Kebakaran permukiman;
b. kebakaran lahan/hutan;
c. Banjir;
d. Tanah longsor;
e. Kejadian Lain-lain

2. Status Bencana

Dari beberapa kali kejadian bencana apabila dilihat dari statusnya maka bencana yang terjadi di Kota Balikpapan berstatus bencana Kota / Lokal.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan sejumlah Rp. 408.770.000,00.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah melakukan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi.

5. Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Penanganan bencana di Kota Balikpapan menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dengan melibatkan perangkat daerah terkait seperit Dinas Sosial Kota Balikpapan,Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan, Basarnas serta berbagai unsur baik itu instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah 161 PNS dan 136 orang Non PNS.

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Kelembagaan yang dibentuk untuk menangani bencana adalah Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kota Balikpapan.

8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi adalah sebagai berikut :

a) Angin puting beliung;

b) Tanah longsor pemukiman;

c) Pohon tumbang;

d) Kebakaran pemukiman;

e) Kebakaran sekolah;

f) Kebakaran sarana kesehatan;

g) Kebakaran gudang;

h) Kebakaran hutan/ladang;

i) Kebakaran kapal laut;

j) Ledakan tabung gas;

k) Musibah orang tenggelam;

l) Banjir genangan air;

m) Tanah longsor penggundulan hutan;

n) Konflik masyarakat;

o) Kegagalan teknologi;

p) Wabah penyakit.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Penetapan kawasan khusus dimaksudkan untuk melindungi aset Negara, meningkatkan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kota Balikpapan memiliki beberapa Kawasan Khusus yang dikelola Pemerintah, Swasta, mapun masyarakat diantaranya sebagai berikut:

Tabel 6.4.

Pengelolaan Kawasan Khusus

No	Jenis Kawasan Khusus	Status Kepemlliklan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, Bumn, Swasta Dan Atau Keraiasama)	Sumber Anggaran	Permasalahan Yang Dihadapi	Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus	Jumlah Pegawal, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kawasan Strategis dari sudut pandang lapangan ekonomi					
	1.1 Kawasan Kota Baru Karang Joang	Pemerintah Kota Balikpapan, Swasta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Belum adanya delineasi yang pasti serta penyusunan strategi pengembangan Kawasan Kota Baru Karang Joang sebagai Sub Pelayanan Kota Balikpapan	Bappeda Litbang. DPPR. DPMPT. DPU, DISHUB	
	1.2 Kawasan lndustri Kariangau	Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan. Swasta	APBD Provinsi dan Kota	Tumpang tindih kepemilikan lahan, topografi lahan yang berbukit, akses jalan, pengawasan perizinan, pembentukan perusahaan kawasan industri	DPMPT, DKUMKMP, Perusda Kota Balikpapan	

No	Jenis Kawasan Khusus	Status Kepemlliklan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, Bumn, Swasta Dan Atau Keraiasama)	Sumber Anggaran	Permasalahan Yang Dihadapi	Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus	Jumlah Pegawal, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
	1.3 Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru	Pemerintah Kota Balikpapan, Swasta	APBN, APBD Provinsi dan Kota	Permukiman kumuh, kewenangan PPI saat ini diambil alih oleh provinsi	Disperkim, DPU, DP3, DPOP, DP3AKB, DKK,	
	1.4 Kawasan Reklamasi Pantai	Pemerintah Kota Balikpapan, Swasta	APBD Kota, Swasta	Banyaknya perizinan yang harus dilengkapi antara lain: ljin Kerja Reklamasi ke Kementerian Perhubungan, izin Lingkungan	DPMPT, Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan	
	1.5 Kawasan Kota Baru Teritip	Pemerintah Kota Balikpapan	APBN, APBD Provinsi dan Kota	Target total rumah produksi yang akan dibangun di SIKT sebanyak 48 unit. Target pembangunan hingga tahun 2019 sebanyak 24 unit. Sehingga masih memerlukan anggaran untuk pembangunan 24 unit rumah produksi lagl,Memerlukan sumber daya alternatif misalnya dari energi sinar matahari atau angin Memerlukan kolam detensi untuk mengatasi banjir	DKUMKMP	
2	Kawasan strategis dari sudut pandang lapangan sosial budaya					
	2.1 Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat	Masyarakat	APBD Kota Balikpapan. PDAM	Perlu peningkatan layanan dasar khususnya Air Minum, Sanitasi dan Persampahan	DISPERKIM, DLH. DPU	

No	Jenis Kawasan Khusus	Status Kepemlliklan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, Bumn, Swasta Dan Atau Keraiasama)	Sumber Anggaran	Permasalahan Yang Dihadapi	Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus	Jumlah Pegawal, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
3	Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan, fungsi dan daya dukung lingkungan					
	3.1 Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (Termasuk kawasan Kebun Raya Balikpapan)	PUSAT (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,BUMN	Belum adanya pengaturan lebih lanjut dari UU No.23 Tahun 2014 khususnya sektor kehutanan,sehingga status Pemkot dalam pengelolaan dan penganggaran kawasan hutan lindung sungai Wain khususnya Kebun Raya Balikpapan adalah pengelola sementara.	DLH	
	3.1.1 UPTD Kebun Raya Balikpapan	Pemerintah Kota Balikpapan	APBD Kota Balikpapan	Jaringan Air ke Taman2 (Musim Kemarau) Sapras Kebersihan (Dump truck)	DLH	Sl (Ill C) 1 orang S 1 (111 B) 1 orang St (II C) 1 orang SMA 25 orang SMP 5 orang SD 3 orang
		KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus)		Kendaraan Operasional (pickup) Jaringan Listrik tidak pernah lagi Kegiatan Explorasi (Pencarian bibit ke hutan)		

No	Jenis Kawasan Khusus	Status Kepemlliklan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, Bumn, Swasta Dan Atau Keraiasama)	Sumber Anggaran	Permasalahan Yang Dihadapi	Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus	Jumlah Pegawal, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
	3.2 Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Ballkoaoan Timur	PUSAT (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Personil pekerja Penellti / PNS Fungsional Perbaikan Sapras Pendukung Konservasi Belum adanya pengaturan lebih lanjut dari UU No.23 Tahun 2014 khususnya sektor kehutanan. (Kendala penganggaran antara lain kegiatan pemagaran kawasan hutan lindung)	DLH	

1. Jenis Kawasan Khusus

Jenis kawasan khusus yang ada di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Strategis dari sudut pandang lapangan ekonomi

- Kawasan Kota Baru Karang Joang;
- Kawasan Industri Kariangau;
- Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
- Kawasan Reklamasi Pantai;
- Kawasan Kota Baru Teritip.

b. Kawasan Strategis dari sudut pandang lapangan sosial budaya

- Kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat;
- Kawasan Pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan, fungsi

- Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (termasuk Kawasan Kebun Raya Balikpapan);
- UPTD Kebun Raya Balikpapan;
- Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus

a. Status kepemilikan Kawasan Kota Baru Karang Joang adalah milik Pemerintah Kota Balikpapan dan Swasta;
b. Status kepemilikan Kawasan Industri Kariangau adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Swasta;
c. Status kepemilikan Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru adalah milik Pemerintah Kota Balikpapan dan Swasta;
d. Status kepemilikan Kawasan Reklamasi Pantai adalah milik Pemerintah Kota Balikpapan dan Swasta;
e. Status kepemilikan Kawasan Kota Baru Teritip adalah milik Pemerintah Kota Balikpapan;

f. Status kepemilikan Kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat adalah milik masyarakat;
g. Status kepemilikan Kawasan Pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah milik ITK (Kemendikbud) dan masyarakat;
h. Status kepemilikan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (termasuk Kawasan Kebun Raya Balikpapan) adalah milik Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
i. Status kepemilikan Kawasan UPTD Kebun Raya Balikpapan adalah milik Pemerintah Kota Balikpapan;
j. Status kepemilikan Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur adalah milik Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

3. Sumber Anggaran

a. Sumber anggaran Kawasan Kota Baru Karang Joang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Swasta;
b. Sumber anggaran Kawasan Industri Kariangau bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kota;
c. Sumber anggaran Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Swasta;
d. Sumber anggaran Kawasan Reklamasi Pantai bersumber dari APBD Kota dan Swasta;
e. Sumber anggaran Kawasan Kota Baru Teritip bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota;
f. Sumber anggaran Kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat bersumber dari APBD Kota dan PDAM;
g. Sumber anggaran Kawasan Pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara bersumber dari APBN dan APBD Kota;
h. Sumber anggaran Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (termasuk Kawasan Kebun Raya Balikpapan) bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan BUMN;

i. Sumber anggaran Kawasan UPTD Kebun Raya Balikpapan bersumber dari APBD Kota;
j. Sumber anggaran Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.

4. Permasalahan yang Dihadapi

a. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Kota Baru Karang Joang adalah belum adanya delineasi yang pasti serta penyusunan strategi pengembangan Kawasan Kota Baru Karang Joang sebagai sub layanan Kota Balikpapan;
b. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Industri Kariangau adalah tumpang tindih kepemilikan lahan, topografi lahan yang berbukit, akses jalan, pengawasan perizinan, pembentukan perusahaan kawasan industri;
c. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru adalah permukiman kumuh, kewenangan PPI saat ini diambil alih oleh Provinsi;
d. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Reklamasi Pantai adalah banyaknya perizinan yang harus dilengkapi, antara lain: izin kerja reklamasi ke Kementerian Perhubungan, izin lingkungan;
e. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Kota Baru Teritip adalah target total rumah produksi yang akan dibangun sebanyak 48 unit, target pembangunan hingga tahun 2018 sebanyak 24 unit sehingga masih memerlukan anggaran untuk pembangunan 24 unit rumah produksi lagi, memerlukan sumber daya alternatif misalnya dari energi sinar matahari atau angin, memerlukan kolam detensi untuk mengatasi banjir;
f. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat adalah perlu peningkatan layanan dasar khususnya air minum, sanitasi dan persampahan;
g. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah belum bebasnya seluruh lahan yang dibutuhkan untuk ITK, belum terbangunnya infrastruktur jalan masuk yang representatif;
h. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan

Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (termasuk Kawasan Kebun Raya Balikpapan) adalah belum adanya pengaturan lebih lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya sektor kehutanan, sehingga status Pemerintah Kota dalam pengelolaan dan penganggaran Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain khususnya Kebun Raya Balikpapan adalah pengelola sementara;

i. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan UPTD Kebun Raya Balikpapan adalah jaringan air ke Taman 2 (musim kemarau), sarana dan prasarana kebersihan (damtruck), kendaraan operasional (pickup), jaringan listrik, tidak pernah lagi jaringan eksplorasi (pencarian bibit ke hutan);
j. Permasalahan yang dihadapi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur adalah personil pekerja, peneliti/PNS fungsional, perbaikan sarana dan prasarana pendukung konservasi, belum adanya pengaturan lebih lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya sektor kehutanan (kendala penganggaran antara lain kegiatan pemagaran kawasan hutan lindung).

5. Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus

a. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Kota Baru Karang Joang adalah Bappedalitbang, DPPR, DPMPT, DPU dan Dishub;
b. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Industri Kariangau adalah DPMPTT, DKUMKMP dan Perusda Kota Balikpapan;
c. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru adalah Disperkim, DPU, DP3, DPU, DPOP, DP3AKB dan DKK;
d. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Reklamasi Pantai adalah DPMPT dan Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan;
e. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Kota Baru Teritip adalah DKUMKMP;
f. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat adalah Disperkim, DLH dan DPU;
g. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah Disdikbud dan DPU;
h. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan

Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (termasuk Kawasan Kebun Raya Balikpapan) adalah DLH;

i. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan UPTD Kebun Raya Balikpapan adalah DLH;
j. Perangkat Daerah yang menangani Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur adalah DLH.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Pegawai yang menangani Kawasan Kota Baru Karang Joang adalah pegawai yang berasal dari OPD: Bappedalitbang, DPPR, DPMPT, DPU dan Dishub;
b. Pegawai yang menangani Kawasan Industri Kariangau adalah pegawai yang berasal dari OPD: DPMPTT, DKUMKMP dan Perusda Kota Balikpapan;
c. Pegawai yang menangani Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru adalah pegawai yang berasal dari OPD: Disperkim, DPU, DP3, DPU, DPOP, DP3AKB dan DKK;
d. Pegawai yang menangani Kawasan Reklamasi Pantai adalah pegawai yang berasal dari OPD: DPMPT dan Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan;
e. Pegawai yang menangani Kawasan Kota Baru Teritip adalah pegawai yang berasal dari OPD: DKUMKMP;
f. Pegawai yang menangani Kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat adalah pegawai yang berasal dari OPD: Disperkim, DLH dan DPU;
g. Pegawai yang menangani Kawasan Pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah pegawai yang berasal dari OPD: Disdikbud dan DPU;
h. Pegawai yang menangani Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (termasuk Kawasan Kebun Raya Balikpapan) adalah pegawai yang berasal dari OPD: DLH;
i. Pegawai yang menangani Kawasan UPTD Kebun Raya Balikpapan adalah pegawai yang berasal dari OPD: DLH;
j. Pegawai yang menangani Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur adalah pegawai yang berasal dari OPD: DLH.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

Di Kota Balikpapan tidak pernah terjadi konflik yang berbasis SARA, anarkisme, ataupun separatisme. Kondisi keamanan di Kota Balikpapan sangat kondusif. Secara umum jenis gangguan yang terjadi di Kota Balikpapan pada tahun 2019 adalah:

a) Gangguan keamanan, ketertiban dan keindahan (K3);

b) Pelanggaran Perda dan Perwali Kota Balikpapan.

2. Perangkat Daerah yang Menangani

Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Balikpapan.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan yang menangani penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah 133 orang dari Satuan Polisi PP.

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;

b) Tingkat kesadaran para pelanggar masih rendah.

Tindakan penanggulangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Melaksanakan razia/penertiban di tempat rawan gangguan K3;

b) Melaksanakan sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Keamanan dari TNI/POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman dalam upaya menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Dan juga keikutsertaan aparat keamanan dari TNI/POLRI, Kejaksaan dan

Kehakiman dalam kegiatan-kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran dalam kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 741.000.000



BAB VII - PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuanmengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai daritahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhanPelayanan Dasar.

Penerapan SPM sebagai mana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penerapan dan Pencapaian standar Minimal di Kota Balikpapan pada tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan :
   OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program PendidikanAnakUsiaDini	100%	100%	6.936.124.000,00	6.262.530.182,00	KepalaDinas, KepalaBidang, Pengelola PAUD Tingkat Kota, PengelolaLembagadanSatuanPendidikan Non Formal, PengelolaKegiatan, KepalaSekolah, TenagaPendidik, TenagaKependidikan, Pengelola BOS, KomiteSekolah, Fasilitator DAK, NarasumberKegiatan, PanitiaKegiatandan Tim JuriLomba	Masalah : PadaHariAnakNasionalterjadiperubahanikilim/cuacapadasaatkegiatan outdoor, Solusi : Kegiatan outdoor di batalkan Masalah : Animosatuanpendidikanpesertaakreditasimelebihi target

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
							kegiatan, Solusi : SatuanpendidikanPAUD mengikutipenilaianakreditasidengancaramandiri Masalah : Pengadaan APE danbukupadakegiatan DAK belumterdaftar di E katalog, Solusi : Menyusunrencanakegiatansesuaidenganrencanakerja
2	Program Pendidikan Non Formal	100%	100%	18.274.887.800,00	16.459.707.814,00	KepalaDinas, KepalaBidang, Pengelola PAUD Tingkat Kota, PengelolaKegiatan, KepalaSekolah, TenagaPendidik, TenagaKependidikan, Pengelola BOS, KomiteSekolah, Fasilitator DAK, NarasumberKegiatan,	Masalah : Data pesertaUjian , Solusi : Pendataandilakukanlebihawaldenganmelakukankoordinasikepadasatuanpendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
						PanitiaKegiatandan Tim JuriLomba	Masalah : 6 lomba GTK PAUD Non Formal tidakdilaksanakan di tingkatProvinsi , Solusi : Melakukankoordinasi keProvinsiterkaitkegiatan Masalah : Terdapat sub kegiatan Rehab (DAK) yang tidakbolehdilaksanakan, Solusi : Sub kegiatantidakdilaksanakan
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	. 838.600.000,00	778.285.978,00	Kepala Dinas, Kepala Bidang pengelola kegiatan, Pengawas Sekolah, Kepala sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan	Masalah : Usulan berkas anga kredit tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat berikutnta.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
						Narasumber Kegiatan, Tim Juri Lomba Analis Data dan Tim Penilai	Solusi : Melakukan pembinaan/ bimbingan bagi guru yang akan mengajukan usul lenaikan pangkat Masalah: Target pertama kegiatan diarahkan untuk kegiatan PKB guru umum namun karena urgensi kegiatan sasaran di alihkan ke guru inklusi sejumlah 54 berdasarkan SK sekolah Solusi ; Melaksanakan PKB untuk guru umum Masalah : Perubahan proses pembayaran yang non pns dibayar melalui Dana Hibah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
							Solusi : Penganggaran di bagi berdasarkan status Kepegawaian guru.
4	Program Pendidikan Dasar	100%	100%	210.009.055.450,00	201.447.044.933,52	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pengelola Kegiatan, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pengelola BOS, Komite Sekolah Fasilitator DAK, Narasumber Kegiatan dan Tim Juri lomba.	

2. Urusan Kesehatan :

OPD : Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Kesehatan Inu Hamil	**13575**	**12936**			958 (PNS 563, Non PNS 396)	1. Keterbatasan SDM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12506	12417				2. Penyediaan BMHP masih terbatas
3	pelayanana Kesehatan Bayi Baru Lahir	12341	12396	1.612.000.000,00	1.541.241.291,-		3. Definisi Operasional per indikator terkadang terdapat perubahan denominator
4	Pelayanan Kesehatan Balita	59002	54043				4. Mengakomodir Kriteria sesuai standar pelayanan minimal
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan	103659	35921	0	0		

	Dasar						
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	165946	189555	100.000.000,00	97.042.430,00		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	43345	17703	350.000.000,00	324.283.660,00		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita hopertensi	166933	44482	300.000.000,00	25.012.951,00		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15174	10145				
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa 9 (ODGJ)	722	581	100.000.000,00	59.753.775,00		
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	11200	9313	200.000.000,00	151.576.650,00		
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	11919	15222	250.000.000.000,00	187.180.777,00		
	BOK Puskesmas			14.219.000.000,00	11.459.039.456,00		DPA per Puskesmas khusus DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) Tahun 2019 tersaji per program belum tersaji perindikator SPM

3. Urusan Pekerjaan Umum :

OPD : Dinas Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Pembangunan Jaringan Air Bersih)	**100**	**79,60**	Rp 25.908.750.000	24.954.944.678	13	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (DAK 2019)	**90**	**80**	Rp 1.261.011.000	1.243.811.902	13	

4. Urusan Perumahan Rakyat :

OPD : Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Penyedian Rumah Layak Huni	90%	100%	Rp 1.413.831.000	Rp 1.413.621.500	Kepala Seksi + 2 (Dua) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	**Permasalahan** Ada beberapa usulan RT dan KeLurahan yang kurang sesuai dan Kepemilikan Lahan yang Kurang Lengkap **Solusi** Koordinasikan dengan Pihak Terkait jika data tidak sesuai
	Program lingkungan sehat perumahan	100%	73%	5.632.576.250	3**.616.656.956**	9	1 paket tidak dilaksanakan karena waktu tdk mencukupi

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
   a. OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketentraman Umum	**100%**	**91,50%**	30.442.790.000	27.854.966.928	100 Perspnil Operasional Satpol PP dengan status PNS	Masalah yang dihadapi 1. Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai 2. Rasio jumlah personil operasional dengan jumlah penduduk belum seimbang (2 personil melayani 10.000 penduduk) 3. Rasio jumlah personil operasional dengan jumlah luas wilayah belum seimbang (3 personil menangani wilayah 10 KM²)

						50 personil operasional dengan status pegawai non PNS	Solusi yang harus dilakukan : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 2. Penambahan jumlah personil untuk memenuhi rasio jumlah personil operasional 3. Peningkatan kualitas personil melalui bimtek dan diklat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

b. OPD : BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluhan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	85%	98,61%	Rp 100.000.000,00	Rp 98.611.500,00	150 Orang	
2	Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana	70%	45,01%	Rp 1.586.700.000,00	Rp 714.166.969,00	200 Orang	

Urusan Sosial :

Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM memuat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah Selama 1 tahun		Alokasi & Realisasi Anggaran		Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
		Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100	93,33	250.000.000,00	244.446.967,00	9 orang	Perlu penambahan personil dan dukungan anggaran
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	100	98,72	508.961.700,00	315.709.046,00	9 orang	Perlu penambahan personil
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100	83,24	160.000.000,00	159.986.300,00	9 orang	Perlu penambahan personil dan dukungan anggaran
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100	58,06	1.246.110.000,00	959.153.933,00	9 orang	Perlu penambahan personil
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / Kota	100	67,84	100.000.000,00	97.714.000,00	7 orang	Perlu penambahan personil dan dukungan anggaran



BAB VIII - AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB VII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan capaian kebrhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaiman yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Saat ini Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sudah terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah uang disusun secara periodik. Ringkasan Akuntabilitas Kinerja KOta Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 8.1 berikut:

Tabel 8.1.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No	IKU Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja target dalam pembangunan jangka menengah (2021)	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai	Analisis Program dan kegiatan Mendukung Pencapian Target Kinerja
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,53	10,49	10,78	10,65	102,76%	101,53%	102,37%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,73	14,73	14,40	14,12	97,76%	95,86%	91,54%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis

No	IKU Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja target dalam pembangunan jangka menengah (2021)	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai	Analisis Program dan kegiatan Mendukung Pencapian Target Kinerja
3	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,04	73,99	74,80	74,18	101,09%	100,26%	101,03%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,55	5,05	6,55	9,52	77,10%	53,05%	69,47%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,92	64,09	64,66	64,33	100,89%	100,37%	99,60%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
6	Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)	79,53	79,13	79,84	79,81	100,90%	100,86%	100,39%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
7	Tingkat Kemiskinan (%)	2,3	2,32	2,42	2,62	95,87%	88,55%	95,04%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
8	lndeks Pembangunan Gender (angka indeks)	92	92	92	91,45	100,00%	99,40%	100,00%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks)	60,64	59,82	60,19	14,4	100,62%	24,07%	99,26%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
10	*Livable City Index* (angka indeks)	74,35	73,50	77,58	81,3	105,55%	110,61%	104,34%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
11	Indeks Kepuasan Layanan lnfrastruktur Dasar (angka indeks)	79,00	77,00	77,75	80,35	100,97%	104,35%	98,42%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
12	lndeks Gini Ratio (angka indeks)	0,3	0,32	0,31	0,32	103,23%	100,00%	96,77%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
13	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	126,64	151,15	152,34	142,35	100,79%	94,18%	120,29%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis

No	IKU Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja target dalam pembangunan jangka menengah (2021)	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai	Analisis Program dan kegiatan Mendukung Pencapian Target Kinerja
14	PDRB Non Migas (Rp.Trillun)	38,62	48,65	68,45	67,46	140,70%	138,66%	177,24%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
15	Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%	100,00%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
16	Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks)	6,9	6,75	6,89	6,87	102,07%	101,78%	99,86%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
17	Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala)	80,36	79,76	81,61	78,78	102,32%	98,77%	101,56%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
18	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	75,00	71,00	68,68	68,13	96,73%	95,96%	91,57%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
19	Penilalan Kepatuhan (angka Skala)	79,00	70,00	83,19	83,19	118,84%	118,84%	105,30%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis
20	Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks)	87,00	85,00	59,29	59,19	69,75%	69,64%	68,15%	Tidak ada Analisis	Tidak ada Analisis



BAB IX - PENUTUP

BAB IX
P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2019 yang akan dipublikasikan secara luas melalui *website* Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Terima kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela



LAMPIRAN II.1

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
KOTA BALIKPAPAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	ada/tidak ada PERDA IMB	Apabila ada: Sebutkan dasar hukumnya. Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Ada	**Ada**	Sumber Data : DPMPT
						1 Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu			
						2 Perda No. 3 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung			
						3 Perda No. 12 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Bangunan di Wilayah Kota Balikpapan			
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya	Jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2019	136.301	**66,56%**	Sumber Data : DPMPT
						Jumlah seluruh rumah s.d akhir tahun 2019	204.774		Sumber Data : DISPERKIM
			3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	Apabila ada: Sebutkan dasar hukumnya. Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Ada	**Ada**	Sumber Dta dari : Satpol PP
		Peraturan ttg Kependudukan	4	Pengurusan E- KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E KTP di bagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP	478.462	**98,85%**	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah penduduk yang wajib KTP	484.041		
			5	Pengurusan KIA	Proses Anak yang sudah memiliki KIA	Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA	101.114	**56,13%**	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA	180.128		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum)	6	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10,000 Penduduk x 100%	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019 (orang)	133	**1,98** Satpol PP per 10.000	Sumber Data : Satpol PP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penduduk pada akhir tahun 2019 (orang)	670.505		
		Kebijakan Bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak Perda Penanganan Bencana	Apabila Ada: Sebutkan dasar hukumnya.	Ada	**Ada**	BPBD
		Peraturan tentang Kebersihan Kota	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kota	Apabila Ada: Sebutkan dasar hukumnya.	Ada	**Ada**	DLH
						1 Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga			
						2 Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga			
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019	Tanggal Penyampaian LPPD 2018 (tanggal/bulan/tahun)	No Surat Pengantar 100/130/PEM Tanggal 29 Maret 2019	**Tepat**	**Tepat**	Sumber Data : Bagian Pemerintahan
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah di tetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman :		**Tepat**	
						- Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal .... 2020 sesuai surat pengantar Nomor .... Tanggal ...2020 Tahun 2019 disampaikan pada tanggal ....2020 sesuai Pengantar Nomor .... Tanggal 2020	**Tepat**		BPKD
						- Laporan Kinerja Tahun 2019, disampaikan pada tanggal .... 2020 sesuai surat pengantar Nomor .... Tanggal ...2020 Tahun 2019 disampaikan pada tanggal ....2020 sesuai Pengantar Nomor .... Tanggal 2020	**Tepat**		Bappeda

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Pemerintah Daerah yang memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang Penerapan SPM	SK Walikota Nomor 188.45-362/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Balikpapan	**Ada**	**Ada**	Sumber Data : Bagian Pemerintahan
		Hubungan Antar Daerah Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Kerja sama Daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak ... MOU yang terdiri dari : 1 MOU dengan ..... Tentang kerjasama .... 2 MOU dengan ..... Tentang kerjasama .... 3 dst.....	11 MOU	**11 MOU**	Bagian Perkotaan
	KESELARASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Singkronisasi Pelaksana Pembangunan Nasional dan Daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	- Prioritas pembangunan Daerah(RKPD) mendukung prioritas pembangunan Nasional, sebanyak .... Prioritas - Prioritas Pemangunan Nasional ada - sebanyak 5 program /agenda prioritas.	5 5	100%	Sumber Data : BAPPEDA
		Kewenangan	14	Urusan Wajib yang diselenggarakan Dearah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU No 23 Tahun 2014) X	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 2018(APBD) = ... Urusan	24	100%	Bappeda
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepatnya waktu penetapan PERDA APBD 2019	Perda No 8 Tahun 2018 Tentang APBD 2019	Tepat	**Tepat**	BPKD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda No 2 Tahun 2011 Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	**Ada**	BPKD
			17	Belanja untuk Pelayanan Dasar	layanan dasar dibagi Jur	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019		**43%**	BPKD
						1 Urusan Pendidikan	Rp 230.957.178.210,35		
						2 Urusan Kesehatan	Rp 183.976.871.435,68		
						3 Urusan PU & Penataan Ruang	Rp 542.335.344.390,10		
						4 Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan	Rp 36.734.966.848,00		
						5 Urusan Trantibum dan Linmas	Rp 25.050.227.187,71		
						6 Urusan Sosial	Rp 5.806.827.703,80		
						Total Belanja Pelayanan dasar	1.024.861.415.776		
						Total Belanja APBD 2019	**Rp 2.408.461.974.189,33**		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
			18	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019		**40,49%**	BPKD
						1 Urusan Pendidikan	Rp 230.957.178.210,35		
						2 Urusan Kesehatan	Rp 183.976.871.435,68		
						Total belanja Pend & Kes	414.934.049.646		
		Pelayanan publik	19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya Standar Pelayanan Publik	1 Perda Nomor 13 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Ada	Ada	Bagian Hukum
						2 Perwali Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan			
						3 Perwali Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Balikpapan			
						4 Perwali Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
		Kepegawaian	20	Rasio PNS terhadap Penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kota tahun 2019	4.895	**0,73%**	BKPSDM
						Jumlah Penduduk Kota Tahun 2019	670.505		Sumber Data : Disdukcapil
		Kelembagaan	21	Rasio PNS Memiliki kualifikasi Pendidikan tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII di bagi Jumlah PNS X 100%	Jumlah PNS Kota Tahun 2019 yang memiliki kualifikasi Pendidikan tinggi Minimal DIII (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	1.286	**Ada**	BKPSDM
						Jumlah PNS Kota Tahun 2019	4.895		
			22	Penataan Perangkat Daerak	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016	**Jumlah Perangkat Daerah**	**36**	**36 Unit**	Sumber Data : Bagian Organisasi
						Bagian (setda)	11		
						Sekretariat Daerah	1		
						Dinas	19		
						Badan	5		
						Kantor	1		
						Rumah Sakit	2		
						Lembaga Teknis lainnya	1		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
						Kecamatan / Distrik	6		
4	EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk Peraturan Perundangan	23	Perda yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang di tetapkan dalam tahun 2019	Perda yang ditetapkan pada tahun 2019, sebanyak 7 perda	7	**7 Perda**	Sumber Data : Bagian Hukum
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	24	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah Raperda yang di setujui DPRD tahun 2019 dibagi jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2019	Raperda yang disetujui Tahun 2019	3	**42,86%**	Sumber Data : Bagian Hukum
						Raperda yang diusulkan DPRD Tahun 2019	7		
5	EFEKTIFITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang di tindaklanjuti	Keputusan DPRD yang di tindaklanjuti oleh DPRD di bagi Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019	26	**100,00%**	Sumber Data : Set DPRD
						Keputusan DPRD dalam tahun 2019	26		
6	EFEKTIFITA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BERSERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut Keputusan Walikota	26	Keputusan Walikota yang di tindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2019 x 100%	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti tahun 2019	395	**100,00%**	Sumber Data : Bagian Hukum
						Keputusan Walikota Tahun 2019	395		
		Tindaklanjut Peraturan Walikota	27	Peraturan Walikota yang di tindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2019 X 100%	Peraturan Walikota yang di tindaklanjuti Tahun 2019	34	**100,00%**	Sumber Data : Bagian Hukum
						Peraturan Walikota Dalam Tahun 2019	34		
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAA N PEMERINTAHAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang di batalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke	Perda yang dibatalkan, ... Yang terdiri dari :	0	**0,00%**	Sumber Data : Bagian

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
	DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				Pemerintahan untuk dievaluasi X 100%	Perda yang dikirimkan untuk evaluasi oleh Pemerintah sebanyak	4	0,00%	Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang Konsultasi Publik	29	Keberadaan PERDA / PerBup tentang konsultasi Publik	Ada / tidak Perda / Per Bup	Apabila ada : - Sebutkan dasar hukumnya : - PERDA atau Perbup Nomor .... Tahun .... Tentang.... (konsultasi Publik)	Ada	**Ada**	Bappeda
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya Media informasi Pemda yang dapat di akses oleh Publik (Website Kota, Pos, Bag/biro humas, Leaflet/brosur)	Ada / Tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan perwali	Perwal No. 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Diskominfo	**Ada**	**Ada**	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI , PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap tahun 2019 Dana Perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019	**Rp 1.136.041.501.529,00** **Rp 1.247.784.803.353,00**	**91,04%**	Sumber Data : BPKD
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Realisasi belanja langsung APBD tahun 2019 DAU Tahun 2019	**Rp 439.818.664.000,00** **Rp 439.818.664.000,00**	**100,00%**	Sumber Data : BPKD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung di bagi APBD X 100%	Total realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2019	**Rp 1.539.547.317.968,99**	**63,92%**	Sumber Data : BPKD
						Total Realisasi Belanja APBD Tahun 2019	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
10	INTENSITAS, EFEKTIFITAS DAN TRANPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)	jumlah PAD dibagi jumlah total Pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (realisasi) Tahun 2019	**Rp 764.083.687.241,05**	**30,94%**	Sumber Data : BPKD
						- Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) Tahun 2019	**Rp 2.469.524.938.671,23**		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUSNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daearah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 Tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 dengan opini	WTP	Opini Tahun 2018	Sumber Data : BPKD
						Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019 dengan opini	WTP	Opini Tahun 2019	
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan	Besaran SILVA di Bagi jumlah Pendapatan X 100%	- SILPA Tahun 2019	**Rp 323.831.664.088,05**	**13,11%**	Sumber Data : BPKD
						- Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) Tahun 2019	**Rp 2.469.524.938.671,23**		
		Realisasi Belanja	37	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran Belanja	Realisasi Belanja di bagi total Anggaran belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2019	**Rp 2.408.461.974.189,33**	**86,34%**	Sumber Data : BPKD
						Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Pengawasan Inspektorat Kota	38	Rasio Temuan BPK RI yang di tindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan tahun 2019	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2019	794	**97,90%**	Sumber Data : Inspektorat
						- Temuan BPK RI sampai dengan tahun 2019	811		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta Potensi Daerah	39	Rasio Realisasi PAD 2019 terhadap Potensi PAD 4	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan Potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2019	**Rp 764.087.241.241,05**	**145,84%**	Sumber Data : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						- Potensi PAD pada APBD 2019	523.920.862.000		
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% ((PAD 2019 - PAD 2018): PAD 2018 X 100%)	- **Selisih total PAD 2019 dan 2018**	**Rp 286.249.139.700,05**	**59,91%**	Sumber Data : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						- Total PAD pada Tahun 2019	**Rp 764.087.241.241,05**		
						- Total PAD pada Tahun 2018	**Rp 477.838.101.541,00**		
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENGHARGAAN	41	Penghargaan dari Pemerintah yang di terima oleh Pemda dalam Tahun 2019	Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	penghargaan yang diterima, 1 2 ..... 3 dst	93	**93 Penghargaan**	Sumber Data : Humpro dan Seluruh OPD
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-Procurement	ada/Tidak	Perwal No. 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Perwal 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-Procurenment	Ada	**Ada**	Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Daya saing Daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	jumlah ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada tahun 2019	495 Ijin	**495 Ijin**	Sumber Data : DPMPT



LAMPIRAN II.2

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : INSPEKTORAT
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**15**	**15 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**9**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**9**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**27**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**46**	**0,94%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**9**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**9**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**9**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**9**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**2**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**2**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**2**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 15.426.619.000,00**	**0,55%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 13.842.242.904,00**	**0,57%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 5.211.646.496,00**	**37,65%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 13.842.242.904,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 8.630.578.408,00**	**62,35%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 13.842.242.904,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 12.745.039.153,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak Ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**10**	**10 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**55**	**55 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**19**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**19**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**9**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**121**	**2,47%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**15**	**78,95%**	
						Pejabat yang ada	**19**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**19**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**19**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**19**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**19**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**13**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**13**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 72.816.577.000,00**	**2,61%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 65.949.411.873,73**	**2,74%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 50.354.523.886,73**	**76,35%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 65.949.411.873,73**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 15.594.887.987,00**	**23,65%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 65.949.411.873,73**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 8.054.996.959,01**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**tidak ada**	**tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**10**	**10 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**55**	**55 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**19**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**19**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**9**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**121**	**2,47%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**15**	**78,95%**	
						Pejabat yang ada	**19**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**19**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**19**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**19**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**19**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**13**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**13**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 72.816.577.000,00**	**2,61%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 65.949.411.873,73**	**2,74%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 50.354.523.886,73**	**76,35%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 65.949.411.873,73**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 15.594.887.987,00**	**23,65%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 65.949.411.873,73**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 8.054.996.959,01**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**tidak ada**	**tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DISDUKCAPIL
URUSAN : KEPENDUDUKAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**1**	**1 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**5**	**5 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**15**	**94%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**16**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**5**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**35**	**0,72%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**14**	**93,33%**	
						Pejabat yang ada	**15**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**15**	**94%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**16**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**4**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**4**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**4**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 10.797.086.800,00**	**0,39%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 10.235.122.946,00**	**0,42%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 5.049.538.604,00**	**49,34%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 10.235.122.946,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 518.584.342,00**	**5,07%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 10.235.122.946,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 41.354.860.150,77**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
URUSAN : 1. KEPEMUDAAN & OLAHRAGA
2. PARIWISATA

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA		PARIWISATA		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**3**	**3 Program**	**4**	**4 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**3**	**3 SOP**	**13**	**13 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	**13**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**8**	**100%**	**10**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**8**		**10**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**ada**	**0**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**17**	**0,35%**	**21**	**0,43%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**4**	**50,00%**	**5**	**50,00%**	
						Pejabat yang ada	**8**		**10**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**8**	**100%**	**10**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**8**		**10**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA		PARIWISATA		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	5	100%	4	100%	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	5		4		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	5	100%	4	100%	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	5		4		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	3	100%	4	100%	
						Jumlah program dalam DPA OPD	3		4		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp 19.659.545.000,00	0,70%	Rp 19.579.897.400,00	0,70%	
						Total belanja APBD	Rp 2.789.437.578.346,00		Rp 2.789.437.578.346,00		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	Rp 18.518.410.598,00	0,77%	Rp 9.252.215.934,00	0,38%	
						Total Realisasi Belanja APBD	Rp 2.408.461.974.189,33		Rp 2.408.461.974.189,33		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	Rp 14.933.412.802,00	80,64%	Rp 6.862.217.402,00	74,17%	
						Total Realisasi Belanja OPD	Rp 18.518.410.598,00		Rp 9.252.215.934,00		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	Rp 3.584.997.796,00	19,36%	Rp 2.389.998.532,00	25,83%	
						Total Realiasasi Belanja OPD	Rp 18.518.410.598,00		Rp 9.252.215.934,00		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	3	3 Dokumen	3	3 Dokumen	
				- Neraca		- Neraca	ada		ada		
				- LRA		- LRA	ada	ada			
				- CALk		- CALk	ada		ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	ada	ada/tidak	ada	ada/tidak	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	Rp -	0%	Rp -	0%	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	Rp 275.346.038.983,00		Rp 152.014.879.042,00		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA		PARIWISATA		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		**Tidak Ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**4**	**4 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**7**	**7 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**13**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**13**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**32**	**0,65%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**11**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**11**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**13**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**13**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**7**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 76.949.885.000,00**	**2,76%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 65.725.302.024,75**	**2,73%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 60.697.840.622,72**	**92,35%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 65.725.302.024,75**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 5.027.461.402,00**	**7,65%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 65.725.302.024,75**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 63.609.437.644,10**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**3**	**3**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**Tidak ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : BPPDRD
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**31**	**31 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**48**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**20**	**95%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**21**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**1**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**72**	**1,47%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**16**	**80,00%**	
						Pejabat yang ada	**20**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**20**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**20**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**4**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**4**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**4**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 53.324.023.254,00**	**1,91%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 37.765.358.122,00**	**1,57%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 6.584.516.670,00**	**17,44%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 37.765.358.122,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 31.180.841.452,00**	**82,56%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 37.765.358.122,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 10.229.628.012,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS TENAGA KERJA
URUSAN : WAJIB NON DASAR TENAGA KERJA

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**5**	**5 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**15**	**15 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**16**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**16**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**26**	**0,53%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**11**	**68,75%**	
						Pejabat yang ada	**16**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**16**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**16**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**7**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 556.237.800,00**	**0,02%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 7.016.036.006,00**	**0,29%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 2.886.555.800,00**	**#DIV/0!**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp -**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 31.180.841.452,94**	**#DIV/0!**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp -**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 12.613.071.665,67**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PERDAGANGAN
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**7**	**7 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**37**	**37 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**26**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**26**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**8**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**70**	**1,43%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**18**	**69,23%**	
						Pejabat yang ada	**26**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**26**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**26**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**9**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**9**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**9**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 31.132.629.600,00**	**1,12%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 30.214.645.461,11**	**1,25%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 20.451.603.443,11**	**67,69%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 30.214.645.461,11**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 9.763.042.018,00**	**32,31%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 30.214.645.461,11**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 170.121.263.847,22**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DPMPT
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**5**	**5 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**80**	**80 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**14**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**20**	**95%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**21**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2**		
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**57**	**1,16%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**15**	**71,43%**	
						Pejabat yang ada	**21**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**20**	**95%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**21**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**4**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**4**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**4**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**4**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 12.346.705,00**	**0,00%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 11.753.811.991,00**	**0,49%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 3.608.335.459,00**	**30,70%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 11.753.811.991,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 8.145.476.532,00**	**69,30%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 11.753.811.991,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 70.006.876.212,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : BPBD KOTA BALIKPAPAN
URUSAN : PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**4**	**4 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**67**	**67 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**7**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**25**	**96%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**26**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**164**	**3,35%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**21**	**84,00%**	
						Pejabat yang ada	**25**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**25**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**25**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**11**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**11**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**10**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**10**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**9**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 41.920.531.450,00**	**1,50%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 37.751.841.437,71**	**1,57%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 18.203.775.627,71**	**48,22%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 37.751.841.437,71**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 19.548.065.810,00**	**51,78%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 37.751.841.437,71**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 71.963.856.919,96**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DISPERKIM KOTA BALIKPAPAN
URUSAN : PERUMAHAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**4**	**4 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**10**	**10 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**10**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**18**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**18**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**39**	**0,80%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**15**	**83,33%**	
						Pejabat yang ada	**18**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**18**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**18**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**2**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**6**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**6**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**6**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**6**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 48.484.744.550,00**	**1,74%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 43.025.820.731,00**	**1,79%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 36.734.966.848,00**	**85,38%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 43.025.820.731,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 6.290.853.883,00**	**14,62%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 43.025.820.731,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 183.377.425.534,62**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**tidak ada**	**tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**21**	**21 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**25**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**25**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**3**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**71**	**1,45%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**24**	**96,00%**	
						Pejabat yang ada	**25**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**25**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**25**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**6**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**6**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**6**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**6**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**6**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**6**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 93.435.506.000,00**	**3,35%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 85.940.170.609,40**	**3,57%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 75.186.747.675,40**	**87,49%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 85.940.170.609,40**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 10.753.422.934,00**	**12,51%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 85.940.170.609,40**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 215.332.303.461,45**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ADA**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN : PEKERJAAN UMUM

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**15**	**15 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**20**	**20 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**24**	**96%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**25**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**TIDAK ADA**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**71**	**1,45%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**14**	**58,33%**	
						Pejabat yang ada	**24**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**24**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**24**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**17**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**17**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**17**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**17**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**17**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**17**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 615.619.327.650,00**	**22,07%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 542.335.344.390,10**	**22,52%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 542.335.344.390,10**	**100,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 542.335.344.390,10**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 9.621.100.145,00**	**1,77%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 542.335.344.390,10**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 215.332.303.461,45**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**tidak ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : SAT POL. PP
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**3**	**3 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**12**	**12 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**3**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**15**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**15**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**79**	**ADA**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**170**	**3,47%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**15**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**15**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**15**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**15**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**11**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**11**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 30.422.790.000,00**	**1,09%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 27.854.966.928,00**	**1,16%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 6.846.451.560,00**	**24,58%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 27.854.966.928,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 21.008.515.368,00**	**75,42%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 27.854.966.928,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 6.866.306.227,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS SOSIAL
URUSAN : SOSIAL

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**6**	**8 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**9**	**12 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**16**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**16**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**3**	**ADA**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**32**	**0,65%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**16**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**16**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**16**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**16**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**7**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 30.422.790.000,00**	**1,09%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 27.854.966.928,00**	**1,16%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 6.846.451.560,00**	**24,58%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 27.854.966.928,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 21.008.515.368,00**	**75,42%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 27.854.966.928,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 26.615.980.907,33**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KEC. BALIKPAPAN SELATAN
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**10**	**10 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**28**	**28 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**43**	**98%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**44**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**78**	**1,59%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**26**	**60,47%**	
						Pejabat yang ada	**43**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**43**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**43**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**13**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**13**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**13**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**13**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 23.511.320.000,00**	**0,84%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 20.550.513.807,00**	**0,85%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 9.065.008.903,00**	**44,11%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 20.550.513.807,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 11.485.504.904,00**	**55,89%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 20.550.513.807,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 12.745.039.153,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KEC. BALIKPAPAN TIMUR
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**12**	**12 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**27**	**27 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**27**	**93%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**29**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**50**	**1,02%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**19**	**70,37%**	
						Pejabat yang ada	**27**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**27**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**27**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**14**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**14**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**14**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 16.081.874.500,00**	**0,58%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 13.707.934.094,00**	**0,57%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 7.877.663.000,00**	**57,47%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 13.707.934.094,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 8.204.211.500,00**	**59,85%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 13.707.934.094,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 29.943.839.224,37**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ADA**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KEC. BALIKPAPAN TENGAH
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**11**	**11 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**13**	**13 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**35**	**90%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**39**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**73**	**1,49%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**34**	**87,18%**	
						Pejabat yang ada	**39**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**34**	**87%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**39**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**14**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**14**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**14**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 22.264.533.800,00**	**0,80%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 18.621.946.321,00**	**0,77%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 8.864.201.725,00**	**47,60%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 18.621.946.321,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 9.757.744.596,00**	**52,40%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 18.621.946.321,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 17.068.744.036,19**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**11**	**11 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**35**	**35 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**31**	**91%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**34**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**53**	**1,08%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**19**	**61,29%**	
						Pejabat yang ada	**31**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**31**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**31**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**14**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**14**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**14**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 15.150.131,00**	**0,00%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 15.983.834.572,00**	**0,66%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 7.122.341.192,00**	**44,56%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 15.983.834.572,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 8.799.218.880,00**	**55,05%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 15.983.834.572,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 70.006.876.212,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KEC. BALIKPAPAN UTARA
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**10**	**10 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**12**	**12 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**37**	**95%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**39**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**62**	**1,27%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**26**	**60,47%**	
						Pejabat yang ada	**43**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**35**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**35**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**14**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**14**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**14**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 20.597.054.550,00**	**0,74%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 17.021.306.999,00**	**0,71%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 7.606.126.663,00**	**44,69%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 17.021.306.999,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 9.415.180.336,00**	**55,31%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 17.021.306.999,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 50.988.740.586,89**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KEC. BALIKPAPAN UTARA
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**11**	**11 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**4**	**4 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**37**	**95%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**39**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**62**	**1,27%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**26**	**60,47%**	
						Pejabat yang ada	**43**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**35**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**35**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**14**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**14**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**14**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**14**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 19.550.792.600,00**	**0,70%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 17.021.306.999,00**	**0,71%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 7.194.645.926,00**	**42,27%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 17.021.306.999,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 9.185.340.869,00**	**53,96%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 17.021.306.999,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 38.816.652.316,49**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : BADAN PENGELOLA KEAUNGAN DAERAH
URUSAN : KEUANGAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**5**	**5 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**36**	**36 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**23**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**23**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**55**	**1,12%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**10**	**43,48%**	
						Pejabat yang ada	**23**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**23**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**23**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**10**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**10**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 41.408.030.500,00**	**1,48%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 37.628.052.191,80**	**1,56%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 29.091.245.097,80**	**77,31%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 37.628.052.191,80**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 8.536.807.094,00**	**22,69%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 37.628.052.191,80**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 38.816.652.316,49**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**3**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**Tidak Ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
URUSAN : KESEHATAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**9**	**9 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**385**	**385 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**6**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**43**	**98%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**44**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**406**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**545**	**11,13%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**0**	**#DIV/0!**	
						Pejabat yang ada	**0**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**79**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**79**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**9**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**9**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**9**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 202.283.035.235,00**	**7,25%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 173.182.627.776,61**	**7,19%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 107.191.853.805,61**	**61,90%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 173.182.627.776,61**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 65.990.773.971,00**	**38,10%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 173.182.627.776,61**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 203.567.089.776,98**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : RSUD
URUSAN : KESEHATAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**1163**	**1163**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**7**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**14**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**14**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**95**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**112**	**2,29%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**11**	**78,57%**	
						Pejabat yang ada	**14**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**14**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**14**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**2**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**2**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**2**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**2**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 103.223.579.000,00**	**3,70%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 79.060.953.481,00**	**3,28%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 66.016.306.352,00**	**83,50%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 79.060.953.481,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 13.044.647.129,00**	**16,50%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 79.060.953.481,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 224.562.438.866,63**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : RSKB
URUSAN : KESEHATAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**525**	**525 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**5**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**5**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**43**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**53**	**1,08%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**4**	**80,00%**	
						Pejabat yang ada	**5**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**5**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**5**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**5**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**5**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**5**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**5**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**5**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**5**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 20.880.353.900,00**	**0,75%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 17.180.917.087,00**	**0,71%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 10.868.183.084,00**	**#DIV/0!**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp -**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 6.312.734.002,00**	**#DIV/0!**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp -**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 21.123.336.031,15**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
URUSAN : 1. PENDIDIKAN
2. KEBUDAYAAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Urusan Pendidikan		Urusan Kebudayaan		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**5**	**5 Program**	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**29**	**29 SOP**	**3**	**3 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**21**	**100%**	**4**	**#DIV/0!**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**21**				
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2.065**	**ada**	**0**	**Tidak Ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**2.215**	**45,25%**	**7**	**0,14%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**8**	**38,10%**	**1**	**25,00%**	
						Pejabat yang ada	**21**		**4**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**21**	**100%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**21**		**4**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Urusan Pendidikan		Urusan Kebudayaan		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**10**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**10**		**2**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**10**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**10**		**2**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**10**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**10**		**2**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 567.883.503.837,00**	**20,36%**	**Rp 4.869.617.500,00**	**0,17%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 542.862.799.741,61**	**22,54%**	**Rp 4.124.308.072,00**	**0,17%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 229.804.971.860,61**	**42,33%**	**Rp 4.124.308.072,00**	**100,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 542.862.799.741,61**		**Rp 4.124.308.072,00**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 313.057.827.881,00**	**57,67%**	**Rp -**	**0,00%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 542.862.799.741,61**		**Rp 4.124.308.072,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Urusan Pendidikan		Urusan Kebudayaan		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**#DIV/0!**	**Rp -**	**#DIV/0!**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS KOPERASI, USAHA MICKRO KECIL MENENGAH DAN PEERINDUSTRIAN
URUSAN : 1. KORERASI DAN UKM
2. PERINDUSTRIAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KOPERSI DAN UKM		PERINDUSTRIAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**7**	**7 Program**	**1**	**1 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**36**	**36 SOP**	**10**	**10 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**3**	**ada**	**3**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**8**	**100%**	**10**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**8**		**10**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**18**	**0,37%**	**16**	**0,33%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**8**	**100,00%**	**5**	**50,00%**	
						Pejabat yang ada	**8**		**10**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**8**	**100%**	**10**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**8**		**10**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KOPERSI DAN UKM		PERINDUSTRIAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**7**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**7**		**3**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		**3**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		**3**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 5.520.138.500,00**	**0,20%**	**Rp 26.891.315.500,00**	**0,96%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 4.964.306.058,00**	**0,21%**	**Rp 18.434.664.228,38**	**0,77%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 1.875.575.252,00**	**37,78%**	**Rp 16.033.998.618,38**	**86,98%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 4.964.306.058,00**		**Rp 18.434.664.228,38**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 3.088.730.806,00**	**62,22%**	**Rp 2.400.665.610,00**	**13,02%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 4.964.306.058,00**		**Rp 18.434.664.228,38**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KOPERSI DAN UKM		PERINDUSTRIAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	**Rp -**	**#DIV/0!**	tidak ada pemisahan aset
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 64.168.095.495,38**		**Rp -**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		**Tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN : 1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. PERSANDIAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PERSANDIAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**4**	**4 Program**	**1**	**1 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**48**	**48 SOP**	**2**	**2 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	**2**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**11**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**11**		**1**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**3**	**ADA**	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**23**	**0,47%**	**3**	**0,06%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**7**	**63,64%**	**1**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**11**		**1**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**11**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**11**		**1**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PERSANDIAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**6**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**6**		**1**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**6**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**6**		**1**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**6**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**6**		**1**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 13.815.450.600,00**	**0,50%**	**Rp 50.000.000,00**	**0,00%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 12.556.351.753,00**	**0,52%**	**Rp 42.683.858,00**	**0,00%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 8.194.343.902,00**	**65,26%**	**Rp 42.683.858,00**	**100,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 12.556.351.753,00**		**Rp 42.683.858,00**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 4.362.007.851,00**	**34,74%**	**Rp -**	**0,00%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 12.556.351.753,00**		**Rp 42.683.858,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PERSANDIAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	**Rp -**	**#DIV/0!**	Tidak ada pemisahan aset
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 53.301.957.255,76**		**Rp -**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**Tidak Ada**		**Tidak ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**ada**	**ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DP3AKB
URUSAN : 1. PEMBERDAYAAN PEREMPUA DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	PEMBERDAYAAN PEREMPUA DAN		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**3**	**3 Program**	**4**	**4 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**34**	**34 SOP**	**16**	**16 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**3**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**15**	**100%**	**8**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**15**		**8**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**ada**	**0**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**19**	**0,39%**	**12**	**0,25%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**12**	**80,00%**	**7**	**87,50%**	
						Pejabat yang ada	**15**		**8**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**15**	**100%**	**8**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**15**		**8**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	PEMBERDAYAAN PEREMPUA DAN		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**4**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**4**		**3**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**4**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**4**		**3**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**4**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**4**		**3**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 6.963.803.500,00**	**0,25%**	**Rp 8.072.737.000,00**	**0,29%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 5.949.884.269,00**	**0,25%**	**Rp 7.401.813.887,00**	**0,31%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 3.061.290.432,00**	**51,45%**	**Rp 4.513.220.050,00**	**60,97%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 5.949.884.269,00**		**Rp 7.401.813.887,00**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 2.888.593.837,00**	**48,55%**	**Rp 2.888.593.837,00**	**39,03%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 5.949.884.269,00**		**Rp 7.401.813.887,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	PEMBERDAYAAN PEREMPUA DAN		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 3.043.263.200,60**		**Rp 5.834.883.620,20**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**ada**	**ada**	**Tidak ada**	**Tidak Ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
URUSAN : 1. PERTANAHAN
2. PENATAAN RUANG

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PU & Penataan Ruang		Pertanahan		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**4**	**4 Program**	**6**	**6 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**1**	**1 SOP**	**3**	**3 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**2**	**ada**	**3**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**8**	**100%**	**8**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**8**		**8**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak Ada**	**0**	**Tidak Ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**17**	**0,35%**	**19**	**0,39%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**8**	**100,00%**	**8**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**8**		**8**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**8**	**100%**	**8**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**8**		**8**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**4**	**100%**	**6**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**4**		**6**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**4**	**100%**	**6**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**4**		**6**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**4**	**100%**	**6**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**4**		**6**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 55.691.273.000,00**	**2,00%**	**Rp 55.691.273.000,00**	**2,00%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 11.408.524.268,81**	**0,47%**	**Rp 11.408.524.268,81**	**0,47%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 11.408.524.268,81**	**100,00%**	**Rp 11.408.524.268,81**	**100,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 11.408.524.268,81**		**Rp 11.408.524.268,81**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 2.172.812.237,40**	**19,05%**	**Rp 324.106.736,00**	**2,84%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 11.408.524.268,81**		**Rp 11.408.524.268,81**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**#DIV/0!**	**Rp -**	**0%**	Tidak ada pemisahan aset
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp -**		**Rp 177.495.676.903,00**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : SEKRETARIAT
URUSAN : 1. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**30**	**30 Program**	**2**	**2 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari : **SOP #1** **SOP #2** **dst**	**20**	**20 SOP**	**0**	**3 SOP**	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**50**	**98%**	**2**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**51**		**2**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional, 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. dst	**9**	**ada**	**0**	**Tidak Ada**	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**145**	**2,96%**	**4**	**0,08%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**43**	**86,00%**	**2**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**50**		**2**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**50**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**50**		**2**		

							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**33**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**33**		**2**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**33**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**33**		**2**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**33**	**100%**	**2**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**33**		**2**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 135.840.440.015,00**	**4,87%**	**Rp 2.546.598.800,00**	**0,09%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 5.918.723.296,00**	**0,25%**	**Rp -**	**0,00%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 97.773.233.839,48**	**#DIV/0!**	**Rp 2.319.508.545,00**	**#DIV/0!**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp -**		**Rp -**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 24.331.210.196,00**	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp -**		**Rp -**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	**Rp -**	**#DIV/0!**	tidak ada pemisahan aset
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 516.618.194.193,27**		**Rp -**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
URUSAN: 1. PANGAN
: 2. KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. PERTANIAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Urusan Pangan		Urusan Kelautan & Perikanan		Urusan Pertanian		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**2**	**2 Program**	**5**	**5 Program**	**6**	**6 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**3**	**3 SOP**	**4**	**4 SOP**	**20**	**20 SOP**	
						SOP #1							
						SOP #2							
						dst							
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	**1**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**9**	**100%**	**3**	**75%**	**14**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**9**		**4**		**14**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**1**	**ada**	**0**	**ada**	**24**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1							
						2. Jabatan Fungsional #2							
						3. dst							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**12**	**0,25%**	**7**	**0,14%**	**60**	**1,23%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**7**	**77,78%**	**2**	**66,67%**	**10**	**71,43%**	
						Pejabat yang ada	**9**		**3**		**14**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**9**	**100%**	**3**	**100%**	**14**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**9**		**3**		**14**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Urusan Pangan		Urusan Kelautan & Perikanan		Urusan Pertanian		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	5	100%	6	100%	6	100%	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	5		6		6		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	5	100%	4	100%	6	100%	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	5		4		6		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	6	150%	4	100%	6	100%	
						Jumlah program dalam DPA OPD	4		4		6		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp 20.504.100,00	0,00%	Rp 4.684.791.500,00	0,17%	Rp 2.143.651.000,00	0,08%	
						Total belanja APBD	Rp 2.789.437.578.346,00		Rp 2.789.437.578.346,00		Rp 2.789.437.578.346,00		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	Rp 17.558.703.069,58	0,73%	Rp 3.156.596.026,56	0,13%	Rp 1.073.649.601,24	0,04%	
						Total Realisasi Belanja APBD	Rp 2.408.461.974.189,33		Rp 2.408.461.974.189,33		Rp 2.408.461.974.189,33		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	Rp 4.971.265.212,58	28,31%	Rp 3.156.026,56	0,10%	Rp 1.073.649.601,24	100,00%	
						Total Realisasi Belanja OPD	Rp 17.558.703.069,58		Rp 3.156.596.026,56		Rp 1.073.649.601,24		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	Rp 12.587.437.857,00	71,69%	Rp -	0,00%		0,00%	
						Total Realiasasi Belanja OPD	Rp 17.558.703.069,58		Rp 3.156.596.026,56		Rp 1.073.649.601,24		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	3	3 Dokumen	3	3 Dokumen	3	3 Dokumen	
				- Neraca		- Neraca	ada		ada		ada		
				- LRA		- LRA	ada		ada		ada		
				- CALk		- CALk	ada		ada		ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	Rp 19.790.487.300,00		Rp 69.940.693.081,98		Rp 3.101.003.449,72		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Urusan Pangan		Urusan Kelautan & Perikanan		Urusan Pertanian		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**Tidak ada**		**Tidak Ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak Ada**		**ada**		**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
URUSAN : 1, KEPEGAWAIAN
2. DIKLAT

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KEPEGAWAIAN		DIKLAT		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**4**	**4 Program**	**1**	**1 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**35**	**35 SOP**	**10**	**10 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**12**	**100%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**12**		**4**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2**	**ADA**	**1**	**ADA**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**36**	**0,74%**	**12**	**0,25%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**11**	**91,67%**	**3**	**75,00%**	
						Pejabat yang ada	**12**		**4**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**12**	**100%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**12**		**4**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KEPEGAWAIAN		DIKLAT		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**7**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**7**		**1**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		**1**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		**1**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 15.417.499.440,00**	**0,55%**	**Rp 7.481.792.600,00**	**0,27%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 11.543.527.161,50**	**0,48%**	**Rp 6.073.893.773,00**	**0,25%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 5.006.118.516,85**	**43,37%**	**Rp 6.073.893.773,00**	**100,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 11.543.527.161,50**		**Rp 6.073.893.773,00**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 6.537.408.645,00**	**56,63%**	**Rp -**	**0,00%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 11.543.527.161,50**		**Rp 6.073.893.773,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	KEPEGAWAIAN		DIKLAT		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	**Rp -**	**#DIV/0!**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 4.929.426.277,00**		**Rp -**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**Tidak Ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**Tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**ada**	**ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
URUSAN : 1. PERPUSTAKAAN
2. KEARSIPAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PERPUSTAKAAN		KEARSIPAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**1**	**1 Program**	**3**	**3 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**3**	**3 SOP**	**6**	**6 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**1**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**7**	**88%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**8**		**4**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**3**	**ada**	**4**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**16**	**0,33%**	**11**	**0,22%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**6**	**85,71%**	**4**	**100,00%**	
						Pejabat yang ada	**7**		**4**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**7**	**100%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**7**		**4**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PERPUSTAKAAN		KEARSIPAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**1**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**1**		**3**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**1**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**1**		**3**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**1**	**100%**	**3**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**1**		**3**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 7.648.557.500,00**	**0,27%**	**Rp 3.121.596.500,00**	**0,11%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 6.570.315.087,00**	**0,27%**	**Rp 2.863.037.781,00**	**0,12%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 4.407.938.545,00**	**67,09%**	**Rp 700.661.239,00**	**24,47%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 6.570.315.087,00**		**Rp 2.863.037.781,00**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 2.162.376.542,00**	**32,91%**	**Rp 2.162.376.542,00**	**75,53%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 6.570.315.087,00**		**Rp 2.863.037.781,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PERPUSTAKAAN		KEARSIPAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	**Rp -**	**#DIV/0!**	Tidak ada pemisahan aset
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 72.230.354.136,80**		**Rp -**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**Tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**ada**	**ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : BAPPEDALITBANG
URUSAN : 1. PERENCANAAN
2. PENELITIAN & PENGEMBANGAN

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PERENCANAAN		PENELITIAN & PENGEMBANGAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**5**	**5 Program**	**1**	**1 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**38**	**38 SOP**	**5**	**5 SOP**	
						SOP #1					
						SOP #2					
						dst					
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**4**	**ada**	**1**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**17**	**100%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**17**		**4**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**2**	**ada**	**0**	**ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. dst					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**34**	**0,69%**	**5**	**0,10%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**15**	**88,24%**	**3**	**75,00%**	
						Pejabat yang ada	**17**		**4**		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**17**	**100%**	**4**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**17**		**4**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PERENCANAAN		PENELITIAN & PENGEMBANGAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**7**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**7**		**1**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**7**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**7**		**1**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**7**	**100%**	**1**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**7**		**1**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 11.311.243.000,00**	**0,41%**	**Rp 1.961.296.000,00**	**0,07%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 10.288.298.188,00**	**0,43%**	**Rp 1.723.715.554,50**	**0,07%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 3.484.121.245,00**	**33,86%**	**Rp 1.723.715.554,50**	**100,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 10.288.298.188,00**		**Rp 1.723.715.554,50**		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 6.440.176.943,00**	**62,60%**		**0,00%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 10.288.298.188,00**		**Rp 1.723.715.554,50**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		**ada**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	PERENCANAAN		PENELITIAN & PENGEMBANGAN		KETERANGAN
							ISIAN	CAPAIAN KINERJA	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				- LRA		- LRA	**ada**		**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada/tidak**	**ada**	**ada/tidak**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp 35.875.625,00**	**0%**	**Rp -**	**#DIV/0!**	Tidak ada pemisahan aset
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 72.787.894.013,11**				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**5**	**5**	**5**	**5**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**ada**		**ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	0	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA : BALIKPAPAN
OPD : KESBANGPOL
URUSAN :

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUASAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis) dan nilai Anggaran serta Realisasinya	**6**	**6 Program**	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak ... Yang terdiri dari :	**5**	**5 SOP**	
						SOP #1			
						SOP #2			
						dst			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (perda/perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	apabila ada sebutkan	**5**	**ada**	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah Jabatan yang Ada X 100%	Jabatan yang ada sebanyak	**5**	**100%**	
						Jabatan yang seharusnya ada	**5**		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangakat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/Jabatan Fungsional,	**0**	**Tidak ada**	
						1. Jabatan Fungsional #1			
						2. Jabatan Fungsional #2			
						3. dst			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS OPD	**13**	**0,27%**	
						Total PNS Kota	**4.895**		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	**4**	**80,00%**	
						Pejabat yang ada	**5**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persayaratan kepangkatan dibagi jumlah total Pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi Syarat Kepangkatan	**5**	**100%**	
						Jabatan yang ada sebanyak ..... Jbt	**5**		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen Perencanaan Pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada/tidak ada dokumen yang dimaksud	**3**	**dokumen**	
				-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	**ada**		
				-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	**ada**		
				-RKA OPD		-RKA OPD	**ada**		
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang di akomodir dalam RENJA OPD dibagi Jumlah Program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD X 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD	**9**		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA OPD yang di akomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah Program dalam RKA OPD	**9**		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah Program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	**9**	**100%**	
						Jumlah program dalam DPA OPD	**9**		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	**Rp 5.210.600.000,00**	**0,19%**	
						Total belanja APBD	**Rp 2.789.437.578.346,00**		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja OPD terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja OPD di bagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja OPD	**Rp 4.531.554.019,00**	**0,19%**	
						Total Realisasi Belanja APBD	**Rp 2.408.461.974.189,33**		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah OPD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	**Rp 2.447.017.148,00**	**54,00%**	
						Total Realisasi Belanja OPD	**Rp 4.531.554.019,00**		

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	ISIAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung di bagi total belanja OPD x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD	**Rp 2.084.536.871,00**	**46,00%**	
						Total Realiasasi Belanja OPD	**Rp 4.531.554.019,00**		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA,CALk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Laporan Keuangan yang ada	**3**	**3 Dokumen**	
				- Neraca		- Neraca	**ada**		
				- LRA		- LRA	**ada**		
				- CALk		- CALk	**ada**		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Apa bila ada, sebutkan jenis Dokumennya	**ada**	**ada**	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah nilai asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Aset yang tidak di gunakan	**Rp -**	**0%**	
						Aset yang di kuasai Perangkat Daerah	**Rp 17.068.744.036,19**		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	**4**	**4**	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	**ada**		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	**ada**		
				3. Leaflet		3. Leaflet	**ada**		
				4. Mobil Keliling		4. Mobil Keliling	**Tidak ada**		
				5. Pengumuman di media masa		5. Pengumuman di media masa	**ada**		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	**Tidak ada**	**Tidak ada**	



LAMPIRAN II.3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	18.994	79,73%	Sumber Data : Pembilang (Disdikbud), Penyebut (Disdukcapil)	Disdik
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	23.823			Capil
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	280	12,02%	Sumber Data : Pembilang (Disdikbud), Penyebut (Disdukcapil)	Disdik
				Jumlah Pendidik PAUD	2.330			Disdik
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	176	35,34%	Sumber Data : Pembilang (Disdikbud), Penyebut (Disdukcapil)	Disdik
				Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	498			Disdik
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis	491.098	98,29%		Disdik
				Jumlah penduduk usia 15th ke atas	499.634			Capil
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	87.287	123,22%		Disdik
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	70.837			Capil

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	25.539	132,73%		Disdik
				umlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	19.242			Capil
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	18	0,02%		Disdik
				Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	72.197			Disdik
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs	31	0,09%		Disdik
				Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	36.162			Disdik
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah (D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	222	35,07%		Disdik
				Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	633			Disdik
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	774	53,90%		Disdik
				Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	1.436			Disdik
		11	ersentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi	290	96,67%		Disdik
				Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP	300			Disdik
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	11.993	99,77%		Disdik
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	12.021			Disdik

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	10.820	100,00%		Disdik
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	10.820			Disdik
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs	10.857	90,07%		Disdik
				Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	12.054			Disdik
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan	106.921	362,20%		Disdik
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Provinsi yang bersangkutan.	29.520			Disdik
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	1.636	0,24%		DKK
				Jumlah Penduduk di Kota	670.505			Capil
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	13	86,67%		DKK
				Jumlah RS di Kota	15			DKK
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan	5.227	0,78%		Capil
				Jumlah Penduduk Kota	670.505			DKK
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	13.157	97,24%		DKK
				Jumlah ibu hamil di Kota	13.530			DKK

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	12.477	99,91%		DKK
				Jumlah ibu bersalin di Kota	12.488			DKK
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	12.396	99,51%		DKK
				Jumlah bayi baru lahir di Kota	12.457			DKK
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	53.480	90,73%		DKK
				Jumlah balita di Kota	58.942			DKK
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	35.921	39,88%		DKK
				Jumlah anak usia pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) di Kota	90.079			Capil
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	189.555	42,03%		DKK
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota	450.999			capil
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	17.703	36,40%		DKK
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kota	48.635			Capil
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44.482	26,65%		DKK
				Jumlah penderita hipertensi di Kota	166.930			DKK

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.145	66,86%		DKK
				Jumlah penderita DM di Kota	15.174			DKK
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	581	80,47%		DKK
				Jumlah penderita ODGJ di Kota	722			DKK
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.313	522,03%		DKK
				Jumlah penderita TBC di Kota	1.784			DKK
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	14.847	98,45%		DKK
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota	15.080			DKK
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Kelurahan UCI	34	100,00%		DKK
				Jumlah Seluruh Kelurahan	34			DKK
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kes	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	9	100,00%		DKK
				Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama	9			DKK
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn	1.554	100,00%		DKK
				Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	1.554			DKK

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	8	0,06%		DKK
				Jumlah Ibu Melahirkan	12.488			DKK
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	422,19	84,24%		DPU
				seluruh jalan Kota di daerah tersebut	501,180			DPU
		36	Presentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kota yang direhabilitasi/direkonstruksi	21,055070	26,66%		DPU
				Panjang Jalan Kota yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi	78,99			DPU
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	-	#DIV/0!		DPU
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	-			DPU
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota (m)	-	#DIV/0!		DPU
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)	-			DPU
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah	93.575	39,70%		DPU
				Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut.	235.679			Capil
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya	6.065	2,96%		Disperkim
				Jumlah rumah di Kota	204.774			Disperkim

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	105	100,00%		DPU
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kota	105			DPU
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	Nihil	#VALUE!		DPU
			Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Nihil			DPU
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	187.177	79%		Disperkim
				Jumlah seluruh rumah tangga	235.679			Capil
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	93.575	40%		Disperkim
				Jumlah seluruh rumah tangga	235.679			Capil
		45	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	58,58	0,11%		Disperkim
				Luas Wilayah	51.431,55			DPPR
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau	529,79	1,03%		DLH
				Luas wilayah	51.432			DPPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	#DIV/0!		Disperkim
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	0			Disperkim

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		48	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa +	0	#DIV/0!		Disperkim
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0			Disperkim
		49	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	58,58	100,00%		Disperkim
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	58,58			Disperkim
		50	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh	719	0,35%		Disperkim
				Jumlah total unit rumah Kota	204.774			Disperkim
		51	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	33.882	16,55%		Disperkim
				Jumlah unit rumah kota	204.774			Disperkim
		52	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	204.055	99,65%		Disperkim
				Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	204.774			Disperkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	221	100,00%		Satpol PP
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	221			Satpol PP
		54	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	26	100,00%		Satpol PP
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	26			Satpol PP

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		55	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	705	705		BPBD
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.360	1.360		BPBD
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	411	411		BPBD
		58	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam	66	100,00%		BPBD
				Jumlah kejadian kebakaran di Kota	66			BPBD
		59	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	100%		BPBD
		60	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS	4	2,35%		Satpol PP
				Jumlah Personil Satpol PP	170			Satpol PP
6	Sosial	61	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	15	18,75%		Dinsos
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	80			Dinsos
		62	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	327	86,28%		Dinsos
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	379			Dinsos
		63	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	3	7,89%		Dinsos
				Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	38			Dinsos

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		64	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	#DIV/0!		Dinsos
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	0			Dinsos
		65	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada	43	204,76%		Dinsos
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	21			Dinsos
7	Tenaga Kerja	66	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	27	100,00%		Disnaker
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota	27			Disnaker
		67	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	umlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	157	100,00%		Disnaker
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	157			Disnaker
		68	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	102.389.034	#DIV/0!		Bappeda
				Jumlah tenaga kerja	0			Disnaker
		69	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	97	#DIV/0!		Disnaker
				Jumlah Perusahaan	0			Disnaker
		70	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	2.590	50,38%		Disnaker
				Jumlah pencaker yang terdaftar	5.141			Disnaker

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		71	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	49	77,78%		Disnaker
				Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	63			Disnaker
		72	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi	58	49,57%		Disnaker
				Jumlah Instruktur	117			Disnaker
		73	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	32	100,00%		Disnaker
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	32			Disnaker
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	138.138.369.000	8,97%		DP3AKB
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD	1.539.947.317.968,99			BPKD
		75	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi	59	0,03%		DP3AKB
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	186.475			Capil
		76	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	74	0,02%		DP3AKB
				Jumlah penduduk perempuan	327.257			Capil
		77	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	74	100,00%		DP3AKB
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	74			DP3AKB

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
9	Pangan	78	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	116.016	50,01%		Disnaker
				Jumlah angkatan kerja perempuan	231.970			Disdukcapil
		79	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	0	0,00%		DP3
				Jumlah kebutuhan pangan (ton/th)	52.236,88			DP3
		80	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk	Ada/tidak	Tidak	Tidak		DP3
10	Pertanahan	81	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	9.221.283	100,00%		DPMPT
				seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	9.221.283			DPMPT
		82	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1.215	100,00%		DPPR
				umlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1.215			DPPR
		83	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	1.700.659	100,00%		DPMPT
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	1.700.659			DPMPT
		84	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)	0	#DIV/0!		DPPR
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	0			DPPR
		85	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	1.098.218	10,62%		BPKD
				Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	10.340.017			BPKD

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		86	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	1.910.730	100,00%		DPPR
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	1.910.730			DPPR
		87	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	14	100,00%		DPPR
				jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	14			DPPR
11	Lingkungan Hidup	88	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota		60,19	60,19		DLH
								DLH
		89	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani	130.341,5	73,97%		DLH
				Total vol timbunan sampah kota	176.207,4			DLH
		90	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota	378	100,00%		DLH
				usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	378			DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	91	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	188.313	92,05%		Capil
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	204.582			Capil
		92	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	469.894	97,08%		Capil
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	484.041			Capil

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	#DIV/0!		Bag.pemerintahan
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	0			Bag.pemerintahan
		94	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	#DIV/0!		Bag.pemerintahan
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	0			Bag.pemerintahan
		95	PKK aktif	Jumlah PKK aktif	41	100,00%		Bagian Kesra
				Jumlah PKK	41			Bagian Kesra
		96	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	1.072	73,73%		Bagian Kesra
				Total Posyandu	1.454			Bagian Kesra
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97	TFR (Angka Kelahiran Total)		0	0		DP3AKB
		98	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		0	0		DP3AKB
		99	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	73,575	70,02%		DP3AKB
				Jumlas Pasangan Usia Subur	105,081			DP3AKB

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		100	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	15,225	14,49%		DP3AKB
				Jumlas Pasangan Usia Subur	105,081			DP3AKB
15	Perhubungan	101	Rasio konektivitas Kota	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,78	77,77777778		DISHUB
				- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	7			
				- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi	1			
				Keterangan:	9			
				IK1 (Angkutan Jalan)	0			
				- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP	0			
				- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu	0			
				IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)	0			
				- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil	100			
				- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang	0			
				Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :				
				- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70				
				Bobot Trayek atau Lintas :				

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
				a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1				
				b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8				
				c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				
		102	Kinerja lalulintas Kota	V/C Ratio di Jalan Kota	Ada			DISHUB
16	Komunikasi dan Informatika	103	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	36	100,00%		Diskominfo
				Jumlah OPD	36			Organisasi
		104	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	97	100,00%		Diskominfo
				Jumlah Layanan Publik	97			Organisasi
		105	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	56.600	12,55%		Diskominfo
				Jumlah penduduk (usia 15-59 tahun)	450.999			Disdukcapil
		106	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	ada		Diskominfo
		107	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi	2	66,67%		Diskominfo
				Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	3			Diskominfo
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	88	16,18%		DKUMKMP
				Jumlah seluruh koperasi	544			DKUMKMP

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		109	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	3.920	100,00%		DKUMKMP
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	3.920			DKUMKMP
		110	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	314	30,97%		DKUMKMP
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	1.014			DKUMKMP
		111	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif	458	84,19%		DKUMKMP
				Jumlah seluruh koperasi	544			DKUMKMP
18	Penanaman Modal	112	Persentase peningkatan investasi di Kota	Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota	1.065.497.180.000	58,88%		DPMPT
				Jumlah investasi tahun n-1 di kota	1.809.622.920.000			DPMPT
19	Kepemudaan dan Olahraga	113	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota	163.966	100,00%		DPOP
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	163.966			Capil
		114	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kota	63	0,04%		DPOP
				jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	163.966			DPOP
		115	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	164	164		DPOP
								DPOP

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		116	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan	49	12,93%		DPOP
				jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	379			DPOP
20	Statistik	117	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	36	100,00%		Kominfo
				jumlah OPD	36			Bag Organisasi
		118	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	36	100,00%		Kominfo
				Jumlah OPD	36			Bag Organisasi
21	Persandian	119	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	0		Kominfo
				Jumlah area penilaian	0			Kominfo
22	Kebudayaan	120	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	93	100,00%		Disdik
				Jumlah cagar budaya yang terdata	93			Disdik
		121	Penyelenggaraan festifal seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	0		Disdik,
23	Perpustakaan	122	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca	0			Arperpus

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
24	Kearsipan	123	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	x = a'+b'/a+b × 100%	100	100		Arperpus
				x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1			
				a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks)	0			
				b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks)	495			
				a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	0			
				b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	495			
		124	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah	44.835	41,22%		Arperpus
				Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	108.769			Arperpus
		125	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. T = (a + i + s + j)/4		82,50		Arperpus
				T= tingkat ketersediaan arsip	82,50			
				a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip	90			
				i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip	90			
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	95			
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	55			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		126	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6		85,00		Arperpus
				T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	85,00			
				m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	75			
				b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	85			
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kota dengan NSPK	80			
				a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	90			
				c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	90			
				I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	90			
URUSAN PILIHAN								
25	Kelautan dan Perikanan	127	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	1.972,59	380.879		DPPP
				Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya)	378.906			DPPP
		128	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	0	-		DPPP
				Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	0			DPPP
26	Pariwisata	129	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1	9.537	20,27%		DPOP
				Jumlah wisatawan tahun n-1	47.040			DPOP

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		130	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	41.527	1,46%		DPOP
				umlah wisatawan tahun n-1	2.837.034			DPOP
		131	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	957.400	39,28%		DPOP
				Jumlah kamar yang tersedia	2.437.575			DPOP
		132	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2.031.892,8	1,98%		Bappeda
					102.389.034,0			
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	179.653.732.258	23,51%		BP2DRD
					764.087.241.241,05			
27	Pertanian	134	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	13.452,4	2717,66%		DP3
				Luas Panen	495			DP3
		135	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian	978.609,4	0,96%		Bappeda
				Jumlah total PDRB	102.389.034,0			Bappeda
		136	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-57	-25,11%		DPPP
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	227			DPPP

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
28	Energi Sumber Daya Mineral	137	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	-	#DIV/0!		DPMPT
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	-			DPMPT
29	Perdagangan	138	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	9.547.776,6	9,32%		Bappeda
				Jumlah total PDRB	102.389.034,0			Bappeda
		139	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	111	50,68%		Disdag
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	219			Disdag
		140	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	1.496,84	24,17%		DP3
				RDKK	6.194			DP3
		141	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	1.713	26,35%		Disdag
				jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	6.500			Disdag
30	Perindusrian	142	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	7	0,78%		DKUMKMP
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	895			DKUMKMP
		143	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional)yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan		Nihil	#VALUE!		DKUMKMP
					Nihil			DKUMKMP

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		144	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	155	2214,29%		DKUMKMP
				Jumlah izin yang dikeluarkan	7			DPMPT
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	#DIV/0!		DKUMKMP
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			DPMPT
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	#DIV/0!		DKUMKMP
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			DPMPT
31	Transmigrasi	147	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	umlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		BUP		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen	57	57		Kominfo
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	103	47,69%		Bappeda
				Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	216			Bappeda
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga	347.151.534.241,34	14,41%		BPKD
				Jumlah APBD	2.408.461.974.189,33			BPKD
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD	764.087.241.241,05	0,0014%		BPDRD
				Jumlah PDRB non migas	55.234.700.000.000.000			BPKD
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer	703.020.722.759,15	29,19%		BPKD
				Jumlah belanja APBD	2.408.461.974.189,33			BPKD
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	terdefinisi/ tingkat 4	terdefinisi/ tingkat 4		Inspektorat
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 3	level 3		Inspektorat

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	17	13,28%		Adbang
				jumlah kontrak keseluruhan tahun n	128			Bappeda
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8.857	2,355		PBJ
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	3.761			PBJ
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Rp 1.174.459.583.173	76%		PBJ
				Total belanja langsung	1.539.547.317.968,99			BPKD
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan	197	8%		BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.541			BKPSDM
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	87	4%		BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.344			BKPSDM
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	1	1,000		BPKD
				Total belanja APBD dikurangi satu	1			BPKD
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	Ya		BPKD
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	Ya		BPKD
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	YA	Ya		BPKD

NO	URUSAN	NO IKK	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	OPD
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	Ya		BPKD
		15	Cash Management: Rasio anggaran s	Nilai Realisasi SiLPA	291.635.286.428,55	12%		BPKD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	2.407.567.298.809,00			BPKD
		16	nformasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	1.026.210.000	85%		Kominfo
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	1.204.650.000			Kominfo
		17	Akses publik terhadap informasi keu	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	129	100%		Kominfo
				total jumlah dokumen yang telah dirinci	129			Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	4	4		Kesbangpol
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	2	2		Kesbangpol

KUBANGUN, KUJAGA, KUBELA



BALIKPAPAN 2019